

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN 2015 - 2019



RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN 2015 - 2019

Kata Pengantar



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode lima tahun mendatang. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disusun berdasarkan pada

Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019.

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan memuat Agenda Prioritas Nasional Presiden Republik Indonesia ke-7.

Dinamika perubahan lingkungan strategis terjadi begitu cepat sejak terpilihnya Presiden Republik Indonesia ke-7, terutama dengan adanya perubahan susunan Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Adanya penyesuaian struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menekankan terutama pada pengembangan wilayah sebagai basis penyusunan rencana dan program untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan kawasan, sehingga orientasi hasil tidak hanya menekankan “*output*”, namun juga “*outcome*” dan “*impact*”.

Untuk itu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penjurur bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi kinerja (antara lain RENJA-KL, RKA-KL dan LAKIP).

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya dari seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kami mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dapat tercapai sehingga mensukseskan program Pemerintah terutama dalam menurunkan disparitas, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa di lingkup global, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta meningkatkan kemandirian ekonomi, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Jakarta, 8 April 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



M. BASUKI HADIMULJONO



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13.1/PRT/M/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Renstra Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
- (2) Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bagi internal dan eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi uraian tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan, peran, kondisi, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis (outcome/impact), arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program, sasaran program (outcome), kegiatan dan sasaran kegiatan (output), target capaian, serta pendanaan
- (2) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan untuk menyusun Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam program tahunan masing-masing.

Pasal 4

- (1) Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II atau Unit Kerja Mandiri sesuai dengan RPJMN dan RPJP.
- (2) Perwujudan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 5

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pemantauan dan evaluasi capaian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah dituangkan dalam Renja Kementerian sesuai Unit Organisasi Eselon I masing-masing.

Pasal 6

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttb

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttb

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13.1/PRT/M/2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN 2015 - 2019

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi	4
1.2 Potensi dan Permasalahan	18
BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	33
2.1 Visi	34
2.2 Misi	36
2.3 Tujuan	37
2.4 Sasaran Strategis	38
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ..	43
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional	44
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	50
3.3 Kerangka Regulasi	77
3.4 Kerangka Kelembagaan	78

BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	81
4.1 Program dan Kegiatan	82
4.2 Target Kinerja	87
4.3 Kerangka Pendanaan	88
 BAB 5. PENUTUP	 93
 SUB LAMPIRAN 1: Tabel Rangka Regulasi	 L.1
Tabel SL-1. Kerangka Regulasi	L2
SUB LAMPIRAN 2: Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaan	L15
Tabel SL-2.1. Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaan Tujuan 1	L16
Tabel SL-2.2. Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaan Tujuan 2	L40
Tabel SL-2.3. Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaan Tujuan 3	L96
Tabel SL-2.4. Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaan Tujuan 4	L108
Tabel SL-2.5. Matriks Program, Kegiatan dan Pendanaan Tujuan 5	L158
Gambar SL-2.1. Rencana Pembangunan Waduk Tahun 2015 - 2019	L204
Gambar SL-2.2. Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2015 - 2019	L205
Gambar SL-2.3. Rencana Penyediaan Perumahan Tahun 2015 - 2019	L206
Gambar SL-2.4. Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015 - 2019 ...	L207
SUB LAMPIRAN 3: Pengembangan Wilayah Strategis	L209

Daftar Tabel

Tabel 4.1	Kerangka Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Per Program Tahun 2015-2019	90
-----------	--	----

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	39
Gambar 3.1	Tahapan Pembangunan Nasional	45
Gambar 3.2	Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019	46
Gambar 3.3	Sebaran Pertumbuhan Ekonomi pada Pulau-Pulau/Kepulauan	51
Gambar 3.4	Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)	55
Gambar 3.5	Jalur Rencana Pelabuhan <i>Hub</i> dan Pelabuhan <i>Feeder</i>	56
		57
Gambar 3.6	Wilayah Pengembangan Strategis	80
		
Gambar 3.7	Struktur Organisasi Kementerian PUPR	

BAB

1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator-indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Dengan demikian, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebisaaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan peningkatan efektifitas pelembagaan PUG ke dalam budaya internal organisasi, mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terintegrasi dengan aspek gender; serta mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh unit organisasi.

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat



keberhasilan pembangunan. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik dapat menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih aman, nyaman, meningkat kesejahteraannya, serta dapat mengekspresikan dirinya secara maksimal. Lebih jauh, diharapkan pelayanan publik yang baik dapat memfasilitasi dunia usaha nasional dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat ikut memacu peningkatan kapasitas perekonomian nasional.

Dalam melaksanakan hal tersebut, tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengacu pada Keputusan Presiden No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Peraturan Presiden No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden No. 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam upaya untuk mendukung mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan termasuk pengusahaan penyediaan pembiayaan dan penyediaan rumah, industri konstruksi yang kompetitif, sinergi pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel yang dituangkan dalam rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019.

1.1 KONDISI

1.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air

Selama periode tahun 2010-2014, capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan/kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi nasional melalui pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk yang ada saat ini.

Adapun untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan energi pada periode tahun 2010-2014 telah dibangun 28 waduk dan 7 diantaranya telah selesai. Pencapaian ini telah menambah jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 menjadi sebanyak 211 buah. Sedangkan untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1332 buah. Selain itu juga telah dilakukan upaya rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 342 embung/situ/bangunan penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap 1.207 waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya, serta konservasi terhadap kawasan sumber air di 36 kawasan. Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan kapasitas tampung sumber air sampai akhir tahun 2014 menjadi 12,61 milyar M³, serta memberikan dukungan bagi peningkatan ketersediaan air untuk irigasi yang bersumber dari waduk menjadi 761.542 Ha.

Sebagai contoh, manfaat waduk yang telah selesai dibangun yaitu Waduk Marangkayu yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Waduk ini akan



bermanfaat untuk persediaan suplai kebutuhan air irigasi bagi 3.000 Ha sawah, suplai air baku dengan kapasitas 200 liter/detik, pembangkit listrik dengan daya 1.350 KWH, serta sebagai objek wisata.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target MDGs, yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun 2015 sebesar 68,87%, untuk itu pada periode 2010-2014 telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 M³/detik, sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode tahun 2005-2014 sebanyak 64 M³/detik. Selain itu, pada periode 2010-2014 juga telah dilakukan rehabilitasi prasarana air baku dengan kapasitas sebanyak 34,12 M³/detik serta operasi dan pemeliharaan untuk 47,47 M³/detik. Namun demikian, Kapasitas IPA PDAM sampai akhir tahun 2013 hanya sebesar 36,83 M³/detik sehingga terdapat *idle capacity* sebanyak 6,41 M³/detik.

Untuk mendukung ketahanan pangan pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya yang meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan. Upaya pembangunan jaringan irigasi permukaan telah dilakukan seluas 429.739 Ha, jaringan irigasi rawa seluas 202.386 Ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 14.020 Ha. Selain itu juga dengan upaya rehabilitasi Irigasi permukaan seluas 2.021.439 Ha, Jaringan irigasi rawa seluas 655.437 Ha, dan Jaringan Irigasi Air tanah (JIAT) seluas 42.131 Ha. Sedangkan melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan seluas 2.479.412,37 Ha, jaringan irigasi rawa seluas 1.275.352 Ha, dan JIAT seluas 43.840 Ha. Kondisi jaringan permukaan yang menjadi kewenangan pusat sampai tahun 2014, yang dalam kondisi baik telah mencapai 77,46% dan yang dalam kondisi rusak sebesar 22,54%.

Selanjutnya dalam rangka pengendalian daya rusak air pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang

1.447,94 Km, rehabilitasi sepanjang 1.131,72 Km, serta operasi dan pemeliharaan sepanjang 2.091,81 Km. Pada periode itu pula, untuk prasarana dan sarana pengendali lahar/sedimen telah dibangun sebanyak 180 buah, direhabilitasi sebanyak 140 buah serta yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sebanyak 293 buah.

Beberapa contoh upaya pengendalian lahar/sedimen pada periode tersebut telah dilaksanakan pembangunan beberapa sarana diantaranya pembangunan pengendali sedimen yang berlokasi di Kabupaten Gowa- Sulawesi Selatan yang diperuntukkan bagi pengendalian runtuh dan longsor dinding kaldera Gunung Bawakaraeng. Longsor ini mengakibatkan terjadinya bencana aliran debris yang dahsyat yang berdampak pada terjadinya pendangkalan dan perubahan morfologi di Sungai Jeneberang, serta peningkatan sedimentasi di Waduk Bili-Bili. Pembangunan prasarana pengendali sedimen dibagi menjadi 3 bagian yaitu: (1) di hulu berupa prasarana pengendali sedimen berupa 7 bangunan sabo dam; (2) di tengah berupa 8 bangunan *consolidation dam*; dan (3) di hilir berupa *sand pocket*. Sabo Dam Bawakaraeng berfungsi untuk menstabilkan dasar sungai, mengurangi gerakan sedimen sekunder dari endapan sedimen, mengurangi erosi lateral, erosi dan endapan sedimen, mengendalikan erosi tebing sungai selama waktu banjir, menampung dan mengatur endapan aliran debris dari hulu serta mengarahkan aliran sedimen atau arah aliran.

Contoh lain dalam aspek pengendalian banjir pada periode 2010-2014 yaitu telah selesainya pembangunan Kanal Banjir Timur memiliki panjang kanal 23,5 Km dan kedalaman kanal 3 - 7 M yang melalui 13 Kelurahan, Kanal Banjir Timur ini diharapkan mampu mengalirkan debit banjir dengan periode ulang 100 tahunan dan dilengkapi dengan 3 buah *Weir*, 7 Buah *Inlet* dan 4 Buah *Outlet*. Selain itu juga diperuntukkan sebagai kawasan konservasi air untuk dijadikan proyek percontohan *green infrastructure* dan menciptakan nuansa *waterfront city* di masa depan. Selain itu juga diharapkan melayani sistem drainase pada wilayah seluas 207 Km² (*catchment area*), melindungi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas 256 Km² dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sungai Sunter, Sungai Buaran, Sungai Jati Kramat, dan Sungai Cakung, serta mengurangi 13 kawasan genangan (11 Kelurahan di Jakarta Timur dan 2 Kelurahan di Jakarta Utara).

Selanjutnya pada periode 2010-2014 juga untuk pengaman pantai telah dibangun prasarana sepanjang 279,36 Km, direhabilitasi sepanjang 18,10 Km, serta operasi dan pemeliharaan sepanjang 142,03 Km.

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya air di tingkat Nasional, selama kurun waktu 2010 – 2014 juga telah diterbitkan sejumlah peraturan dalam pengelolaan SDA yang terdiri dari: Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Rawa, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai. Sehingga total peraturan terkait pengelolaan sumber daya air sampai tahun 2014 adalah sebanyak 7 buah Peraturan Pemerintah termasuk di dalamnya PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.



Namun demikian, dengan adanya pembatalan UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan No.85/PUU-XI/2015), pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan. Implikasinya, praktek pengelolaan SDA tidak memiliki payung hukum, sehingga perlu dilakukan *review* dan dibuatkan payung hukumnya, sementara rancangan UU pengganti sedang disusun. Hal ini perlu dilakukan mengingat pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, sehingga lembaga pengelolaan yang sudah ada saat ini tetap harus ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ketiga harus tetap berjalan sampai akhir kontrak.

1.1.2 Penyelenggaraan Jalan

Dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 1.268 Km, jalan bebas hambatan sepanjang 45,59 Km, dan jembatan sepanjang 41.640 M. Dengan demikian total panjang Jalan Nasional yang telah dibangun sampai tahun 2014 adalah sepanjang 39.838 Km. Untuk capaian hasil pembangunan jembatan/fly over/underpass/terowongan sampai tahun 2014 sepanjang 62.599 M. Sebagai ilustrasi salah satu pencapaian pembangunan jembatan adalah Jembatan Kelok 9, yang terdiri dari enam jembatan dengan total panjang 943 M dan jalan sepanjang 2,089 Km.

Total hasil pembangunan jalan bebas hambatan sampai akhir tahun 2014 -mencapai 1.030,56 Km. Sebagai ilustrasi, capaian pembangunan jalan bebas hambatan periode tahun 2010-2014 diantaranya yaitu ruas Kanci-Pejagan, Semarang-Ungaran, Nusa Dua-Benoa, JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), Cinere-Jagorawi, Surabaya-Mojokerto, dan Bogor Ring Road.

Selanjutnya pembangunan/pelebaran jalan dan jembatan untuk kawasan strategis, perbatasan serta wilayah terluar dan terdepan pada tahun 2010-2014 adalah sepanjang 2.660 Km (Jalan: 2.660 Km & Jembatan: 4.341 M). Untuk kawasan perbatasan, antara lain telah dilakukan pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Tamajuk – Sei Ular Malinau) dan telah tersambung sepanjang 42.07 Km dari rencana sepanjang 1.755 Km, Jalan Perbatasan NTT-RDTL telah dilakukan penanganan sepanjang 54,2 Km dari rencana sepanjang 877 Km dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat termasuk Jalan perbatasan Papua sepanjang 102 Km.

Capaian kondisi jalan pada periode tahun 2010-2014 adalah kondisi kemandirian jalan nasional sebesar 93,95% (untuk total panjang jalan nasional 38.569 Km) dan utilitas jalan nasional 97,56 Milyar Kendaraan Km. Namun demikian, terdapat penambahan panjang jalan nasional dari jalan daerah dan jalan strategis nasional rencana yang mengakibatkan total panjang jalan nasional menjadi 47.017 Km, sehingga kemandirian pada tahun 2015 menurun menjadi 86 persen. Sedangkan untuk panjang jalan daerah sampai tahun 2014 mencapai panjang 463.399 Km (data RPJMN 2015-2019) dengan tingkat kemandirian mencapai 70% dan untuk Jalan Kabupaten/Kota mencapai 59%.

Untuk mendukung konektivitas nasional, pada periode tahun 2010-2014 diantaranya penanganan jalan di koridor utama pada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, antara lain telah terselesaikannya penanganan jalan Lintas Timur Sumatera, lintas Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi. Sedangkan dalam rangka mendorong industri dan jasa nasional, penanganan jaringan jalan dilakukan di Pulau Jawa, salah satu pencapaiannya adalah Lingkar Nagreg Jawa Barat dengan panjang 5,3 Km untuk mengatur persimpangan lalu lintas Bandung - Tasikmalaya - Garut. Jalan ini mulai dibangun tahun 2006, dan selesai dibangun serta difungsikan pada awal awal 2011. Selain itu, untuk mendukung Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional, penanganan jaringan jalan dilakukan di Pulau Kalimantan. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Pontianak – Tayan sepanjang 104,2 Km yang ditujukan untuk memperpendek jarak tempuh Kota Pontianak dengan lima Kabupaten di sekitarnya, juga untuk membuka akses Kabupaten Ketapang ke Ibukota Pontianak yang selama ini belum tembus, sekaligus melanjutkan Jalan Trans Kalimantan poros Selatan. Sedangkan untuk mendukung Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pertambangan Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Sulawesi.



Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Maros – Watampone sepanjang 164,88 Km. Selanjutnya untuk memberi dukungan wilayah pintu gerbang pariwisata, penanganan jaringan jalan dilakukan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Tol Nusa Dua – Tanjung Benoa sepanjang 10 Km. Jalan tol ini berada di atas permukaan air laut di Teluk Benoa yang menghubungkan wilayah selatan Pulau Bali. Sedangkan untuk mendukung Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua, yang antara lain adalah : Pembangunan Jembatan Merah Putih sepanjang 1.060 M menyeberangi Teluk Ambon dimulai sejak tahun 2011, serta penanganan 11 ruas jalan strategis sepanjang 3.098 Km di Pulau Papua.



1.1.3 Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Capaian pada periode 2010-2014 pembangunan infrastruktur dasar untuk kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi, serta pembinaan Pemda/PDAM. Peningkatan kualitas layanan air minum dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lebih dari 2.853 Kawasan yang dapat meningkatkan persentase cakupan pelayanan air minum sampai tahun 2014 menjadi 70% dengan kapasitas 167.784 l/det atau setara dengan lebih dari 160 juta jiwa yang tertangani. Selain itu peningkatan jumlah layanan air minum juga dilakukan melalui pembinaan kemampuan pemerintah daerah/PDAM yaitu status kinerja PDAM pada tahun 2014 sebanyak 182 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat, dan 74 PDAM tidak sehat. Dalam upaya peningkatan cakupan pelayanan sanitasi, hingga tahun 2014 terjadi peningkatan prosentase cakupan pelayanan air limbah menjadi 60,9% dengan jumlah jiwa terlayani sebanyak 147 juta jiwa. Selanjutnya juga telah terbangun sarana dan prasarana sanitasi (sampah dan drainase) pada lebih dari 428 kab/kota (terdapat kab/kota berulang) dan 2.352 kawasan. Dengan demikian sampai tahun 2014 telah terbangun sebanyak 2.706 Kawasan.

1.1.4 Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sementara itu, untuk capaian pembangunan perumahan 2010-2014 dalam mendukung penyediaan dan pembiayaan perumahan telah dilakukan upaya-upaya antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (ditetapkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 88 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat); (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (meliputi: Pembangunan rusunawa sebanyak 843 Twin Block/Tower Block atau 18.216 unit dengan total daya tampung untuk 143.072 jiwa, Fasilitas pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang melayani sebanyak 261.768 unit rumah, Fasilitas dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 912,5 Ha, Fasilitas pembangunan rumah khusus sebanyak 6.384 unit, yang mencakup rumah khusus untuk pekerja, nelayan, kawasan perbatasan, warga baru di perbatasan NTT-Timor Leste, relokasi penduduk Jatigede dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat); (3) Perluasan Program Pro-Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya dengan sebanyak 64.757 unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak 596.162 unit., PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 unit, dan Fasilitas Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan capaian sebanyak 44.242 bidang); dan (4) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Penyaluran kredit pembiayaan perumahan dengan capaian sebesar 370.250 unit melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan sebesar 89.081 unit melalui pola subsidi selisih bunga/uang muka. Sampai tahun 2014 masih tersisa backlog sebanyak 7,6 juta unit rumah.





1.1.5 Pengembangan Wilayah

Sebagai upaya untuk mendorong diakuinya Kota Pusaka Indonesia sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO dan sebagai bentuk implementasi RTRW yang konsisten pada tema-tema budaya/pusaka berbasis penataan ruang, telah difasilitasi 29 kota/kawasan perkotaan di kabupaten melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Melalui program ini diharapkan Pemda akan melakukan penyusunan rencana aksi P3KP dan mengimplementasikannya sehingga kota yang bersangkutan dapat mempertahankan atau mengembalikan identitas maupun ciri khas sesuatu secara berkelanjutan yang pada gilirannya dapat di promosikan pada tingkat internasional sebagai *World Heritage City*.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, pada tahun 2013 telah diinisiasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sampai akhir tahun 2014 telah dilakukan fasilitasi terhadap 28 Kawasan Perdesaan melalui Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan, fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan Kawasan Perdesaan, Bimtek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Penguatan Peran Pemangku Kepentingan, Penyusunan Road Map, Pemantauan Pelaksanaan P2KPB, dan Pembangunan/Pengembangan Fisik yang dominan.

Selain itu juga dilakukan penyusunan rencana pengembangan kawasan strategis nasional berbasis rencana tata ruang.



1.1.6 Pembinaan Konstruksi

Sektor konstruksi adalah salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa sejarah kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB terus meningkat dari hanya sebesar 3,9% di tahun 1973 hingga sebesar 9,99% dari PDB tahun 2013 dan memberikan kontribusi lapangan kerja kepada 5,67% dari total angkatan kerja.

Walaupun mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, sektor konstruksi nasional berada pada kondisi yang kurang menggembirakan. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penghambat investasi konstruksi di Indonesia - disamping kualitas birokrasi pemerintahan dan pengaturan tenaga kerja - untuk mendorong pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu daya saing sektor konstruksi baik produktifitas dan efisiensi maupun kreatifitas dan inovasi masih terbatas. Berbagai indikator daya saing yang berhubungan dengan ketersediaan dan kondisi infrastruktur, baik yang bersifat makro seperti Indeks Daya Saing Global maupun yang bersifat mikro seperti perbandingan keuntungan bersih (net profit) dan nilai penjualan (annual sales) atau nilai penjualan dengan total biaya pegawai kontraktor nasional menunjukkan kinerja produktifitas dan efisiensi yang belum menggembirakan.

Melihat strategisnya peran sektor konstruksi bagi perekonomian dan tantangan-tantangan kedepan yang harus dihadapi, pembinaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi nasional agar mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri melalui berbagai upaya pembinaan, mulai dari aspek pengat pengaturan, pemberdayaan, sampai dengan pengawasan.

1.1.7 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Dalam aspek penyelenggaraan negara, pada era reformasi birokrasi ini, publik beropini bahwa penyelenggara negara melakukan pemborosan, pelayanannya buruk, KKN dan pengawasannya mandul. Hasil survey KPK tahun 2011 terhadap 15.540 responden menunjukkan bahwa nilai dari indeks integritas nasional 6,31, indeks integritas pusat 7,07, indeks integritas vertikal 6,40, indeks integritas daerah 6,00 dan integritas total pusat (pusat + vertikal) 6,48 dan integritas total daerah (daerah + vertikal) 6,24. Untuk indeks persepsi korupsi sesuai data *transparency international*, Indonesia masih rendah (2,8 dari 10). Sedangkan *Economic Forum* menunjukkan bahwa korupsi yang menjadi penghambat kedua untuk kemudahan berusaha pada tahun 2010 – 2011 mempunyai skor 16 terhadap 30 pada ratio 0,53. Selain itu hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada instansi pusat menunjukan adanya upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat yang merupakan sub indikator yang nilainya masih rendah dibawah 6. Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 yang masuk dalam penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi KPK (PIAK KPK) dengan penilaian pada awal tahun 2013 mendapat nilai 6,3 sehingga tidak termasuk lagi dalam program penilaian PIAK KPK. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi ini merupakan kegiatan KPK dalam mendorong K/L/Pemda untuk membangun sistem anti korupsi di dalam instansinya dengan cara melakukan *self assessment* terhadap inisiatif anti korupsi yang telah dilakukannya yang kemudian diverifikasi oleh KPK.

Namun demikian, kondisi sumber daya manusia Auditor Kementerian Pekerjaan Umum saat ini adalah jumlah auditor sebanyak 148 orang yang terdiri dari 76 orang pendidikan teknik dan 72 orang non teknik yang secara kualitas kompetensinya di bidang pengawasan infrastruktur masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan terobosan diklat keteknikan dan non keteknikan dengan bekerja sama dengan BPKP dan YPIA maupun lembaga lainnya dan sekaligus melakukan *assessment* untuk masing-masing bidang. Pengendalian dan pengawasan pada Kementerian Perumahan Rakyat dilakukan secara bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP yang telah mengembangkan penerapan SPIP dengan menyusun peta risiko melalui kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) di 3 unit kerja, yaitu: Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Perumahan Swadaya dan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.

1.1.8 Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2014, Kementerian PU berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit atas LK TA 2013. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dalam pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan kinerja keuangan di Kementerian PU dibandingkan periode-periode sebelumnya. Yang artinya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi penatausahaan dan pelaporan keuangan serta penataan BMN cukup berhasil. Sebagai perbandingan, opini hasil audit dari BPK-RI terhadap LK Kementerian PU pada tahun 2009 - 2011 telah naik dari "Disclaimer " menjadi "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)", dan tahun 2012 naik kembali menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – Dengan Paragraf Penjelasan".

Dalam aspek penyusunan rencana kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum diantaranya telah disusun 1 Renstra Kementerian, 1 Revisi Renstra Kementerian, 1 Review Renstra Kementerian tahun 2010-2014, serta 1 Renstra Sekretariat Jenderal, 1

Review Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, serta 5 LAKIP Kementerian dan 5 LAKIP Sekretariat Jenderal.

Selain itu telah disusun 5 RKP dan 5 Nota Keuangan, 140 pelaporan E-Monitoring Satker Kementerian PU, pembinaan bendahara 101 angkatan, pembinaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 90 angkatan, pembinaan BUMN Perum 35 angkatan, penyusunan peraturan perundang-undangan 129 dokumen dan penyelesaian perkara hukum 89 litigasi, pendapat hukum dan pendampingan hukum 25 Non Litigasi, pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN 293 dokumen, pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN 6 laporan, sistim dan data base BMN 9 unit, pendidikan dan pelatihan prajab serta teknis dan fungsional sebanyak 903 angkatan, pembuatan 1 *data center*, pembuatan 2.607 peta tematik, penyusunan 150 buku informasi statistik PU, peliputan dan pemberitaan di media masa sebanyak 1.365 kali, publikasi melalui media sebanyak 487 kali, peliputan kunjungan kerja dan rapat 271 kali, pembangunan dan perbaikan gedung 4 unit.

Untuk capaian target dukungan manajemen, sarana dan prasarana periode 2010-2014 pada Kementerian Perumahan Rakyat meliputi antara lain tersusunnya 3 RPP yang masih menunggu persetujuan para menteri dan kepala lembaga terkait, yaitu: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) meliputi: RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; serta RPP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman); dan (2) 2 (dua) RPP yang masih dalam tahap harmonisasi Kementerian dan Lembaga terkait yang meliputi: RPP Tentang Pengerahan dan Pemupukan Dana Serta Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan; dan RPP Tentang Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pelaksanaan SAKIP Kementerian Perumahan Rakyat telah mensejajarkan diri pada peringkat B (Baik) di tingkat Kementerian/Lembaga. Sedangkan Peningkatan Opini atas Laporan Keuangan dari BPK RI terkait Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun 2013 kembali meraih status predikat WTP. Penyerahan aset hasil pembangunan Rusunawa dalam kurun waktu tahun 2005-2011 meliputi Rusunawa yang telah terbangun sebanyak 187 *Twin Block* (TB) melalui Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga sebanyak 14 *Twin Block* dan kepada Pemerintah Daerah dengan mekanisme hibah sebanyak 2 *Twin Block* sehingga jumlah yang telah diserahkan baik kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebanyak 16 *Twin Block*.

Untuk pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat Kepada UKP4 dan Bappenas berupa Laporan Triwulan Capaian Rencana Aksi Prioritas Nasional 4 (Penanggulangan Kemiskinan) dan Prioritas Nasional 6 (Bidang Infrastruktur) dan Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dari hasil *polling* Pemberitaan Program Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II selama masa polling dari Januari hingga Mei 2014 yang dilakukan oleh Forum Jurnalis Jakarta (FJJ) tercatat telah mendapat perhatian dari pers dengan sebanyak 348 berita. Ketertarikan media pada 10 Kementerian teratas dikarenakan memiliki program-program kehumasan yang efektif dalam merangsang para jurnalis untuk melakukan peliputan pemberitaan. Penyediaan *Media Center* untuk memfasilitasi pemberitaan tentang Kementerian Perumahan Rakyat dengan dilengkapi 15 unit televisi yang berjangkauan nasional beserta kelengkapannya.

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap Layanan Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 70,66% (kategori Baik) pada tahun 2013. Survey ini didasarkan pada kriteria: (1) Kesesuaian Kebijakan; (2) Sistem Prosedur; (3) Sumber Daya Manusia (SDM); dan

(4) Kepuasan Total Terhadap Layanan dan Operasionalisasi Kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat. Terkait sarana dan prasarana, telah dilakukan renovasi ruang kerja, toilet disetiap lantai, ruang serba guna (aula) pada lantai 9 sebagai sarana untuk rapat koordinasi dan sarana pengajian pegawai Kementerian Perumahan Rakyat, serta telah dibangun Poliklinik dan perlengkapannya yang telah dapat difungsikan.

1.1.9 Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia merupakan aset pembangunan yang merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dan juga sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya. Berdasarkan pengalaman, hingga saat ini perhatian terhadap sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat masih sangat kecil apabila dilihat dari segi investasi penganggaran dan kelembagaannya. Investasi pengembangan SDM dalam 5 tahun ke belakang rata-rata hanya 2 permil dari anggaran pembangunan infrastruktur. Sementara itu peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan maupun pelatihan juga tersebar di berbagai unit kerja dan tidak terkoordinasi dengan baik serta kurang fokus pada kompetensi substansi teknis. Sedangkan dilihat dari faktor kelembagaan juga kurang mempunyai kewenangan yang memadai untuk pengembangan SDM secara integral. Dengan demikian pengembangan sumber daya manusia menjadi terabaikan/kurang perhatian, padahal di satu sisi peran sumber daya manusia sangat vital terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sebagai ilustrasi, selama kurun waktu 2010-2014 telah dilakukan pendidikan dan pelatihan sebanyak 30.195 pegawai dengan rincian 29.119 pegawai baik pusat maupun daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan 1.076 eks Pegawai Pusat Kementerian Perumahan Rakyat. Alumni pendidikan kedinasan dan vokasi sebanyak 5.801 pegawai dengan rincian 5.789 orang Kementerian Pekerjaan Umum dan 12 orang eks pegawai Kementerian Perumahan Rakyat. Alumni diklat sebanyak 23.330 orang terdiri dari Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan eks. Perumahan Rakyat sebanyak 12.670 orang (54.31%) dan Pegawai Daerah Bidang PU sebanyak 11.736 orang (45.69%).

Apabila dilihat dari pencapaian target hanya sebanyak 50.68% pegawai yang telah mengikuti diklat dari jumlah pegawai sebanyak 25.000 orang. Hal ini tidak lain terjadi karena kebijakan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM sebagai bagian dari dukungan manajemen kegiatan pembangunan infrastruktur ke PU an selama 5 tahun lalu. Sementara itu pengembangan SDM tidak berada dalam satu koordinasi yang utuh mulai dari pengembangan karir, evaluasi kompetensi dan pemantauan kinerja sampai dengan pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Beban kerja pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara potensi SDM dari segi kuantitas dan kualitas belum sepadan dengan beban kerja tersebut. Secara kuantitas jumlah SDM PUPR yang ada saat ini sejumlah 25.000 pegawai yang terdiri dari 3.800 orang K1 K2 K3, berdasarkan pendidikan berlatar belakang teknik untuk pendidikan teknik SLTP hingga SMA/D3 sebesar 9466 orang atau 45.10%, pendidikan S1/D4 sebesar 8438 orang atau 40,20%, pendidikan teknik S2 sebesar 2997 orang atau 14.28% dan pendidikan S3 sebesar 87 orang atau 0.41%.

Hal ini belum memadai apabila dilihat dari beban kerja atau anggaran yang diberikan pada tahun 2015 yaitu sebesar kurang lebih Rp 118,5 Trilyun. Selain itu secara kualitas juga lebih tidak memadai lagi hal ini disebabkan faktor pendidikan yang tidak sesuai, mengingat SDM PU-PR didominasi oleh yang berpendidikan tingkat SLTA/SLTP. Selain itu

kondisi pegawai saat ini hingga 5 tahun ke depan akan berkurang akibat purna bakti/pensiun rata-rata sekitar 300 – 500 orang.

1.1.10 Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian kinerja penelitian dan pengembangan selama kurun waktu 2010 – 2014 antara lain: (1) Menghasilkan teknologi litbang sebanyak 186 terdiri dari bidang Air 36 teknologi, bidang Jalan Jembatan 84 teknologi, bidang Permukiman 35 teknologi dan Sosekling 31 teknologi; (2) NSPM litbang sebanyak 361 terdiri dari bidang Air 123 NSPM, bidang Jalan Jembatan 177 NSPM, bidang permukiman 22 NSPM dan Sosekling 9 NSPM; (3) Melayani advis teknik sebanyak 293 Terdiri dari bidang Air 115 advis teknik, bidang Jalan dan Jembatan 77 advis teknik, bidang permukiman 82 advis teknik dan Sosekling 19 advis teknik; (4) Melayani pengujian sebanyak 3170 terdiri dari bidang Air 172 pengujian, bidang Jalan dan Jembatan 268 pengujian, bidang Permukiman 2730 pengujian; dan (4) Melakukan *joint cooperation* program sebanyak 72 terdiri dari bidang Air 2 *joint cooperation* program, bidang Jalan Jembatan 6 *joint cooperation* program, bidang Permukiman 53 *joint cooperation* program dan Sosekling 11 *joint cooperation* program. Hingga tahun 2014, pencapaian kinerja penelitian dan pengembangan terutama untuk teknologi dan NSPM adalah sebagai berikut : teknologi bidang Air 79 teknologi, bidang Jalan dan Jembatan 84 teknologi, bidang Permukiman 35, serta teknologi bidang Sosekling 39 teknologi. Untuk NSPM litbang terdiri dari bidang Air 157 NSPM, bidang Jalan Jembatan 177 NSPM, bidang permukiman 22 NSPM dan sosekling 11 NSPM.

Beberapa hasil Litbang aplikatif yang dapat diterapkan dan diadopsi oleh masyarakat umum, institusi, swasta maupun Kementerian dan Lembaga yang terkait antara lain, Produk Teknologi Sumber Daya Air: (1) Teknologi Revitalisasi Bangunan Air Utama (Pendeteksian kerusakan bangunan air utama dengan georadar pada bendungan); (2) Pengkajian korelasi alat *Dynamic Penetrometer* (DP) dan alat *Static Penetrometer* (sondir) pada bendungan tipe urugan; (3) Pengkajian pemanfaatan tinggi tekan untuk energi pada pintu-pintu air bendung gerak. (4) Teknologi Pengendalian Banjir Perkotaan (Teknologi Pemodelan Banjir Perkotaan; (5) Teknologi Pondasi Tanggul Lepas Pantai; (6) Teknologi Banjir Perkotaan Lingkungan Keairan; dan (7) R-0 Pedoman Pengelolaan Polder). Selain itu produk Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan meliputi: (1) Teknologi Bahan Perkerasan dengan bahan lokal dan bahan sub standar (batu karang dan pasir laut) meliputi spesifikasi, pedoman perencanaan dan pelaksanaannya; (2) Teknologi preservasi jalan berupa tambalan cepat mantap, *minosurfacing*, *slurry seal*, *chip seal*, *fog seal*; (3) Teknologi Preservasi bagi *Crack Filling* dan *Sealing*; (4) Teknologi *Thin Overlay*; dan (5) Teknologi Perkerasan Kaku untuk Jalan Beton Konvensional. Untuk Produk Teknologi Permukiman meliputi: (1) *Prototipe Green Building* di Turangga, Bandung; (2) Aplikasi Tekno *Green Building* berbasis hasil Litbang Permukiman di Medan; (3) Prototipe Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Sistem *Mobile*; (4) Pengembangan Prototipe Sistem Sambungan Rumah dan Model Daur Ulang Limbah Komunal; (5) Prototipe Penerapan Teknologi Bidang Permukiman (Tongkonan) di Toraja; (6) Penataan kawasan berbasis *eco-settlement*; (7) Model Fisik Daur Ulang Air Limbah Di Kawasan Pesisir; (8) Aplikasi Teknologi Bahan Bangunan Lokal Pada Model Bangunan Tradisional di Wilayah Kerja di NTB (*Techno Village*); (9) Penerapan Panel Struktur Risha pada Bangunan fasilitas Umum dengan Dinding Pengisi Bata Lusi di Kabupaten Sidoarjo.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat diantaranya meliputi: pertama, pembangunan infrastruktur dipandang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika dilakukan secara sistemik. Sebagai ilustrasi, persentase penduduk miskin dapat diturunkan hingga 11,37% (2013), walaupun Indeks Gini perlu mendapatkan perhatian, mengingat perbedaan masih relatif lebar yaitu menunjuk pada angka 0,413 pada tahun 2013. Kedua, pertumbuhan penduduk Indonesia yang akan terus meningkat yaitu mencapai 271 juta jiwa di tahun 2020, McKinsey memprediksi bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori “*consuming class*” akan meningkat ke angka 85 juta jiwa pada tahun 2020 sebagai golongan menengah. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan publik yang jauh lebih baik. Disamping itu, pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap eksploitasi sumber daya alam yang cenderung tidak terkendali, dan pada akhirnya dapat menurunkan daya dukung. Ketiga, arus urbanisasi yang tinggi diikuti dengan berbagai persoalan klasik perkotaan, seperti: kemacetan, kekumuhan, banjir, degradasi kualitas lingkungan (udara dan air), minimnya ruang terbuka hijau, kurangnya air bersih, kesenjangan pendapatan, meningkatnya sektor informal, dan terjadinya perkembangan perkotaan horizontal (*urban sprawl*). Sebagai ilustrasi, dalam kurun 4 dekade terakhir (1970 – 2010) telah terjadi kenaikan populasi perkotaan di Indonesia sebanyak 6 kali lipat yang membawa implikasi pada belum terpenuhinya berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, padahal perkotaan merupakan mesin pertumbuhan dan ujung tombak daya saing. Keempat, perubahan iklim yang terjadi saat ini juga mengancam kehidupan. Sebagai contoh, perkotaan khususnya kota-kota di kawasan pesisir terancam rob akibat fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah seperti di Jakarta dan Semarang. Hal ini terutama disebabkan juga oleh pengambilan air tanah secara berlebihan. Kelima, secara geografis Indonesia terletak di kawasan “*ring of fire*” yang memiliki banyak gunung api yang aktif hingga mencapai 130 gunung. Indonesia juga terletak pada titik pertemuan empat lempeng tektonik dunia yang menyebabkan tingginya tingkat kejadian gempa bumi. Sebagai contoh, pada tahun 2012 terjadi 363 gempa di atas 5 skala *Richter*. Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, operasionalisasi serta pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Keenam, kesenjangan wilayah timur dan barat, Bappenas 2012 mencatat fakta bahwa beberapa wilayah bahkan bertumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Sementara itu, KTI yang begitu kaya akan sumber daya alam, kelautan, mineral, dan hutan selama puluhan tahun hanya menyumbang 18% dari perekonomian nasional. Hal ini bisa diakibatkan wilayah di bagian timur Indonesia sangat kurang pembangunan infrastrukturnya. Ketujuh, pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga berimplikasi pada kerusakan alam. Sebagai contoh, terjadinya sedimentasi pada badan-badan air, terjadinya longsor, dan daya tampung reservoir yang menurun secara signifikan.

Kedelapan, permasalahan utama di bidang maritim adalah kurang terpadunya perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan penyeberangan, maupun pengembangan kota pesisir dengan pembangunan infrastruktur PUPR, terutama jalan dan sumber daya air. Kesembilan, sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin pada pola pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Sinergi tersebut masih perlu terus dilakukan perbaikan dan penataan yang intensif mengingat infrastruktur merupakan urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* (dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan batasan kewenangan pusat dan daerah. Sebagai ilustrasi, kemampuan Pemda, terutama dalam aspek pendanaan untuk melakukan operasi dan pemeliharaan infrastruktur serta komitmen (*political will*) masih harus ditingkatkan. Terkait hal ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2010 dari seluruh kabupaten dan



kota, realisasi belanja untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai rata-rata 14,24 persen dari seluruh total belanja Pemerintah Daerah, dan pada tahun 2012 justru menurun hanya mencapai 13,95 persen, bahkan 38,57 persen diantaranya di bawah 10 persen.

1.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Air

Potensi sumber air Indonesia sangat besar yaitu 3.9 triliun M^3 namun yang dimanfaatkan baru mencapai $\pm 13,8$ milyar M^3 atau $\pm 58 M^3$ perkapita yang dapat dikelola melalui reservoir. Angka ini jauh lebih rendah dari Thailand 1.277 m^3 perkapita dan satu tingkat di atas Ethiopia (38 m^3 /Kapita).

Dalam aspek ketahanan energi, tahun 2019 diperkirakan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 298 GWh (Sumber: RUKN 2010-2029). Total kapasitas terpasang pembangkit nasional hingga Juni 2012 adalah sebesar 40.438 MW, yang mana 4.655 MW diantaranya terdiri Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA, PLTM dan PLTMH). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional dalam rangka ketahanan energi tersebut, beberapa waduk direncanakan akan dikembangkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), diantaranya: Waduk Karian, Jatigede, Jatibarang, Bajulmati, Bendo, Lolak, Kuwil, Karalloe, Tugu, Titab, Marangkayu.

Selanjutnya, kontribusi sektor irigasi terhadap produksi padi relatif besar yaitu $\pm 85\%$ terhadap total produksi padi nasional, namun apabila kerusakan jaringan irigasi tahun

2014 sebesar 16% dapat diatasi, akan lebih meningkatkan kontribusi irigasi terhadap produksi padi tersebut.

Namun demikian, ke depan masih terdapat permasalahan-permasalahan seperti: pertama, dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi diantaranya karena dinamika masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya upaya mitigasi dan adaptasi. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca juga telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikkan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir. Kedua, masih terjadinya kerusakan pada *catchment area*, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi. Sebagai ilustrasi, pengaruh perubahan iklim, seperti peningkatan muka air laut akan membawa perubahan pada garis pantai yang akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara. Ketiga, jaringan irigasi masih mengalami kerusakan, sehingga perlu optimalisasi penurunan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Pusat dan dorongan kepada daerah untuk menurunkan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Daerah. Keempat, pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih menghadapi banyak hambatan, terutama disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah.

1.2.2 Penyelenggaraan Jalan

Kualitas infrastruktur jalan di Indonesia dalam mendukung konektivitas dan daya saing saat ini berada pada tren yang cukup positif. Berdasarkan penilaian dari *Global Competitiveness Index*, kualitas infrastruktur jalan menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013-2014, infrastruktur jalan mengalami peningkatan dari nilai 3,4 pada tahun 2012-2013 menjadi 3,7 dari 7 pada tahun 2013-2014 dan berada pada urutan ke 78 dari 148 negara. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan untuk menjaga tren positif kualitas infrastruktur jalan di Indonesia, sehingga mampu mencapai nilai yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Pada akhir tahun 2014, kondisi kemandirian jalan nasional sudah mampu mencapai 94%.

Selain itu, peran infrastruktur khususnya infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing perekonomian suatu negara. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai barang modal yang secara langsung dapat menghasilkan produksi (*Economic Directly Productive Capital*), tapi juga barang modal yang menjadi landasan bagi perekonomian yang secara tidak langsung dapat menghasilkan atau meningkatkan proses produksi, seperti fasilitas transportasi dan irigasi (*Economic Overhead Capital*), serta sebagai sarana penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang secara tidak langsung bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi (*Social Overhead Capital*).

Selanjutnya infrastruktur jalan juga berperan sangat penting sebagai tulang punggung (*backbone*) dalam pergerakan ekonomi dan daya saing nasional. Percepatan penyediaan infrastruktur jalan yang berkualitas menjadi salah satu upaya bagi Indonesia untuk dapat keluar dari negara *middle income trap*.-



Selain itu, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, merupakan salah satu formula handal dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur jalan dapat membuka akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan, investasi, serta dapat menjadi pendorong perputaran/siklus kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi lokal.

Dukungan konektivitas nasional dalam penguatan daya saing masih menghadapi beberapa kendala. Kendala yang paling mendasar adalah kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan berimbas pada *trip time* (jam/100 Km) masih cukup tinggi yaitu 2,7 jam/100 Km, jika dibandingkan dengan negara tetangga, dimana 100 Km dapat dicapai kurang lebih dalam 1-1,5 jam.

Indonesia tercatat masih belum bersahabat dengan dunia usaha. Menurut laporan *World Bank*, posisi Indonesia dalam peringkat kemudahan berusaha (*Rankings of the Ease of Doing Business*) hanya mampu menempati peringkat ke-120. Penilaian ini salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya transportasi, selain indikator lain seperti prosedur dan administrasi. Hal ini tidak lepas dari tingginya biaya logistik di Indonesia, yang mana rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB masih pada kisaran 27%. Berdasarkan studi *World Bank*, skor *logistic performance index* (LPI) Indonesia hanya mencapai 2,94 dan hanya menempati peringkat ke-53 pada tahun 2014.

Meskipun kondisi jalan nasional sudah mencapai tingkat kemantapan yang relatif tinggi, kondisi jalan daerah belum mampu mendukung fungsi jalan nasional. Tingkat kemantapan jalan daerah masih pada kisaran 70%. Padahal, sebagai sebuah sistem jaringan, jalan daerah memegang peran yang tidak kalah penting dari jalan nasional. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab kurang baiknya kinerja jaringan jalan di

Indonesia, yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan seperti waktu tempuh yang cukup lama serta tingginya biaya logistik.

Di kawasan perkotaan juga terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh pertumbuhan kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor. Mengingat pada periode 2015-2020 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, diperkirakan kegiatan ekonomi akan meningkat, yang akan mendorong pertumbuhan pergerakan kendaraan bermotor. Tanpa adanya tindakan, hal ini dapat memperburuk kondisi kemacetan di kawasan perkotaan.

Selain itu, *backlog* pengembangan jaringan jalan tol masih cukup tinggi, yang berakibat pada *expressway density* rendah, yaitu sekitar 0,05 Km/1.000 penduduk. Pembangunan jalan tol masih terhambat masalah pengusahaan, pengadaan lahan, dan kelembagaan. Disamping itu, mutu dan kuantitas jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban berlebih juga masih terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelayakan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.

1.2.3 Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi layak, pada tahun 2020.

Selain itu, pengembangan permukiman tidak sekedar sebagai pendukung sarana kebutuhan kehidupan, tetapi merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, menampakkan jati diri, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan lapangan kerja.

Peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, masih bisa dioptimalkan. Sebagai contoh, dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya sarana dan prasarana dasar terkait pembebasan tanah sangat besar, sehingga berpotensi untuk diberdayakan dan ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan, seperti 70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satunya berasal TPA *Open Dumping* yang menghasilkan gas metana (CH₄). Bangunan gedung menggunakan 40% dari energi global, dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi.

Selain itu, dalam aspek akses air minum, masih perlunya peningkatan cakupan layanan yang saat ini secara nasional sekitar 70 persen, penurunan kehilangan air, peningkatan kualitas air minum, optimalisasi potensi pendanaan swasta, penerapan tarif *full cost recovery*; optimalisasi penerapan *Good Corporate Governance*; peningkatan kualitas dan kuantitas air baku, optimalisasi potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM serta pengembangan teknologi pengolahan air.



Selanjutnya terkait sanitasi, tantangan/permasalahan antara lain: (1) cakupan layanan sanitasi nasional saat ini masih rendah yaitu sekitar 59,7 persen; (2) belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (sekitar 70 juta jiwa penduduk Indonesia buang air besar sembarangan); (3) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; daerah belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas; (4) perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi; (5) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan (6) perlunya peningkatan manajemen aset.

Dalam penanganan permukiman kumuh ada beberapa tantangan/permasalahan antara lain; (1) hasil identifikasi kawasan kumuh pada tahun 2014 mencapai 38.431 Ha di 4.108 Kawasan; (2) perlunya peningkatan peran daerah dalam pengentasan kawasan kumuh, saat ini sekitar 53 persen belum memiliki Perda bangunan gedung; dan (3) peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.



1.2.4 Pembiayaan Perumahan

Beberapa peluang untuk pembiayaan perumahan antara lain: (1) sumber-sumber pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui pelembagaan yang terintegrasi masih terbuka (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Tabungan Perumahan, Dana Jangka Panjang); (2) Bank BTN sebagai bank untuk pembiayaan perumahan; (3) Lembaga Keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (Koperasi/ *Multifinance*); (4) PT. SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan; (5) penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan perumahan; (6) pemanfaatan sumber dana di luar APBN/APBD; dan (7) perumahan menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/kabupaten.

Namun demikian terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah: (1) masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (*availability*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) masih rendahnya daya beli atau kemampuan (*affordability*) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni; (3) relatif masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (*accessibility*); dan 4) terjadinya *mismatch* dalam pembiayaan perumahan, akibat relatif sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (*sustainability*).



1.2.5 Penyediaan Perumahan

Peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut, yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan Pemerintah Daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah.

Di samping Pemerintah Daerah, pelaku yang juga perlu diberdayakan adalah masyarakat dan dunia usaha, termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang selama ini belum didorong secara maksimal. Peran dunia usaha seharusnya dikembalikan sebagai investor yang efektif dan sebagai generator pengembangan kawasan. BUMN harus didorong untuk dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membantu Pemerintah untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan. Sedangkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, perlu diberdayakan secara terorganisir dan ditempatkan sebagai aktor penting pembangunan.

Disisi lain, terdapat tantangan dan permasalahan yaitu; (1) dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai; (2) koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal; (3) peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal; (4) efisiensi proses dan mahalny biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal; (5) terbatasnya dan mahalny harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan; (6) pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal; (7) masih tingginya *backlog* kepemilikan rumah; dan (8) pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan.

1.2.6 Pembinaan Industri Konstruksi Nasional

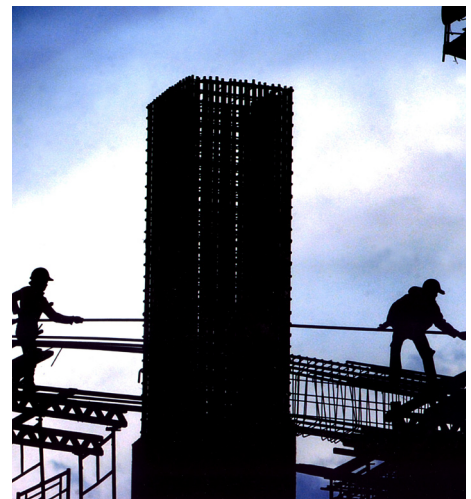
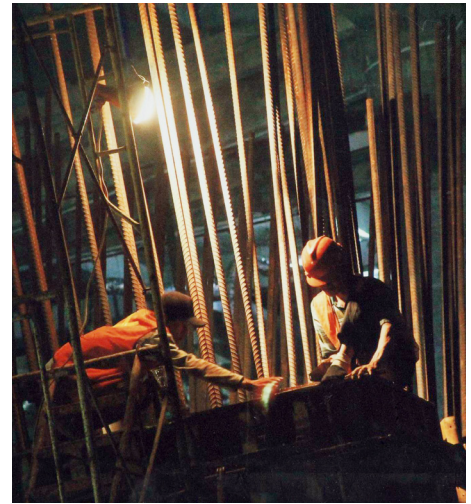
Jasa konstruksi dikenal sebagai kegiatan yang sangat terfragmentasi. Fragmentasi vertikal terjadi dalam rantai produksi antara produsen material, pemasok, manufaktur, kontraktor spesialis, dan kontraktor general, sementara fragmentasi horizontal terjadi dalam siklus proyek yaitu gagasan, konseptual desain, studi kelayakan, perencanaan detail, pengadaan, konstruksi, penyerahan pekerjaan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Selain permasalahan tersebut, rendahnya mutu masih mewarnai penyelenggaraan konstruksi di Indonesia. Di bidang jalan misalnya, masih terjadi jalan mengalami kerusakan struktural sebelum umur rencana berakhir. Kegagalan konstruksi juga mulai terjadi dalam pengelolaan bendung dan jembatan. Runtuhnya Bendung Situ Gintung tahun 2009 dan Jembatan Kutai Kartanegara pada tahun 2011 dapat menjadi contoh.

Walaupun terdapat beberapa kontraktor nasional terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kemampuan tinggi, daya saing kontraktor nasional secara umum masih rendah. BUK didominasi oleh BUK generalis sehingga kemitraan antar kualifikasi dan klasifikasi belum terwujud.

Lemahnya kemampuan tenaga ahli dan konsultan nasional di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat juga sangat dirasakan. Pada saat ini hanya terdapat beberapa konsultan nasional yang bereputasi tinggi dan umumnya tidak bekerja di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Luputnya perhatian pemerintah dan terbatasnya kemampuan asosiasi profesi mengawal *billing rate* tenaga ahli yang pantas berakibat langsung pada kemampuan perusahaan konsultan untuk mempertahankan dan membina tenaga ahli serta mengembangkan usahanya terjadinya praktek-praktek yang kurang profesional.

Mutu sumber daya manusia sektor konstruksi tidak kurang memprihatinkan. Dari 6,9 juta pekerja, 60% adalah tenaga kasar, 30% tenaga terampil, dan hanya 10% tenaga ahli. Dari total tenaga kerja tersebut, kurang dari 10% yang telah disertifikasi.



1.2.7 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan berperan sebagai *Scientific Backbone* dan sebagai *leader* dalam bidang teknologi infrastruktur dan bertanggung jawab dalam memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, serta permukiman dan perumahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan/permasalahan diantaranya adanya tuntutan penyediaan IPTEK siap pakai untuk: (1) meningkatkan akses masyarakat terhadap upaya - upaya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana; (2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan air irigasi; (3) mengurangi kelangkaan air baku; (4) memperbaiki kualitas air baku (aplikasi UU SDA); (5) menurunkan Biaya Operasional Kendaraan (Aplikasi UU Jalan); (6) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; (7) meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dasar (aplikasi UU SDA, UU Sampah); (8) pemanfaatan bahan lokal dan potensi wilayah; (9) perlunya mempercepat proses standarisasi untuk menambah jumlah SNI maupun pedoman di bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil, untuk mengantisipasi semakin meningkatnya proteksi produk dan standar oleh negara lain; (10) perlunya memperluas simpul-simpul pemasyarakatkan IPTEK PU dan Perumahan Rakyat, standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil, termasuk memperluas kontribusi perguruan tinggi, asosiasi dan media informasi; (11) perlunya memanfaatkan peluang riset insentif (kegiatan riset yang didanai oleh Depdiknas) untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian para calon peneliti dan perekayasa, sehingga dapat mengurangi kesenjangan keahlian akibat *zero growth*; (12) dituntut untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga litbang internasional dalam rangka meningkatkan kompetensi lembaga maupun sumber daya manusia litbang dalam mengantisipasi dampak pemanasan dan perubahan iklim global, khususnya terhadap penyediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan (13) adanya tuntutan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Litbangrap IPTEK.

1.2.8 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur merupakan bagian dari administrasi publik yang berperan sangat strategis dan kritis dalam pencapaian target-target pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kondisi ideal yang diharapkan dari SDM aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: independen dan netral; berkompeten; produktif; berintegritas; berkesejahteraan; berorientasi pelayanan dan kinerja; dan akuntabel. Ke depan perlu ada perubahan pola pikir (*mindset*) dari ASN, yaitu: dari dilayani menjadi melayani; dari orientasi proses menjadi orientasi outcome; dari menunggu menjadi menjemput; dari inkompeten menjadi kompeten; dari rumit dan tidak fleksibel menjadi sederhana; serta dari koruptif menjadi bersih.

Disisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia, diantaranya: (1) dalam rangka percepatan transformasi pengembangan SDM Kementerian PUPR belum tersusunnya sistem pengembangan SDM mulai dari evaluasi dan pemantauan kinerja, potensi dan kompetensi, pemberdayaan dan



penempatan pejabat fungsional dan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi; (2) data kinerja yang menggambarkan hasil evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pengembangan karir pegawai dan perencanaan pengembangan pegawai belum terdata secara akurat, sangat kompleks dan belum terintegrasi secara benar; (3) sistem merit pengembangan SDM belum dipetakan secara baik dari awal karir pegawai sampai dengan akhir menjabat. Indikasinya adalah dalam penempatan pegawai kualifikasi keahlian dan keterampilan belum sesuai dengan jabatannya. Hal ini disebabkan oleh pendidikan dan pelatihannya belum merupakan persyaratan jabatan; (4) pegawai Kementerian PUPR yang menduduki jabatan struktural dalam 5 tahun ke depan relatif banyak yang akan pensiun, yaitu pejabat Eselon I s.d IV yang usianya melebihi 51 tahun sebanyak 304 orang atau 18.55% dari seluruh pegawai; (5) potensi dan kompetensi pegawai belum terpetakan seluruhnya, sehingga penempatan aparatur belum "the right man on the right place", yang menyebabkan kinerja SDM belum maksimal; (6) masih adanya pegawai yang masih berpikir secara tradisional sehingga kurang inovatif dan berdaya saing; (7) penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi; (8) Promosi dan Mutasi Jabatan belum berdasarkan pada Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan yang dipersyaratkan, dan penilaian terhadap aparatur dengan basis kompetensi kinerja belum diterapkan untuk seluruh aparatur Kementerian; (9) sistem remunerasi pegawai berbasis penilaian kinerja dan penerapan sistem reward and punishment belum sepenuhnya diterapkan; dan (10) Kuantitas SDM yaitu 25.000 (dua puluh lima ribu) orang dianggap sudah cukup, namun banyak pejabat yang akan pensiun sedangkan staf pengganti di bawahnya belum cukup matang, sehingga ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

1.2.9 Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dengan faktor eksternal yang dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain. Konsep pengembangan wilayah dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik serta menciptakan pusat-pusat produksi. Sedangkan dalam konteks jangka panjang, pengembangan wilayah dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berdasarkan arahan spasial tata ruang.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang mengemuka diantaranya: (1) ketersediaan lahan budi daya terbesar terdapat di wilayah Pulau Kalimantan, yaitu mencapai 31% dan terendah di wilayah Pulau Maluku dan Nusa Tenggara yaitu 4 % terhadap nasional; (2) konversi lahan berupa pertambahan kawasan terbangun masih lebih banyak terjadi di wilayah Jawa selama 2006-2011, yakni mencapai 194,3 ribu Ha per tahun, Sumatera 125,2 ribu Ha, Kalimantan 32 ribu Ha, Sulawesi 16 ribu Ha, Maluku 5 ribu Ha, Papua dan Nusa Tenggara 7 ribu Ha per tahun; (3) kepadatan penduduk di Pulau Jawa-Bali merupakan yang tertinggi dengan kepadatan rata-rata diatas 500 Jiwa/Km²; (4) secara spasial, wilayah dengan proporsi penduduk miskin yang tinggi terdapat di wilayah Papua dan Nusa Tenggara (didasar 30%) sementara terendah di Kalimantan (dibawah 10%); (5) distribusi ekonomi wilayah Jawa Bali mendominasi hingga mencapai 58.8% terhadap nasional, Sumatera 23% dan Kalimantan 9.3% sisanya kurang dari 10%; (6) keterpaduan antar program/antar sektor yang berbeda sumber pendanaannya masih belum optimal; (7) akses ke kawasan terpencil/tertinggal/daerah perbatasan dan akses ke *oulet*/pemasaran masih sangat terbatas; (8) pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral) belum efektif digunakan; (9) pengelolaan pembangunan di daerah dalam menunjang pengembangan wilayah masih belum optimal dilakukan; serta (10) kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan makin meningkat dengan indikasi hampir seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga cenderung menimbulkan arus urbanisasi.

1.2.10 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Saat ini terdapat tuntutan masyarakat untuk menghapuskan praktik KKN yang telah berlangsung lama, membuat pemerintah bertekad untuk melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di segala bidang pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penghapusan KKN tersebut apabila terpenuhi maka akan berpotensi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Selain itu adanya keinginan mengurangi kebocoran, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mengayomi pelaksana yang telah bekerja dengan baik dan benar. Juga adanya dukungan Sistem Akuntansi dan *IT Based System* dalam mendukung pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian PU.

Beberapa tantangan dan permasalahan dalam aspek pengendalian dan pengawasan, diantaranya; (1) pembangunan sarana dan prasarana bidang PU dan perumahan rakyat perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; (2) koordinasi penyelenggaraan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih lemah yang berdampak pada ketidakjelasan status aset; (3) belum maksimalnya pelaporan gratifikasi sebagai tindak lanjut atas komitmen penerapan gratifikasi; dan (4) perlunya seluruh unit kerja menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melalui Manajemen Resiko sesuai Instruksi Menteri PU No. 2/IN/M/2011.

1.2.11 Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Beberapa potensi dalam aspek dukungan manajemen diantaranya; (1) citra positif Kementerian PU sebagai penyedia infrastruktur yang andal telah berhasil dibangun melalui pemanfaatan peran serta media (baik konvensional maupun sosial) dan masyarakat serta memaksimalkan fungsi *media relations* seperti konferensi pers, kunjungan ke kantor media massa, *press briefing* dan *media gathering*, pameran, media sosial dan *online*, dan peliputan berbagai kegiatan dan produk Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, sehingga citra positif tersebut merupakan modal penting dan perlu terus ditingkatkan dalam kerangka pemenuhan tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap layanan infrastruktur; (2) penyelenggaraan data dan sistem informasi diantaranya melalui pembuatan peta profil infrastruktur dan integrasi *Local Area Network* (LAN) telah berhasil mengembangkan layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang perlu terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya; (3) adanya upaya pengamanan dan penguatan hak atas aset tanah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang belum bersertifikat. Data tahun 2012 aset Kementerian Pekerjaan Umum saja mencakup 24% dari total aset Pemerintah Pusat, terlebih adanya penambahan target dan anggaran yang semakin meningkat akan berimplikasi terhadap jumlah aset; (4) penggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat membutuhkan pembaruan NSPK, serta adanya potensi meningkatnya kasus hukum seiring dengan meningkatnya anggaran dan target pembangunan; (5) dokumen Renstra, RKP, Renja, RKAKL, dan Nota Keuangan telah disusun dengan baik dan dijadikan acuan penting oleh seluruh unit organisasi, hal ini mengindikasikan koordinasi relatif cukup baik; (6) predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan perlu terus dipertahankan karena hal ini merupakan gambaran perbaikan penggunaan keuangan negara; serta (7) keberadaan gedung baru sangat menunjang pelaksanaan tugas Kementerian, dan merupakan tambahan aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di samping tambahan aset dari eks Kementerian Perumahan Rakyat sehingga beban pemeliharaan dan pengelolaannya akan semakin besar.

Namun demikian, ke depan masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya: (1) dalam aspek perencanaan dan penganggaran, kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan rencana perlu ditingkatkan, alokasi anggaran infrastruktur masih 2-3% dari PDB (ideal 5%), efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran perlu dioptimalkan, pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) perlu lebih didukung data yang lengkap dan mutakhir, pelaporan berbasis elektronik (e-monitoring) belum optimal sehingga kurva S belum ideal; (2) perlunya optimalisasi *clean and good governance*, optimalisasi penerapan sistem akuntansi berbasis "*full accrual*", peningkatan tertib administrasi keuangan serta peningkatan keseragaman pelaporan keuangan; (3) perlunya optimalisasi pengendalian disiplin pegawai, peningkatan reformasi birokrasi oleh setiap pegawai, fasilitasi pengelolaan laporan harta kekayaan pejabat negara, optimalisasi proses mutasi

pegawai serta *master plan* organisasi dan tata laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ideal agar stabil; (4) perlunya penyelesaian temuan BPKRI terkait aset/BMN, peningkatan kompetensi SDM pengelolaan dan penatausahaan BMN, penertiban aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui sertifikasi, penyederhanaan pemrosesan dan pelaporan BMN, peningkatan pendataan dan inventarisasi aset meskipun bermacam jenis karakteristik aset, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi aset/BMN dengan pihak luar, dan penanganan aset BMN yang sudah tidak layak pakai; (5) perlunya peningkatan kesadaran pegawai terkait penghematan energi dan kualitas lingkungan kerja, peningkatan kuantitas sarana dan prasarana kerja, dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip; (6) perlunya peningkatan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), peningkatan pemanfaatan media sosial dan *online* dalam pembentukan opini publik yang positif terhadap capaian pembangunan infrastruktur PUPR, dan perlunya dukungan strategi komunikasi publik yang tepat terkait penyebaran informasi; (7) perlunya optimalisasi sistem informasi geografis yang terpadu dalam pendataan infrastruktur PUPR, optimalisasi penggunaan TIK dalam pelaksanaan tugas, peningkatan integrasi basis data setiap Satminkal ke dalam satu basis data, dan peningkatan kompetensi SDM terkait TIK; (8) perlunya optimalisasi pembinaan sistem dan tertib peraturan dan per-UU-an serta bantuan hukum, percepatan penyelesaian peraturan bidang PUPR melalui dukungan koordinasi, harmonisasi serta peningkatan kompetensi SDM dalam pembahasan dengan pihak-pihak terkait, peningkatan tertib dokumen sebagai alat bukti pendukung dalam penanganan perkara, peningkatan penanganan rumah negara, serta pembuatan jaringan dokumentasi informasi hukum terpusat.

BAB

2

**VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN STRATEGIS**

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL
DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan* yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

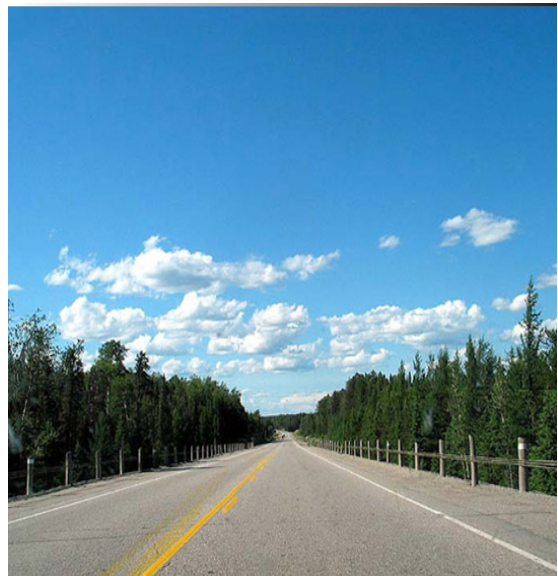
Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.



2.2 MISI

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatn serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.





2.3 TUJUAN

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan* yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

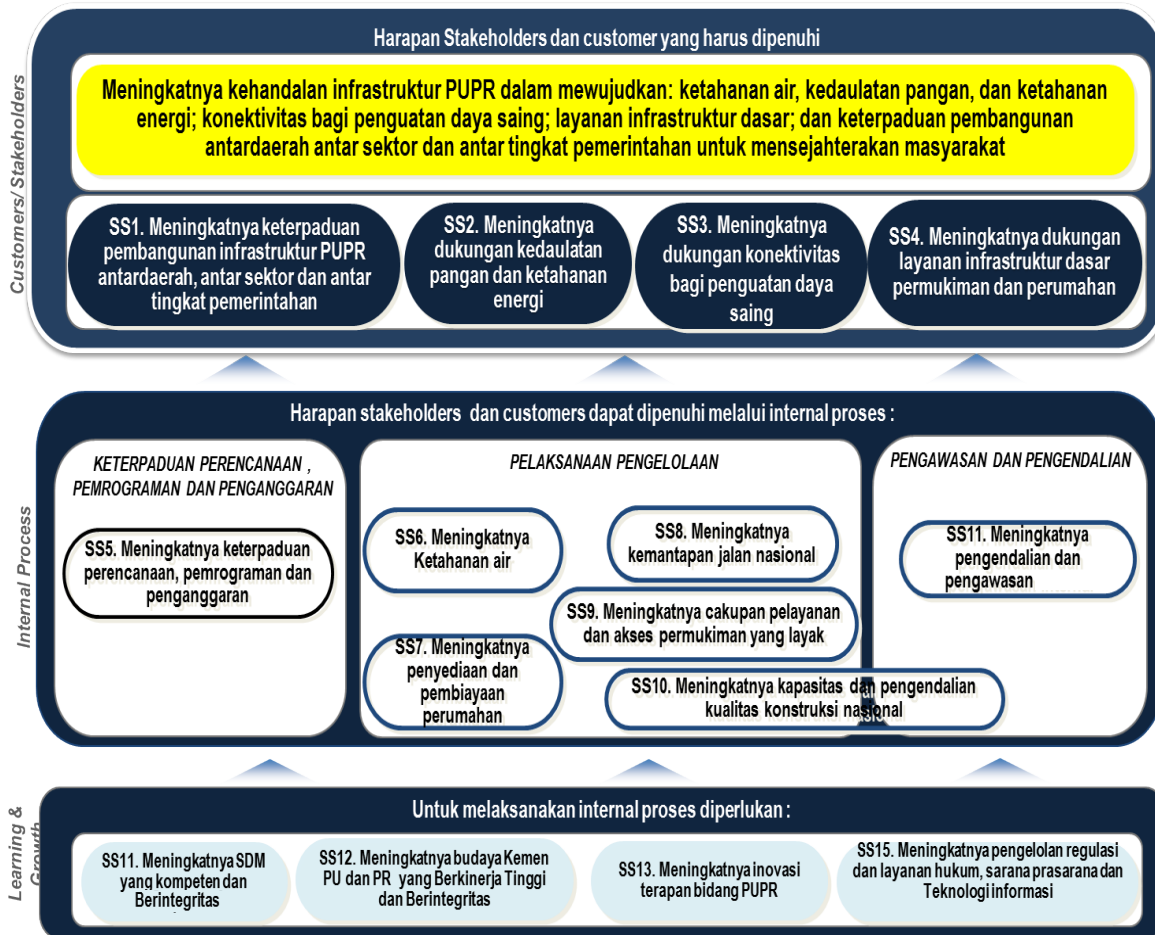
2.4 SASARAN STRATEGIS

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer* yang *dilayani*) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat lihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Kemudian agar kebutuhan *customers* dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan *stakeholders* dan *customers* tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses *learning and growth*, yang meliputi :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
 - b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
 - c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
2. Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
 - b. Meningkatnya ketahanan air.
3. Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
 - b. Meningkatnya kemandirian jalan nasional

4. Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:
- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
 - b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
 - c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
5. Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
 - b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
 - c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
 - d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

BAB

3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB 3

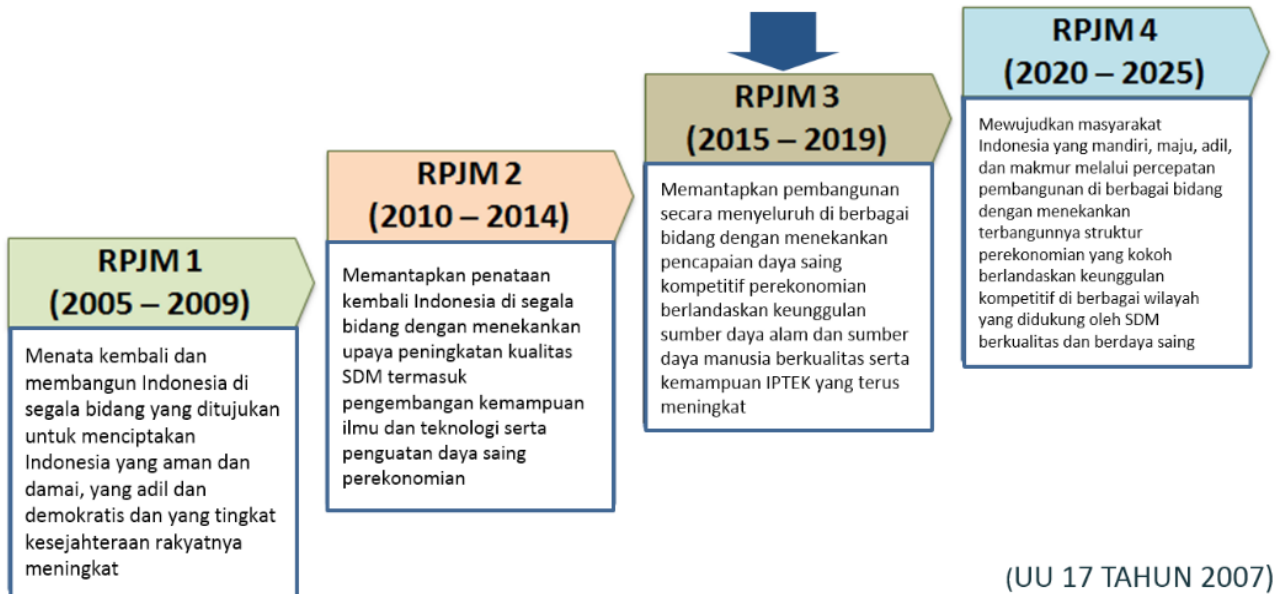
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.



Gambar 3.1
Tahapan Pembangunan Nasional



Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan kepada :

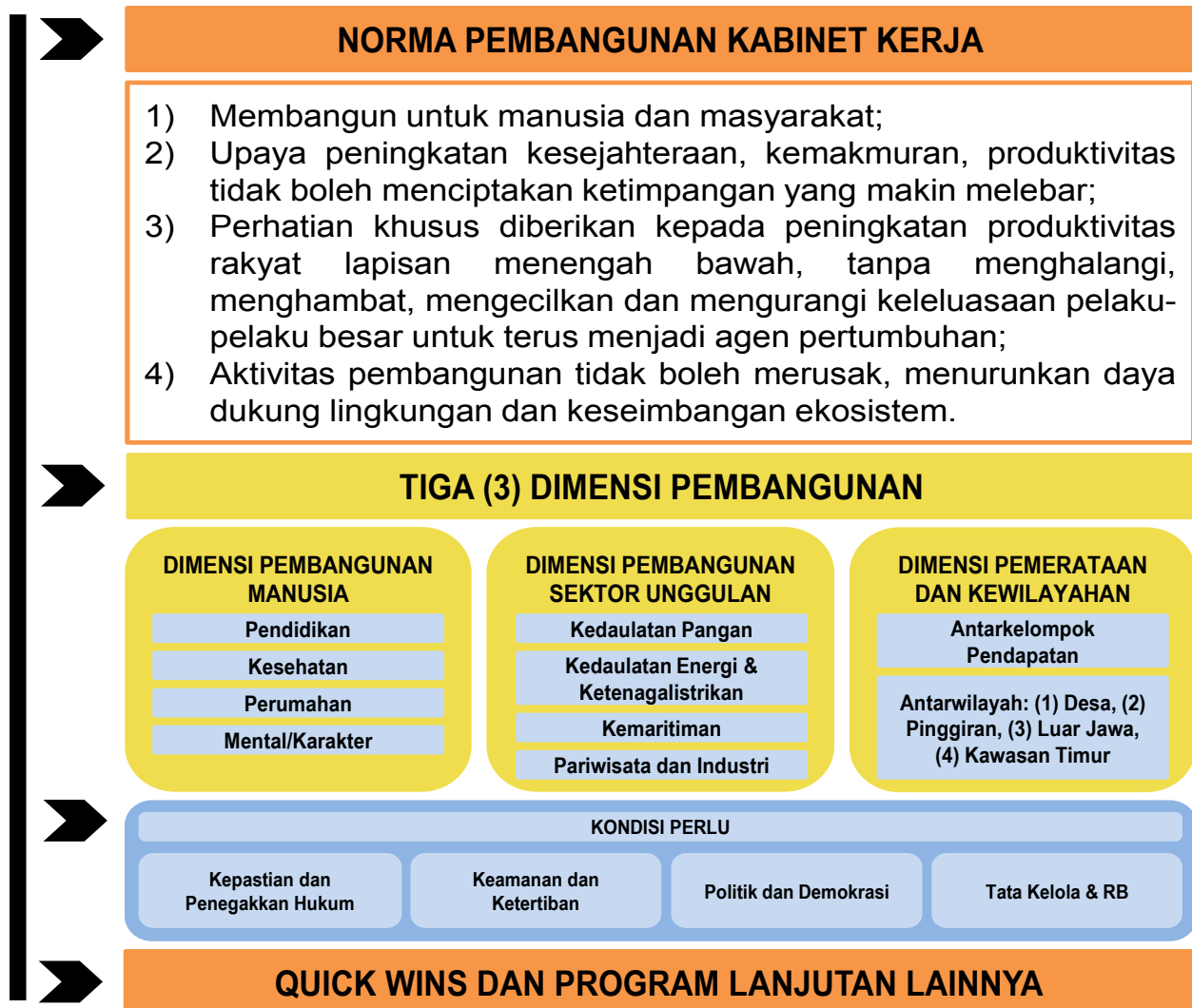
- A. Norma Pembangunan,** meliputi antara lain: (1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan; (3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
- B. Dimensi Pembangunan;**
 - 1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.** Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.
 - 2. Dimensi pembangunan sektor unggulan.** Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan kelautan harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal pengembangan pariwisata nasional, sedangkan potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.

3. **Dimensi pemerataan dan kewilayahan.** Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

C. **Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil.** Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.

D. **Quickwins.** *Quickwins* dilakukan agar *output* pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Gambar 3.2.
Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019



3.1.1 Arah Kebijakan Utama Pembangunan Wilayah Nasional

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu;

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dicapai melalui strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah; percepatan pembangunan konektivitas; peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK; regulasi dan kebijakan; serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal; melalui strategi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui; (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya; (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (4) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan; (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau;

(2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa.

4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan. Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis, melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan (9) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5) peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan.
5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, akan dicapai melalui strategi; internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang.
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

3.1.2 Agenda Prioritas Nasional

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. **Sasaran Makro:** meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
2. **Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:** meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
3. **Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:** meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
4. **Sasaran Dimensi Pemerataan:** meliputi penurunan kesenjangan antar kelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.

5. **Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah:** meliputi pemerataan pembangunan antar wilayah.
6. **Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:** meliputi politik dan demokrasi; tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata kelola pemerintah daerah; serta pertahanan dan keamanan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

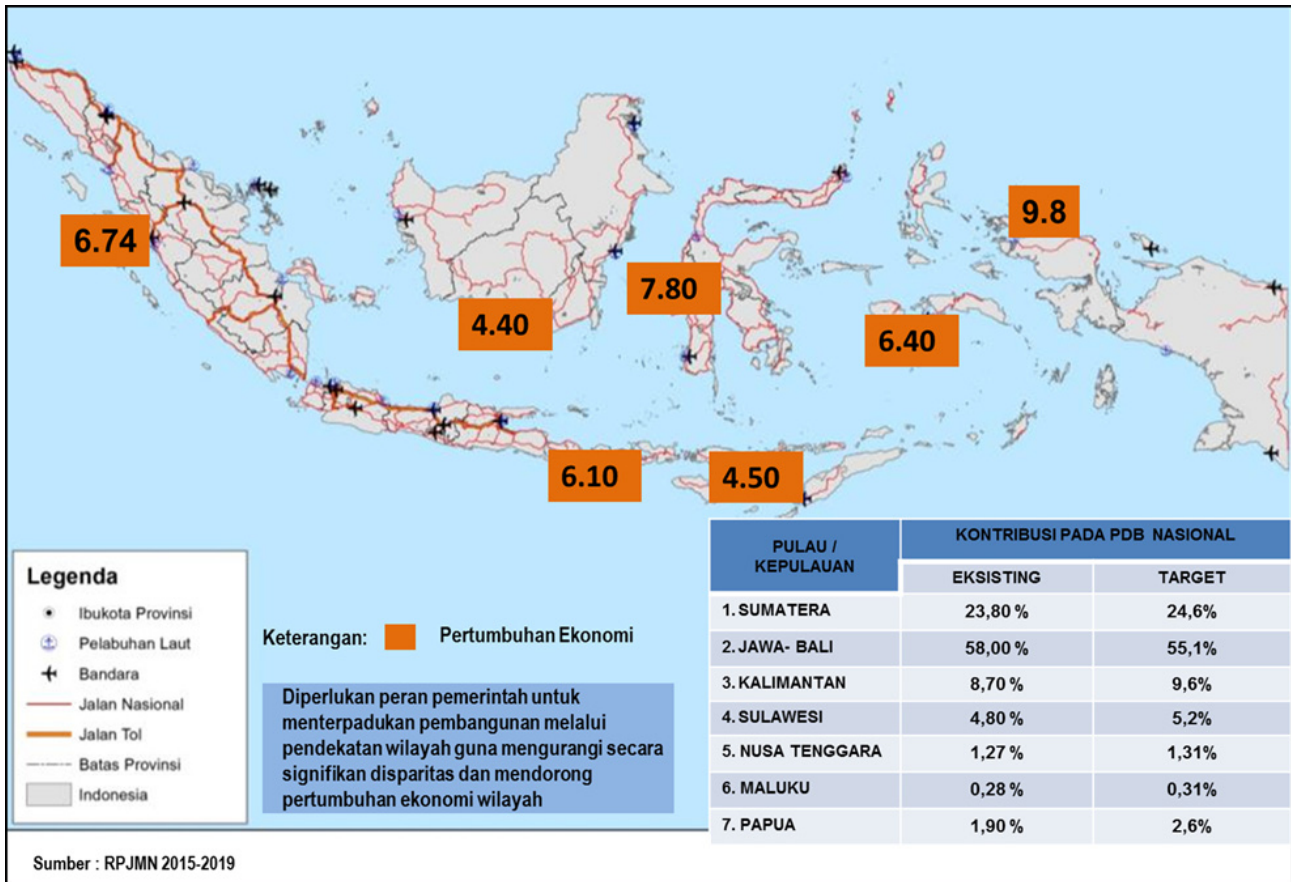
Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Selain itu pembangunan infrastruktur disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan wilayah perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

Sebagai ilustrasi pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau/kepulauan dan kontribusinya terhadap PDB Nasional adalah seperti pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Sebaran Pertumbuhan Eekonomi Pada Pulau-Pulau/ Kepulauan



Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi: 1) untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, 2) untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan

daerah untuk mendukung pengembangan kawasan; dan 3) untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Selain arah kebijakan tersebut juga ditetapkan arah kebijakan yang bersifat manajerial yaitu: 1) untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional; dan 2) untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh *stakeholders*, dan peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada *stakeholders*, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya dalam konteks pengembangan wilayah mengingat sangat luasnya wilayah nasional Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah Pulau/Kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan "Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)" yang di dalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau, sebagai berikut:

- 1) **Pulau Sumatera.** Tema besar pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah: Pintu Gerbang Perdagangan Internasional; Industri Berbasis Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Timah, Bauksit, & Kaolin; Lumbung Energi Nasional, Termasuk Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa; Hilirisasi Komoditas Batu Bara; dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim (Kelautan).
- 2) **Pulau Jawa.** Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah: Sebagai Lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan).
- 3) **Pulau Papua.** Tema besar pada Wilayah Pulau Papua adalah: Percepatan Pengembangan Industri Komoditas Lokal Perkebunan, Peternakan, Kehutanan; Percepatan Pengembangan Ekonomi Kemaritim; Percepatan Pengembangan

Hilirisasi Industri Pertambangan, Migas & Tembaga; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; Percepatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Alam; Peningkatan Kawasan Konservasi dan Daya Dukung Lingkungan; dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Kampung Masyarakat Adat.

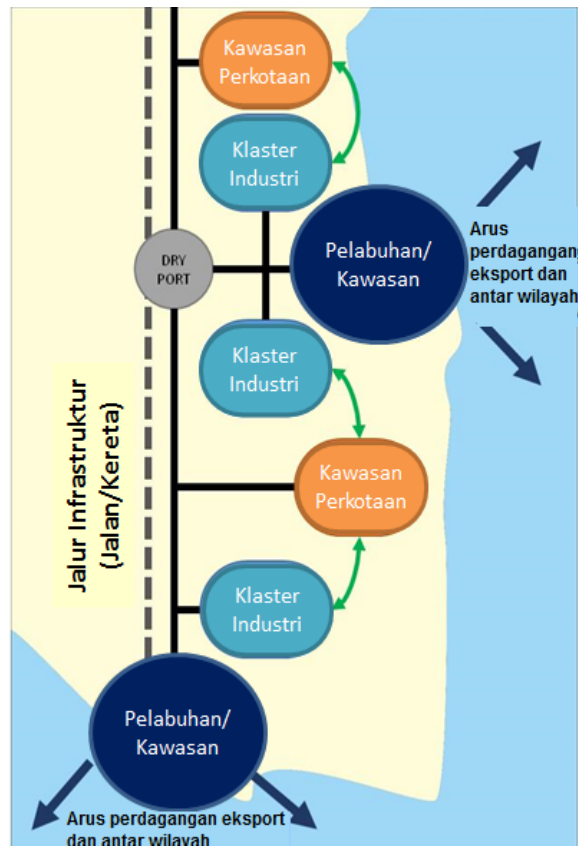
- 4) **Pulau Kalimantan.** Tema besar pada pengembangan Wilayah Kalimantan adalah: Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia; Salah satu lumbung pangan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, dan karet; dan Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon & pasir kuarsa.
- 5) **Pulau Bali dan Nusa Tenggara.** Tema Besar pada pengembangan Wilayah Bali adalah: Sebagai lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Sedangkan tema besar pada pengembangan Wilayah Nusa Tenggara adalah: Pintu gerbang pariwisata ekologis; Pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan Pengembangan industri pangan, dan tembaga.
- 6) **Kepulauan Maluku.** Tema besar pada pengembangan Wilayah Maluku adalah: Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan Pariwisata bahari.
- 7) **Pulau Sulawesi.** Tema besar pada pengembangan Wilayah Sulawesi adalah: Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi & gas bumi; Pintu gerbang perdagangan internasional & kawasan timur; Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri kakao, padi, dan jagung; Pengembangan industri berbasis logistik; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan & pariwisata bahari.

Pengembangan WPS tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (*economic of scale*) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional, mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada setiap WPS.

Konsepsi pengembangan WPS diilustrasikan yaitu pembangunan infrastruktur wilayah PUPR pada setiap WPS diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama WPS di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan maupun antar WPS. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral, regional dan makro ekonomi. Setiap WPS akan dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan atau pariwisata antara lain dengan:

1. Pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendukung kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, daerah tertinggal dan, daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik terkait infrastruktur PUPR;
2. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi maritim dan peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah melalui:
 - a. Pengembangan sentra ekonomi, pembangunan Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;
 - b. Pengembangan kemaritiman (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan, pengembangan energi dan mineral kelautan, pengembangan kawasan wisata bahari, industri maritim dan perkapalan;
 - c. Pengembangan kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan;
 - d. Pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali;
 - e. Peningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan fokus pada PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (dengan membangun kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman); serta membangun kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui pengembangan untuk pengentasan daerah tertinggal.
4. Meningkatkan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SPM di 35 WPS untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
5. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang.

Gambar 3.4. Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)



Selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS akan diintegrasikan dengan sasaran pokok dan program nasional sebagai berikut:

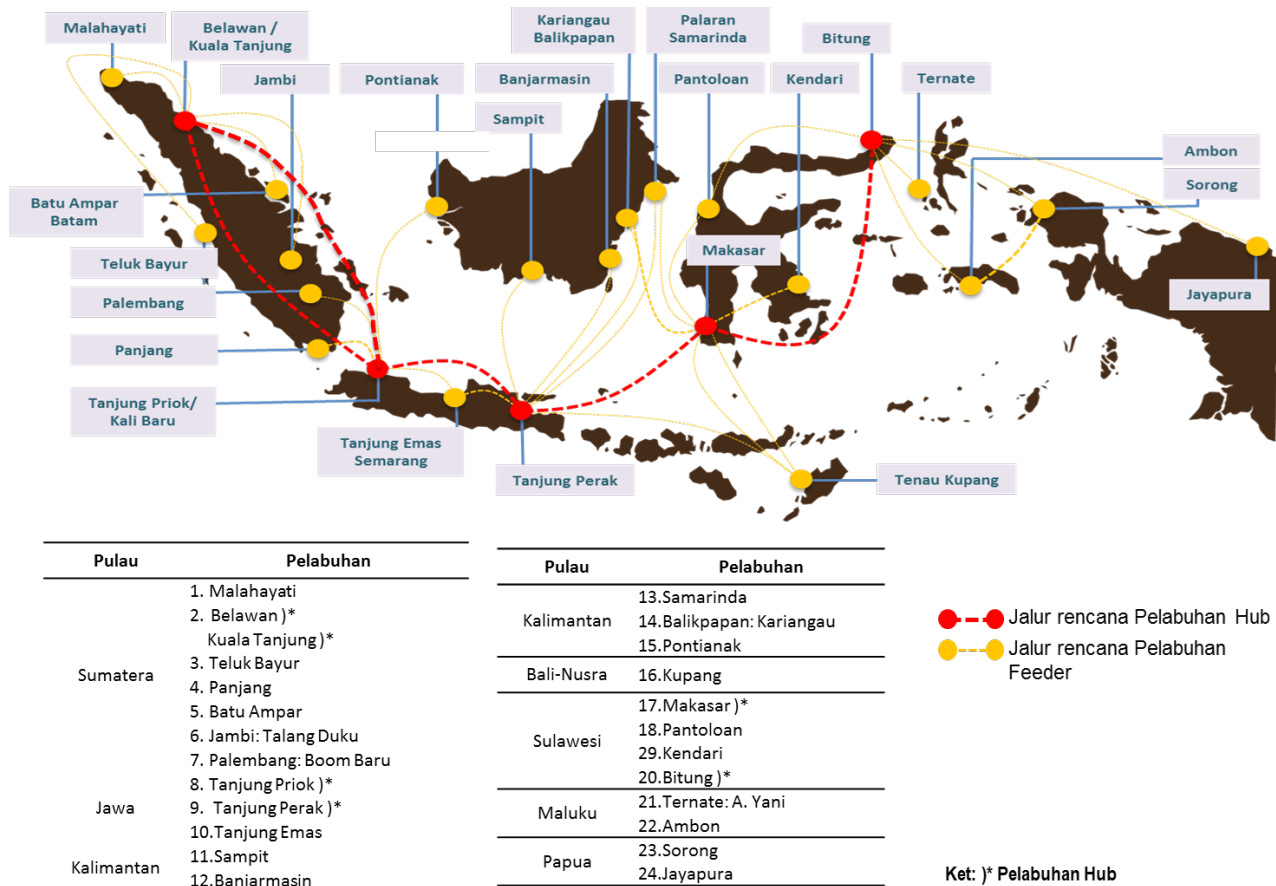
Pertama, dengan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) di antaranya di Pulau Sumatera (KSPNP Danau Toba dsk); Pulau Jawa (KSPNP: Kep Seribu dsk, Kota Tua-Sunda Kelapa dsk, Borobudur dsk, dan Bromo-Tengger-Semeru dsk); Pulau Bali- Nusa Tenggara (KSPNP: Kintamani-Danau Batur dsk, Menjangan-Pemuteran dsk, Kuta-Sanur-Nusa Dua dsk, Rinjani dsk, Pulau Komodo dsk, dan Ende-Kelimutu dsk); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting dsk); Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja dsk, Bunaken dsk, dan Wakatobi dsk); dan Kepulauan Maluku (KSPNP Raja Ampat dsk).

Kedua, diintegrasikan dengan program pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP), di antaranya di Pulau Sumatera (KIP:Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa (KIP: Tangerang, Cikarang, Cibinong, Karawang, Bandung, Cirebon, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan); Kalimantan (KIP: Batulicin, Ketapang, dan Landak); Pulau Sulawesi (KIP: Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (KIP Buli/Halmahera Timur); dan Pulau Papua (KIP Teluk Bintuni).

Ketiga, diintegrasikan dengan program Pengembangan Perkotaan KSN, PKW dan PKSN/ Kota Perbatasan di antaranya di Pulau Sumatera; Pulau Jawa-Bali; Kepulauan Nusa Tenggara; Pulau Kalimantan; Kepulauan Maluku dan Pulau lainnya.

Keempat, diterpadukan dengan program pengembangan Tol Laut (pelabuhan *hub* dan pelabuhan *feeder*) yang di antaranya di Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom Bar); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Kupang); Pulau Sulawesi (Makasar, Pantoloan, Kendari dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura).

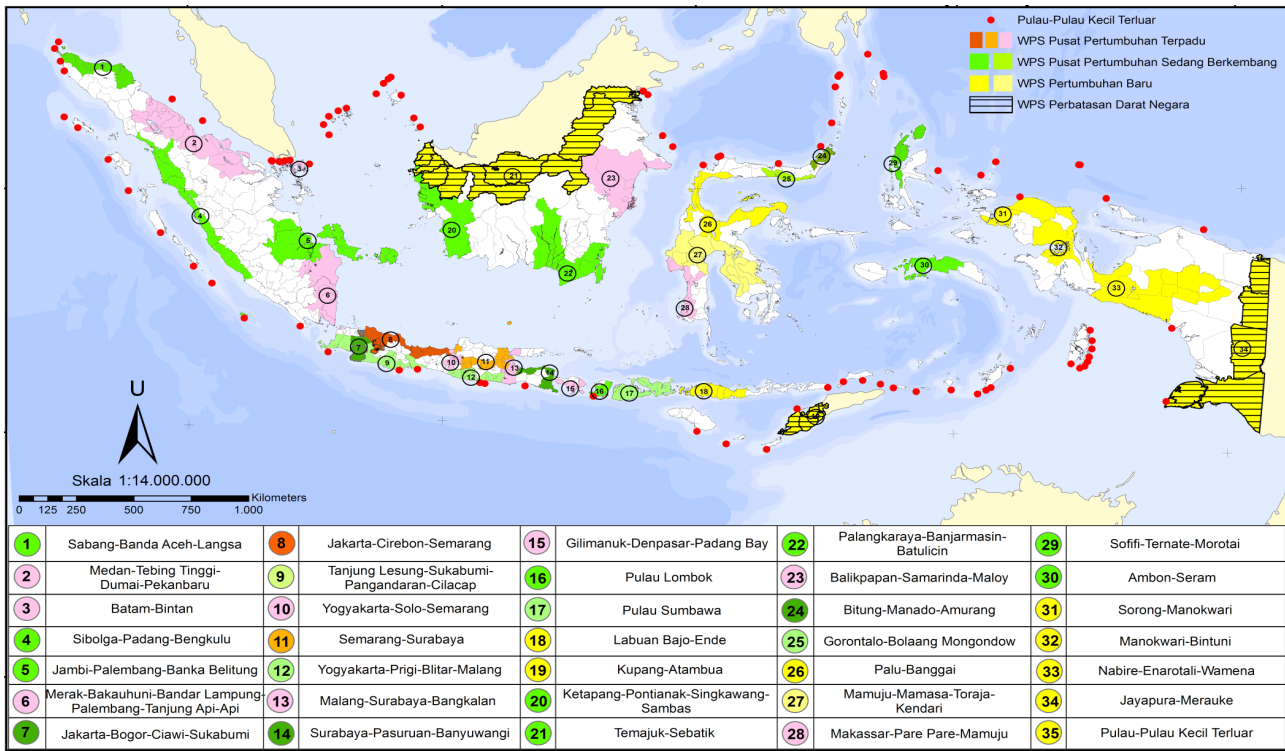
Gambar 3.5. Jalur Rencana Pelabuhan Hub dan Pelabuhan Feeder



Sumber: RPJMN 2015-2019

Ilustrasi arah pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seluruh pulau sebagaimana terlihat pada gambar 3.6. Dalam hal ini, setiap wilayah pulau/kepulauan tersebut dipilah ke dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok WPS, yaitu: Kelompok WPS Pusat pertumbuhan terpadu; Kelompok WPS Pusat pertumbuhan sedang berkembang; dan Kelompok WPS Pertumbuhan baru. Ke 35 WPS tersebut tersebar di seluruh pulau dan kepulauan yaitu: Pulau Sumatera (6 WPS), Pulau Sulawesi (5 WPS), Pulau Kalimantan (4 WPS), Kepulauan Maluku (2 WPS), Pulau Bali - Nusa Tenggara (5 WPS), Pulau Papua (4 WPS), Pulau Jawa (8 WPS), dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (1WPS).

Gambar 3.6. Wilayah Pengembangan Strategis



Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dari wilayah pengembangan strategis tersebut, akan diukur aspek-aspek yang terkait diantaranya: pengurangan gap pertumbuhan antara kawasan yang sudah berkembang dengan yang belum berkembang, tingkat keterpaduan perencanaan pemrograman dengan pelaksanaan (deviasi), tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran), disparitas kebutuhan dengan pemrograman, tingkat pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Informasi arah pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seluruh pulau sebagaimana pada peta WPS pada Sub Lampiran 3.

3.2.2 Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.

Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan.

Untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah tersebut akan dicapai melalui sasaran strategis:

- (1) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program: Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
 - a. Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor
 - b. Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi:
 - a) Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan;
 - b) Pengembangan kota baru dan cerdas (*smart cities*);
 - c) Peremajaan perkotaan melalui *urban redevelopment/urban renewal*
 - c. Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah
- 2) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:

- a. Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;
 - b) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;
 - c) Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7 Pulau/Kepulauan;
 - d) Penyusunan Skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
 - e) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
 - f) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
 - g) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.
- b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
 - a) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau/keulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan);
 - b) Evaluasi kinerja keterpaduan;
 - c) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;
- c. Perencanaan penguatan kelembagaan dalam rangka keterpaduan.

2. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur.

Kebijakan pembinaan industri konstruksi nasional dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, adalah untuk peningkatan kualitas dan produktifitas jasa konstruksi yang diarahkan pada pembinaan kepada empat *stakeholder* utama yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi; (2) Jasa konstruksi dalam rangka mewujudkan struktur usaha/pelaku konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing; (3) Industri konstruksi dalam rangka mewujudkan rantai pasok konstruksi yang kuat; dan (4) Masyarakat konstruksi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi, dengan sasaran program: 1) Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional; 2) Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar; 3) Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak; dan 4) Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten, 5). Meningkatnya utilitas produk unggulan. Hal tersebut akan dicapai melalui strategi:

- 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2) Peningkatan pembinaan penyelenggaraan dan investasi konstruksi agar tercipta tertib penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas BUIK, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi;
- 3) Peningkatan pembinaan untuk mewujudkan BUIK yang berkualifikasi besar, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, berdaya saing tinggi;
- 4) Peningkatan penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur;
- 5) Peningkatan pengembangan informasi konstruksi dan penyediaan sumber daya konstruksi;
- 6) Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan.

B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air adalah agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mewujudkan Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan, dan Ketahanan Energi, yang akan diwujudkan melalui sasaran strategis: (1). Meningkatkan dukungan ketahanan air (2). Meningkatkan dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi, dengan sasaran program: (a). Meningkatkan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, (b). Meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air, (c). Meningkatkan kinerja layanan irigasi, (d). Meningkatkan kapasitas pengendalian daya rusak air, (e). Meningkatkan upaya konservasi SDA, (f). Meningkatkan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, (g). Meningkatkan potensi energi dan sumber-sumber air. Hal tersebut akan diwujudkan melalui:

- a. Konservasi sumber daya air yang ditujukan agar terjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air buatan, yang akan dicapai melalui strategi:

- Pembangunan 65 Buah bendungan (65 bendungan *on going*, 49 bendungan baru, dan 29 Buah waduk selesai dibangun), dan pembangunan 1.893 Buah embung/bangunan penampung air lainnya.
 - Rehabilitasi/peningkatan bendungan/waduk sebanyak 46 Buah serta embung dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.175 Buah.
 - Restorasi sungai 55 Buah, revitalisasi danau 17 Buah dan konservasi rawa 29 Buah.
 - Pembangunan pengendali sedimen (*check dam*) sebanyak 180 Buah.
- b. Pendayagunaan sumber daya air** yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, yaitu:
1. Untuk pemenuhan kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari, dicapai melalui strategi:
 - Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku dari 51,44 M³/detik menjadi 118,17 M³/detik atau peningkatan sebesar 67,52 M³/detik.
 - Rehabilitasi fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku sebesar 21,76 M³/detik.
 2. Untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dicapai melalui strategi:
 - Peningkatan suplai irigasi waduk dari 11% menjadi 19% (cakupan dari total area irigasi).
 - Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 1 juta Ha (jaringan irigasi kewenangan pusat yang dibangun sepanjang 10,40 Km, jaringan irigasi rawa yang dibangun 22,82 Km, jaringan irigasi tambak sepanjang 1,58 Ha, jaringan irigasi air tanah 0,197 Km).
 - Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 juta Ha (rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat sepanjang 50,41 Km, jaringan irigasi rawa sepanjang 80,93 Km, jaringan irigasi tambak sepanjang 8,38 Km, jaringan irigasi air tanah sepanjang 0,343 Km).
 - Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi (Operasi dan Pemeliharaan) jaringan irigasi 3,9 juta Ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan 128,28 Km, OP Jaringan Irigasi Air Tanah 0,68 Km, OP Jaringan Irigasi Rawa 112,35 Km, OP Jaringan Irigasi Tambak 14,88 KM).

- c. **Pengendalian daya rusak air** yang ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai, yang akan dicapai melalui strategi:
- Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 530 Km.
 - Normalisasi sungai dan pembangunan/peningkatan tanggul sepanjang 3.080 Km.
 - Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas 200 ribu Ha
- d. Kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, akan difokuskan pada penataan kelembagaan, yang akan dicapai melalui strategi:
- Penyusunan dan penerapan pola dan rencana pengelolaan SDA terpadu yang berbasis wilayah sungai
 - Pengelolaan data dan informasi hidrologi wilayah sungai dan pengelolaan kualitas air pada sumber air
 - Penyusunan dan penerapan pola dan sistem investasi kerjasama pengelolaan SDA
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA
 - Penataan kelembagaan dan benchmarking antar lembaga PSDA
 - Pemberian bimbingan/bantuan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam PSDA
 - Penerbitan rekomendasi teknis terkait perijinan pemanfaatan SDA

C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim

1. Penyelenggaraan Jalan

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dicapai salah satunya dengan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan. Selain itu untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dicapai melalui, sasaran strategis: (1) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan (2) Meningkatnya kemandapan jalan nasional.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui sasaran program (a) Menurunnya waktu tempuh pada koridor utama dari 2,7 Jam per 100 Km menjadi 2,2 Jam per Km; (b) Meningkatnya pelayanan jalan nasional dari 101 Milyar Kendaraan Km menjadi 133 Milyar Kendaraan Km; dan (c) Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan dari 0% menjadi 100%, yang akan dicapai melalui strategi:

- a. Preservasi jalan nasional sepanjang 47.017 Km,
- b. Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 Km (Kawasan Perbatasan Kalimantan, penuntasan *missing link* di Aceh, Kalimantan, Papua, dll.),
- c. Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 Km,
- d. Pembangunan jembatan, sepanjang 29.859 M,
- e. Penggantian jembatan sepanjang 19.951 M,
- f. Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 Km,
- g. Dukungan jalan daerah untuk pengembangan kawasan

D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.

1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

Dengan sasaran program yaitu: (1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat; (2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak; (3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

- a. Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi utama:
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SPAM khusus 1.500 Liter/Detik.
 - Pengembangan SPAM PDAM terfasilitasi untuk 174 PDAM dan 522 kawasan MBR, dan pengembangan SPAM non PDAM terfasilitasi untuk 50 Non PDAM dan 106 Kawasan MBR.
 - Pembinaan penyelenggaraan SPAM/penyehatan sebanyak 13 Laporan.
 - Pendampingan restrukturisasi utang pada 75 PDAM.
 - Fasilitasi Opsi pembiayaan SPAM (perbankan) sebanyak 113 Laporan.
 - Fasilitasi kepengusahaan SPAM (pendampingan KPS dan B to B) sebanyak 112 Laporan.
- b. Pengentasan permukiman kumuh perkotaan :
 - Peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha.
 - Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan di 5.238 Kawasan.
 - Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di 86 Kawasan serta pembangunan dan pengembangan kawasan rawan atau paska bencana di 63 Kawasan.

- c. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar, melalui strategi:
- Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 12 Kota/Kab, penambahan pengolahan air limbah komunal di 5.200 Kawasan, penambahan IPAL skala kawasan sebanyak 200 Kawasan, serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT di 222 Kota/Kab.
 - Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan, yaitu dengan pembangunan TPA di 163 Kawasan, penyediaan fasilitas 3R komunal di 850 Kawasan, fasilitas pengolahan sementara sampah di 45 Kawasan.
 - Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan di 170 Kota/Kab.
- d. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan, melalui strategi:
- Penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 18 NSPK.
 - Dukungan legalisasi Perda Gedung di 139 Kabupaten/Kota dan pendampingan penyusunan 22 Ranperda bangunan Gedung.
 - Penyelenggaraan bangunan Gedung pada 115 Bangunan Gedung dan penyelenggaraan penataan bangunan di 454 Kawasan.

2. Penyediaan Perumahan

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan perumahan adalah Agenda No. 6 yaitu Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan Sub Agenda Prioritas Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sub Agenda prioritas pembangunan nasional tersebut akan dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penyediaan perumahan.

Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi (1) Pengendalian Perumahan Komersial, (2) Penguatan Perumahan Umum, (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan (4) Fasilitas Perumahan Khusus.

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan berdasarkan target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit.

- b. Fasilitas bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 250.000 unit.
- c. Fasilitas bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit.
- d. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit.
- e. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit.

Untuk pencapaian target sesuai RPJMN tersebut dibutuhkan pendanaan sebesar 184.662 trilyun rupiah, sementara alokasi pendanaan berdasarkan RPJMN hanya sebesar 33.090 trilyun rupiah. Terdapat gap pendanaan sebesar 151,563 trilyun.

3. Pembiayaan Perumahan

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitas penyediaan pembiayaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitas penyediaan pembiayaan perumahan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- 1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- 2. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program: Meningkatkan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan; (2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07). Akan dicapai melalui strategi:

- a. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat daerah, yang meliputi:
 - Penyusunan RUU terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau mengintegrasikan Tapera dalam sistem SJSN.
 - Penyusunan RPP dan Raperpres turunan RUU Tapera;
 - Penyusunan RPP turunan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - Penyusunan Peraturan Menteri terkait fasilitas bantuan pembiayaan perumahan;
 - Penyusunan NSPK terkait pembiayaan perumahan.

- b. Peningkatan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak melalui fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan, yang meliputi:
 - Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 900.000 Unit Rumah Umum (rumah tapak, rusunami, dan sewa beli).
 - Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 450.000 Unit Rumah Swadaya;
 - Perluasan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;
 - Pengembangan skema pembiayaan perumahan baik dari sisi *demand* maupun *supply* (kredit konstruksi);
 - Pengembangan skema pembiayaan perumahan untuk MBR sektor formal;
 - Pengembangan skema pemberian bantuan uang muka sebanyak 476.000 unit untuk kelompok MBR tertentu;
 - Mendorong pembentukan lembaga *Multifinace* khusus KPR program;
 - Penyusunan segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;
 - Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimtek kepada Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Badan Usaha (pengembang);
 - Pengembangan lembaga yang mendukung bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor formal;
 - Pengembangan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya;
 - Fasilitasi *linkage* program antara LKB dan LKBB; dan
 - Pemberdayaan lembaga keuangan bank/bukan bank
- c. Peningkatan Peran Bank Pemerintah yang lebih besar dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan;
- d. Peningkatan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
- e. Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi tabungan perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- f. Penempatan dana jangka panjang pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
- g. Peningkatan peran serta pemda, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam pembiayaan perumahan melalui Pemberian bimbingan dan

- g. Peningkatan peran serta pemda, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam pembiayaan perumahan melalui Pemberian bimbingan dan bantuan teknis peningkatan pembiayaan bagi RT MBR

E. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR, dengan sasaran program: Meningkatkan Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, akan dicapai melalui strategi:

- a. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurer* sehingga dapat menjadi *agent of change* untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui:
- Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
 - Peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas;
 - Peningkatan kualitas sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel;
 - Peningkatan kompetensi dan integritas APIP;
 - Peningkatan koordinasi antar aparat pengawasan fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan masyarakat.
- b. Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan permukiman yang bebas KKN, melalui:
- Pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu secara efektif, dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum

permukiman di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Pelaksanaan reviu laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai kualifikasi wajar tanpa persyaratan.
- c. Peningkatan kualitas hasil pengawasan, melalui:
- Pelaksanaan kode etik PNS dan kode etik auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - Penyelenggaraan asistensi, sosialisasi/deseminasi peraturan-peraturan kepada para auditi dan *stakeholder* dalam rangka penerapan *good governance* dan *good corporate governance*, serta fungsi konsultasi
- d. Peningkatan penerapan zona integritas/ wilayah bebas korupsi

2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan dukungan manajemen, sarana dan prasarana adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, akan dicapai melalui sasaran strategis: 1) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas; dan 2) Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana. Adapun untuk mendukung sasaran strategis tersebut, dirumuskan sasaran program, yaitu: 1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR; dan 2) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR.

Untuk mewujudkan hal tersebut akan dicapai melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi:
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pemberdayaan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - Peningkatan kualitas pembinaan pengelolaan dan pengolahan kearsipan, pengembangan Sistem Aplikasi Tata Naskah Elektronik

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, dan Sistim Kearsipan Elektronik;

- Revitalisasi Pelayanan administrasi publik melalui tata laksana administrasi yang baik;
 - Optimalisasi peran Setjen sebagai unit terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan infrastruktur PU dan perumahan rakyat.
- b. Peningkatan citra positif pengelolaan bidang keuangan kementerian, yang meliputi:
- Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan;
 - Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan;
 - Peningkatan kualitas penatausahaan PNBP melalui penetapan NSPK;
 - Peningkatan kualitas Pembinaan Pengusahaan BUMN dan Perum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Peningkatan citra positif kementerian di mata publik, yang meliputi:
- Pengembangan dan penguatan komunikasi publik.
 - Inovasi *campaign* dan strategi komunikasi dan publikasi.
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan BMN, yang meliputi:
- Penetapan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan.
 - Identifikasi peraturan perundangan yang perlu ditindaklanjuti dengan juklak/juknis operasional.
 - Pembinaan kapasitas SDM dan institusi pengelola BMN.
 - Pemrosesan penghapusan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- e. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum, yang meliputi:
- Peningkatan koordinasi dan harmonisasi penyusunan peraturan perundangan,
 - Pengembangan SDM bidang hukum,
 - Penyebarluasan peraturan perundangan.
 - Penanganan perkara/masalah hukum.
 - Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

- Pengelolaan rumah negara yang tertib dan berkepastian hukum.
- f. Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/numerik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian, yang meliputi:
- Peningkatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang handal dalam mendukung proses bisnis Kementerian,
 - Penyediaan Data dan Informasi Spasial dan Statistik dalam mendukung TUSI unit kerja di lingkungan Kementerian.
 - Penyediaan aplikasi sistem informasi yang dapat menyediakan informasi kepada pimpinan (*Decision Support System (DSS)*).
- g. Penciptaan kelembagaan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis, yang meliputi:
- Penyempurnaan desain struktur organisasi;
 - Penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur;
 - Penguatan sinergisitas unit kerja/perangkat di pusat maupun di daerah.
- h. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, yang meliputi:
- Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
 - Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (*Grand Design dan Road Map*);
 - Penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;
 - Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- i. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang meliputi:
- Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai;
 - Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT;
 - Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;
 - Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN;
 - Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan

- Penguatan sistem informasi kepegawaian.
- j. Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang meliputi:
- Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta;
 - Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi;
 - Memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, penetapan *quick wins* pelayanan publik;
 - Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi (menyelaraskan *road map* dengan Renstra);
 - Pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
 - Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta
 - Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat;
- k. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, yang meliputi:
- Penguatan kebijakan *e-government*;
 - Penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM;
 - Penetapan *quick wins* penerapan *e-government*; dan
 - Pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government*.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, *qualified*, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Sasaran

strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas.

Sasaran program yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan, akan dicapai melalui strategi;

(1) Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur, yang meliputi:

a. Penilaian Kompetensi dan Evaluasi, untuk mendapatkan peta kompetensi SDM PUPR, yang terdiri dari:

- Penilaian potensi dan kompetensi serta Unjuk Kerja bagi pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, PPK Satker Mandiri, dan pejabat fungsional umum;
- Pemetaan kompetensi melalui *Assessment Center* bagi pejabat struktural/fungsional;
- Penyusunan dan Review Standar Kompetensi, Kamus Kompetensi Teknis dan Kualifikasi Kompetensi untuk seluruh Unit Kerja di Kementerian PUPR;
- Penyusunan Instrumen Teknis (Unjuk Kerja);
- Penyusunan Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta Sosialisasi Pemanfaatan Instrumen Untuk Asesor;
- Penyusunan Bahan Substantif Kebijakan Penilaian Potensi dan Kompetensi;
- Evaluasi Penilaian Potensi dan Kompetensi serta Unjuk Kerja;
- Penyusunan Database Kompetensi.

b. Pemetaan Karir dan Evaluasi, untuk pengembangan karir SDM PU-PR, yang terdiri dari :

- Penyusunan Program Akselerasi dan Program Reguler SDM PU-PR;
- Penyusunan *Road Map* Karir SDM dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai dan Pejabat;
- Penyusunan *Master Plan/Grand Design* SDM Unggulan dan Materi Program SDM Unggulan;
- Penyusunan Bahan Substantif Kebijakan Peta Karir Individu SDM PUPR;
- Evaluasi Implementasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Pengembangan Karir, serta Evaluasi Kesesuaian Jabatan dan Penempatan SDM PU-PR;

- Proyeksi Peta Karir Individu SDM PU-PR dan Pemutakhiran Data Karir SDM PU-PR;
- Penyusunan Pedoman Konseling Karir Individu SDM PU-PR.

(2) Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu khususnya terhadap kinerja organisasi, yang terdiri dari:

- a. Penyusunan Konsep Kebijakan Pengaturan Penilaian Kinerja serta Juklak, Juknis dan SOP Operasional Penilaian Prestasi Kerja PNS;
- b. Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Aplikasi, serta pemantauan atas Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja;
- c. Evaluasi dan Pemutakhiran Data SKP Pada Aplikasi Sistem Informasi Prestasi Kerja Pegawai (SIPK);
- d. Penyusunan Standar Minimal Kerja Jabatan Pegawai Bidang Teknis dan Jabatan Fungsional Tertentu;
- e. Pemutakhiran Data Kinerja Pegawai;
- f. Evaluasi Kinerja Individu terhadap Kinerja Organisasi.

(3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terdiri dari:

- a. Penyusunan rencana, strategi, program pengembangan kompetensi jangka menengah – tahunan, kebutuhan akan pendidikan kedinasan dan pelatihan berbasis kompetensi disertai peningkatan pengembangan koordinasi dengan satminkal terkait *education dan training plan*;
- b. Penyusunan pola, kurikulum dan modul, pengembangan teknologi dan teknik pendidikan pelatihan SDM PUPR berbasis kompetensi berikut sistem evaluasinya;
- c. Pengembangan pola pelatihan yang berbasis kompetensi, program pelatihan khusus, dan berbasis IT (*E-Learning*) dan kerjasama dengan pembina jabatan fungsional;
- d. Peningkatan kapasitas, profesionalisme, tenaga pengajar dan manajemen penyelenggara/pengelola pelatihan serta kapasitas pemerintah daerah dalam menangani bidang PUPR;

- e. Peningkatan dan pengembangan kerjasama pendidikan kedinasan/ tugas belajar dengan mitra lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri, kerjasama penyelenggaraan pelatihan dengan pemerintah daerah dan lembaga kementerian lain atau non kementerian, dan kerjasama dengan balai-balai diklat;
 - f. Peningkatan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, dan keterkaitan atau kesetaraan sertifikat pelatihan dengan sertifikat profesi untuk keahlian dan keterampilan;
 - g. Pemanfaatan hasil penelitian, lokasi proses pelaksanaan pekerjaan fisik sebagai sarana peningkatan kompetensi;
 - h. Pelaksanaan akreditasi lembaga-lembaga diklat PUPR untuk Diklat Kepemimpinan dan pengadaan barang dan jasa, dan akreditasi bagi lembaga diklat yang akan melaksanakan pelatihan bidang PUPR;
 - i. Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) pada setiap program pelatihan PUPR;
 - j. Pengusulan penetapan program pelatihan tertentu sebagai persyaratan jabatan di bidang PUPR;
 - k. Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM PUPR sebagai hal ASN untuk mendapatkan pelatihan 2 kali dalam 1 tahun secara bertahap;
 - l. Pengembangan secara terus menerus mengenai *data base* sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan (SIMD).
- (4) Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian PUPR, yang terdiri dari:
- a. Penyusunan dan penetapan pedoman teknis formasi, sosialisasi atau penyebarluasan informasi jabatan fungsional;
 - b. Pelaksanaan seleksi dan penempatan, review butir-butir angka kredit pejabat fungsional dan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis;
 - c. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional PUPR dan non PUPR melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis dan fungsional, lokakarya, seminar, magang dan kerjasama baik dengan Pembina jabatan fungsional non PUPR;
 - d. Pelaksanaan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional di Pusat dan Instansi/Daerah;
 - e. Penyusunan organisasi dan etika profesi jabatan fungsional PUPR dan evaluasi penugasan jabatan fungsional;
 - f. Pengkajian tunjangan jabatan fungsional PUPR;

- g. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional PUPR dan non PUPR.

4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

Peran penelitian dan pengembangan sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu dengan melakukan inovasi teknologi, advis teknis, pelatihan teknis tenaga terampil, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan *sustainable*.

Untuk mewujudkan hal tersebut akan dicapai melalui penerapan teknologi dan inovasi teknologi yang telah dihasilkan, serta memberikan layanan teknis berupa advis dan rekomendasi teknis, rekomendasi kebijakan, serta layanan uji laboratorium terhadap permasalahan infrastruktur yang dihadapi. Sasaran strategis Balitbang adalah: Meningkatnya inovasi teknis terapan bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Sasaran strategis tersebut akan dicapai melaluisasaran program: 1) Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh *Stakeholders*; dan 2) Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada *stakeholders*, yang akan dicapai melalui strategi:

- a. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mampu menghasilkan inovasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mencakup:
 - Penerapan IPTEK melalui uji coba skala lapangan secara terbatas yang menghasilkan informasi tentang kemampooterapan teknologi;
 - Inovasi IPTEK untuk meminimalkan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global serta mengantisipasi dampak perubahan iklim dan pemanasan global khususnya pada aspek tata kelola air dan pencemaran udara;
 - Melaksanakan Litbangrap yang menghasilkan IPTEK untuk mencapai MDG's, MP3EI, MP3KI termasuk *Cluster IV*;
 - Diseminasi, sosialisasi dan pelatihan kepada pelatih (*Training of trainer*), yang menghasilkan umpan balik tentang kebutuhan SPMK;
 - Menjadikan Balitbang tidak hanya sebagai *research institute* tetapi juga menjadi *knowledge institute*.
- b. Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalah-masalah lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemampooterapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, yang mencakup:
 - Optimalisasi pemanfaatan pilihan-pilihan IPTEK infrastruktur PU dan permukiman siap pakai oleh para *stakeholders*;
 - Pemanfaatan potensi perguruan tinggi dan asosiasi profesi/tenaga ahli untuk mempercepat penyusunan, pemasyarakatan dan penerapan serta pengawasan pemanfaatan standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil;

- Mendorong stakeholder untuk memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara proporsional dalam setiap pembangunan infrastruktur PU, serta perhatian khusus dalam pembebasan lahan;
- Meningkatkan pelayanan PULSA dan kelaikan/ kelayakan bangunan.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/ atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan Rakyat. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional.

Saat ini efektivitas regulasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang ada belum optimal sehingga masih perlu peningkatan kejelasan peran, tugas fungsi, tanggung jawab dan kewenangan, terlebih dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan rakyat serta perlunya penyelarasan dengan Kerangka Regulasi pada Prolegnas.

Selain itu pada tingkat pemerintah pusat, pemenuhan regulasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berupa Undang-Undang beserta turunannya relatif masih kurang, kejelasan peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan kurang jelas dan menjadi permasalahan pada saat berkoordinasi baik dengan sektor lain maupun daerah.

Integrasi kerangka regulasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ke dalam dokumen perencanaan strategis sangatlah penting untuk memberikan dasar/arah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.

Selain itu kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rincian rencana regulasi yang akan disusun adalah sebagaimana pada Sub Lampiran Tabel 1.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian dan disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penggabungan (*merger*) dua Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, oleh karena itu dalam penyusunan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selain memperhatikan hal tersebut diatas juga mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dan Keputusan Presiden No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2015-2019. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugaskan untuk mendukung dalam upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistem investasi infrastruktur yang memadai, fasilitasi penyediaan rumah, perusahaan penyediaan pembiayaan, membina sumber daya manusia (SDM) konstruksi dan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemberdayaan organisasi dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai pelaksana beberapa program sektor dan lintas sektor yang telah ditetapkan. Kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disusun berdasarkan kepada hubungan internal dan antar lembaga, sumber daya manusia aparatur, tugas, fungsi, kewenangan, peran, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi. Selain itu didasarkan pula pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan serta penyesuaian dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Dalam aspek sumber daya manusia, telah dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Eselon IA) yang akan menangani peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan bidang infrastruktur lainnya, telah dibentuk Direktorat Jenderal Konstruksi sebagai unit kerja yang bersifat strategis nasional yaitu menyiapkan kapasitas industri konstruksi nasional yang meliputi tenaga konstruksi, kontraktor dan konsultan maupun rantai pasoknya baik nasional maupun daerah secara sinergis dalam rangka mempertahankan pasar konstruksi nasional dan merebut pasar konstruksi regional.

Tidak kalah penting telah dibentuk pula Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Eselon IA) untuk menterpadukan perencanaan, pemrograman dan penganggaran bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis pengembangan wilayah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diharapkan mampu mengemban amanat penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam membantu Presiden, terutama untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Adapun untuk menjalankan organisasi tersebut didukung oleh fungsi-fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan oleh 6 (enam) Direktorat Jenderal, serta fungsi-fungsi unsur pembantu pimpinan, unsur pengawas, dan unsur pendukung dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan tugas-tugas lainnya untuk mendukung pimpinan dilakukan oleh Staf Ahli Menteri dan Sekretariat Jenderal. Struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana terlihat pada Gambar 3.7.

MENTERI

STAF AHLI

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL

DIREKTORIAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORIAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORIAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

DIREKTORIAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KETERANGAN :

— : Garis Komando

- - - : Garis Koordinasi

BAB

4

TARGET, KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di kementerian PU dan Perumahan Rakyat secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Nomenklatur program dan kegiatan untuk kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
- b. Pembinaan Penatagunaan SDA
- c. Pembinaan Program dan Anggaran
- d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
- f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak
- g. Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
- h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
- i. Dukungan Manajemen DSDAN
- j. Pembinaan Keamanan Bendungan
- k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya
- l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
- m. P Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
- n. embangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
- o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
- p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu

2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan
- c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
- d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
- e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
- f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
- g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan Bebas Hambatan
- h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
- b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung

- c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
 - d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman
 - f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
 - g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan
- 4. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur**, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Pembinaan Investasi Infrastruktur
 - b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
 - d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
 - e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi
- 5. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
 - b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan
 - c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
 - d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
 - e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
 - f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
 - g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBP)
 - h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)
- 6. Program Pengembangan Perumahan**, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
 - b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dan Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
 - e. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
 - f. Penyediaan Rumah Susun
- 7. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah**, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

- Perumahan Rakyat.
- c. Pengembangan Kawasan Strategis.
- d. Pengembangan Perkotaan.
- e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

B. Program Generik, merupakan program-program kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;
- c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;
- d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum;
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PUDAN Perumahan Rakyat

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ;
- b. Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Lainnya;
- c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik

3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sumber Daya Air;
- b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan
- c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;
- d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan & Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II
- d. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III
- e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV .
- f. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V

5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta Sistem Informasi Manajemen
- b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi serta Pemantauan Kinerja
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
- d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

4.2 TARGET KINERJA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas. Dalam hal ini *base line* capaian pada tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2010-2014.

Target sasaran Kementerian (*outcome-impact*), sasaran program (*outcome*), dan sasaran kegiatan (*output*) adalah sebagaimana pada Sub Lampiran 2.

4.3 KERANGKA PENDANAAN

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan untuk mendukung hal tersebut. Pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah, perlu dipersiapkan kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya baik dari pembiayaan pemerintah maupun pembiayaan yang lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah berdasarkan perkiraan realistis kebutuhan investasi dan kemampuan mendanai.

Meskipun investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah masih relatif belum sebesar dibandingkan dengan kebutuhan lainnya ataupun dibandingkan dengan negara lainnya namun sangat penting sebagai bentuk nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari sisi belanja pemerintah, investasi tersebut perlu dikelola Kementerian PUPR secara cermat agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Demikian pula pembiayaan/investasi dari non pemerintah/ investasi yang berasal dari investasi masyarakat atau swasta sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah diarahkan pada kebijakan pembiayaan terpadu sebagai berikut ;

1. Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah yang sudah ada; dan
2. Pengembangan potensi baru pembiayaan/investasi pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah seperti skema Kerjasama Pemerintah Swasta/Public Private Partnership (KPS/PPP) dan dsb.

Untuk melaksanakan arah, kebijakan, strategi, program dan kegiatan utama pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang maksimal. Perhitungan pendanaan memperhatikan antara lain 1) Alokasi pendanaan Program adalah penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan; 2) Alokasi pendanaan Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi pendanaan Output; dan 3) Alokasi pendanaan Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

Alokasi pendanaan untuk Kementerian PUPR dalam RPJMN selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 659,2 Triliun (belum termasuk anggaran untuk dukungan manajemen). Sedangkan kebutuhan pendanaan berdasarkan perhitungan Kementerian PUPR untuk mendanai pencapaian target RPJMN dan dikaitkan dengan kemampuan dukungan sumber daya adalah sebesar Rp931.585 Triliun (termasuk pendanaan untuk dukungan manajemen). Rincian pendanaan per program per tahun sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Kerangka Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Per Program Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM	ALOKASI (MILIAR RUPIAH)					TOTAL	
		2015	2016	2017	2018	2019	RENSTRA	RPJMN
		RENSTRA	RENSTRA	RENSTRA	RENSTRA	RENSTRA		
1	PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR *)	30.813	62.215	72.407	75.436	75.690	316.562	208.577
2	PENYELENGGARAAN JALAN	57.051	69.948	52.105	55.121	43.952	278.177	278.177
3	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	15.830	24.201	26.855	29.668	31.552	128.107	124.885
4	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7.768	8.780	52.732	55.410	59.973	184.663	33.099
5	PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN **)	342	362	383	406	430	1.924	1.049
6	PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITASI PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR	723	924	1.144	1.365	1.587	5.743	3.558
7	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT	198	214	237	264	297	1.210	1.985
8	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PU-PR	401	512	531	376	406	2.226	
9	PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	105	113	120	129	142	609	414
10	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	520	608	772	790	818	3.508	1.582
11	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	569	625	688	757	832	3.471	2.429
12	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	526	949	1.188	1.303	1.421	5.385	3.467
TOTAL		114.844	169.452	209.162	221.025	217.100	931.585	659.222

Catatan : *) diluar BA 999

Berdasarkan hasil perhitungan Kementerian PUPR terdapat beberapa catatan perbedaan target sasaran dan jumlah alokasi pendanaan, hal tersebut secara umum disebabkan diantaranya: 1) penetapan RPJMN dilaksanakan sebelum ditetapkan Struktur Organisasi baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga terjadi perubahan struktur *outcome*, *output*, indikator dan target yang disesuaikan dengan struktur organisasi baru; 2) terdapat tugas tambahan pada beberapa unit organisasi; dan 3) adanya beberapa target sasaran di RPJMN yang tidak bisa dilaksanakan mengingat kemampuan sumber daya yang belum mencukupi.

Beberapa perbedaan target sasaran dan alokasi pendanaan yang signifikan per unit organisasi adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Untuk program ini ada beberapa perbedaan antara Renstra dan RPJMN yaitu: 1) kebutuhan pendanaan dengan target sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 yang diusulkan Ditjen SDA sebesar Rp 316,56 Trilyun berbeda yaitu turun menjadi Rp 208,58 Trilyun (selisih Rp 107,89 Trilyun), sehingga akan terdapat beberapa target yang ditetapkan tidak dapat tercapai, yaitu antara lain: pembangunan bendungan, embung, pengendali banjir, pengaman pantai, dan rehabilitasi pengendali banjir; 2) adanya perbedaan struktur kegiatan, sasaran kegiatan (*output*) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan struktur yang ada pada RPJMN 2015-2019, hal ini disebabkan penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi. Selain itu terdapat beberapa *output* pada RPJMN 2015-2019 adalah merupakan *outcome* (contoh: *output* jaringan irigasi yang dibangun, pada RPJMN 2015-2019 memiliki satuan hektar (*outcome*), sedangkan pada struktur yang baru memiliki satuan km(*output*), tetapi tetap dapat diukur menggunakan struktur yang baru; 3) terdapat pekerjaan yang merupakan kewenangan Daerah yang pendanaannya diusulkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu pembangunan jaringan irigasi dan bendung kewenangan daerah; 4) terdapat tugas tambahan dari Menteri PUPR yaitu terkait penanganan drainase dan belum dialokasikan, sehingga pagu yang diperlukan dalam Renstra sebesar Rp 316 T.

2. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur

Pada program ini, terdapat beberapa penyesuaian yaitu: 1) level beberapa *outcome* dalam RPJMN berubah menjadi level *output* dalam Renstra; 2) perbedaan sasaran dan satuan antara RPJMN dan Renstra hanyalah perbedaan nomenklatur saja, yaitu sasaran "Jumlah Badan Usaha" pada RPJMN menjadi "Tingkat BUK yang berkualifikasi besar" pada Renstra dengan targetnya dikonversi; 3) kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3,557 T pada RPJMN belum termasuk anggaran untuk komponen dukungan manajemen, sedangkan kebutuhan sesungguhnya adalah sebesar Rp. 5,743 T yang sudah mencakup kebutuhan anggaran untuk target RPJMN dan dukungan manajemen.

3. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan Pembiayaan Perumahan (diluar kebutuhan dana FLPP dan bantuan pembiayaan lainnya) adalah sebesar Rp 1,924 T, sedangkan alokasi dalam RPJMN sebesar Rp 1,050 T. Kebutuhan pendanaan Pembiayaan Perumahan tersebut sudah termasuk dana PNPB dari BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang diperkirakan sebesar Rp 1,132 T. Selain itu kebutuhan pendanaan untuk memfasilitasi pembiayaan 1.350.000 unit rumah yang merupakan target RPJMN yaitu sebesar Rp 164,492 T tidak dialokasikan dalam RPJMN. Hal ini mengingat kebutuhan pendanaan tersebut sudah dialokasikan dalam BA 999.03 dan BA 999.07 karena termasuk dalam kategori investasi pemerintah dan belanja subsidi.



4. Program Pengembangan Perumahan

Terdapat perbedaan alokasi dana yaitu dalam RPJMN sebesar Rp. 33.099 T, padahal untuk mencapai target RPJMN tersebut diperlukan alokasi dana yaitu sebagaimana tertuang dalam Renstra sebesar Rp. 184,663 T.

5. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Perbedaan struktur *output* dan pendanaan dalam Renstra dan RPJMN diantaranya disebabkan: 1) adanya perbedaan struktur organisasi dengan yang tercantum dalam RPJMN yaitu semula terdiri dari 6 unit Eselon II menjadi sebanyak 5 unit Eselon II, hal ini berpengaruh terhadap struktur *output* dan targetnya; 2) adanya muatan pekerjaan pengembangan wilayah strategis termasuk inkubasinya serta fasilitasi pengadaan tanah, hal ini berimplikasi perlunya penambahan dana.

6. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Adanya perbedaan dengan target sasaran RPJMN berdasarkan hasil penajaman yaitu terdapat beberapa penelitian yang melewati siklus penelitian dengan lengkap. Seperti diketahui bahwa proses penyusunan teknologi terdiri dari beberapa tahapan yaitu: naskah ilmiah, model sistem, model fisik, dan *prototype*. Beberapa teknologi dapat dihasilkan langsung dari tahapan naskah ilmiah langsung menjadi *prototype* sehingga hal ini akan mengurangi jumlah *output*.

7. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada program ini terdapat beberapa perbedaan dengan RPJMN diantaranya: 1) Adanya perubahan indikator kinerja dan target kinerja dalam Renstra (tjen matriks perubahan) yang

didasari hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Esalon I dengan Kementerian PAN dan RB pada tanggal 10 Juni 2015 yang mana Indikator Kinerja Itjen terlalu sempit dan sulit untuk diukur, sehingga dikhawatirkan tidak mampu menggambarkan kontribusi kegiatan Esalon II-nya, sehingga perubahan indikator kinerja tersebut berdampak pula pada perubahan nama kegiatan level Esalon II; 2) Adanya perbedaan target pendanaan antara Renstra sebesar Rp. 608,82 milyar dengan RPJMN Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 413,80 milyar, yang disebabkan Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L dalam RPJMN Tahun 2015-2019 digunakan hanya untuk mendanai kegiatan teknis Itjen, diluar kegiatan layanan berupa belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran.

8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terdapat perbedaan pagu anggaran yaitu dalam Renstra sebesar Rp. 4,471T sedangkan dalam RPJMN sebesar Rp. 2,429 T, hal ini disebabkan dalam RPJMN belum memasukan biaya pembayaran gaji, tunjangan, operasional perkantoran serta kegiatan dukungan lainnya. Selain itu terdapat perbedaan struktur nomenklatur kegiatan, sasaran kinerja, indikator serta target pada RPJMN dengan Renstra disebabkan Struktur Organisasi sekarang berbeda dengan struktur yang diusulkan pada waktu penyusunan RPJMN.

9. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pencapaian target sasaran untuk 100-0-100 memerlukan pendanaan sekitar Rp. 832 T. Hal ini merupakan target nasional yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta, namun yang ditangani pusat dalam hal ini oleh Ditjen Cipta Karya untuk menuju target 100-0-100 memerlukan dana sebesar Rp. 128,267 T. Sedangkan target pembangunan 3.500 liter/detik SPAM Regional akan terpenuhi bila proporsi APBD 35% dari APBN

10. Program Penyelenggaraan Jalan

Target dan pendanaan dalam RPJMN sudah sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR yaitu sebesar Rp. 278,177 T.

11. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

Dalam RPJMN, target kedua program ini tidak dijabarkan secara rinci, namun, terdapat perbedaan pagu anggaran yaitu dalam Renstra total kedua program ini adalah Rp. 3,436 T, sedangkan dalam RPJMN adalah Rp. 1,985 T. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur organisasi.

BAB

5

PENUTUP

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di setiap satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mencapai target-target yang telah disepakati perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK.

Pencapaian saran target rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 - 2015 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif (seperti pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan, penataan sistem perizinan, perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan akses ke pasar, dan pemberian insentif pajak bagi kawasan-kawasan yang memiliki prospek baik), mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta.

Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh Pemerintah.

Melalui pelaksanaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat diperlukan.

Akhir kata, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 perlu untuk dijabarkan ke dalam rencana program dan rencana kegiatan unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara konsisten.

SUB LAMPIRAN

1

Kerangka Regulasi

TABEL SB-1 KERANGKA REGULASI

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR					
1.	Penyusunan Peraturan Menteri PUPR sebagai perangkat operasional UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan	Penguat/turunan dari UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan	Kemen PUPR		
a.	Permen PUPR No.04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai	Materi yang diatur : • Kriteria DAS dan WS • Penetapan WS strategi nasional • Perubahan batas wilayah sungai	Kemen PUPR	Kemen LH dan Kehutanan	2015
b.	Permen PUPR No.06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan	Materi yang diatur : • Pemeliharaan sumber air • Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air • Rencana alokasi sumber daya air tahunan dan rinci • Peran masyarakat dan kerja sama	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen BUMN, Kemen ESDM	2015
c.	Permen PUPR No.07/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai	Materi yang diatur : • Tahapan perencanaan • Pelaksanaan • Operasi dan pemeliharaan bangunan • Pengelolaan bangunan pengamanan pantai • Pembiayaan bangunan pengamanan pantai	Kemen PUPR	Kemen Kelautan dan Perikanan	2015
d.	Permen PUPR No.08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi	Materi yang diatur : • Garis sempadan jaringan irigasi • Wewenang dan tanggung jawab • Tata cara penetapan • Pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi • Pengamanan dan pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi • Peran masyarakat	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
e.	Permen PUPR No.09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan SDA	Materi yang diatur : • Penggunaan sumber daya air dan prasarananya sebagai media • Penggunaan air dan daya air sebagai materi • Penggunaan sumber air sebagai media • Penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi • Penggunaan sumber daya air dalam keadaan memaksa dan kepentingan mendesak	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen BUMN, Kemen ESDM	2015

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
	f. Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan	Materi yang diatur : • Pola pengelolaan sumber daya air • Rencana pengelolaan sumber daya air	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
	g. Permen PUPR No.11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut	Materi yang diatur : • Kegiatan operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut • Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut • Pemantauan dan evaluasi kegiatan O dan P jaringan reklamasi rawa pasang surut • Kelembagaan dan SDM • Pembiayaan	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen LH dan Kehutanan	2015
	h. Permen PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Materi yang diatur : • Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
	i. Permen PUPR No.13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air	Materi yang diatur : • Mekanisme penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air • Peran masyarakat • Pendanaan	Kemen PUPR	BNPB	2015
	j. Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi	Materi yang diatur : • Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi • Penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
	k. Permen PUPR No.16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak	Materi yang diatur : • Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
	l. Permen PUPR No.17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi	Materi yang diatur : • Kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi • Susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja • Prosedur pemilihan dan penetapan anggota • Hubungan kerja antar wadah koordinasi • Pembiayaan	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
	m. Permen PUPR No.18/PRT/M/2015 tentang Luran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan	Materi yang diatur : • luran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan • Jenis kegiatan usaha yang dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air • Tata cara dan contoh perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
	n. Permen PUPR No.21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Materi yang diatur : • Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen Kelautan dan Perikanan	2015
	o. Permen PUPR No.23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Kemen Kumham)	Materi yang diatur : • Inventarisasi aset irigasi • Perencanaan pengelolaan aset irigasi • Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi • Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi • Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi	Kemen Kumham, Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015
	p. Permen PUPR No.26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai	Materi yang diatur : • Ketentuan teknis • Kompensasi • Perijinan dan tata laksana	Kemen PUPR	Kemen LH dan Kehutanan	2015
	q. Permen PUPR No.27/PRT/M/2015 tentang Bendungan	Sedang dalam penyusunan	Kemen PUPR	Kemen LH dan Kehutanan	2015
	r. Permen PUPR No.28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, Sempadan Danau	Materi yang diatur : • Penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, termasuk mata air • Pemanfaatan daerah sempadan • Pengawasan pemanfaatan daerah sempadan	Kemen PUPR	Kemen LH dan Kehutanan	2015
	s. Permen PUPR No.29/PRT/M/2015 tentang Rawa	Materi yang diatur : • Penetapan rawa • Pengelolaan rawa • Sistem informasi rawa • Perijinan dan pengawasan • Pemberdayaan masyarakat	Kemen PUPR	Kemen LH dan Kehutanan	2015
	t. Permen PUPR No.30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Sedang dalam penyusunan	Kemen PUPR	Kemen Pertanian	2015

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
	u. Rapermen tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air (Bagian Hukum SDA) (Menunggu RPP Pengusahaan SDA Ditetapkan)	Materi yang diatur : - Tata cara perolehan izin, perubahan izin, dan perpanjangan izin penggunaan sumber daya air - Tata cara perolehan izin, perubahan izin, dan perpanjangan izin pengusahaan sumber daya air - Tata cara pencabutan izin penggunaan sumber daya air atau pengusahaan sumber daya air - Pengawasan pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air atau pengusahaan sumber daya air	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen LH dan Kehutanan, Kemen BUMN, Kemen ESDM	2015
	v. RPP Pengusahaan SDA (Harmonisasi)			Kemen Hukum dan Ham	
	w. Perpres Dewan SDA			Menko Perekonomian	
	x. Kepres Keanggotaan Dewan SDA Nasional			Menko Perekonomian	
2.	Penyusunan rancangan UU pengganti UU No.7 tahun 2004	Sedang dalam penyusunan	Kemen PUPR	Kemen Pertanian, Kemen LH dan Kehutanan	2016
PENYELENGGARAAN JALAN					
3.	Perubahan PP tentang Jalan	Penguat/turunan dari UU 38/2004 tentang Jalan dan PP 34/2006 tentang Jalan, untuk mendefinisikan kembali Jalan Arteri (sesuai fungsi) yang diklasifikasikan berdasarkan kelas jalan (sesuai spesifikasi penyediaan prasarana jalan) menjadi: Arteri Utama (untuk kelas jalan bebas hambatan), dan Arteri lainnya (untuk kelas jalan raya dan jalan sedang)	Kementerian PUPR		2017

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
4.	Perubahan PP tentang Jalan Tol	Penguat/turunan dari UU 38/2004 tentang Jalan dan PP 15/2005 tentang Jalan Tol dan perubahannya, untuk memperkuat organisasi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan mengakomodir pembangunan Jalan Bebas Hambatan secara bertahap dalam rangka percepatan pembangunan jalan bebas hambatan di daerah yang lalu lintasnya masih rendah	Kementerian PUPR		2017
5.	Raperpres tentang Dana Preservasi dan Mekanisme Hibah untuk Jalan Daerah	Penguat/turunan dari UU 38/2004 tentang Jalan dan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian PUPR	• Kemenkeu • Kemendagri • Bappenas	2019
6.	Perubahan Permen PU tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU dan Permen PU tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU	Penguat/turunan dari Perpres 165/2014 tentang Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan Perpres 15/2015 tentang Kementerian PUPR, untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian, khususnya Balai sebagai unit pelaksana teknis	Kementerian PUPR		2015
7.	Rapermen PUPR tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan	Penguat/turunan dari UU 38/2004 tentang Jalan, UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, PP 34/2006 tentang Jalan dan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Kementerian PUPR	• Bappenas	2016
8.	Perubahan Permen PU tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol	Penguat/turunan dari UU 38/2004 tentang Jalan, PP 15/2005 tentang Jalan Tol dan perubahannya, dan Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, termasuk mengakomodir penerapan skema <i>availability payment</i> /PBAS dalam pembangunan jalan bebas hambatan	Kementerian PUPR	• Bappenas	2016
9.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Tata Cara Penetapan Kelas Jalan	Amanat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian PUPR	• Kemenhub • Kepolisian RI • Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/ Kota	2019
10.	Rapermen PUPR tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Nasional	Amanat UU 38/2004 tentang Jalan dan PP 34/2006 tentang Jalan	Kementerian PUPR	• Bappenas	2019

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
11.	Perubahan Permen PU tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan	Amanat Instruksi Presiden 4/2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan meninjau kembali Permen PU 11/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan mengingat sampai dengan akhir 2014 belum ada jalan nasional non-tol yang laik fungsi tanpa syarat	Kementerian PUPR	Kemenhub Kepolisian RI Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota	2017
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN					
12.	RUU Sanitasi	Rancangan Undang-Undang (RUU) Mandiri	Kementerian PUPR	Bappenas, Kemendagri, Kemenkes	2016
13.	RPP tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Penguat /turunan dari UU No.1/2011 dan UU No.20/ 2011 dan UU No. 28/ 2002 Ruang lingkup : a. Pencegahan; b. Peningkatan kualitas; c. Pengadaan tanah; dan Pendanaan.	Kemkoekonomi, Bappenas, Kemen PUPR,	- KemenLH - Kemen.ESDM - Kemen.BUMN Kementerian Perumahan Rakyat	2015
14.	Revisi Permen PU tentang BPPSPAM	Amanat RPP tentang Penyelenggaraan SPAM	Kementerian PUPR	Kemendagri, Kemenkes, Kemen. PUPR	2015
15.	Rapermen PU Tentang Petunjuk Teknis Indikator Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum	Permen Mandiri	Kementerian PUPR	Kemendagri	2015
16.	Rapermen PU tentang Rencana Induk SPAM	Amanat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kementerian PUPR	Kemendagri	2017
17.	Rapermen PU tentang Rencana Pengamanan Air Minum	Amanat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kementerian PUPR		2017
18.	Rapermen PU tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) bagi PDAM	Permen Mandiri	Kementerian PUPR	Kemendagri	2015
19.	Rapermen PU Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah	Permen Mandiri	Kementerian PUPR	KemenLH, Kemenkes	2017

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
20.	Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian PUPR	Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri	2016
21.	Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Permukiman	Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian PUPR		2016
22.	Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan	Permen Mandiri	Kementerian PUPR	Bappenas	2016
23.	Revisi Permen Nomor 45 tahun 2007 tentang Pengelolaan Bangunan Gedung Negara	Amanat Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kementerian PUPR		2015
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN					
24.	RPP tentang Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun	Penguat/turunan dari UU No. 20/2011 dan UU No. 28/2002 Ruang Lingkup pengaturan : a. Bentuk; b. Tata cara penerbitan; c. Kelembagaan; dan Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan	Kemkoekonomi, Bappenas, Kemen PUPR,	- KemenLH - Kemen.ESDM - Kemen.BUMN	2015
25.	RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Penguat /turunan dari UU No.20/ 2011Dan UU No. 28/2002 Ruang Lingkup pengaturan : a. Pembinaan; b. Pelaksanaan pembangunan; c. Pelaksanaan pasca pembangunan; d. Pengendalian; e. Kelembagaan; f. Pemberian bantuan dan kemudahan; dan g. sanksi	Kemkoekonomi, Bappenas, Kemen PUPR,		2015
26.	RPP tentang Rumah Negara	Penguat /turunan dari UU No 1 / /2011 dan UU No.72/1957 dan UU No.17 /2003	Kemkoekonomi, Bappenas, Kemen PUPR,	Kemenkeu	2015
27.	Perubahan PP No 15 Tahun 2004 tentang Perum Perumnas	a. Turunan dari UU No 1 Tahun 2011 b. Dukungan Program Pembangunan Sejuta Rumah	Kemen PUPR	PERUMNAS	

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
28.	Perubahan PP No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Ketenagakerjaan	Dukungan Program Pembangunan Sejuta Rumah	Kemen PUPR	BPJS Ketenagakerjaan	
29.	RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penguat/turunan dari UU nomor 1 tahun 2011 a. Penyelenggaraan Perumahan; b. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; c. Pemeliharaan dan perbaikan; d. Konsolidasi Tanah; dan e. Jenis, besaran, denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif	Kemenko ekonomi, Bappenas, Kemenhukham, Kemen PUPR	Kemenkeu, BPN	2015
30.	Perubahan Keppres No 46 Tahun 1994 tentang Bapertarum PNS	Dukungan Program Pembangunan Sejuta Rumah	Kemen PUPR	BAPERTARUM PNS	
31.	Repermen PUPR tentang Pedoman Teknis Penghunian Sementara dan Penghunian Kembali dalam Peningkatan Kualitas Rumah Susun	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2016
32.	Rapermen PUPR tentang Pengikatan Jual Beli, termasuk juga PPJB Rumah Susun	2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun			
33.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Rumah Susun	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2016
34.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun	Revisi Permenpera No. 21 Tahun 2011	Kemen PUPR		2015
35.	Rapermen PUPR tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Susun	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2016
36.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2016
37.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Permohonan Izin Rencana fungsi dan Pemanfaatan serta Pengubahan Rumah Susun	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2017
38.	Repermen PUPR tentang Perubahan Permenpera No. 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang Dibiayai APBN dan APBD	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2017

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
39.	Repermen PUPR tentang Perubahan Permenpera No. 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rusunawa	Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Kemen PUPR		2016
40.	Repermen PUPR Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Revisi Permenpera No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (d disesuaikan dengan Kebijakan Kemen PUPR)	Kemen PUPR	Kemendagri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/ Kota	2015
41.	Repermen PUPR tentang Pemberian Kemudahan Perizinan dan Tatacara Pencabutan Izin Pembangunan Terhadap Badan Hukum Oleh Pemerintah Daerah.	Penguat/turunan dari UU nomor 1 tahun 2011, Pasal 33 ayat (3). Ruang Lingkup pengaturan : Bentuk kemudahan perizinan Tatacara Pencabutan Izin Pembangunan	Kemen PUPR	Kemendagri, Kemenkumham	2016
42.	Repermen PUPR tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah	Penguat . turunan dari UU nomor 1 tahun 2011, Pasal 42 ayat (3). Ruang Lingkup pengaturan: Subyek dan obyek jual beli rumah Sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah Hak, kewajiban, dan larangan Pembinaan	Kemen PUPR	Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Bank Indonesia	2016
43.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Skala Besar	Penguat / Turunan dari UU nomor 1 tahun 2011 Pasal 37. Ruang Lingkup pengaturan: Penyelenggaraan Perumahan Kriteria Hunian Berimbang	Kemen PUPR	Kemendagri, Kemenkumham	2018
44.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraab Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penguat / turunan dari UU Nomor 1 tahun 2011 Pasal 133 dan UU nomor 20 tahun 2011 Pasal 96 ayat (6). Ruang Lingkup pengaturan : Pelibatan peran masyarakat. Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .	Kemen PUPR	Kemendagri, Kemenkumham	2018
45.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perumahan	Dukungan Pencapaian Renstra Bidang Penyediaan Perumahan	Kemen PUPR	Kemendagri	
46.	Rapermen PUPR tentang Pedoman Pelaksanaan DAK Bidang Perumahan	Dukungan Pencapaian Renstra Bidang Penyediaan Perumahan	Kemen PUPR	Kemendagri	
47.	RPP terkait pendayagunaan atau pemberdayaan sumber-sumber pembiayaan perumahan	Memenuhi amanat ayat 4 pasal 123 dan ayat 4 pasal 126 UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR	KemenKeu, Kemenkum-HAM	2015
48.	Rapermen PU-PR terkait turunan amanat PP pendayagunaan atau pemberdayaan sumber-sumber pembiayaan perumahan	Memenuhi amanat PP pendayagunaan atau pemberdayaan sumber-sumber pembiayaan perumahan	Kemen PU PR		2015 s/d 2019

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
49.	Raperpres tentang perubahan Perpres No. 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan	Dukungan pencapaian Renstra Ditjen Pembiayaan Perumahan	Kemen PU PR	PT. SMF	2015
50.	Raperpres tentang Taperum-PNS	Dukungan pencapaian Renstra Ditjen Pembiayaan Perumahan	Kemen PU PR	Bapertarum-PNS	2015
51.	Rapermen PU-PR terkait Taperum -PNS	Dukungan pencapaian Renstra Ditjen Pembiayaan Perumahan	Kemen PU PR	Bapertarum-PNS	2016 s/d 2019
52.	Rapermen PU-PR mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) i. Permen tentang skim dan mekanisme ii. Permen tentang petunjuk pelaksanaan	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR		2015
53.	RaKepmen PU-PR mengenai proporsi pendanaan Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera	Dukungan pencapaian Renstra Ditjen Pembiayaan Perumahan	Kemen PU PR		2015
54.	Rapermen PU-PR mengenai Bantuan Uang Muka	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR		2015
55.	Rapermen PU-PR mengenai Kredit Pembangunan/Perbaikan Rumah Secara Swadaya bagi MBR i. Permen tentang skim dan mekanisme ii. Permen tentang petunjuk pelaksanaan	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR		2016
56.	RUU Tabungan Perumahan	Memenuhi amanat pasal 124 UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR	DPR, Kemenkum-HAM, Kemenkeu	2016
57.	RPP terkait amanat UU Tapera	Memenuhi amanat UU Tapera	Kemen PU PR	KemenKeu, Kemenkum-HAM	2016 s/d 2018
58.	Raperpres terkait amanat UU Tapera	Memenuhi amanat UU Tapera	Kemen PU PR	KemenKeu, Kemenkum-HAM	2017 s/d 2019

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
59.	Rapermen PU-PR mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejahtera susun bagi MBR i. Permen tentang skim dan mekanisme ii. Permen tentang petunjuk pelaksanaan	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pasal 95 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rusun	Kemen PU PR		2016
60.	Rapermen PU-PR mengenai Kredit Kontruksi untuk pengadaan rumah bagi MBR i. Permen tentang skim dan mekanisme ii. Permen tentang petunjuk pelaksanaan	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR		2016
61.	Rapermen PU-PR mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui mekanisme sewa beli bagi MBR i. Rapermen tentang skim dan mekanisme ii. Rapermen tentang petunjuk pelaksanaan	Ayat 5 Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kemen PU PR		2017
62.	Penyusunan NSPK Bidang Pembiayaan Perumahan	Amanat Pasal 118 ayat 2, pasal 122 ayat 1, pasal 123 ayat 2 dan 3 UU 1 tahun 2011	Kemen PU PR		2015 s/d 2019
PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITASI PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR					
63.	Revisi UU Jasa Konstruksi	Masuk dalam agenda Prolegnas DPR RI tahun 2015	Kemen PUPR		2015-2016
64.	Rapermen PUPR tentang Pembinaan Konstruksi	Amanat/turunan UU Jasa Konstruksi dan operasionalisasi PP No.30/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Kemen PUPR		2016
65.	Rapermen PUPR tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Dibutuhkannya pedoman dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan (CPD)	Kemen PUPR		2015
66.	Rapermen PUPR tentang perubahan ketiga terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 tahun 2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi	Dibutuhkannya Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 tahun 2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi	Kemen PUPR		2015
67.	Rapermen PUPR tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Terintegrasi Rancang Dan Bangun	Dibutuhkannya pedoman untuk pengadaan terintegrasi rancang dan bangun (Design and Build) proyek konstruksi	Kemen PUPR		2015

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
68	Rapermen PUPR tentang standar dan pedoman pengadaan terintegrasi berbasis kinerja	Dibutuhkannya pedoman untuk pengadaan terintegrasi berbasis kinerja (Performance-based contract) proyek konstruksi	Kemen PUPR		2015-2016
69.	Rancangan peraturan tentang Standar dan kriteria dokumen perusahaan infrastruktur sektor jalan/jembatan tol	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2016
70	Rancangan peraturan tentang Standar dan kriteria penyelesaian sengketa investasi infrastruktur	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2016
71.	Rancangan Pedoman transaksi sistem elektronik terintegrasi bidang jalan	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2016
72.	Rancangan Pedoman Penentuan Variabel Investasi dalam Perusahaan Infrastruktur	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2017
73.	Rancangan Pedoman Prinsip Perusahaan Infrastruktur Ekonomi	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2018
74.	Rancangan Pedoman penerapan transaksi pra-bayar pada pengumpulan tarif infrastruktur publik	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2019
75.	Rancangan Pedoman pengembalian aset pemerintah dalam KPS infrastruktur	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2019
76.	Rancangan Pedoman Pelaksanaan Penjajakan Pasar Investasi Infrastruktur PU-PR	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2019
77.	NSPK bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan perusahaan infrastruktur	Kemen PUPR		2015 – 2019
78.	NSPK bidang penyelenggaraan jasa konstruksi	Dibutuhkannya pedoman terkait penyelenggaraan jasa konstruksi	Kemen PUPR		2015 – 2019
79.	NSPK bidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Dibutuhkannya pedoman terkait pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Kemen PUPR		2015 – 2019
80.	NSPK bidang kompetensi dan produktivitas konstruksi	Dibutuhkannya pedoman terkait kompetensi produktivitas konstruksi	Kemen PUPR		2015 – 2019

SUB LAMPIRAN 2

Matriks Program, Kegiatan dan
Pendanaan

TABEL SB -2.1. MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TUJUAN 1

TUJUAN 1 : Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
SASARAN STRATEGIS							
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan						
	(1)	Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan	%	35 WPS	80	85	90
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.						
	(1)	Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR	%	7 Pulau	80	85	90
3	Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional						
	(1)	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	%		75	78	82
PROGRAM 1 : PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH							
SASARAN PROGRAM							
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan						
	1	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan	%	35 WPS	78	84	89
	2	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS	%	35 WPS	78	83	89
	3	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	%	35 WPS	76	82	88

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	95	100	100						
	95	100	100						
	86	90	90						
				525.500	948.840	1.187.616	1.302.616	1.420.616	5.385.189
	95	100	100						
	94	100	100						
	94	100	100						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan						
	1	Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS	%	35 WPS	80	85	90
	2	Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman	%	35 WPS	79	84	90
KEGIATAN 1.1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH							
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN							
SASARAN KEGIATAN							
1	Layanan Administrasi Kepegawaian		Laporan	Jakarta	7	8	7
	1	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	Laporan	Jakarta	7	8	7
2	Layanan Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data Informasi		Laporan	Jakarta	7	9	10
	1	Jumlah kegiatan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja	Laporan	Jakarta	4	4	6
	2	Jumlah layanan data informasi	Laporan	Jakarta	3	5	4
3	Layanan Hukum,Kerjasama, dan Informasi		Laporan	Jakarta	9	9	12
	1	Jumlah layanan produk dan bantuan hukum	Laporan	Jakarta	3	3	4
	2	Jumlah fasilitasi kerjasama	Laporan	Jakarta	3	3	4
	3	Jumlah layanan informasi	Laporan	Jakarta	3	3	4
4	Layanan Administrasi Keuangan, Umum dan BMN		Laporan	Jakarta	8	9	10
	1	Jumah layanan administrasi keuangan, umum dan BMN	Laporan	Jakarta	8	9	10
5	Layanan Perkantoran		Laporan	Jakarta	4	4	4
	1	Jumlah layanan perkantoran	Laporan	Jakarta	4	4	4

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	95	100	100						
	95	100	100						
				140.342	165.000	180.000	190.000	200.000	875.342
	11	12	44	11.475	14.000	16.100	18.515	21.292	81.382
	11	12	44						
	11	12	48	10.730	13.000	14.950	17.193	19.771	75.644
	6	7	27						
	5	5	21						
	13	14	54	21.533	25.000	28.750	29.601	30.041	134.925
	4	4	17						
	5	5	19						
	4	5	18						
	11	12	50	9.660	11.109	12.775	14.692	16.895	65.131
	11	12	50						
	4	4	20	86.944	101.891	107.425	110.000	112.000	518.260
	4	4	20						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 1.2: PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							
UNIT ORGANISASI: PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							
SASARAN KEGIATAN							
1	Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah		Dokumen Rumusan Pedoman	Jakarta	4 1	3 4	4 3
	1	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	4	3	4
	2	Jumlah pedoman perencanaan dan pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi penerapannya	Pedoman	Jakarta	1	4	3
2	Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR		Dokumen	Jakarta	4	9	11
	1	Jumlah dokumen rencana strategis serta rumusan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	4	9	11
3	Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau		Dokumen	Jakarta	13	12	12
	1	Jumlah dokumen rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	13	12	12
4	Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat		laporan	Jakarta	0	2	4
	1	Jumlah laporan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disebarluaskan	laporan	Jakarta	0	2	4
5	Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan		laporan	Jakarta	4	4	4

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				72.380	100.000	137.154	147.154	157.154	613.842
	4	4	19	10.500	13.500	18.000	19.576	18.000	79.576
	3	3	14						
	4	4	19						
	3	3	14	3.400	14.000	19.623	20.160	24.192	81.375
	12	12	48						
	12	12	48	30.600	29.000	30.450	31.973	32.515	154.537
	13	14	64						
	13	14	64	0	3.000	5.200	5.720	6.292	20.212
	4	4	14						
	4	4	14	7.500	12.000	14.231	15.111	16.079	64.921
	4	4	20						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
6	1	Jumlah fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan	laporan	Jakarta	4	4	4	
	Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR		Dokumen	Jakarta	4	1	5	
	1	Jumlah dokumen rekomendasi hasil analisis kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur PUPR	Dokumen	Jakarta	4	1	5	
7	Program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan yang telah disinkronisasi		Dokumen	Jakarta	1	1	1	
	1	Jumlah dokumen program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang sinkron	Dokumen	Jakarta	1	1	1	
8	Skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi		Dokumen	Jakarta	1	2	2	
	1	Jumlah dokumen rumusan skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	1	2	2	
9	Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat		laporan	Jakarta	0	1	1	
	1	Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholders	laporan	Jakarta	0	1	1	
10	Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS		Dokumen	Jakarta	0	1	4	
	1	Jumlah dokumen rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan pemrograman, penganggaran dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS yang dilaksanakan	Dokumen	Jakarta	0	1	4	
11	Layanan perkantoran		Laporan	Jakarta	3	7	7	
	1	Jumlah laporan layanan perkantoran yang dilaksanakan	Laporan	Jakarta	3	7	7	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	4	20						
	5	5	20	12.000	3.000	15.000	16.500	18.150	64.650
	5	5	20						
	1	1	5	2.000	4.000	4.400	4.840	5.324	20.564
	1	1	5						
	2	2	9	2.000	6.000	6.600	7.260	7.986	29.846
	2	2	9						
	1	1	4	0	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
	1	1	4						
	4	4	13	0	2.000	8.800	9.680	10.648	31.128
	4	4	13						
	7	7	31	4.380	10.500	11.550	12.705	13.976	53.111
	7	7	31						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 1.3: PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							
UNIT ORGANISASI : PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							
SASARAN KEGIATAN							
1	Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR		Pedoman	Jakarta	2	3	7
	1	Jumlah pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	Pedoman	Jakarta	2	3	7
2	Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS		dokumen rumusan	Jakarta	51	26	30
	1	Jumlah rumusan program tahunan untuk 35 WPS yang sinkron	dokumen rumusan	Jakarta	51	26	30
3	Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR		dokumen	Jakarta	5	15	19
	1	Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholders	dokumen	Jakarta	5	15	19
4	Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR		dokumen rekomendasi	Jakarta	2	3	27
	1	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR yang disusun	dokumen rekomendasi	Jakarta	2	3	27
5	Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR		dokumen	Jakarta	2	9	10
	1	Jumlah dokumen kebijakan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR yang dilaksanakan	dokumen	Jakarta	2	9	10
6	Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR		dokumen	Jakarta	2	6	7

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				89.664	120.000	162.154	177.154	192.154	741.126
	8	9	29	2.750	4.000	8.000	9.000	10.000	33.750
	8	9	29						
	31	32	170	57.384	63.750	60.000	62.000	63.000	306.134
	31	32	170						
	21	23	83	10.000	18.750	20.000	21.000	25.000	94.750
	21	23	83						
	32	34	98	4.750	4.000	33.000	41.000	45.000	127.750
	32	34	98						
	11	12	44	6.900	16.250	20.000	21.000	23.000	87.150
	11	12	44						
	8	9	32	2.100	7.250	7.000	8.000	10.000	34.350

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	1	Jumlah dokumen data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR yang disebarluaskan	dokumen	Jakarta	2	6	7	
7	Layanan Perkantoran		%	Jakarta	100	100	100	
	1	Tingkat layanan perkantoran	%	Jakarta	100	100	100	
KEGIATAN 1.4: PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS								
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS								
SASARAN KEGIATAN								
1	Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR		Pedoman Teknis Dokumen	Jakarta	3 2	3 2	4 2	
	1	Jumlah pedoman teknis perencanaan dan pemrograman keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur PUPR yang disusun dan difasilitasi	Pedoman Teknis	Jakarta	3	3	4	
	2	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	2	2	2	
3	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR		Rencana	Jakarta	9	9	10	
	1	Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	Rencana	Jakarta	21	21	16	
4	Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat		laporan	Jakarta	2	2	2	
	1	Jumlah laporan layanan data informasi	laporan	Jakarta	2	2	2	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	9	32						
	100	100	100	5.780	6.000	14.154	15.154	16.154	57.242
	100	100	100						
				111.210	313.840	408.308	458.308	508.308	1.799.974
	4	4	15	20.957	9.020	12.420	14.029	16.736	73.162
	3	3	10						
	4	4	18						
	3	3	12						
	11	11	99	37.431	48.000	63.641	65.600	67.000	281.672
	20	21	99						
	2	2	10	3.500	10.000	14.230	17.000	20.000	64.730
	2	2	10						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
5	Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun		Rencana Teknis Area Inkubasi	Jakarta	7 4	7 4	7 7
	1	Jumlah rencana teknis area inkubasi pada kawasan strategis yang ditetapkan	Rencana Teknis	Jakarta	7	7	7
	2	Jumlah area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun	Area Inkubasi	Jakarta	4	4	7
6	Fasilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 35 WPS		lokasi	Jakarta	20	20	29
	1	Jumlah pencadangan tanah yang difasilitasi	lokasi	Jakarta	2	2	2
	2	Jumlah pengadaan tanah yang difasilitasi	lokasi	Jakarta	2	2	2
	3	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk area inkubasi di 35 WPS	lokasi		18	18	27
7	Layanan Perkantoran		Laporan	Jakarta	5	5	5
	1	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan	Laporan	Jakarta	5	5	5
KEGIATAN 1.5: PENGEMBANGAN PERKOTAAN							
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN PERKOTAAN							
SASARAN KEGIATAN							
1	Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat		Dokumen	Jakarta	10	4	4
	1	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	10	4	4

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	9	31	25.440	200.000	235.177	266.000	292.519	1.019.136
	7	9	27						
	8	9	38						
	7	9	31						
	33	37	139	14.800	37.738	66.050	73.971	89.350	281.909
	2	2	10						
	2	2	10						
	31	35	129						
	5	5	25	9.082	9.082	16.790	21.708	22.703	79.365
	5	5	25						
				111.904	250.000	300.000	330.000	363.000	1.354.904
	4	4	26	23.074	45.937	54.471	60.756	67.636	251.874
	4	4	26						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
2	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat		dokumen	Jakarta	17	22	21	
	1	Jumlah dokumen rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	dokumen	Jakarta	17	22	21	
3	Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat		laporan	Jakarta	2	2	2	
	1	Jumlah layanan data dan informasi	laporan	Jakarta	2	2	2	
4	Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat		dokumen rumusan	Jakarta	1	2	2	
	1	Jumlah rumusan progam yang disinkronkan	dokumen rumusan	Jakarta	1	2	2	
5	Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun		Rencana Teknis	Jakarta	5	5	5	
			Area Inkubasi		13	12	12	
	1	Jumlah dokumen rencana teknis area inkubasi pada kawasan perkotaan yang disusun dan ditetapkan	Rencana Teknis	Jakarta	5	5	5	
	2	Jumlah area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun	Area Inkubasi	Jakarta	13	12	12	
6	Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat		Pedoman	Jakarta	3	4	6	
	1	Jumlah pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Pedoman	Jakarta	3	4	6	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	21	21	102	42.119	115.000	125.000	135.000	139.515	556.634
	21	21	102						
	2	2	10	4.135	4.961	5.953	7.144	8.572	30.765
	2	2	10						
	2	2	9	2.330	4.495	6.849	8.274	10.911	32.859
	2	2	9						
	5 12	5 11	25 60	20.192	55.668	79.000	84.354	95.000	334.214
	5	5	25						
	12	11	60						
	6	6	25	4.955	10.140	12.168	14.602	17.522	59.387
	6	6	25						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
7	Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat		laporan	Jakarta	9	9	9	
	1	Jumlah Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	laporan	Jakarta	9	9	9	
8	Layanan Perkantoran		laporan	Jakarta	1	1	1	
	1	Jumlah layanan perkantoran	laporan	Jakarta	1	1	1	

PROGRAM 2 : PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITASI PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR

SASARAN PROGRAM

1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional						
	1 Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	%		3	3	3	
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar						
	1 Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi Besar	%		18	18	18	
3	Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak						
	1 Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi	%		8	8	8	
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten						
	1 Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%		2	4	5	
5	Meningkatnya utilitas produk unggulan						
	1 Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	%		3	3	3	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	11	48	13.299	11.639	13.967	16.760	20.112	75.777
	10	11	48						
	1	1	5	1.800	2.160	2.592	3.110	3.732	13.394
	1	1	5						
				722.900	923.769	1.143.958	1.365.155	1.587.413	5.743.195
	3	3	15						
	18	18	90						
	8	8	40						
	7	9	27						
	3	3	15						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 2.1: PEMBINAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR								
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pengaturan pembinaan investasi infrastruktur		Draft NSPK		4	4	4	
	1	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur	Draft NSPK		4	4	4	
2	Pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur dan pengelolaan risiko		Profil		4	4	4	
	1	Jumlah profil pembinaan investasi infrastruktur dan pengelolaan risiko	Profil		4	4	4	
3	Pengelolaan administrasi perkantoran		Laporan Bulan Layanan		13	13	13	
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan		13	13	13	
KEGIATAN 2.2 : PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI								
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pengaturan pembinaan penyelenggaraan konstruksi		Draft NSPK		7	7	7	
	1	Jumlah draft NSPK pembinaan penyelenggaraan konstruksi	Draft NSPK		7	7	7	
2	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi		Profil		5	5	5	
	1	Jumlah profil pembinaan dan penyelenggaraan konstruksi	Profil		5	5	5	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				47.550	49.928	52.424	55.045	57.797	262.744
	4	4	20						
	4	4	20						
	4	4	20						
	4	4	20						
	13	13	65						
	13	13	65						
				60.176	63.185	66.344	69.662	73.145	332.512
	7	7	35						
	7	7	35						
	5	5	25						
	5	5	25						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
3	Pengelolaan administrasi perkantoran		Laporan Bulan Layanan		13	13	13	
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan		13	13	13	
KEGIATAN 2.3: PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI								
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pengaturan pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi		Draft NSPK		8	8	8	
	1	Jumlah draft NSPK pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Draft NSPK		8	8	8	
2	Pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi		Profil		8	8	8	
	1	Jumlah profil pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Profil		8	8	8	
3	Pengelolaan administrasi perkantoran		Laporan Bulan Layanan		13	13	13	
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan		13	13	13	
KEGIATAN 2.4: PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI								
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pengaturan pembinaan kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi		Draft NSPK	Jakarta	26	30	36	
	1	Jumlah draft NSPK kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	Draft NSPK	Jakarta	26	30	36	
2	Pemantauan dan evaluasi kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi		Profil	Jakarta	3	3	3	
	1	Jumlah profil kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	Profil	Jakarta	3	3	3	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	13	13	65						
	13	13	65						
				57.065	59.918	62.914	66.060	69.363	315.319
	8	8	40						
	8	8	40						
	8	8	40						
	8	8	40						
	13	13	65						
	13	13	65						
				76.811	80.652	84.684	88.919	93.365	424.430
	36	27	155						
	36	27	155						
	3	3	15						
	3	3	15						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
3	Pengelolaan administrasi perkantoran		Laporan Bulan Layanan	Jakarta	13	13	13	
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	Jakarta	13	13	13	
KEGIATAN 2.5: KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI								
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi		Profil		1	1	1	
	1	Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi	Profil		1	1	1	
2	Pengelolaan administrasi perkantoran		Laporan Bulan Layanan		13	13	13	
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan		13	13	13	
KEGIATAN 2.6: PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI								
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI								
SASARAN KEGIATAN								
1	Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi		Dokumen/ Laporan		5	5	5	
	1	Jumlah layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi	Dokumen/ Laporan		5	5	5	
2	Pengelolaan administrasi perkantoran		Laporan Bulan Layanan		13	13	13	
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan		13	13	13	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	13	13	65						
	13	13	65						
				367.965	551.087	752.641	954.273	1.155.987	3.781.953
	1	1	5						
	1	1	5						
	13	13	65						
	13	13	65						
				113.333	119.000	124.950	131.197	137.757	626.236
	5	5	25						
	5	5	25						
	13	13	65						
	13	13	65						

TABEL 2.2. MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TUJUAN 2

TUJUAN 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
SASARAN STRATEGIS									
1	Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi		%		45,83	50,33	54,83	59,33	
	(1)	Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi	%		45,83	50,33	54,83	59,33	
2	Meningkatnya ketahanan air		%		28,95	35,00	45,00	59,00	
	(2)	Tingkat dukungan ketahanan air nasional	%		28,95	35,00	45,00	59,00	
SASARAN PROGRAM									
1	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku								
	1	Peningkatan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	m3/detik		8,65	12,00	11,87	13,00	
	2	Pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	m3/detik		8,20	1,70	2,29	2,96	
	3	Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	m3/detik		49,23	57,88	69,88	81,75	
2	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air								
	1	Peningkatan kapasitas tampung sumber air	juta m3		1.024,59	-	102,61	146,62	
	2	Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air	juta m3		376,80	766,40	752,80	756	
	3	Terjaganya kapasitas tampung sumber air	juta m3		15.396	15.969	15.992	16.395	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	63,43	63,43						
	63,43	63,43						
	67,60	67,60						
	67,60	67,60						
			30.812.502	62.215.168	72.407.428	75.436.287	75.690.395	316.561.780
	22,00	67,52						
	6,84	22,00						
	94,75	94,75						
	524,15	1.797,97						
	758	3.410						
	17.097	17.096,80						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
3	Meningkatnya kinerja layanan irigasi								
	1	Peningkatan layanan jaringan irigasi	Hektar		181.282,79	244.962,37	263.184,86	236.847,95	
	2	Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi	Hektar		477.960,57	691.490,27	676.102,61	644.548,04	
	3	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	Hektar		3.142.532,18	3.345.174	3.424.361,90	3.519.694	
4	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air								
	1	Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Hektar		-	-	-	-	
5	Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air								
	1	Peningkatan persentase kawasan / lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas	%		20	20	20	20	
6	Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA								
	1	Peningkatan indeks RBO (indeks)	indeks		2,24	2,59	2,94	3,29	
7	Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air								
	1	Peningkatan potensi energi sumber air	MW		113,19	0,00	1,14	5,92	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	216.705,03	1.142.983						
	509.898,51	3.000.000						
	3.604.791	3.604.791,23						
	-	200.000						
	20	100						
	4,00	4,00						
	22,27	142,52						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK LAINNYA									
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA									
SASARAN KEGIATAN									
1	NSPK penyusunan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan		N/S/P/K		5	5	5	5	
	1	Jumlah NSPK penyusunan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan	N/S/P/K		5	5	5	5	
2	Layanan teknis penyusunan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan		Pemda/ Masyarakat/ Dunia Usaha		-	10	10	10	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/ dunia usaha yang diberi bimbingan teknis penyusunan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan	Pemda/ Masyarakat/ Dunia Usaha			10	10	10	
3	Layanan dukungan manajemen penyusunan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan		BBWS/BWS						
	1	Layanan dukungan manajemen penyusunan regulasi dan pendampingan hukum, serta administrasi pengelolaan SDM dan ortala, BMN, keuangan, informasi publik, dan lahan	BBWS/BWS						
4	Layanan perkantoran		Bulan						
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
			565.306,92	577.969,80	618.427,68	661.717,62	708.037,85	3.131.459,87
	5	25	478,77	1.000	1.100	1.200	1.300	5.078,77
	5	25						
	10	40	-	2.000	3.000	4.000	5.000	14.000
	10	40						
			58.626	64.143	74.093	100.867	129.591	427.319
			506.202	510.827	540.235	555.651	572.147	2.685.062
	12	12						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
KEGIATAN 2: PEMBINAAN PENATAGUNAAN SDA									
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SDA									
SASARAN KEGIATAN									
1	NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu		N/S/P/K		1	1	1	1	
	1	Jumlah NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu	N/S/P/K		1	1	1	1	
2	Layanan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu		BBWS/BWS		33	33	33	33	
	1	Jumlah BBWS/BWS yang diberikan dukungan manajemen tata kelola pengelolaan SDA terpadu	BBWS/BWS		33	33	33	33	
3	Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu		Pemda/ Masyarakat/ Dunia Usaha		-	5	5	5	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/ dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan pengelolaan SDA WS, pengelolaan hidrologi WS dan kualitas air sumber air, pembinaan kelembagaan, penyusunan sistem pola investasi serta pembinaan pengendalian pemanfaatan SDA	Pemda/ Masyarakat/ Dunia Usaha			5	5	5	
4	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	
KEGIATAN 3: PEMBINAAN PROGRAM DAN ANGGARAN									
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN SDA									
SASARAN KEGIATAN									
1	NSPK perencanaan dan pemrograman SDA		N/S/P/K		1	1	1	1	
	1	Jumlah NSPK perencanaan dan pemrograman SDA	N/S/P/K		1	1	1	1	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
			106.658,81	102.913,57	70.117,52	77.825,74	86.073,55	443.589,18
	1	5	9.143,65	10.058	11.064	12.170	13.387	55.823
	1	5						
	33	33	80.740,16	44.023	9.801	24.544	27.394	186.502
	33	33						
	5	20	-	30.380	28.955	18.784	20.732	98.851
	5	20						
	12	12	16.775	18.453	20.298	22.328	24.560	102.413
	12	12						
			74.471,86	76.140,03	81.469,84	87.172,72	93.274,81	412.529,27
	1	5	536,37	1.000	1.100	1.210	1.331	5.177,37
	1	5						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
2	Layanan teknis perencanaan dan pemrograman SDA		Pemda/ Masyarakat/ Dunia Usaha		-	5	5	5	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/ dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan pemrograman dan penganggaran	Pemda/ Masyarakat/ Dunia Usaha		-	5	5	5	
3	Layanan dukungan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA		BBWS/BWS						
	1	Jumlah BBWS/BWS yang diberikan dukungan manajemen perencanaan dan pemrograman SDA	BBWS/BWS						
4	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	
KEGIATAN 4: PEMBINAAN WADUK, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA									
UNIT ORGANISASI: PUSAT BENDUNGAN									
SASARAN KEGIATAN									
1	NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya		N/S/P/K		1	1	1	1	
	1	Jumlah NSPK bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	N/S/P/K		1	1	1	1	
2	Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/ dunia usaha yang diberi bimbingan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha			5	5	5	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	20	-	2.000	3.000	4.000	5.000	14.000
	5	20						
			48.282	44.922	46.330	47.818	49.385	236.737
	12	12	25.653	28.218	31.040	34.144	37.559	156.615
	12	12						
			-	65.247,48	86.809,70	90.820,38	95.490,21	338.367,76
	1	5	-	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
	1	5						
	5	20	-	12.270	16.021	17.123	18.300	63.713
	5	20						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
3	Layanan dukungan manajemen dan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya		BBWS/BWS		33	33	33	33	
	1	Jumlah BBWS/ BWS yang diberi layanan dukungan manajemen dan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	BBWS/BWS		33	33	33	33	
4	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	
KEGIATAN 5: PEMBINAAN KONSERVASI, PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI									
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI									
SASARAN KEGIATAN									
1	NSPK pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai		N/S/P/K		1	1	1	1	
	1	Jumlah NSPK pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	N/S/P/K		1	1	1	1	
2	Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha			5	5	5	
3	Layanan teknis pemenuhan SPM drainase di daerah		Pemda		-	20	20	20	
	1	Jumlah Pemda yang diberi bimbingan/ bantuan teknis dalam pemenuhan SPM drainase di daerah	Pemda			20	20	20	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	33	33	-	28.629	37.383	39.953	42.699	148.665
	33	33						
	12	12		22.348	31.206	31.324	31.829	116.708
	12	12						
			108.147,77	90.348,49	112.405,82	116.744,23	121.491,32	549.137,62
	1	5	-	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
	1	5						
	5	20	-	2.000	3.000	4.000	5.000	14.000
	5	20						
	20	80		2.000	3.000	4.000	5.000	14.000
	20	80						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
4	Layanan dukungan manajemen dan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai		BBWS/BWS		33	33	33	33	
	1	Jumlah BBWS/ BWS yang diberi layanan dukungan manajemen dan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	BBWS/BWS		33	33	33	33	
5	Layanan teknis desain pengendalian banjir		BBWS/BWS		33	33	33	33	
	1	Jumlah BBBWS/ BWS yang diberi bimbingan/ bantuan teknis desain pengendalian banjir	BBWS/BWS		33	33	33	33	
6	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	
KEGIATAN 6: PEMBINAAN IRIGASI, RAWA, DAN TAMBAK									
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA									
SASARAN KEGIATAN									
1	NSPK irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak		N/S/P/K		1	1	1	1	
	1	Jumlah NSPK irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak	N/S/P/K		1	1	1	1	
2	Layanan teknis irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha			5	5	5	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	33	33	33.926	52.348	66.206	66.824	67.829	287.134
	33	33						
	33	33		2.000	3.000	4.000	5.000	14.000
	33	33						
	12	12	74.222	30.000	35.000	35.500	36.000	210.722
	12	12						
			172.112,526	121.010,645	147.672,565	158.009,645	169.070,320	767.875,702
	1	5	3.943,78	2.000	2.200	2.420	2.662	13.226
	1	5						
	5	20	-	43.642	43.642	46.677	49.922	183.883
	5	20						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
3	Layanan teknis pemenuhan SPM irigasi di Daerah		Pemda		-	5	5	5	
	1	Jumlah Pemda yang diberi bimbingan/ bantuan teknis dalam pemenuhan SPM irigasi di Daerah	Pemda			5	5	5	
4	Layanan dukungan manajemen dan teknis pembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak		BBWS/BWS		33	33	33	33	
	1	Jumlah BBWS/ BWS yang diberi layanan dukungan manajemen dan teknis pembangunan, persiapan OP dan rehabilitasi irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak	BBWS/BWS		33	33	33	33	
5	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	
KEGIATAN 7: PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR TANAH									
UNIT ORGANISASI: PUSAT AIR BAKU DAN AIR TANAH									
SASARAN KEGIATAN									
1	NSPK penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku		N/S/P/K		1	1	1	1	
	1	Jumlah NSPK penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	N/S/P/K		1	1	1	1	
2	Layanan teknis pengelolaan air tanah dan air baku		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/ dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	20		2.000	3.000	4.000	5.000	14.000
	5	20						
	33	33	119.139	44.369	67.831	70.913	74.486	376.738
	33	33						
	12	12	49.029	29.000	31.000	34.000	37.000	180.029
	12	12						
			-	40.336,88	49.224,19	52.669,88	56.356,77	198.587,73
	1	5	-	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
	1	5						
	5	20	-	6.501,064	9.107,257	10.074,965	11.108,432	36.792
	5	20						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
3	Layanan dukungan manajemen dan teknis pengelolaan air tanah dan air baku		BBWS/BWS		33	33	33	33	
	1	Jumlah BBWS/ BWS yang diberi layanan dukungan manajemen dan teknis pengelolaan air tanah dan air baku	BBWS/BWS		33	33	33	33	
4	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	
KEGIATAN 8: PEMBINAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA									
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN									
SASARAN KEGIATAN									
1	NSPK OP sarana prasarana SDA		N/S/P/K		5	5	5	5	
	1	Jumlah NSPK pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	N/S/P/K		5	5	5	5	
2	Layanan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		0	25	25	25	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha			25	25	25	
3	Layanan dukungan manajemen dan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana prasarana SDA		BBWS/BWS		33	33	33	33	
	1	Jumlah BBWS/ BWS yang diberi dukungan manajemen dan teknis OP sarana dan prasarana SDA	BBWS/BWS		33	33	33	33	
4	Layanan dukungan manajemen dan teknis penyusunan dan penetapan peta kawasan rawan bencana		BBWS/BWS		33	33	33	33	
	1	Jumlah BBWS/ BWS yang diberi bimbingan teknis penyusunan peta kawasan rawan bencana	BBWS/BWS		33	33	33	33	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	33	33	-	21.835,817	26.916,932	28.074,917	29.276,341	106.104
	33	33						
	12	12		10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
	12	12						
			938.787,46	787.512,82	842.638,72	901.623,43	964.737,07	4.435.299,50
	5	25	12.557,33	13.813	15.194	16.714	18.385	76.664
	5	25						
	25	100	-	192.568	209.122	227.684	247.322	876.697
	25	100						
	33	33	303.733,91	169.923	200.377	232.719	267.057	1.173.810
	33	33						
	33	33	-	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
	33	33						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA		2015			2016	2017	2018		
1			2	3	4	5	6	7	
5	Fasilitasi penyediaan peralatan pendukung operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan		Unit		-	34	34	34	
	1	Jumlah peralatan yang difasilitasi	Unit		-	1	1	1	
	2	Jumlah bahan banjiran yang difasilitasi	Unit		-	33	33	33	
6	Layanan dukungan manajemen dan teknis tanggap darurat bencana		BBWS/BWS		33	33	33	33	
	1	Jumlah BBWS/ BWS yang diberi bimbingan teknis tanggap darurat bencana	BBWS/BWS		33	33	33	33	
7	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	
KEGIATAN 9: DUKUNGAN MANAJEMEN DSDAN									
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT HARIAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL									
SASARAN KEGIATAN									
1	NSPK pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDAN		N/S/P/K		1	1	1	1	
	1	Jumlah NSPK dukungan pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDAN	N/S/P/K		1	1	1	1	
2	Layanan dukungan manajemen pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDAN		Dokumen		0	1	1	1	
	1	Jumlah masukan DSDAN yang dirumuskan	Dokumen			1	1	1	
3	Kebijakan nasional pengelolaan SDA yang disusun/direview		Dokumen		0	1	1	1	
	1	Jumlah dokumen kebijakan nasional yang disusun/ direview	Dokumen			1	1	1	
4	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	34	37	-	39.542	39.111	37.789	36.583	153.025
	1	4						
	33	33						
	33	33	559.162,39	300.000	300.000	300.000	300.000	1.759.162
	33	33						
	12	12	63.334	69.667	76.634	84.297	92.727	386.659
	12	12						
			12.906,00	13.195,10	14.118,75	15.107,07	16.164,56	71.491,48
	1	5	-	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	1	5						
	1	110	3.907,83	3.297,86	3.429,72	3.560,91	3.690,40	17.886,72
	1	110						
	1	4	6.453,00	6.097,55	6.509,38	6.948,53	7.416,78	33.425,24
	1	4						
	12	12	2.545	2.800	3.080	3.388	3.726	15.539
	12	12						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
KEGIATAN 10: PEMBINAAN KEAMANAN BENDUNGAN									
UNIT ORGANISASI: BALAI BESAR BENDUNGAN									
SASARAN KEGIATAN									
1	NSPK keamanan bendungan		N/S/P/K		1	1	1	1	
	1	Jumlah NSPK keamanan bendungan	N/S/P/K		1	1	1	1	
2	Layanan teknis keamanan bendungan		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		0	5	5	5	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/ dunia usaha yang diberi bimbingan teknis keamanan bendungan	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha			5	5	5	
3	Layanan dukungan manajemen dan teknis keamanan bendungan		BBWS/BWS		20	20	20	20	
	1	Jumlah BBWS/ BWS yang diberi dukungan manajemen dan teknis keamanan bendungan	BBWS/BWS		20	20	20	20	
4	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	
KEGIATAN 11: PENGELOLAAN BENDUNGAN, EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA									
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS									
SASARAN KEGIATAN									
1	Layanan teknis bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	10	10	10	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat /dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
			18.980,00	19.405,15	20.763,51	22.216,96	23.772,15	105.137,77
	1	5	2.262,08	2.488,29	2.737,12	3.010,83	3.311,91	13.810,22
	1	5						
	5	20	-	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	5	20						
	20	20	14.172,75	14.017,18	14.846,74	15.718,51	16.633,85	75.389,03
	20	20						
	12	12	2.545	2.800	3.080	3.388	3.726	15.539
	12	12						
			5.640.262,09	13.026.818,41	20.332.389,95	21.615.963,95	22.926.667,31	83.542.101,71
	10	40	4.336.153	10.000	10.000	10.000	10.000	4.376.153
	5	20						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
	2	Jumlah Pemda/ masyarakat /dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan OP bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		5	5	5		
2	Tanah untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan		Hektar		2.094	5.862	11.176	11.488	
	1	Luas tanah yang dibebaskan	Hektar		2.094	5.862	11.176	11.488	
3	Rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi		Dokumen		45	37	30	23	
	1	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun dan ditingkatkan/ direhabilitasi	Dokumen		45	37	30	23	
4	Bendungan baru yang dibangun		Bendungan		13	8	9	11	
	1	Jumlah konstruksi bendungan baru yang dilaksanakan	Bendungan		13	8	9	11	
5	Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)		Bendungan		16 on going/ 13 baru/7 selesai	22 on going/9 baru /0 selesai	31 on going/8 baru /5 selesai	34 on going/11 baru /9 selesai	
	1	Jumlah konstruksi bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	Bendungan		16	22	31	34	
6	Prasarana sumber energi yang dibangun		Buah		-	-	5	5	
	1	Jumlah konstruksi prasarana sumber energi yang dilaksanakan	Buah				5	5	
7	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ ditingkatkan		Buah		309	114	190	225	
	1	Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan	Buah		309	114	190	225	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	20						
	5.987	36.607		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000
	5.987	36.607						
	22	157		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000
	22	157						
	8	49		4.912.885,18	5.216.998,85	6.186.425,77	7.708.222,70	24.024.533
	8	49						
	36 on going/8 baru /8 selesai	65 On Going/49 Baru/ 29 Selesai		4.322.914,92	10.450.333,56	10.368.727,70	9.856.153,08	34.998.129
	36	65						
	5	15		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000
	5	15						
	250	1.088	734.075,70	1.160.000,00	1.900.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	8.544.076
	250	1.088						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
8	Bendungan yang direhabilitasi		Bendungan		5	10	10	10	
	1	Jumlah konstruksi bendungan yang direhabilitasi	Bendungan		5	10	10	10	
9	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi		Buah		59	182	114	130	
	1	Jumlah konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	Buah		59	182	114	130	
10	Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dibangun		Buah		100	20	20	20	
	1	Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dilaksanakan	Buah		100	20	20	20	
11	Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi		Buah		5	5	5	5	
	1	Jumlah konstruksi bangunan pengendali sedimen (check dam) yang direhabilitasi	Buah		5	5	5	5	
12	Sungai yang direstorasi		Sungai		13	7	7	7	
	1	Jumlah sungai yang direstorasi	Sungai		13	7	7	7	
13	Danau yang direvitalisasi		Danau		2	5	6	6	
	1	Jumlah danau yang direvitalisasi	Danau		2	5	6	6	
14	Kawasan rawa yang dikonservasi		Kawasan		-	8	8	9	
	1	Jumlah kawasan rawa yang dikonservasi	Kawasan		-	8	8	9	
15	Mata air yang dilindungi		Mata Air		-	5	5	5	
	1	Jumlah mata air yang dilindungi	Mata Air			5	5	5	
16	Danau dan garis sempadannya yang diupayakan perlindungannya		Danau		-	6	6	6	
	1	Jumlah danau dan garis sempadannya yang diupayakan perlindungannya	Danau			6	6	6	
17	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	45	152.127,55	78.223,83	81.379,80	283.444,11	222.351,46	817.527
	10	45						
	140	625	149.111,66	712.703,17	793.577,29	606.555,89	707.648,54	2.969.597
	140	625						
	20	180	28.814,74	20.000,00	23.000,00	26.000,00	29.000,00	126.814,74
	20	180						
	5	25	11.365	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	127.389,95
	5	25						
	8	42	107.622,47	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	317.622,47
	8	42						
	6	25	80.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.230.000,00
	6	25						
	9	34		160.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	680.000,00
	9	34						
	5	20		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	5	20						
	6	24		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
	6	24						
	12	12	40.992	45.091	49.600	54.560	60.017	250.261
	12	12						

SASARAN/		SATUAN	LOKASI	TARGET					
INDIKATOR KINERJA				2015	2016	2017	2018		
1		2	3	4	5	6	7		
KEGIATAN 12: PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI, DAN PENGAMANAN PANTAI									
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS									
SASARAN KEGIATAN									
1	Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	10	10	10	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/ dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5	
	2	Jumlah Pemda/ masyarakat/ dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan OP pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5	
2	Tanah untuk konstruksi bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dibebaskan		Hektar		510	1.005	1.505	1.505	
	1	Luas tanah yang dibebaskan	Hektar		510	1.005	1.505	1.505	
3	Rencana teknis dan dokumen lingkungan konstruksi bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi		Dokumen		41	49	49	49	
	1	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bangunan pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai yang dibangun/ ditingkatkan dan direhabilitasi	Dokumen		41	49	49	49	
4	Normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan		Km		284,26	496,00	511,00	527,00	
	1	Panjang konstruksi normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dilaksanakan	Km		284,26	496,00	511,00	527,00	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
			8.121.934,81	12.580.149,44	14.850.633,10	15.423.064,04	17.389,575,70	68.365,357,08
	10	40	5.042.159,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.082.159,20
	5	20						
	5	20						
	1.500	6.025		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	1.500	6.025						
	49	237		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	49	237						
	493,74	2.312,00		5.762.009,07	7.415.362,81	7.267.223,51	9.197.430,00	29.642.025,39
	493,74	2.312,00						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA		2015			2016	2017	2018		
1			2	3	4	5	6	7	
5	Panjang bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan		Km		0	168	174	179	
	1	Panjang konstruksi bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang dilaksanakan	Km		0	168	174	179	
6	Panjang kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan		Km		0	3	3	2	
	1	Panjang konstruksi kanal banjir yang dilaksanakan	Km			3	3	2	
7	Stasiun pompa banjir yang dibangun		Buah		0	3	2	2	
	1	Jumlah konstruksi stasiun pompa yang dilaksanakan	Buah			3	2	2	
8	Polder/kolam retensi yang dibangun		Buah		0	2	2	2	
	1	Jumlah konstruksi polder/kolam retensi yang dilaksanakan	Buah			2	2	2	
9	Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dikembangkan		BBWS/BWS		0	10	10	10	
	1	Jumlah BBWS/BWS yang memiliki FFWS	BBWS/BWS			10	10	10	
10	Pengendali lahar gunung berapi yang dibangun/ditingkatkan		Buah		60	55	63	64	
	1	Jumlah konstruksi pengendali lahar gunung berapi yang dilaksanakan	Buah		60	55	63	64	
11	Bangunan pemecah gelombang (break water) yang dibangun/ditingkatkan		Km		61,11	84,77	88,99	156,43	
	1	Panjang bangunan pemecah gelombang (break water) yang dibangun (km)	Km		61,11	84,77	88,99	156,43	
12	Tembok penahan gelombang (sea wall) yang dibangun/ditingkatkan		Km		-	1,25	1,25	1,25	
	1	Panjang konstruksi tembok penahan gelombang (sea wall) yang dilaksanakan	Km			1,25	1,25	1,25	
13	Saluran drainase yang dibangun/ditingkatkan**		Km		-	1	1	1	
	1	Panjang konstruksi saluran drainase yang dilaksanakan	Km			1	1	1	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	247	768	-	1.199.736,97	1.730.919,37	1.692.295,46	2.409.245,82	7.032.197,62
	247	768						
	2	10	-	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
	2	10						
	2	9	-	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
	2	9						
	2	8		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	2	8						
	10	40		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	10	40						
	64	306	410.502,79	617.394,49	434.424,28	455.549,27	522.713,45	2.440.584,27
	64	306						
	133,70	525,00	1.817.699,11	1.017.236,26	1.067.922,00	1.877.171,74	1.604.350,00	7.384.379,11
	133,70	525,00						
	1,25	5,00		172.603,10	288.789,36	668.039,65	360.338,29	1.489.770,41
	1,25	5,00						
	1	4		600.000,00	660.000,00	726.000,00	798.600,00	2.784.600,00
	1	4						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
14	Bangunan sarana prasarana drainase yang dibangun/ ditingkatkan**		Buah						
	1	Jumlah kontruksi bangunan sarana prasarana drainase yang dilaksanakan	Buah						
15	Tanggul yang direhabilitasi		Km		126,31	135,21	225,00	149,00	
	1	Panjang konstruksi normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang direhabilitasi	Km		126,31	135,21	225,00	149,00	
16	Perkuatan tebing yang direhabilitasi		Km		0,00	60,00	75,00	60,00	
	1	Panjang konstruksi bangunan perlindungan dan perkuatan tebing yang direhabilitasi	Km		0,00	60,00	75,00	60,00	
17	Kanal banjir yang direhabilitasi		Km		0	3	3	2	
	1	Panjang konstruksi kanal banjir yang direhabilitasi	Km			3	3	2	
18	Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi		Buah		0	3	2	2	
	1	Jumlah konstruksi stasiun pompa yang direhabilitasi	Buah			3	2	2	
19	Polder/kolam retensi yang direhabilitasi		Buah		0	1	1	1	
	1	Jumlah konstruksi polder/kolam retensi yang direhabilitasi	Buah			1	1	1	
20	Pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi		Buah		21	14	20	20	
	1	Jumlah konstruksi pengendali lahar gunung berapi yang direhabilitasi	Buah		21	14	20	20	
21	Bangunan pemecah gelombang (break water) yang direhabilitasi		Km		0,87	2,70	3,03	2,55	
	1	Panjang konstruksi bangunan pemecah gelombang (break water) yang direhabilitasi	Km		0,87	2,70	3,03	2,55	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
				200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
		-						
	158,00	793,52	539.206,30	1.116.286,25	1.215.681,73	995.407,32	884.828,50	4.751.410,10
	158,00	793,52						
	64,75	259,75		391.907,58	405.227,24	331.802,44	294.942,83	1.423.880,09
	64,75	259,75						
	2	10		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	2	10						
	2	9		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
	2	9						
	1	4		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	1	4						
	20	95	249.518,01	164.900,00	102.400,00	101.100,00	96.600,00	714.518,01
	20	95						
	2,45	11,60	8.816,24	29.000,00	124.723,00	66.473,00	42.525,00	271.537,24
	2,45	11,60						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
22	Tembok penahan gelombang (sea wall) yang direhabilitasi		Km		-	0,10	0,10	0,10	
	1	Panjang tembok penahan gelombang (sea wall) yang direhabilitasi	Km		-	0,10	0,10	0,10	
23	Desain pengendalian banjir yang ditingkatkan		Dokumen		-	1	1	1	
	1	Tingkat pengendalian banjir yang direncanakan	Dokumen		-	1	1	1	
24	Sungai dan garis sempadannya yang diupayakan perlindungannya		Sungai		-	20	20	20	
	1	Jumlah sungai dan garis sempadannya yang diupayakan perlindungannya	Sungai			20	20	20	
25	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	

KEGIATAN 13: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA DAN TAMBAK

UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS

SASARAN KEGIATAN

1	Layanan teknis irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	10	10	10	
1	Jumlah Pemda/ masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan/ rehabilitasi irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5	
2	Jumlah Pemda/ masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan OP irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha			5	5	5	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	0,10	0,40		1.639,26	1.803,18	1.983,50	2.181,85	7.607,78
	0,10	0,40						
	1	4	-	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	1	4						
	20	80		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	20	80						
	12	12	54.033	59.436	65.380	71.918	79.110	329.878
	12	12						
			8.458.828,13	18.164.933,24	19.468.431,57	19.318.511,28	15.336.156,38	80.746.860,61
	10	40	3.864.787	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.904.786,84
	5	20						
	5	20						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
2	Tanah untuk konstruksi bendung dan irigasi permukaan kewenangan Pusat, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibebaskan		Hektar		4.913	5.647	5.024	4.416	
	1	Luas tanah yang dibebaskan	Hektar		4.912,83	5.646,80	5.023,64	4.415,95	
3	Rencana teknis dan dokumen lingkungan bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi		Dokumen		44	50	50	50	
	1	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dibangun dan ditingkatkan/direhabilitasi	Dokumen		44	50	50	50	
4	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya		Km		2.602,28	411,34	381,45	386,92	
	1	Panjang konstruksi jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dilaksanakan	Km		2.602,28	411,34	381,45	386,92	
5	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang diairi oleh bendungan		Km		11	12	12	13	
	1	Persentase daerah irigasi yang diairi oleh bendungan	%		11	12	12	13	
6	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya		Bendung		24	2	6	3	
	1	Jumlah konstruksi bendung irigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan	Bendung		24	2	6	3	
7	Tanah untuk konstruksi bendung dan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibebaskan		Hektar		-	7.222	7.280	6.409	
	1	Luas tanah yang dibebaskan	Hektar		-	7.222	7.280	6.409	
8	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya *		Km		-	3.576,74	3.600,09	3.251,73	
	1	Panjang jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya	Km		-	3.576,74	3.600,09	3.251,73	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.743	23.742		500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000
	3.742,93	23.742,15						
	50	244		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	50	244						
	378,82	4.160,80		872.960	671.668	938.433	729.607	3.212.668,53
	378,82	4.160,80						
	19	19		175.267	116.350	174.446	113.645	579.708
	19	19						
	3	38	-	397.988	414.196	630.988	287.583	1.730.754
	3	38						
	5.768	26.679		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	5.768	26.679						
	2.995,28	13.423,84	-	8.441.852	8.500.219	7.629.336	6.988.202	31.559.609,36
	2.995,28	13.423,84						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
9	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan konstruksinya *		Bendung		-	12	9	14	
	1	Jumlah konstruksi bendung irigasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan	Bendung		-	12	9	14	
10	Jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan konstruksinya		Km		397,48	382,01	568,09	490,33	
	1	Panjang jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan konstruksinya	Km		397,48	382,01	568,09	490,33	
11	Jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan konstruksinya		Km		82,16	24,12	24,00	24,00	
	1	Panjang jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan konstruksinya	Km		82,16	24,12	24,00	24,00	
12	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi		Km		6.460,53	3.899,70	3.723,40	3.477,20	
	1	Panjang konstruksi jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi	Km		6.460,53	3.899,70	3.723,40	3.477,20	
13	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi		Bendung		4	11	8	9	
	1	Jumlah konstruksi bendung irigasi kewenangan Pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi	Bendung		4	11	8	9	
14	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi *		Km		-	5.400,86	5.917,36	5.816,33	
	1	Panjang konstruksi jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi	Km		-	5.400,86	5.917,36	5.816,33	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	9	44	-	240.000	180.000	280.000	180.000	880.000
	9	44						
	444,58	2.282,49	516.409,74	764.024	1.136.179	980.662	889.162	4.286.437
	444,58	2.282,49						
	4,00	158,28	121.104,42	40.788	45.288	43.913	16.500	267.594
	4,00	158,28						
	2.601,93	20.162,76	3.001.944,09	1.659.131	1.726.288	1.999.456	1.372.517	9.759.335
	2.601,93	20.162,76						
	7	39	-	22.000	16.000	18.000	14.000	70.000
	7	39						
	4.154,89	21.289,44	-	1.779.723	2.669.584	2.669.584	1.547.055	8.665.947
	4.154,89	21.289,44						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
15	Bendung irigasi kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi *		Bendung		-	11	9	6	
	1	Jumlah konstruksi bendung irigasi kewenangan Daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi	Bendung		-	11	9	6	
16	Jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan/direhabilitasi		Km		1.203,91	2.025,69	1.715,89	1.598,36	
	1	Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan/direhabilitasi	Km		1.203,91	2.025,69	1.715,89	1.598,36	
17	Jaringan irigasi tambak yang ditingkatkan/direhabilitasi		Km		295,75	154,75	145,52	132,36	
	1	Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang ditingkatkan/direhabilitasi	Km		295,75	154,75	145,52	132,36	
18	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	
KEGIATAN 14: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU									
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS									
SASARAN KEGIATAN									
1	Layanan teknis sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	10	10	10	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	5	5	5	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	34	-	22.000	18.000	12.000	16.000	68.000
	8	34						
	1.549,45	8.093,30	665.917,21	2.430.386	2.662.813	2.617.348	1.869.699	10.246.163
	1.549,45	8.093,30						
	109,41	837,78	201.635,99	203.081	186.541	188.508	164.766	944.531
	109,41	837,78						
	12	12	87.030	95.733	105.306	115.837	127.420	531.326
	12	12						
			3.077.456,395	5.880.770,60	5.885.436,62	6.026.195,29	5.726.477,36	26.596.336,82
	10	40	2.334.444	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.374.443,79
	5	20						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
	2	Jumlah Pemda/ masyarakat/ dunia usaha yang diberi pemberian bimbingan teknis perencanaan OP sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha			5	5	5	
2	Tanah untuk konstruksi sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku yang dibebaskan		Hektar		6	11	11	11	
	1	Luas tanah yang dibebaskan	Hektar		6	11	11	11	
3	Rencana teknis dan dokumen lingkungan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi		Dokumen		30	36	36	36	
	1	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku yang dibangun/ ditingkatkan dan direhabilitasi	Dokumen		30	36	36	36	
4	Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun/ditingkatkan		Titik		5	5	5	5	
	1	Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang dilaksanakan	Titik		5	5	5	5	
5	Embung untuk air baku yang dibangun/ditingkatkan		Buah		18	20	20	20	
	1	Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang dilaksanakan	Buah		18	20	20	20	
6	Saluran pembawa yang dibangun/ ditingkatkan		Km		1.000	1.000	1.000	1.000	
	1	Panjang konstruksi saluran pembawa yang dilaksanakan	Km		1.000	1.000	1.000	1.000	
7	Intake air baku yang dibangun/ ditingkatkan		Buah		100	100	100	100	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	20						
	11	50		200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	11	50						
	36	174		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	36	174						
	5	25		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
	5	25						
	20	98		200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	20	98						
	1.000	5.000		4.166.270	4.172.236	4.479.030	3.898.628	16.716.164
	1.000	5.000						
	100	500		500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
	1	Jumlah konstruksi intake air baku yang dilaksanakan	Buah		100	100	100	100	
8	Sumur JIAT yang dibangun/ ditingkatkan		Titik Dokumen		106	164	174	116	
				5	5	5	5		
	1	Jumlah konstruksi sumur JIAT yang dilaksanakan	Titik		106	164	174	116	
	2	Jumlah manual OP sumur JIAT	Dokumen		5	5	5	5	
9	Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun		Km		320,50	494,50	489,93	348,20	
	1	Panjang konstruksi Jaringan Irigasi Air Tanah yang dilaksanakan	Km		320,50	494,50	489,93	348,20	
10	Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi		Titik		-	15,0	15,0	15,0	
	1	Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	Titik		-	15	15	15	
11	Embung untuk air baku yang direhabilitasi		Buah		6	5	5	5	
	1	Jumlah konstruksi embung untuk air baku yang direhabilitasi	Buah		6	5	5	5	
12	Saluran pembawa yang direhabilitasi		Km		1.616,42	146,67	240,46	462,50	
	1	Panjang konstruksi saluran pembawa yang direhabilitasi	Km		1.616,42	146,67	240,46	462,50	
13	Intake air baku yang direhabilitasi		Buah		226	20	31	64	
	1	Jumlah konstruksi intake air baku yang selesai direhabilitasi	Buah		226	20	31	64	
14	Sumur JIAT yang direhabilitasi		Titik		306	328	308	263	
	1	Jumlah konstruksi sumur JIAT yang direhabilitasi	Titik		306	328	308	263	
15	Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi		Km		0,050	0,084	0,079	0,068	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	100	500						
	107	667	-	82.000	87.000	58.000	53.500	280.500
	5	25						
	107	667						
	5	25						
	314,20	1.967,33	203.836,24	321.425	318.451	226.330	204.230	1.274.273
	314,20	1.967,33						
	15,0	60,0	-	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	15	60,0						
	5	26	-	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
	5	26						
	1.425,42	3.891,47	402.890	148.595	131.088	39.719	56.130	778.422
	1.425,42	3.891,47						
	215	557	-	40.160	62.168	128.800	429.680	660.808
	215	557						
	238	1.443	-	117.870	110.926	95.190	86.412	410.398
	238	1.443						
	0,062	0,343	117.255,91	50,516	47.540	40.796	37.034	293.141

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
	1	Panjang konstruksi Jaringan Irigasi Air Tanah yang direhabilitasi	Km		0,050	0,084	0,079	0,068	
16	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	
KEGIATAN 15: OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA									
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS									
SASARAN KEGIATAN									
1	Layanan teknis OP sarana prasarana SDA		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	25	25	25	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/ dunia usaha yang diberi bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan OP sarana dan prasarana SDA	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	25	25	25	
2	Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara		Bendungan		208	215	215	220	
	1	Jumlah bendungan yang dioperasi dan dipelihara	Bendungan		208	215	215	220	
3	Unit pengelola bendungan yang difungsikan		%		-	25	25	25	
	1	Jumlah unit pengelola bendungan yang difungsikan	%			25	25	25	
4	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara		Buah		1.061	1.370	1.484	1.674	
	1	Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	Buah		1.061	1.370	1.484	1.674	
5	Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara		Titik		-	5	10	15	
	1	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Titik		-	5	10	15	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	0,062	0,343						
	12	12	19.031	20.935	23.028	25.331	27.864	116.189
	12	12						
			2.215.893,14	9.418.135,47	8.554.341,96	9.548.627,11	10.616.188,23	40.353.185,90
	25	25	387.862,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	427.863
	25	25						
	229	229		1.271.870,25	1.385.641,61	1.609.969,72	1.821.727,07	6.089.209
	229	229						
	25	25		57.370,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	282.370
	25	25						
	1.899	1.899		274.000,06	296.800,06	334.800,06	379.800,06	1.285.400
	1.899	1.899						
	20	20		25.150,88	327.396	426.644	489.941	547.963
	20	20						

SASARAN/		SATUAN	LOKASI	TARGET					
INDIKATOR KINERJA				2015	2016	2017	2018		
1		2	3	4	5	6	7		
6	Embung untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara		Buah		-	18,00	38,00	58,00	
	1	Jumlah embung untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Buah		-	18,00	38,00	58,00	
7	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara		Buah		-	100	200	300	
			Km			1000	1000	1000	
	1	Jumlah intake air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Buah		-	100	200	300	
	2	Panjang saluran pembawa air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Km			1.000	1.000	1.000	
8	Tanggul yang dipelihara		Km		2.728,30	2.212,50	2.708,50	3.219,50	
	1	Panjang tanggul banjir yang dipelihara	Km		2.728,30	2.212,50	2.708,50	3.219,50	
9	Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara		Km		0	0	3	3	
	1	Panjang konstruksi kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	Km			0	3	3	
10	Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara		Unit		1	1	4	6	
	1	Jumlah konstruksi stasiun pompa yang dipelihara	Unit		1	1	4	6	
11	Polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara		Buah		-	-	2	4	
	1	Jumlah konstruksi polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara	Buah			0,00	2	4	
12	Pengendali lahar gunung berapi yang dipelihara		Buah		267	327	382	445	
	1	Jumlah pengendali lahar gunung berapi yang dipelihara	Buah		267	327	382	445	
13	Bangunan pengamanan pantai yang dipelihara		Km		135,55	136,42	139,22	142,35	
	1	Panjang konstruksi pengamanan pantai yang dipelihara	Km		135,55	136,42	139,22	142,35	
14	Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dioperasikan dan dipelihara		Buah		-	-	10	20	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	78,00	78,00	25.150,88	327.396	426.644	489.941	547.963	1.817.096
	78,00	78						
	400	400	25.150,88	327.396	426.644	489.941	547.963	1.817.096
	1000	1000						
	400	400						
	1.000	1.000	377.487,74	442.500,00	541.700,00	643.900,00	749.300,00	2.754.887,74
	3.746,50	3.746,50						
	3.746,50	3.747						
	2	3						
	2	3						
	8	8		500,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	9.500,00
	8	8						
	6	6		-	1.500,00	3.000,00	4.500,00	9.000,00
	6	6						
	509	509	32.380,28	65.400,00	76.400,00	89.000,00	101.800,00	364.980,28
	509	509						
	145,00	145,00	60.943,15	68.210,00	69.610,00	71.175,00	72.500,00	342.438,15
	145,00	145						
	30	30	-	3.770.609	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.770.608,95

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
	1	Jumlah FFWS yang dioperasikan dan dipelihara	Buah		-	-	10	20	
15	Bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dioperasi dan dipelihara		Km		-	100	120	140	
	1	Jumlah bangunan pengendali sedimen (check dam) yang dioperasi dan dipelihara	Km		-	100	120	140	
16	Sungai yang dipelihara		Sungai		0	13	20	20	
	1	Jumlah sungai yang dipelihara	Sungai			13	20	20	
17	Danau yang dipelihara		Danau		0	2	7	10	
	1	Jumlah danau yang dipelihara	Danau		0	2	7	10	
18	Kawasan rawa yang dipelihara		Kawasan		0	0	8	16	
	1	Jumlah kawasan rawa yang dipelihara	Kawasan		0	0	8	16	
19	Mata air yang dipelihara		Mata Air		0	0	5	10	
	1	Jumlah mata air yang dipelihara	Mata Air			0	5	10	
20	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara		Km						
	1	Panjang jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	Km		47.530	50.133	50.544	50.925	
21	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara		Bendung		0	24	2	6	
	1	Jumlah bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	Bendung			24	2	6	
22	Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara		Km		7.034	7.431	7.813	8.381	
	1	Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	Km		7.034	7.431	7.813	8.381	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	30	30						
	160	160	0,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00	32.000,00	104.000,00
	160	160						
	20	20	-	417.900,00	455.400,00	554.700,00	637.300,00	2.065.300,00
	20	20						
	10	10		600,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	8.700,00
	10	10						
	25	25		-	4.000,00	8.000,00	12.500,00	24.500,00
	25	25						
	15	15		-	500,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00
	15	15						
			947.916	1.253.317	1.389.961	1.527.765	1.795.934	6.914.892,90
	51.312	51.312						
	3	24		4.800	500	1.200	600	7.100,00
	3	24						
	8.872	8.872	230.614	371.555	468.787	586.684	709.723	2.367.362,31
	8.872	8.872						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA		2015			2016	2017	2018		
1			2	3	4	5	6	7	
23	Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara		Km		259	555	710	855	
	1	Panjang jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	Km		259	555	710	855	
24	Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara		Titik		0	106	270	444	
	1	Jumlah sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara	Titik			106	270	444	
25	Jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara		Km		0,00	3993,20	4487,70	4977,63	
	1	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	Km			3993,20	4487,70	4977,63	
26	Unit pengelola irigasi yang difungsikan		Km		0	23	23	23	
	1	Jumlah unit pengelola irigasi	Km			23	23	23	
27	Peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan		WS		0	16	16	16	
	1	Jumlah WS yang memiliki peta kawasan rawan bencana	WS			16	16	16	
28	Peralatan dan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan SDA		WS			26	26	26	
	1	Jumlah peralatan yang dioperasikan dan dipelihara	WS			16	16	16	
	2	Jumlah bangunan workshop yang dibangun dan dipelihara	WS			10	10	10	
29	Kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air yang dilaksanakan		Kegiatan			40	40	41	
	1	Jumlah kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air	Kegiatan			40	40	41	
30	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	988	988	37.620	27.749	42.583	59.866	79.007	246.825,66
	988	988						
	560	560	65.617	10.600	27.000	44.400	56.000	203.617,15
	560	560						
	5325,83	5325,83		19.966	26.926	34.843	42.607	124.342,18
	5325,83	5.325,83						
	23	23	-	77.000	80.000	85.000	85.000	327.000,00
	23	23						
	15	16	-	160.000	160.000	160.000	150.000	630.000,00
	15	16						
	25	26		32.000	32.000	32.000	30.000	126.000,00
	15	16						
	10	10						
	41	162		20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	81.000,00
	41	162						
	12	12	-	60.000	70.000	80.000	90.000	300.000
	12	12						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
KEGIATAN 16: PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA TERPADU									
UNIT ORGANISASI: BBWS/BWS									
SASARAN KEGIATAN									
1	Layanan teknis tata kelola pengelolaan SDA terpadu		Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	10	10	10	
	1	Jumlah Pemda/ masyarakat/dunia usaha yang diberi bimbingan teknis pengelolaan SDA terpadu	Pemda/ masyarakat/ dunia usaha		-	10	10	10	
2	Komunikasi dan layanan publik yang diselenggarakan		%		-	20	20	20	
	1	Persentase peningkatan penyelenggaraan komunikasi dan layanan publik	%		-	20	20	20	
3	Sistem data dan informasi SDA yang diselenggarakan		%		-	20	20	20	
	1	Persentase peningkatan penyelenggaraan SISDA	%		-	20	20	20	
4	Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/ direview		Dokumen		14	15	7	7	
	1	Jumlah rencana pengelolaan SDA WS kewenangan pusat yang disusun/direview	Dokumen		10	10	-	-	
	2	Jumlah rencana teknis pengelolaan SDA WS kewenangan pusat yang disusun/ direview	Dokumen		4	5	7	7	
5	Data hidrologi dan kualitas air yang dikelola		%		-	20	20	20	
	1	Persentase peningkatan pengelolaan data hidrologi dan kualitas air	%		-	20	20	20	
6	Rekomendasi teknis yang diberikan		%		-	20	20	20	
	1	Persentase layanan rekomendasi teknis yang diberikan	%		-	20	20	20	

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
			1.300.755,79	1.250.281,21	1.272.546,21	1.320.017,71	1.360.861,36	6.504.462,26
	10	40	905.815,40	914.721,21	921.971,21	950.385,21	852.575,61	4.545.468,62
	10	40						
	20	80		43.890,00	47.643,75	52.408,13	57.071,44	201.013,31
	20	80						
	20	80		131.670,00	142.931,25	157.224,38	171.214,31	603.039,94
	20	80						
	7	50		40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	280.000,00
	-	20						
	7	30						
	20	80		60.000,00	58.000,00	55.800,00	53.380,00	227.180,00
	20	80						
	20	80		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	20	80						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	2018	
1			2	3	4	5	6	7	
7	Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya		%		-	20	20	20	
	1	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga PSDA	%		-	20	20	20	
8	Layanan perkantoran		Bulan		12	12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan	Bulan		12	12	12	12	

Keterangan :

- 1) * Merupakan kewenangan Daerah yang pendanaannya diusulkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 2) ** Merupakan tugas tambahan dari Menteri PUPR, belum dialokasikan pada pagu Renstra Rp 316 T
- 3) Usulan kebutuhan pendanaan dengan target sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 yang diusulkan Ditjen SDA adalah Rp 316,56 Trilyun. Berdasarkan Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, target yang ditetapkan sama, namun alokasi pendanaan turun menjadi Rp 208,58 Trilyun (selisih Rp 107,89 Trilyun). Apabila alokasi pendanaan sesuai dengan pendanaan pada RPJMN 2015-2019, maka beberapa target yang ditetapkan tidak dapat tercapai, antara lain : pembangunan bendungan, embung, pengendali banjir, pengaman pantai, dan rehabilitasi pengendali banjir
- 4) Terdapat perbedaan struktur kegiatan, sasaran kegiatan (output) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan struktur yang ada pada RPJMN 2015-2019, dengan mempertimbangkan perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kaidah Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK). Beberapa output pada RPJMN 2015-2019 merupakan outcome (contoh: output jaringan irigasi yang dibangun, pada RPJMN 2015-2019 memiliki satuan hektar-outcome, sedangkan pada struktur yang baru memiliki satuan km-output). Namun demikian, hal-hal yang ditargetkan pada RPJMN 2015-2019 tetap dapat diukur menggunakan struktur yang baru.

			ANGGARAN (JUTA)					
	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	8	9	10	11	12	13	14	15
	20	80		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	20	80						
	12	12	394.940	20.000	22.000	24.200	26.620	487.760
	12	12						

TABEL 2.3. MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TUJUAN 3

TUJUAN 3 : Menyelenggaraan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
SASARAN STRATEGIS								
1	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing							
	(1)	Tingkat Konektivitas Jalan Nasional	%		73	74	75	
2	Meningkatnya kemantapan jalan nasional							
	(1)	Tingkat kemantapan jalan nasional	%		86*	91	94	
SASARAN PROGRAM								
1	Menurunnya waktu tempuh pada koridor utama							
	1	Waktu Tempuh Pada Koridor utama	Jam/100 Km	Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa	2,7	2,6	2,5	
2	Meningkatnya pelayanan jalan nasional							
	1	Tingkat penggunaan jalan nasional	milyar Kendaraan Km		101	116	122	
3	Meningkatnya fasilitas terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan							
	1	Tingkat fasilitas terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan	%		0	25	50	
KEGIATAN 1: PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL								
UNIT ORGANISASI : BALAI PELAKSANA JALAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Perencanaan, pengendalian dan pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Dokumen		61	61	61	
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan	Dokumen		19	19	19	
	2	Jumlah dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan jembatan	Dokumen		25	25	25	
	3	Jumlah dokumen pengendalian sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan	Dokumen		17	17	17	
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran		Laporan		12	12	12	
	1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	76	77	77						
	97	98	98						
				57.050.911	69.947.949	52.105.273	55.121.016	43.951.850	278.177.000
	2,4	2,2	2,2						
	127	133	133						
	75	100	100						
				50.716.586	59.824.346	43.657.286	49.025.314	38.790.146	242.013.678
	61	61	305	4.266.088	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	20.746.088
	19	19	95						
	25	25	125						
	17	17	85						
	12	12	60						
	12	12	60						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
3	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional		KM M		38.292 355.980	47.595 453.228	47.700 454.160	
	1	Panjang jalan yang terpelihara	KM		35.744	46.804	46.746	
	2	Panjang jembatan yang terpelihara	M		340.934	445.875	445.875	
	3	Panjang jalan yang ditingkatkan	KM		2.016	213	271	
	4	Panjang jembatan yang ditingkatkan	M		7.777	3.044	3.044	
	5	Panjang jalan yang dibangun	KM		493	415	536	
	6	Panjang jembatan yang dibangun	M		7.269	4.310	5.241	
	7	Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun	KM		38	39	22	
	8	Dukungan jalan daerah	KM		0	125	125	
KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI, PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN								
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pelayanan teknis, pelayanan publik dan administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga		Dokumen		12	12	12	
	1	Jumlah laporan kepegawaian dan ortala	Dokumen		3	3	3	
	2	Jumlah laporan keuangan dan umum	Dokumen		3	3	3	
	3	Jumlah Dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum	Dokumen		3	3	3	
	4	Jumlah dokumenPengelolaan Barang Milik Negara	Dokumen		3	3	3	
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran		Laporan		24	24	24	
	1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	
	2	Jumlah laporan layanan publik (PNBP)	Laporan		12	12	12	
3	Penanggulangan bencana alam		Paket Bantuan		33	33	33	
	1	Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan	Paket Bantuan		33	33	33	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	47.813 454.802	47.718 456.073	53.380 495.684	46.450.498	55.704.346	39.537.286	44.905.314	34.670.146	221.267.591
	46.708	46.753	47.017						
	445.875	445.875	445.875						
	309	264	3.073						
	3.044	3.044	19.951						
	650	556	2.650						
	5.884	7.155	29.859						
	21	20	140						
	125	125	500						
				884.869	850.000	850.000	850.000	850.000	4.284.869
	12	12	60						
	3	3	15						
	3	3	15						
	3	3	15						
	3	3	15						
	24	24	120						
	12	12	60						
	12	12	60						
	33	33	165						
	33	33	165						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 3: PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, pembiayaan dan evaluasi kinerja		Dokumen		9	9	9	
	1	Jumlah Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan	Dokumen		2	2	2	
	2	Jumlah Dokumen Pemrograman	Dokumen		1	1	1	
	3	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem	Dokumen		2	2	2	
	4	Jumlah Dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Dokumen		2	2	2	
	5	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen		2	2	2	
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran		Laporan		12	12	12	
	1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				120.226	100.000	100.000	100.000	100.000	520.226
	9	9	45						
	2	2	10						
	1	1	5						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	12	12	60						
	12	12	60						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
1					2015	2016	2017	
2			3	4	5	6		
KEGIATAN 4: PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN JALAN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pengaturan, Pembinaan Manajemen konstruksi, Teknik geometrik, perkerasan, drainase, geoteknik dan manajemen lereng jalan		Dokumen		10	10	10	
	1	Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen		2	2	2	
	2	Jumlah Dokumen Manajemen Konstruksi	Dokumen		2	2	2	
	3	Jumlah Dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase	Dokumen		2	2	2	
	4	Jumlah Dokumen Geoteknik dan Manajemen Lereng	Dokumen		2	2	2	
	5	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen		2	2	2	
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran		Laporan		12	12	12	
	1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	
KEGIATAN 5: PENGATURAN DAN PEMBINAAN PRESERVASI JALAN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PRESERVASI JALAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik rekonstruksi, pemeliharaan jalan		Dokumen		10	10	10	
	1	Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen		2	2	2	
	2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemrograman	Dokumen		2	2	2	
	3	Jumlah Dokumen Teknik Rekonstruksi	Dokumen		2	2	2	
	4	Jumlah Dokumen Teknik Pemeliharaan	Dokumen		2	2	2	
	5	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen		2	2	2	
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran		Laporan		12	12	12	
	1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12	12	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				199.272	120.000	120.000	120.000	120.000	679.272
	10	10	50						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	12	12	60						
	12	12	60						
				102.008	85.000	85.000	85.000	85.000	442.008
	10	10	50						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	12	12	60						
	12	12	60						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 6: PENGATURAN DAN PEMBINAAN JEMBATAN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JEMBATAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik terowongan dan jembatan khusus		Dokumen		-	10	10	
	1	Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen		-	2	2	
	2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemrograman	Dokumen		-	2	2	
	3	Jumlah Dokumen teknik jembatan	Dokumen		-	2	2	
	4	Jumlah Dokumen teknik terowongan dan jembatan khusus	Dokumen		-	2	2	
	5	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen		-	2	2	
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran		Laporan		-	12	12	
	1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		-	12	12	
KEGIATAN 7: PENGATURAN DAN PEMBINAAN JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITASI JALAN DAERAH								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITASI JALAN DAERAH								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pembinaan Teknik Penyelenggaraan Jalan daerah, metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan serta pengadaan tanah		Dokumen Ha		-	8	8	
	1	Jumlah dokumen manajemen dan evaluasi jalan daerah	Dokumen		-	2	2	
	2	Jumlah dokumen teknik jalan daerah	Dokumen		-	2	2	
	3	Jumlah Dokumen pelaksanaan jalan metropolitan dan kota besar	Dokumen		-	2	2	
	4	Jumlah Dokumen Pembinaan jalan bebas hambatan	Dokumen		-	2	2	
	5	Jumlah Hektar Pembebasan Tanah	Ha		-			
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran		Laporan		-	12	12	
	1	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		-	12	12	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					85.000	85.000	85.000	85.000	340.000
	10	10	40						
	2	2	8						
	2	2	8						
	2	2	8						
	2	2	8						
	2	2	8						
	12	12	48						
	12	12	48						
				4.942.950	8.798.603	7.122.987	4.770.703	3.836.704	29.471.946
	8	8	32 15.000		85.000	85.000	85.000	85.000	340.000
	2	2	8						
	2	2	8						
	2	2	8						
	2	2	8						
			15.000						
	12	12	48						
	12	12	48						

SASARAN/		SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA				2015	2016	2017		
1		2	3	4	5	6		
KEGIATAN 8: PENGATURAN, PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN JALAN TOL								
UNIT ORGANISASI :BADAN PENGATUR JALAN TOL								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		Dokumen		13	13	13	
	1	Jumlah Dokumen Kajian dan Evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen		2	2	2	
	2	Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen		2	2	2	
	3	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen		2	2	2	
	4	Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Dokumen		3	3	3	
	5	Jumlah Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen		1	1	1	
	6	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen		1	1	1	
	7	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU)	Dokumen		1	1	1	
	8	Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (BLU)	Dokumen		1	1	1	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	425.000
	13	13	65						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	3	3	15						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	1	5						

TABEL 2.4. MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TUJUAN 4

TUJUAN 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
SASARAN STRATEGIS								
1	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan							
	(1)	Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	%		81	84	88	
2	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman							
	(1)	Tingkat kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	%		77	83	90	
3	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan							
	(1)	Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%		84	85	87	
PROGRAM 1 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN								
SASARAN PROGRAM								
1	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat							
	1	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	%		76	82	88	
2	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak							
	1	Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan	%		8	6	4	
3	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat							
	1	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%		64	72	85	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	91	95	95						
	95	100	100						
	88	89	89						
				15.829.847	24.201.115	26.855.549	29.668.669	31.552.804	128.107.983
	94	100	100						
	2	0	0						
	92	100	100						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 1.1 : PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								
UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Layanan Perkantoran		Bulan Layanan		12	12	12	
	1	Jumlah bulan layanan pendukung kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman	Bulan Layanan		12	12	12	
2	Peraturan Pengembangan Kawasan Permukiman		NSPK		2	2	2	
	1	Jumlah NSPK bidang pengembangan kawasan permukiman yang tersusun	NSPK		2	2	2	
3	Pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan permukiman		Kab/Kota		110	100	100	
	1	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman	Kab/Kota		110	100	100	
4	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan		Ha		2679,78	9300	9500	
	1	Luas peningkatan kualitas permukiman di 38.341 Ha daerah perkotaan	Ha		2679,78	9300	9500	
5	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan		Ha		47530	7683	7501	
	1	Luas peningkatan kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan	Ha		47530	7683	7501	
6	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus		Ha		266	500	667	
	1	Luas peningkatan kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus	Ha		266	500	667	
7	Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat		Kelurahan		1477	1483	1633	
	1	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan masyarakat di 7.683 kelurahan	Kelurahan		1477	1483	1633	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				4.863.151	10.604.752	10.835.752	10.275.752	9.868.593	46.448.000
	12	12	60						
	12	12	60						
	2	2	10						
	2	2	10						
	100	97	507						
	100	97	507						
	8900	8051,47	38431,24956						
	8900	8051,47	38431,24956						
	7835	7835	78384						
	7835	7835	78384						
	833	833	3099						
	833	833	3099						
	1620	1470	7683						
	1620	1470	7683						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
8	Fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas		Kota/kab dan kawasan		0	5 kota, 4 kawasan perkotaan metropolitan, 168 kota/kawasan perkotaan	5 kota, 3 kawasan perkotaan metropolitan, 188 kota/kawasan perkotaan	
	1	Jumlah kab/kota dan kawasan perkotaan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas	Kota/kab dan kawasan		0	5 kota, 4 kawasan perkotaan metropolitan, 168 kota/kawasan perkotaan	5 kota, 3 kawasan perkotaan metropolitan, 188 kota/kawasan perkotaan	
9	Perintisan inkubasi kota baru		Kota/kab		0	2	3	
	1	Jumlah kota/kab yang dilakukan perintisan inkubasi	Kota/kab		0	2	3	
KEGIATAN 1.2: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, PENGELOLAAN GEDUNG, DAN RUMAH								
UNIT KERJA: DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan							
	1	Jumlah NSPK Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan	NSPK		10	2	2	
2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung							
	1	Luas penyelenggaraan bangunan gedung	m2		9.320	13.900	20.860	
3	Penataan Bangunan							
	1	Luas penyelenggaraan penataan bangunan	m2		253.000	137.000	188.000	
4	Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung							
	1	Jumlah pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di kota / kab	kab/kota		507	507	507	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5 kota, 3 kawasan perkotaan metropolitan, 194 kota/kawasan perkotaan	3 kota, 2 kawasan perkotaan metropolitan, 194 kota/kawasan perkotaan	18 kota, 12 kawasan, perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan						
	5 kota, 3 kawasan perkotaan metropolitan, 194 kota/kawasan perkotaan	3 kota, 2 kawasan perkotaan metropolitan, 194 kota/kawasan perkotaan	18 kota, 12 kawasan, perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan						
	3	2	10						
	3	2	10						
AH NEGARA									
				1.253.614	1.202.533	1.666.127	1.970.129	2.339.967	8.432.370
	2	2	18						
	33.740	46.800	124.620						
	192.000	192.000	962.000						
	507	507	507						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 1.3: PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR								
UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal		Kab/Kota		147	177	200	
	1	Jumlah Kab/Kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota	Kab/Kota		7	7	10	
	2	Jumlah Kab/Kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal	Kab/Kota		80	95	120	
	3	Jumlah Kab/Kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kawasan	Kab/Kota		60	65	70	
2	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		Kab/Kota		32	30	57	
	1	Jumlah Kab/Kota yang dibangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab/Kota		32	30	57	
3	Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah		Kab/Kota		56	22	32	
	1	Jumlah Kab/Kota yang dibangun TPA	Kab/Kota		56	22	32	
4	Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R		Kab/Kota		103	110	125	
	1	Jumlah Kab/Kota yang dibangun TPST/3R	Kab/Kota		103	110	125	
5	Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah		Kab/Kota		3	5	15	
	1	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi Pengolahan Akhir Sampah	Kab/Kota		3	5	15	
6	Infrastruktur Drainase		Ha		600 Ha	600 Ha	1.000 Ha	
	1	Luas Genangan Tertangani	Ha		600 Ha	600 Ha	1.000 Ha	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN									
				3.835.000	5.466.000	6.894.000	9.077.000	10.373.000	35.645.000
	142	115	620						
	12	12	12						
	90	73	458						
	40	30	150						
	57	46	222						
	57	46	222						
	32	21	163						
	32	21	163						
	96	85	850 kawasan 343 kab/kota						
	96	85	850 kawasan 343 kab/kota						
	10	11	46 kawasan 45 kab/kota						
	10	11	46 kawasan 45 kab/kota						
	1.000 Ha	1.300 Ha	192 kab/kota di 4.500 Ha						
	1.000 Ha	1.300 Ha	192 kab/kota di 4.500 Ha						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
7	Pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi		Kab/Kota		507	507	507	
	1	Jumlah Kab/Kota yang diselenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi pelaksanaan PPLP	Kab/Kota		507	507	507	
KEGIATAN 1.4: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYE								
UNIT KERJA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional							
	1	Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM Regional	L/d		700	700	350	
			SR		70.000	70.000	35.000	
2	Pembangunan Infrastruktur SPAM Perkotaan							
	1	Debit dan dan jumlah sambungan rumah SPAM IKK	L/d		2.100	2.100	2.160	
			SR		210.000	210.000	216.000	
	2	Debit dan dan jumlah sambungan rumah SPAM Ibu Kota Pemekaran/ Perluasan	L/d		-	540	480	
			SR		-	81.000	74.000	
3	Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan							
	1	Debit dan dan jumlah sambungan rumah SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat	L/d		1.278	1.274	1.536	
			SR		408.960	407.680	491.520	
4	Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Khusus							
	1	Debit dan dan jumlah sambungan rumah SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan	L/d		180	180	160	
			SR		18.000	18.000	16.000	
	2	Debit dan dan jumlah sambungan rumah SPAM di Kawasan Nelayan	L/d		68	55	43	
			SR		6.750	5.500	4.250	
	3	Debit dan dan jumlah sambungan rumah SPAM di Kawasan Rawan Air/ Perbatasan/Pulau Terluar	L/d		84	96	111	
			SR		26.880	30.720	35.520	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	507	507	507						
	507	507	507						
DIAAN AIR MINUM									
				5.265.500	6.168.970	6.826.940	7.542.120	8.096.450	33.899.980
	700	1.050	3.500						
	70.000	105.000	350.000						
	1.980	1.860	10.200						
	198.000	186.000	1.020.000						
	540	510	2.070						
	85.000	73.000	313.000						
	1.588	1.598	7.274						
	508.160	511.360	2.327.680						
	140	110	770						
	14.000	11.000	77.000						
	40	33	238						
	4.000	3.250	23.750						
	99	102	492						
	31.680	32.640	157.440						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
5	Fasilitasi SPAM PDAM		PDAM		122	122	169	
			Kawasan		349	1.140	1.140	
	1	Jumlah PDAM yang difasilitasi	PDAM		122	122	169	
	2	Jumlah kawasan SPAM MBR yang dikembangkan jaringannya	Kawasan		349	1.140	1.140	
6	Fasilitasi SPAM Non-PDAM		Kawasan		0	400	400	
	1	Jumlah UPTD yang difasilitasi	Kawasan			50	50	
	2	Jumlah kawasan SPAM MBR yang dikembangkan jaringannya	Kawasan			350	350	
7	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Air Minum		Kab/Kota		-	507	507	
	1	Jumlah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan air minum di Kab/Kota	Kab/Kota			507	507	

KEGIATAN 1.5: DUKUNGAN MANAJEMEN BIDANG PERMUKIMAN

UNIT KERJA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

SASARAN KEGIATAN

1	Pengelolaan administrasi perkantoran		Bulan		12	12	12	
	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan		12	12	12	
2	Pengelolaan kepegawaian dan ortala, keuangan, perlengkapan dan SIMAK-BMN, dan hukum		Laporan Dokumen Bulan		59 11 12	59 11 12	59 11 12	
	1	Jumlah laporan kepegawaian dan ortala	Laporan		23	23	23	
	2	Jumlah laporan keuangan dan umum	Laporan		15	15	15	
	3	Jumlah dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara	Dokumen		11	11	11	
	4	Jumlah Laporan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum	Laporan		21	21	21	
	5	Jumlah layanan PNBP	Bulan		12	12	12	
3	Pengelolaan Habitat		Laporan		3	3	3	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	47	47	174						
	1.140	1.140	522						
	47	47	174						
	1.140	1.140	522						
	400	350	1.450						
	50		50						
	350	350	1.400						
	507	507	507						
	507	507	507						
				274.809	326.491	338.239	324.883	337.716	1.602.138
	12	12	60	61.612	55.752	61.252	66.753	72.253	317.622
	12	12	60						
	59 11 12	59 11 12	295 55 12	66.169	66.044	69.392	72.404	76.487	350.496
	23	23	115						
	15	15	75						
	11	11	55						
	21	21	105						
	12	12	60						
	3	3	15	3.700	4.450	4.850	5.100	5.550	23.650

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
4	Penyediaan sarana dan prasarana Gedung/ Kantor		Paket Bulan		9 12	9 12	9 12	
5	Bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak		Paket Bantuan		20	20	20	
6	Bimbingan Teknis Bidang Cipta Karya		Angkatan		80	85	85	
KEGIATAN 1.6: PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN								
UNIT KERJA: DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pengelolaan administrasi perkantoran		Bulan		12	12	12	
	1	Jumlah pengelolaan administrasi Perkantoran	Bulan		12	12	12	
2	Kebijakan dan strategi Bidang permukiman		Dokumen		6	6	6	
	1	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang permukiman jangka panjang dan jangka menengah	Dokumen		6	6	6	
3	Program dan anggaran Bidang permukiman		Laporan		7	7	7	
4	Administrasi penyelenggaraan pinjaman, hibah, dan kerja sama internasional		Laporan		8	8	8	
	1	Jumlah laporan kerja sama dan penyiapan administrasi pinjaman/ hibah luar negeri	Laporan		2	2	2	
	2	Jumlah dokumen penyiapan administrasi pinjaman, hibah, dan kerjasama internasional	Laporan		3	3	3	
	3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pinjaman, hibah, dan kerjasama internasional	Laporan		3	3	3	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	9 12	9 12	50 60	9.000	15.500	18.000	20.700	23.500	86.700
	20	20	100	76.565	129.600	129.600	104.781	104.781	545.327
	85	85	420	57.763	55.145	55.145	55.145	55.145	278.343
				275.779	330.971	185.901	361.261	377.561	1.531.471
	12	12	60	46.719	46.585	47.935	49.355	50.845	241.440
	12	12	60						
	6	6	30	12.000	15.750	16.540	17.360	18.230	79.880
	6	6	30						
	7	7	35	82.555	68.345	70.985	73.735	76.625	372.246
	8	8	40	11.800	15.750	16.540	17.360	18.230	79.680
	2	2	10						
	3	3	15						
	3	3	15						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
5	Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bidang permukiman		Laporan		9	9	9	
	1	Jumlah laporan evaluasi dampak dan manfaat serta kelayakan Bidang permukiman	Laporan		5	5	5	
	2	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang permukiman	Laporan		4	4	4	
6	Pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik Bidang permukiman		Laporan		7	7	7	
7	Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman		Laporan		64	64	64	

KEGIATAN 1.7: DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SANITASI DAN PERSAMPAHAN

UNIT KERJA: BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SASARAN KEGIATAN

1	Peraturan Pengembangan SPAM, Sanitasi, dan Persampahan		SPK		5	5	5	
	1	Jumlah Konsep Standar/Pedoman/ Kriteria yang disusun	SPK		5	5	5	
2	Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM		Laporan		3	4	5	
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM dan Sanitasi	Laporan		3	4	5	
3	Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasi		Laporan		49	49	50	
	1	Jumlah Laporan Fasilitasi Opsi Pembiayaan dan kepengusahaan SPAM dan Sanitasi	Laporan		49	49	50	

PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM

1	Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni							
	1	Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif penghuni	%		0,63	2,01	2,75	
	2	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	%		1,47	3,04	10,29	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	9	9	45	11.918	15.490	16.260	17.070	17.930	78.668
	5	5	25						
	4	4	20						
	7	7	35	13.108	16.800	17.640	18.520	19.450	85.518
	64	64	320	97.679	152.250	-	167.860	176.250	594.039
				61.994	101.398	108.590	117.524	159.518	549.024
	5	5	25						
	5	5	25						
	5	5	22						
	5	5	22						
	51	46	245						
	51	46	245						
				7.768.028	8.780.260	52.731.673	55.410.349	59.972.500	184.662.810
	2,83	2,96	11,18						
	14,60	14,71	44,12						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 2.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN								
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan		Laporan		76	77	76	
	1	Jumlah Laporan Pengembangan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Laporan	Pusat	5	5	5	
	2	Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian	Laporan	Pusat	2	2	2	
	3	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Laporan	Pusat	4	4	4	
	4	Jumlah Laporan Pembinaan dan Fasilitasi Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan	Laporan	Pusat	8	8	8	
	5	Jumlah Laporan Pelayanan Pertimbangan/Opini hukum dan Pendampingan hukum	Laporan	Pusat	4	4	4	
	6	Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi Keuangan	Laporan	Pusat	5	5	5	
	7	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	Pusat	3	3	3	
	8	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi, Umum dan Pengelolaan BMN, Laporan pelayanan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan	Laporan	Pusat	3	3	3	
	9	Jumlah Laporan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan ditjen perumahan	Laporan	Pusat	3	3	3	
10	Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip dan Tata Persuratan	Laporan	Pusat	3	3	3		

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				220.141	220.630	191.277	199.974	203.805	1.035.826
	77	76	286	220.141	220.630	191.277	199.974	203.805	1.035.826
	5	5	25						
	2	2	10						
	4	4	20						
	8	8	40						
	4	4	20						
	5	5	25						
	3	3	15						
	3	3	15						
	3	3	15						
	3	3	15						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	11	Jumlah Laporan Tata Usaha Pimpinan	Laporan	Pusat	1	1	1	
	12	Jumlah Laporan Layanan Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi	Laporan	Pusat	5	5	5	
	13	Jumlah Laporan fasilitasi Pelaporan Pimpinan	Laporan	Pusat	3	3	3	
	14	Jumlah Laporan Tanggap Darurat Bencana Bidang Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	1	1	1	
	15	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Laporan	Pusat	1	1	1	
	16	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Laporan	Pusat	1	1	1	
	17	Kendaraan Bermotor	Laporan	Pusat	0	1	0	
	18	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	Pusat	12	12	12	
	19	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan	Pusat	12	12	12	
KEGIATAN 2.2 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Perencanaan dan Pembinaan Penyediaan Perumahan		Dokumen/ Laporan		36 30	35 31	34 31	
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis Penyediaan Perumahan	Dokumen	Pusat	6	6	4	
	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Penyediaan Perumahan	Dokumen	Pusat	4	4	4	
	3	Jumlah Dokumen RP3KP	Dokumen	Pusat	8	8	8	
	4	Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Susun dan Rumah Khusus	Laporan	Pusat	1	1	1	
	5	Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial	Laporan	Pusat	1	1	1	
	6	Jumlah Laporan Kemitraan Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	2	2	2	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	1	5						
	5	5	25						
	3	3	15						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	0	2						
	12	12	12						
	12	12	12						
				103.507	188.240	134.326	149.999	161.679	737.752
	33 31	34 33	172 108	103.507	188.240	134.326	149.999	161.679	737.752
	4	4	24						
	4	4	20						
	8	8	40						
	1	1	5						
	1	1	5						
	2	2	10						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	7	Jumlah Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	3	3	3	
	8	Jumlah Dokumen Pedoman dan Kriteria Evaluasi Penyediaan Perumahan	Dokumen	Pusat	2	1	2	
	9	Jumlah Laporan Pemantauan Kegiatan Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	2	2	2	
	10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	3	4	4	
	11	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan Perumahan	Laporan	Pusat	3	3	3	
	12	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Laporan	Pusat	2	2	2	
	13	Jumlah Laporan Pengembangan Informasi Perumahan	Laporan	Pusat	1	1	1	
	14	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hunian Skala Besar	Dokumen	Pusat	8	8	8	
	15	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar	Dokumen	Pusat	8	8	8	
	16	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan	Pusat	12	12	12	
KEGIATAN 2.3 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL								
SASARAN KEGIATAN								
1	Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial		Dokumen/ Laporan		35 12	35 12	35 12	
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis, Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Rumah Umum dan Komersial	Dokumen	Pusat	7	7	7	
	2	Jumlah Dokumen Pengaturan dan Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial	Dokumen	Pusat	7	7	7	
	3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum	Dokumen	Pusat	8	8	8	
	4	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pelaksanaan Hunian Berimbang	Dokumen	Pusat	6	6	6	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	3	15						
	1	2	8						
	2	2	10						
	4	6	21						
	3	3	15						
	2	2	10						
	1	1	5						
	8	8	40						
	8	8	40						
	12	12	12						
				394.340	376.880	1.637.376	1.489.732	1.782.416	5.680.744
	35 12	35 12	175 12						
	7	7	35						
	7	7	35						
	8	8	40						
	6	6	30						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	5	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama, Pendataan, dan Pemantauan Penyediaan Tanah	Dokumen	Pusat	7	7	7	
	6	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan	Pusat	12	12	12	
2	Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Difasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum (PSU)		Unit/ Laporan		40.700 12	42.000 12	180.000 12	
	1	Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum (PSU)	Unit	Tersebar di 34 Provinsi	40.700	42.000	180.000	
	2	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan		12	12	12	
KEGIATAN 2.4 : PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA								
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR RUMAH SWADAYA								
SASARAN KEGIATAN								
1	Keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi		Dokumen / Laporan		9 18	9 18	10 18	
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Perumahan Swadaya	Dokumen	Pusat	3	3	4	
	2	Jumlah Dokumen Pembinaan Pendataan Rumah Swadaya	Dokumen	Pusat	3	3	3	
	3	Jumlah Dokumen Pembinaan Pemberdayaan MBR dalam Penyediaan Rumah Swadaya	Dokumen	Pusat	3	3	3	
	4	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Swadaya	Laporan	Pusat	3	3	3	
	5	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Rumah Swadaya	Laporan	Pusat	3	3	3	
	6	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan	Pusat	12	12	12	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	7	35						
	12	12	12						
	190.000 12	224.250 12	676.950 12						
	190.000	224.250	676.950						
	12	12	12						
				1.515.800	2.729.460	8.348.147	10.953.720	10.711.988	34.259.115
	9 18	10 18	47 42						
	3	4	17						
	3	3	15						
	3	3	15						
	3	3	15						
	3	3	15						
	12	12	12						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
2	Pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah swadaya		Rumah Tangga Bulan		70.000 12	126.000 12	410.000 12	
	1	Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Rumah Tangga	Tersebar di 34 Provinsi	20.000	22.500	60.000	
	2	Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Rumah Tangga	Tersebar di 34 Provinsi	50.000	103.500	350.000	
	3	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan		12	12	12	
KEGIATAN 2.5 : PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH KHUSUS								
SASARAN KEGIATAN								
1	Perencanaan, Pembinaan, dan Penyediaan Rumah Khusus		Dokumen/ Laporan		40 12	34 12	35 12	
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah Khusus dan Negara	Dokumen	Pusat	5	3	3	
	2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan Pengendalian Kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara	Dokumen	Pusat	5	7	8	
	3	Jumlah Laporan Pembinaan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus dan Rumah Negara	Dokumen	Pusat	2	2	2	
	4	Jumlah Dokumen Pengaturan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus dan Rumah Negara	Dokumen	Pusat	7	4	4	
	5	Jumlah Dokumen Pengaturan Pendaftaran dan Penghunian Rumah Negara	Dokumen	Pusat	5	2	2	
	6	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penghunian Rumah Negara	Dokumen	Pusat	6	6	6	
	7	Jumlah Laporan Penghunian Rumah Negara	Dokumen	Pusat	3	3	3	
	8	Jumlah Laporan Pengelolaan Rumah Negara	Dokumen	Pusat	2	2	2	
	9	Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah Negara	Dokumen	Pusat	5	5	5	
	10	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan	Pusat	12	12	12	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	556.000 12	578.000 12	1.750.000 12						
	69.500	78.000	250.000						
	496.500	500.000	1.500.000						
	12	12	12						
				1.499.240	1.383.430	2.657.224	3.235.849	3.676.218	12.451.961
	35 12	36 12	180 12						
	4	4	19						
	7	8	35						
	2	2	10						
	4	4	23						
	2	2	13						
	6	6	30						
	3	3	15						
	2	2	10						
	5	5	25						
	12	12	12						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
2	Rumah khusus di daerah pasca bencana/ konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung		Unit/ Laporan		7.320 12	6.000 12	11.000 12	
	1	Jumlah Rumah Khusus Terbangun beserta PSU dan Meubelair	Unit	1. Kawasan Perbatasan Negara 2. Pasca Bencana dan Konflik 3. Maritim 4. Daerah Tertinggal	7.320	5.000	10.000	
	2	Jumlah Rumah Khusus yang direvitalisasi	Unit	1. Kawasan Perbatasan Negara 2. Pasca Bencana dan Konflik 3. Maritim 4. Daerah Tertinggal	1.000	1.000	1.000	
	3	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan		12	12	12	
KEGIATAN 2.6 : PENYEDIAAN RUMAH SUSUN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH SUSUN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Perencanaan, Pembinaan, Bantuan, dan Penyediaan Rumah Susun		Dokumen Laporan Bulan		7 6 12	7 6 12	7 6 12	
	1	Jumlah Dokumen Analisa Teknis Penyediaan Rumah Susun	Dokumen	Pusat	2	2	2	
	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Rumah Susun	Dokumen	Pusat	1	1	1	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	13.680 12	16.000 12	55.000 12						
	12.680	15.000	50.000						
	1.000	1.000	5.000						
	12	12	12						
				4.035.000	3.881.620	39.763.323	39.381.075	43.436.394	130.497.412
	7 6 12	7 6 12	35 30 12						
	2	2	10						
	1	1	5						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	3	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Standar Penyediaan Rumah Susun	Dokumen	Pusat	2	2	2	
	4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyediaan Rumah Susun	Laporan	Pusat	2	2	2	
	5	Jumlah Laporan Pendampingan Penyediaan Rumah Susun	Laporan	Pusat	2	2	2	
	6	Jumlah Dokumen Penghunan dan Pengelolaan Rumah Susun	Dokumen	Pusat	2	2	2	
	7	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Susun	Laporan	Pusat	2	2	2	
	8	Layanan Perkantoran	Bulan	Pusat	12	12	12	
2	Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya		Unit Laporan		20.500 12	15.000 12	160.000 12	
	1	Jumlah Satuan Rumah Susun Terbangun beserta PSU dan Meubelair	Unit	Tersebar di 34 Provinsi	20.500	15.000	160.000	
	2	Laporan Layanan Perkantoran	Laporan		12	12	12	

PROGRAM 3: PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM (Alokasi Anggaran Diluar BA 999.03 dan BA 999.07)

1	Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan *)		%		2,20	3,81	6,36	
	1	Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah	%		2,20	3,81	6,36	
2	Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07) **)		%		5,91	10,23	17,05	
	1	Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan	%		5,91	10,23	17,05	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	12	12	12						
	165.000 12	189.500 12	550.000 12						
	165.000	189.500	550.000						
	12	12	12						
				341.517	361.852	383.461	406.367	430.499	1.923.696
	7,63	2,88	22,88	341.517	361.852	383.461	406.367	430.499	1.923.696
	7,63	2,88	22,88						
	20,45	7,73	61,36	10.335.391	25.550.143	43.360.134	58.820.664	26.426.115	164.492.447
	20,45	7,73	61,36						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 3.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan		Laporan	Jakarta	25	25	25	
	1	Jumlah laporan penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	Laporan	Jakarta	3	3	3	
	2	Jumlah laporan perencanaan, pembinaan dan manajemen kepegawaian	Laporan	Jakarta	3	3	3	
	3	Jumlah laporan keuangan	Laporan	Jakarta	3	3	3	
	4	Jumlah laporan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pembinaan	Laporan	Jakarta	5	5	5	
	5	Jumlah laporan pertimbangan/ opini hukum dan pendampingan hukum	Laporan	Jakarta	4	4	4	
	6	Jumlah laporan kehumasan dan keprotokolan	Laporan	Jakarta	5	5	5	
	7	Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	
	8	Jumlah laporan evaluasi kinerja Setditjen	Laporan	Jakarta	1	1	1	
2	Layanan perkantoran		Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	
	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				81.183	81.183	81.183	81.183	81.183	405.916
	25	25	125	19.183	19.183	19.183	19.183	19.183	95.916
	3	3	15						
	3	3	15						
	3	3	15						
	5	5	25						
	4	4	20						
	5	5	25						
	1	1	5						
	1	1	5						
	12	12	60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	310.000
	12	12	60						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 3.2 : PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangan sistem informasi pembiayaan perumahan		Dokumen	Jakarta	8	8	8	
	1	Jumlah materi teknis/dokumen kebijakan dan strategi bidang pembiayaan perumahan	Materi Teknis/ Dokumen	Jakarta	3	3	3	
	2	Jumlah dokumen analisis makro bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	
	3	Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dan kemudahan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	
	4	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	Jakarta	2	2	2	
	5	Jumlah dokumen data pengembangan sistem informasi bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	
2	Laporan evaluasi kinerja dan layanan perkantoran		Laporan Bulan Layanan	Jakarta	3 12	3 12	3 12	
	1	Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan	Laporan	Jakarta	3	3	3	
	2	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	
3	MOU kerjasama pembiayaan perumahan		MOU	Jakarta	29	41	51	
	1	Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah	MOU	Jakarta	29	39	49	
	2	Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaan perumahan	MOU	Jakarta	0	2	2	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				11.057	14.121	16.346	17.799	19.327	78.651
	8	8	40	7.900	9.540	11.508	12.689	13.988	55.624
	3	3	15						
	1	1	5						
	1	1	5						
	2	2	10						
	1	1	5						
	3	3	15	1.697	1.781	1.870	1.964	2.064	9.378
	12	12	60						
	3	3	15						
	12	12	60	1.460	2.800	2.968	3.146	3.275	13.649
	69	84	93						
	64	79	79						
	5	5	14						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 3.3 : PENGEMBANGAN POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Materi teknis, NSPK, rencana dan strategi, pengembangan pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak, rumah susun dan rumah swadaya		Materi Teknis Rumusan NSPK	Jakarta	9 1	10 1	10 1	
	1	Jumlah materi teknis/ dokumen rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaan perumahan	Materi Teknis/ Dokumen	Jakarta	3	4	4	
	2	Jumlah rumusan NSPK pola pembiayaan perumahan	Materi Teknis	Jakarta	1	1	1	
			Rumusan NSPK	Jakarta	1	1	1	
	3	Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun	Materi Teknis	Jakarta	2	2	2	
	4	Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya	Materi Teknis	Jakarta	1	1	1	
	5	Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro	Materi Teknis	Jakarta	1	1	1	
	6	Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan	Materi Teknis	Jakarta	1	1	1	
2	Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak dan rumah susun, dan rumah swadaya		Rumusan Rapermen	Jakarta	4	4	4	
	1	Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun	Rumusan Rapermen	Jakarta	1	1	1	
	2	Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya	Rumusan Rapermen	Jakarta	1	1	1	
	3	Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro	Rumusan Rapermen	Jakarta	1	1	1	
	4	Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan	Rumusan Rapermen	Jakarta	1	1	1	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				8.905	9.931	11.309	12.952	15.349	58.446
	10	11	50	6.000	6.600	7.260	7.986	9.574	37.420
	1	1	5						
	4	5	20						
	1	1	5						
	1	1	5						
	2	2	10						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	1	5	1.800	2.160	2.808	3.650	4.380	14.799
	4	4	20						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	1	5						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
3	Laporan evaluasi kinerja direktorat dan layanan perkantoran		Laporan Bulan Layanan	Jakarta	1 12	1 12	1 12	
	1	Jumlah Laporan evaluasi kinerja direktorat	Laporan	Jakarta	1	1	1	
	2	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	
4	Fasilitasi Bantuan Uang Muka untuk Rumah tangga berpenghasilan rendah (BA 999.07)		Rumah Tangga	Tersebar	55.000	106.500	124.250	
	1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat fasilitas bantuan uang muka (BA 999.07)	Rumah Tangga	Tersebar	55.000	106.500	124.250	
KEGIATAN 3.4 : PEMBINAAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Layanan perkantoran, materi teknis dan pedoman pembinaan serta pelaksanaan diseminasi sistem pembiayaan perumahan		Bulan Layanan Materi Teknis/ Dokumen Laporan		12 4 5	12 4 5	12 4 5	
	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	
	2	Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Materi Teknis/ Dokumen	Jakarta	2	2	2	
	3	Jumlah materi teknis/ dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Materi Teknis/ Dokumen	Jakarta	2	2	2	
	4	Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat	Laporan	Jakarta	2	2	2	
	5	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah I	Laporan	Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Babel, Kepri, Lampung, Riau, Jabar, DKI Jakarta, Banten	1	1	1	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	1	5	1.105	1.171	1.241	1.316	1.395	6.227
	12	12	60						
	1	1	5						
	12	12	60	220.000	479.250	621.250	684.035	395.280	2.399.815
	124.370	65.880	476.000						
	124.370	65.880	476.000						
				11.505	12.875	15.230	18.276	21.843	79.728
	12	12	60	7.105	7.815	8.597	10.316	12.379	46.211
	4	4	20						
	5	5	25						
	12	12	60						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	1	1	5						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	6	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah II	Laporan	Jateng, Jatim, Yogyakarta, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Bali, NTB, NTT	1	1	1	
	7	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah III	Laporan	Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Sultra, Maluku, Maluku, Papua, Papua Barat	1	1	1	
2	Layanan teknis pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah di wilayah		LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/ Kota		26 LKB/LKBB, 34 Provinsi dan 258 Kab/ Kota	26 LKB/LKBB, 34 Provinsi dan 258 Kab/Kota	26 LKB/LKBB, 34 Provinsi dan 514 Kab/ Kota	
	1	Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/ Kota	Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Babel, Kepri, Lampung, Riau, Jabar, DKI Jakarta, Banten	10 LKB/LKBB, 13 Provinsi dan 98 Kab/ Kota	10 LKB/LKBB, 13 Provinsi dan 98 Kab/Kota	10 LKB/LKBB, 13 Provinsi dan 195 Kab/ Kota	
	2	Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/ Kota	Jateng, Jatim, Yogyakarta, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Bali, NTB, NTT	10 LKB/LKBB, 11 Provinsi dan 88 Kab/ Kota	10 LKB/LKBB, 11 Provinsi dan 88 Kab/Kota	10 LKB/LKBB, 11 Provinsi dan 175 Kab/ Kota	
	3	Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/ Kota	Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Sultra, Maluku, Maluku, Papua, Papua Barat	6 LKB/LKBB, 10 Provinsi dan 72 Kab/Kota	6 LKB/LKBB, 10 Provinsi dan 72 Kab/Kota	6 LKB/LKBB, 10 Provinsi dan 144 Kab/Kota	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	1	5	4.400	5.060	6.633	7.960	9.464	33.516
	1	1	5						
	26 LKB/LKBB, 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota, 18 BLUD dan 16 swadaya mikro	26 LKB/LKBB, 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota, 16 BLUD dan 16 swadaya mikro	26 LKB/LKBB, 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota, 34 BLUD dan 32 swadaya mikro						
	10 LKB/LKBB, 13 Provinsi dan 195 Kab/Kota, 7 kota yang mendirikan BLUD dan 5 kota menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro	10 LKB/LKBB, 13 Provinsi dan 195 Kab/Kota, 6 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro	10 LKB/LKBB, 13 Provinsi dan 195 Kab/Kota, 13 kota yang mendirikan BLUD dan 11 kota menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro						
	10 LKB/LKBB, 11 Provinsi dan 175 Kab/Kota, 6 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro	10 LKB/LKBB, 11 Provinsi dan 175 Kab/Kota, 5 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro	10 LKB/LKBB, 11 Provinsi dan 175 Kab/Kota, 11 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro						
	6 LKB/LKBB, 10 Provinsi dan 144 Kab/Kota, 5 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro	6 LKB/LKBB, 10 Provinsi dan 144 Kab/Kota, 5 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro	6 LKB/LKBB, 10 Provinsi dan 144 Kab/Kota, 10 kota yang mendirikan BLUD dan menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 3.5 : PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Laporan evaluasi kinerja direktorat dan layanan perkantoran		Bulan Layanan Laporan	Jakarta	12 1	12 1	12 1	
	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	
	2	Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat	Laporan	Jakarta	1	1	1	
2	Layanan teknis pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan		LKB/LKBB Perusahaan		6 0	37 15	54 20	
	1	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Dokumen	Jakarta	2	2	2	
	2	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Materi Teknis	Jakarta	1	1	1	
			Rumusan N/S/P/K	Jakarta	1	1	1	
	3	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan	LKB	Tersebar	5	20	25	
	4	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan	LKBB	Tersebar	0	10	15	
	5	Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, asuransi, bapertarum PNS, dan TWP TNI/ POLRI untuk pembiayaan pembangunan perumahan (quick wins/progam lanjutan)	%	Jakarta	1	5	7	
	6	Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan	% peningkatan dana pinjaman likuidasi	Jakarta	8	8	8	
			% peningkatan sekuritisasi	Jakarta	15	15	15	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				11.800	12.936	14.183	15.551	17.054	71.523
	12	12	60	1.105	1.171	1.241	1.316	1.395	6.227
	1	1	5						
	12	12	60						
	1	1	5	10.695	11.765	12.941	14.236	15.659	65.296
	62	85	85						
	20	25	25						
	2	2	10						
	1	1	5						
	1	1	5						
	25	35	35						
	15	20	20						
	9	10	10						
	8	8	38						
	15	15	75						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	7	Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan	Rancangan Peraturan (quick wins)	Jakarta	1	0	0	
	8	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan	RUU/ RPP/ RaPerpres/ Rancangan Inpres	Jakarta	1 rancangan peraturan	1 RUU	2 RPP dan 2 Raperpres	
	9	Jumlah Lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan	LKB/LKBB	Jakarta	0	5	10	
	10	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat	LKB/LKBB	Jakarta	1	2	4	
	11	Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan	Perusahaan	Tersebar	0	15	20	
KEGIATAN 3.6 : PENGENDALIAN KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT EVALUASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Layanan perkantoran, evaluasi kinerja, rencana dan pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan		Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	
			Laporan		2	2	2	
			Dokumen		4	4	4	
	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	
	2	Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat	Laporan	Jakarta	2	2	2	
	3	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan	Dokumen	Jakarta	4	4	4	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0	0	1						
	1 rancangan peraturan	1 rancangan peraturan	3 rancangan peraturan, 1 RUU, 2 RPP dan 2 Raperpres						
	15	20	20						
	7	10	10						
	20	25	25						
				16.250	17.939	19.572	21.429	22.215	97.405
	12	12	60	3.800	4.028	4.270	4.526	4.797	21.421
	2	2	10						
	4	4	20						
	12	12	60						
	2	2	10						
	4	4	20						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
2	Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan di wilayah		Laporan		8	8	8	
	1	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah I	Laporan	SUMATERA	2	2	2	
	2	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah II	Laporan	JAWA-BALI	2	2	2	
	3	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah III	Laporan	KALIMANTAN-SULAWESI	2	2	2	
	4	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah IV	Laporan	MALUKU, MALUT, PAPUA, PAPUA BARAT, NTT, NTB	2	2	2	
KEGIATAN 3.7 (PNBP) : DUKUNGAN PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BLU)								
SASARAN KEGIATAN								
1	Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU), legal dan bantuan hukum		Dokumen	Jakarta	35	35	35	
	1	Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi	Dokumen	Jakarta	5	5	5	
	2	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	Dokumen	Jakarta	2	2	2	
	3	Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum	Dokumen	Jakarta	28	28	28	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	8	40	12.450	13.911	15.302	16.903	17.418	75.985
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
	2	2	10						
				200.817	212.866	225.638	239.177	253.527	1.132.026
	35	35	175	29.400	31.164	33.034	35.016	37.117	165.731
	5	5	25						
	2	2	10						
	28	28	140						

SASARAN/			SATUAN	LOKASI	TARGET			
INDIKATOR KINERJA					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
2	Layanan kerjasama dan rekonsiliasi LJK		LKB/LKBB		49	59	69	
	1	Jumlah lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	LKB/LKBB	Tersebar	29	39	49	
	2	Jumlah rekonsiliasi dengan LJK	LKB/LKBB	Jakarta	20	20	20	
3	Laporan keuangan, informasi, evaluasi, pembinaan, layanan perkantoran		Laporan	Jakarta	29	29	29	
			Bulan Layanan		12	12	12	
	1	Jumlah laporan keuangan	Laporan	Jakarta	8	8	8	
	2	Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana	Rumah Tangga	Jakarta	130.000	225.000	375.000	
	3	Jumlah laporan pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi	Laporan	Jakarta	2	2	2	
	4	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	Laporan	Jakarta	2	2	2	
	5	Jumlah laporan pemenuhan SDM yang berkualitas	Laporan	Jakarta	1	1	1	
	6	Jumlah laporan publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	Laporan	Jakarta	2	2	2	
	7	Jumlah laporan BMN	Laporan	Jakarta	14	14	14	
	8	Jumlah layanan administrasi perkantoran	Bulan Layanan	Jakarta	12	12	12	
	9	Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	Jakarta	30	30	30	
4	Output Cadangan		1 Paket	Tersebar	1	1	1	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	84	99	99	600	636	674	715	757	3.382
	64	79	79						
	20	20	20						
	29	29	145	40.877	43.330	45.930	48.685	51.606	230.428
	12	12	60						
	8	8	40						
	450.000	170.000	1.350.000						
	2	2	10						
	2	2	10						
	1	1	5						
	2	2	10						
	14	14	70						
	12	12	60						
	30	30	150						
	1	1	5	129.940	137.737	146.001	154.761	164.047	732.485

SASARAN/		SATUAN	LOKASI	TARGET				
INDIKATOR KINERJA				2015	2016	2017		
1		2	3	4	5	6		
KEGIATAN 3.8 (BA 999.03) : PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BLU)								
SASARAN KEGIATAN								
1	Bantuan pembiayaan perumahan ke bank pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah		Unit Rumah/ Sarusun	Tersebar	130.000	225.000	375.000	
	1	Jumlah unit KPR sejahtera tapak yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Rumah	Tersebar	130.000	150.000	175.000	
	2	Jumlah unit KPR sarusun yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Sarusun	Tersebar	0	25.000	50.000	
	3	Jumlah unit KPR sewa beli untuk sarusun yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Sarusun	Tersebar	0	0	0	
	4	Jumlah unit Kredit Konstruksi yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Rumah	Tersebar	0	1.000	1.500	
	5	Jumlah unit KPR Swadaya yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Rumah	Tersebar	0	50.000	150.000	

				ANGGARAN (X Rp. Juta)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				10.115.391	25.070.893	42.738.884	58.136.629	26.030.835	162.092.632
	450.000	170.000	1.350.000	10.115.391	25.070.893	42.738.884	58.136.629	26.030.835	162.092.632
	173.500	91.500	720.000						
	75.000	26.500	176.500						
	1.500	2.000	3.500						
	2.000	1.500	6.000						
	200.000	50.000	450.000						

TABEL 2.5. MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TUJUAN 5

TUJUAN 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
SASARAN STRATEGIS							
1	Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas						
(1)	Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%		72,25	77,5	82,75	
2	Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana						
(1)	Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana	%		80	85	89,5	
3	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan rencana program dan anggaran pembangunan bidang PUPR						
(1)	Tingkat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR	%		51	54	57	
4	Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas						
(1)	Prosentase sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritasi	%		10	25	40	
5	Meningkatnya inovasi teknis terapan bidang PUPR						
(1)	Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR	%		67	69	71	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	88	94,5	94,5						
	94	100	100						
	60	63	63						
	55	75	75						
	73	75	75						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							
SASARAN PROGRAM							
1	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR						
	1	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah	Nilai	74	75	76	
	2	Opini WTP hasil audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	
	3	Transparansi pelaksanaan program	Publikasi	55%	65%	75%	
	4	Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai	Layanan	60%	70%	80%	
	5	Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum	Fasilitasi	85%	90%	93%	
KEGIATAN 1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN PHLN							
UNIT ORGANISASI : BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI							
SASARAN KEGIATAN							
1	Fasilitasi pendanaan infrastruktur daerah		Transparansi mekanisme	100%	100%	100%	
	1	Mekanisme proses pengusulan DAK yang transparan	Transparansi mekanisme	100%	100%	100%	
2	Pengelolaan administrasi anggaran		Ketepatan waktu	100%	100%	100%	
	1	Penyusunan dokumen administrasi anggaran yang tepat waktu	Ketepatan waktu	100%	100%	100%	
3	Koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri		Transparansi mekanisme	100%	100%	100%	
	1	Mekanisme pengusulan pinjaman, hibah, investasi, dan administrasi kerja sama luar negeri yang transparan	Transparansi mekanisme	100%	100%	100%	
4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program		Kualitas Data Nilai	100% 74	100% 75	100% 76	
	1	Data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini	Kualitas Data	100%	100%	100%	
	2	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat waktu	Nilai	74	75	76	
5	Pengelolaan administrasi Perkantoran		Bulan	12	12	12	
	1	Fasilitasi Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				197.550	214.478	237.218	263.845	297.251	1.210.342
	77	78	78						
	WTP	WTP	WTP						
	85%	100%	100%						
	90%	100%	100%						
	96%	100%	100%						
				50.550	60.417	73.285	88.456	107.759	380.467
	100%	100%	100%	8.900	11.125	13.906	17.383	21.729	73.043
	100%	100%	100%						
	100%	100%	100%	7.282	9.102	11.378	14.222	17.778	59.762
	100%	100%	100%						
	100%	100%	100%	4.450	5.562	6.953	8.691	10.864	36.520
	100%	100%	100%						
	100% 77	100% 78	100% 78	13.375	13.950	15.200	15.850	17.000	75.375
	100%	100%	100%						
	77	78	78						
	12	12	60	16.543	20.678	25.848	32.310	40.388	135.767
	12	12	60						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 2 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI TATALAKSANA							
UNIT ORGANISASI : BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORTALA							
SASARAN KEGIATAN							
1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Organisasi, Tatalaksana dan Fasilitas Reformasi Birokrasi		Dokumen		3	9	9
	1	Jumlah Dokumen Organisasi, Tatalaksana, Perencanaan Pegawai dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3	9	9	
2	Pelaksanaan, Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian		Orang Dokumen		12 2.203	12 6.353	12 6.353
	1	Jumlah Dokumen Mutasi dan Layanan Umum Kepegawaian	Dokumen	1.200	4.500	4.500	
	2	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai	Dokumen	1.000	1.850	1.850	
	3	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	3	
	4	Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	Orang	12	12	12	
3	Pengelolaan administrasi Perkantoran		Laporan		2	2	2
	1	Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan	2	2	2	
KEGIATAN 3 : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN							
UNIT ORGANISASI : BIRO KEUANGAN							
SASARAN KEGIATAN							
1	Pembinaan Bidang Keuangan		orang		1.250	1.100	1.100
	1	Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pembinaan	orang	1.250	1.100	1.100	
2	Penatausahaan Perbendaharaan		laporan		6	6	6
	1	Jumlah laporan penatausahaan perbendaharaan	laporan	6	6	6	
3	Laporan Keuangan		laporan		17	15	15
	1	Jumlah Laporan penyusunan laporan keuangan	laporan	17	15	15	
4	NSPK bidang Keuangan		dokumen		8	2	2

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				45.100	45.671	47.953	50.349	52.877	241.950
	9	9	39	6.700	6.700	6.405	6.725	7.061	33.591
	9	9	39						
	12 6.353	12 6.353	60 27.615	19.200	19.571	21.073	22.126	23.243	105.213
	4.500	4.500	19.200						
	1.850	1.850	8.400						
	3	3	15						
	12	12	60						
	2	2	10	19.200	19.400	20.475	21.498	22.573	103.146
	2	2	10						
				32.000	35.000	37.000	40.000	45.000	189.000
	1.100	1.100	5.650						
	1.100	1.100	5.650						
	6	6	30						
	6	6	30						
	15	15	77						
	15	15	77						
	2	2	16						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	1	Jumlah dokumen peraturan bidang keuangan	dokumen		8	2	2	
5	Pengelolaan administrasi perkantoran		laporan		3	3	3	
	1	Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran	laporan		3	3	3	
KEGIATAN 4 : PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BANTUAN HUKUM								
UNIT ORGANISASI : BIRO HUKUM								
SASARAN KEGIATAN								
1	Penyusunan produk hukum dan pembinaan hukum		Dokumen Orang	Jakarta	30 320	30 320	30 320	
	1	Jumlah produk hukum yang diproses	Dokumen	Jakarta	30	30	30	
	2	Jumlah SDM yang dibina	Orang	Jakarta	320	320	320	
2	Bantuan hukum, opini hukum, pendampingan dan pembinaan hukum		Dokumen Orang	Jakarta	65 315	65 315	65 315	
	1	Jumlah perkara di Kementerian PUPR yang ditangani	Dokumen	Jakarta	40	40	40	
	2	Jumlah opini hukum, MoU, dan perjanjian kerjasama yang disusun	Dokumen	Jakarta	25	25	25	
	3	Jumlah SDM yang dibina	Orang	Jakarta	315	315	315	
3	Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum		Dokumen Orang	Jakarta	60 40	60 40	60 40	
	1	Jumlah dokumen hukum yang ditayangkan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Dokumen	Jakarta	60	60	60	
	2	Jumlah SDM yang dibina	Orang	Jakarta	40	40	40	
4	Proses penetapan rumah negara serta usulan pengalihan status rumah negara		Dokumen	Jakarta	80	80	80	
	1	Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan usulan pengalihan status rumah negara	Dokumen	Jakarta	80	80	80	
5	Pengelolaan administrasi perkantoran		Laporan	Jakarta	4	4	4	
	1	Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan	Jakarta	4	4	4	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	2	16						
	3	3	15						
	3	3	15						
				34.900	38.390	42.230	46.452	51.098	213.070
	30 320	30 320	150 1.600	12.350	13.585	14.944	16.438	18.082	75.399
	30	30	150						
	320	320	1.600						
	65 315	65 315	325 1575	12.350	13.585	14.944	16.438	18.082	75.399
	40	40	200						
	25	25	125						
	315	315	1.575						
	60 40	60 40	300 200	1.300	1.430	1.573	1.730	1.903	7.936
	60	60	300						
	40	40	200						
	80	80	400	700	770	847	932	1.025	4.274
	80	80	400						
	4	4	20	8.200	9.020	9.922	10.914	12.006	50.062
	4	4	20						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 5 : PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							
UNIT ORGANISASI : BIRO BMN DAN LAYANAN PENGADAAN							
SASARAN KEGIATAN							
1	Pengelolaan, penatausahaan dan pembinaan BMN	Laporan Unit Konsep NSPK		36 1 -	36 1 3	39 1 3	
1	Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan BMN	Laporan		12	12	13	
2	Jumlah laporan pengawasan, Pengamanan, dan Pengendalian BMN	Laporan		6	6	6	
3	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem	Unit		1	1	1	
4	Jumlah konsep NSPK pengaturan BMN	Konsep NSPK		0	3	3	
5	Jumlah laporan pemantauan, Evaluasi, dan Perencanaan Pengelolaan BMN	Laporan		9	9	10	
6	Jumlah laporan sosialisasi BMN	Laporan		9	9	10	
2	Pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yang akuntabel	Laporan		3	3	4	
1	Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa	Laporan		3	3	4	
3	Pengelolaan administrasi Perkantoran	Dokumen		4	4	4	
1	Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Dokumen		4	4	4	
PROGRAM 2 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							
SASARAN PROGRAM							
1	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR						
1	Tingkat kenyamanan bekerja	%	Jakarta	55%	65%	75%	
2	Tingkat layanan data dan teknologi informasi	%	Jakarta	80%	85%	90%	
3	Tingkat layanan informasi publik	Layanan		365	365	365	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				35.000	35.000	36.750	38.588	40.517	185.854
	39 1 3	43 1 3	193 5 3	21.000	20.300	21.315	22.381	23.500	108.496
	13	14	64						
	6	6	30						
	1	1	5						
	3	3	12						
	10	13	51						
	10	10	48						
	4	4	18	6.000	6.300	6.615	6.946	7.293	33.154
	4	4	18						
	4	4	20	8.000	8.400	8.820	9.261	9.724	44.205
	4	4	20						
				401.341	511.524	530.635	376.094	406.484	2.226.078
	85%	100%	100%						
	95%	100%	100%						
	365	365	1825						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 1: PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, DAN PELAKSANA PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PU LAINNYA							
UNIT ORGANISASI : BIRO PERENCANAAN DAN KLN (PMU)							
SASARAN KEGIATAN							
1	Pekerjaan strategis bidang PU dan lainnya		Dokumen Unit		40	40	40
				1	1	1	
	1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR dan lainnya	Dokumen		40	40	40
2	2	Jumlah unit gedung yang dibangun	Unit		1	1	1
KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PUPR							
UNIT ORGANISASI : BIRO UMUM							
SASARAN KEGIATAN							
1	Pelayanan umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan		Laporan	Jakarta	5	5	5
	1	Laporan pembinaan tata usaha, program kerja dan laporan kinerja serta pembinaan pengelolaan BMN Biro Umum	Laporan	Jakarta	1	1	1
	2	Laporan Pembinaan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di lingkungan Kementerian PUPR	Laporan	Jakarta	1	1	1
	3	Laporan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Gedung Kantor Pusat Kementerian PUPR	Laporan	Jakarta	3	3	3
2	Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkat Kementerian serta BMN tingkat Biro Umum dan Sekretariat Jenderal		Laporan	Jakarta	3	3	3
	1	Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian PUPR serta Pembinaan dan Pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal	Laporan	Jakarta	3	3	3
3	Administrasi Perkantoran		Laporan	Jakarta	12	12	12
	1	Layanan perkantoran	Laporan	Jakarta	12	12	12

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				172.670	231.470	225.300	44.000	45.000	718.440
	40 -	40 -	200 3	172.670	231.470	225.300	44.000	45.000	718.440
	40	40	200						
	-	-	3						
				105.247	147.854	162.635	178.894	196.784	791.414
	5	5	25	8.024	8.826	9.709	10.680	11.748	48.987
	1	1	5						
	1	1	5						
	3	3	15						
	3	3	15	3.878	4.266	4.692	5.161	5.677	23.674
	3	3	15						
	12	12	60	93.346	134.762	148.234	163.053	179.358	718.753
	12	12	60						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PUPR DAN PERMUKIMAN							
UNIT ORGANISASI : PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI							
SASARAN KEGIATAN							
1	Pembinaan dan pengelolaan data dan TIK		NSPK Orang Peta Buku Sistem	5 450 3 5 15	5 450 3 5 15	5 450 3 5 15	
	1	Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIK di Kemen.PU yang disusun	NSPK	5	5	5	
	2	Jumlah Sumber Daya Manusia TIK yang dibina	Orang	450	450	450	
	3	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	Sistem	3	3	3	
	4	Jumlah Peta Tematik Bidang PU yang dihasilkan dan dipublikasikan	Peta	3	3	3	
	5	Jumlah buku informasi Infrastruktur ke-PU-an yang disusun	Buku	5	5	5	
	6	Jumlah Sistem Aplikasi yang telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PU	Sistem	12	12	13	
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran		Laporan	1	1	1	
	1	Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan	1	1	1	
3	Pengelolaan data dan informasi Audio Visual Infrastruktur PU PR		Laporan	13	13	13	
	1	Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data dan Informasi Audio Visualnya	Dokumen	7	7	7	
	2	Jumlah Informasi Audio Visual Yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui Galeri Informasi Audio Visual	Laporan	4	4	4	
	3	Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data & Informasi Audio Visual	Laporan	2	2	2	
4	Layanan publik PNB		Bulan	12	12	12	
	1	Jumlah Layanan Publik (PNBP)	Bulan	12	12	12	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				79.717	84.200	89.700	95.200	100.700	449.517
	5 450 3 5 15	5 450 3 5 15	25 2.250 15 25 78	49.017	51.500	53.500	57.000	61.500	272.517
	5	5	25						
	450	450	2250						
	3	3	15						
	3	3	15						
	5	5	25						
	13	13	63						
	1	1	5	22.000	24.000	27.000	28.500	29.000	130.500
	1	1	5						
	13	13	65	1.707	1.707	1.850	1.910	1.980	9.154
	7	7	35						
	4	4	20						
	2	2	10						
	12	12	60	170	170	180	190	200	910
	12	12	60						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
5	Pengelolaan administrasi Perkantoran BPAV		Sektor Bulan	7 12	7 12	7 12	
	1	Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	Sektor/ Bidang	7	7	7	
	2	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	12	
KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK							
UNIT ORGANISASI :BIRO KOMUNIKASI PUBLIK							
SASARAN KEGIATAN							
1	Penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik		Liputan Publikasi Buku Permintaan Informasi	Jakarta	365 60 300 330	365 60 300 310	365 60 300 280
	1	Jumlah peliputan kegiatan kementerian	Liputan	Jakarta	365	365	365
	2	Jumlah publikasi	Publikasi	Jakarta	60	60	60
	3	Jumlah bahan informasi pimpinan	Buku	Jakarta	200	200	200
	4	Jumlah permintaan informasi	Permintaan Informasi	Jakarta	330	310	280
	Pengelolaan administrasi perkantoran		Bulan	Jakarta	12	12	12
	1	Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	Jakarta	12	12	12
PROGRAM 3: PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							
SASARAN PROGRAM							
1	'Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
	1	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	JAKARTA	Level 2	Level 2	Level 3
	2	Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu	%	JAKARTA	70%	75%	80%
	3	Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materil	%	JAKARTA	60%	65%	70%

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7 12	7 12	35 60	6.823	6.823	7.170	7.600	8.020	36.436
	7	7	35						
	12	12	60						
				43.707	48.000	53.000	58.000	64.000	266.707
	365 60 300 250	365 60 300 220	1.825 300 1.500 1.390	23.755	28.000	32.500	37.000	42.000	163.255
	365	365	1.825						
	60	60	300						
	200	200	1.000						
	250	220	1.390						
	12	12	60	19.952	20.000	20.500	21.000	22.000	103.452
	12	12	60						
				105.200	112.564	120.443	128.875	141.738	608.820
	Level 3	Level 3	Level 3						
	85%	90%	90%						
	75%	80%	80%						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 1 : PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, EVALUASI BIDANG PENGAWASAN & PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP							
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL							
SASARAN KEGIATAN							
1	Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal		Laporan	JAKARTA	8	8	8
	1	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Laporan	JAKARTA	4	4	4
	2	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR	Laporan	JAKARTA	2	2	2
	3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR	Laporan	JAKARTA	2	2	2
2	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Laporan	JAKARTA	7	7	7
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP	Laporan	JAKARTA	4	4	4
	2	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan	Laporan	JAKARTA	1	1	1
	3	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan	Laporan	JAKARTA	2	2	2
3	Pembinaan Auditor dan Auditee		Laporan Keg.	JAKARTA	13	13	13
	1	Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/ Raker/ FGD/ Kegiatan Sejenis bidang pengawasan	Laporan Keg.	JAKARTA	10	10	10
	2	Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/ Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Bidang Pengawasan	Laporan Keg.	JAKARTA	3	3	3

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				64.078	68.563	73.363	78.498	86.325	370.827
	8	9	41	4.281	4.581	4.902	5.245	5.746	24.754
	4	5	21						
	2	2	10						
	2	2	10						
	7	7	35	3.400	3.639	3.893	4.166	4.582	19.680
	4	4	20						
	1	1	5						
	2	2	10						
	13	13	65	11.573	12.383	13.250	14.178	15.596	66.980
	10	10	50						
	3	3	15						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
4	Pengelolaan Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan		Laporan/ Laporan Keg.	JAKARTA	18	18	18	
	1	Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran	Laporan	JAKARTA	12	12	12	
	2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Laporan	JAKARTA	1	1	1	
	3	Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan	Laporan Keg.	JAKARTA	5	5	5	
KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT I								
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT I								
SASARAN KEGIATAN								
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I		LHP	JAKARTA	140	140	140	
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I	LHP	JAKARTA	140	140	140	
KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT II								
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT II								
SASARAN KEGIATAN								
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II		LHP	JAKARTA	84	84	84	
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II	LHP	JAKARTA	84	84	84	
KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT III								
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT III								
SASARAN KEGIATAN								
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III		LHP	JAKARTA	140	140	140	
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III	LHP	JAKARTA	140	140	140	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	18	18	90	44.823	47.961	51.318	54.910	60.401	259.413
	12	12	60						
	1	1	5						
	5	5	25						
				9.282	9.932	10.627	11.371	12.508	53.721
	140	140	700	9.282	9.932	10.627	11.371	12.508	53.721
	140	140	700						
				7.398	7.916	8.470	9.063	9.969	42.817
	84	84	420	7.398	7.916	8.470	9.063	9.969	42.817
	84	84	420						
				11.151	11.932	12.767	13.661	15.027	64.537
	140	140	700	11.151	11.932	12.767	13.661	15.027	64.537
	140	140	700						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT IV								
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IV								
SASARAN KEGIATAN								
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV		LHP	JAKARTA	98	98	98	
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV	LHP	JAKARTA	98	98	98	
KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PR DI INSPEKTORAT V								
UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT V								
SASARAN KEGIATAN								
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V		LHP	JAKARTA	16	16	16	
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V	LHP	JAKARTA	16	16	16	
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus		LHP	JAKARTA	17	17	17	
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	LHP	JAKARTA	17	17	17	
PROGRAM 4 : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
SASARAN PROGRAM								
1	Meningkatnya Prosentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan		%		10	25	40	
	1)	Prosentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan	%		10	25	40	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				8.829	9.447	10.109	10.816	11.898	51.099
	98	98	490	8.829	9.447	10.109	10.816	11.898	51.099
	98	98	490						
				4.461	4.773	5.108	5.465	6.012	25.819
	16	16	80	3.807	4.074	4.359	4.664	5.130	22.034
	16	16	80						
	17	17	85	654	700	749	801	881	3.785
	17	17	85						
				568.543	625.397	687.937	756.731	832.404	3.471.012
	55	75	75						
	55	75	75						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 1: PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONEV SERTA SIM							
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIS BADAN							
SASARAN KEGIATAN							
1	Dukungan Manajemen	Laporan	Jakarta	50	51	51	
1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	Jakarta	2	2	2	
2	Jumlah Laporan Kerjasama	Laporan	Jakarta	13	15	15	
3	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum	Laporan	Jakarta	13	13	13	
4	Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawaian Bidang SDM	Laporan	Jakarta	6	6	6	
5	Jumlah Laporan Layanan PNBP	Laporan	Jakarta	11	11	11	
6	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan data dan informasi	Laporan	Jakarta	1	1	1	
7	Jumlah Laporan Sosialisasi/ Penyebaran Luasan Informasi	Laporan	Jakarta	1	1	1	
8	Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan	Laporan	Jakarta	1	1	1	
9	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	Jakarta	1	1	1	
10	Jumlah Laporan Pasca Pendidikan	Laporan	Jakarta	1	0	0	
2	ASN yang Terdidik	Orang	Jakarta	277	276	220	
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jakarta	277	276	220	
3	Hasil Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Dokumen	Jakarta	4	4	4	
1	Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM	Dokumen	Jakarta	4	4	4	
4	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	Jakarta	6.700	4.200	3.000	
1	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	Jakarta	6.700	4.200	3.000	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				259.443	276.805	300.855	326.029	361.397	1.524.529
	52	51	255	102.150	134.420	146.669	161.761	177.497	722.497
	2	2	10						
	15	15	73						
	13	13	65						
	6	6	30						
	11	11	55						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	0	2						
	300	250	1.323	27.293	23.664	20.900	28.500	23.750	124.107
	300	250	1.323						
	4	4	20	4.000	3.200	2.400	2.000	2.000	13.600
	4	4	20						
	2.000	2.000	17.900	40.200	25.200	18.000	12.000	12.000	107.400
	2.000	2.000	17.900						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
5	Peralatan dan Perlengkapan		Unit	Jakarta	240	110	110	
	1	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	Jakarta	240	110	110	
6	ASN yang Terlatih		Orang	Jakarta	4.000	4.000	4.000	
	1	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jakarta	4.000	4.000	4.000	
7	Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja		Orang	Jakarta	6.620	6.620	6.620	
	1	Jumlah ASN yang terpetakan yang dinilai melalui assesment center dan unjuk kerja	Orang	Jakarta	6.620	6.620	6.620	
KEGIATAN 2: PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA								
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA								
SASARAN KEGIATAN								
1	Dukungan Manajemen		Laporan	Jakarta	16	16	16	
	1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	Jakarta	2	2	2	
	2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras	Laporan	Jakarta	1	1	1	
	3	Jumlah Laporan Peningkatan Profesionalisme Assessor, pemantauan dan evaluasi	Laporan	Jakarta	13	13	13	
2	Sistem pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian, Pengembangan standar kompetensi, Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja		Dokumen	Jakarta	23	22	22	
	1	Jumlah Dokumen Kebijakan sistem pengembangan SDM	Dokumen	Jakarta	5	5	5	
	2	Jumlah Dokumen Standar kompetensi, instrumen penilaian kompetensi, kualifikasi serta instrumen penilaian dan indikator kinerja	Dokumen	Jakarta	4	4	4	
	3	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Assessment	Dokumen	Jakarta	6	6	6	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	110	110	680	4.800	5.500	6.050	6.050	6.050	28.450
	110	110	680						
	4.000	4.000	20.000	36.000	35.321	52.386	55.823	74.215	253.745
	4.000	4.000	20.000						
	6.620	6.620	33.100	45.000	49.500	54.450	59.895	65.885	274.730
	6.620	6.620	33.100						
				49.000	66.600	71.940	79.079	86.932	353.551
	16	16	80	18.000	30.800	33.880	37.268	40.994	160.942
	2	2	10						
	1	1	5						
	13	13	65						
	22	22	111	26.000	28.600	31.460	34.606	38.067	158.733
	5	5	25						
	4	4	20						
	6	6	30						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	4	Jumlah Dokumen penyusunan dan pemuktahiran data base dan informasi potensi, kompetensi dan kinerja	Dokumen	Jakarta	3	3	3	
	5	Jumlah dokumen roadmap materi strategi (master plan) program unggulan/percepatan	Dokumen	Jakarta	3	2	2	
	6	Jumlah Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai dan Pejabat	Dokumen	Jakarta	2	2	2	
3	Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja		Orang	Jakarta	10.000	10.000	10.000	
	1	Jumlah PNS yang dipantau Kinerjanya	Orang	Jakarta	10.000	10.000	10.000	
4	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana		M²	Jakarta	0	200	0	
	1	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	Jakarta	0	200	0	
5	Peralatan dan Perlengkapan		Unit	Jakarta	0	10	10	
	1	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	Jakarta	0	10	10	
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI								
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI								
SASARAN KEGIATAN								
1	Dukungan Manajemen		Laporan	Jawa Barat	105	105	105	
	1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	Jawa Barat	2	2	2	
	2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras	Laporan	Jawa Barat	1	1	1	
	3	Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	Jawa Barat	1	1	1	
	4	Jumlah Laporan KAD	Laporan	Jawa Barat	1	1	1	
	5	Jumlah Laporan Pasca Pelatihan	Laporan	Jawa Barat	0	1	0	
	6	Jumlah Laporan Monev Pelatihan	Laporan	Jawa Barat	100	100	100	
2	ASN yang Terlatih		Orang	Jawa Barat	1.950	2.250	2.250	
	1	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jawa Barat	1.950	2.250	2.250	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3	3	15						
	2	2	11						
	2	2	10						
	10.000	10.000	50.000	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321	30.526
	10.000	10.000	50.000						
	0	0	200	0	1.200	0	0	0	1.200
	0	0	200						
	10	10	40	0	500	550	550	550	2.150
	10	10	40						
				98.800	101.746	107.514	119.344	130.448	557.852
	105	105	527	16.000	29.600	31.460	34.606	39.366	151.032
	2	2	10						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	1	5						
	0	1	2						
	100	100	500						
	2.350	2.350	11.150	17.550	19.868	19.868	20.749	20.749	98.784
	2.350	2.350	11.150						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
3	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan		Dokumen	Jawa Barat	12	12	12
	1	Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	Dokumen	Jawa Barat	2	2	2
	2	Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	Jawa Barat	10	10	10
4	ASN yang Terdidik		Orang	Jawa Barat	450	375	375
	1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jawa Barat	450	375	375
5	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana		M ²	Jawa Barat	800	200	0
	1	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	Jawa Barat	800	200	0
6	Peralatan dan Perlengkapan		Unit	Jawa Barat	30	10	10
	1	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	Jawa Barat	30	10	10
KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH							
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH							
SASARAN KEGIATAN							
1	Dukungan Manajemen		Laporan	Jawa Barat	105	106	105
	1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	Jawa Barat	2	2	2
	2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Saprass	Laporan	Jawa Barat	1	1	1
	3	Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	Jawa Barat	1	1	1
	4	Jumlah Laporan KAD	Laporan	Jawa Barat	1	1	1
	5	Jumlah Laporan Pasca Pelatihan	Laporan	Jawa Barat	0	1	0
	6	Jumlah Laporan Monev Pelatihan	Laporan	Jawa Barat	100	100	100
2	ASN yang Terlatih		Orang	Jawa Barat	2.450	2.750	2.750
	1	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jawa Barat	2.450	2.750	2.750

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	12	12	60	8.000	8.800	9.680	10.648	11.713	48.841
	2	2	10						
	10	10	50						
	350	350	1.900	51.850	41.778	45.956	52.791	58.070	250.445
	350	350	1.900						
	0	0	1.000	4.800	1.200	0	0	0	6.000
	0	0	1.000						
	10	10	70	600	500	550	550	550	2.750
	10	10	70						
				82.500	106.161	111.929	123.759	134.864	559.213
	105	106	527	16.000	29.600	31.460	34.606	39.367	151.033
	2	2	10						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	1	5						
	0	1	2						
	100	100	500						
	2.850	2.850	13.650	22.050	24.283	24.283	25.164	25.164	120.944
	2.850	2.850	13.650						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
3	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan		Dokumen	Jawa Barat	12	12	12
	1	Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	Dokumen	Jawa Barat	2	2	2
	2	Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	Jawa Barat	10	10	10
4	ASN yang Terdidik		Orang	Jawa Barat	250	375	375
	1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jawa Barat	250	375	375
5	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana		M ²	Jawa Barat	500	200	0
	1	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	Jawa Barat	500	200	0
6	Peralatan dan Perlengkapan		Unit	Jawa Barat	30	10	10
	1	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	Jawa Barat	30	10	10
KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONALFUNGSIONAL							
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL							
SASARAN KEGIATAN							
1	Dukungan Manajemen		Laporan	Jakarta	105	106	105
	1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum dan Program Anggaran	Laporan	Jakarta	2	2	2
	2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras	Laporan	Jakarta	1	1	1
	3	Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan Jabatan Fungsional	Laporan	Jakarta	1	1	1
	4	Jumlah Laporan KAD	Laporan	Jakarta	1	1	1
	5	Jumlah Laporan Pasca Pelatihan	Laporan	Jakarta	0	1	0
	6	Jumlah Laporan Monev Pelatihan	Laporan	Jakarta	100	100	100
2	ASN yang Terlatih		Orang	Jakarta	4.500	2.000	2.000
	1	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jakarta	4.500	2.000	2.000

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	12	12	60	8.000	8.800	9.680	10.648	11.713	48.841
	2	2	10						
	10	10	50						
	350	350	1.700	32.850	41.778	45.956	52.791	58.070	231.445
	350	350	1.700						
	0	0	700	3.000	1.200	-	-	-	4.200
	0	0	700						
	10	10	70	600	500	550	550	550	2.750
	10	10	70						
				78.800	74.085	95.699	108.520	118.763	475.867
	105	106	527	16.000	29.600	31.460	34.606	39.367	151.033
	2	2	10						
	1	1	5						
	1	1	5						
	1	1	5						
	0	1	2						
	100	100	500						
	2.100	2.100	12.700	40.500	17.661	17.661	18.542	18.542	112.906
	2.100	2.100	12.700						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
3	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan		Dokumen	Jakarta	12	12	12
	1	Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	Dokumen	Jakarta	2	2	2
	2	Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	Jakarta	10	10	10
4	Pengembangan Jabatan Fungsional		Orang	Jakarta	50	50	50
	1	Jumlah Jabatan Fungsional yang di evaluasi penugasannya, pembinaannya dan pengembangannya	Orang	Jakarta	50	50	50
5	ASN yang Terdidik		Orang	Jakarta	70	100	300
	1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	Jakarta	70	100	300
6	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana		M²	Jakarta	0	200	0
	1	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M²	Jakarta	0	200	0
7	Peralatan dan Perlengkapan		Unit	Jakarta	30	10	10
	1	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	Jakarta	30	10	10
PROGRAM 5 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
SASARAN PROGRAM							
1	Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders						
	1	Jumlah Teknologi yang termanfaatkan	Unit	Jakarta/ Bandung	0	0	5
	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang termanfaatkan	Naskah	Jakarta/ Bandung	0	5	5
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders						
	1	Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis	%	Jakarta/ Bandung	72	74	76
	2	Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan	%	Jakarta/ Bandung	72	74	76
	3	Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium	%	Jakarta/ Bandung	72	74	76

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	12	12	60	8.000	8.800	9.680	10.648	11.713	48.841
	2	2	10						
	10	10	50						
	50	50	250	2.500	2.750	3.025	3.328	3.660	15.263
	50	50	250						
	300	300	1.070	11.200	13.574	33.323	40.846	44.931	143.874
	300	300	1.070						
	0	0	200	0	1.200	0	0	0	1.200
	0	0	200						
	10	10	70	600	500	550	550	550	2.750
	10	10	70						
				519.500	608.028	771.998	790.001	818.199	3.507.726
				134.678	152.277	151.965	117.848	68.488	625.255
	5	7	17						
	5	5	20						
				44.502	55.695	79.999	83.902	92.758	356.856
	78	80	80						
	78	80	80						
	78	80	80						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 1: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG SUMBER DAYA AIR							
UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG SDA							
SASARAN KEGIATAN							
1	Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan		Komponen Teknologi	37	47	42	
			Prosiding DSP	5	2	2	
			Unit Model	1	1	1	
	1	Jumlah komponen teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) untuk menghasilkan 20 kelompok teknologi selama 5 tahun	Komponen Teknologi	37	47	42	
	2	Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT)	Prosiding DSP	5	2	2	
	3	Model Dukungan NCICD	Unit Model	1	1	1	
2	Rekomendasi dan masukan kebijakan		Naskah	15	14	25	
			Dokumen	23	30	30	
			Laporan	8	8	8	
	1	Jumlah naskah kebijakan	Naskah	5	4	10	
	2	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis	Dokumen	23	30	30	
	3	Jumlah R-3	Naskah	10	10	15	
	4	Jumlah laporan layanan pengujian laboratorium	Laporan	8	8	8	
3	Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya		Dokumen	90	90	90	
			Unit	35	30	30	
	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)	Dokumen	13	13	13	
	2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)	Dokumen	21	21	21	
	3	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)	Unit	35	30	30	
	4	Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev	Dokumen	29	29	29	
	5	Jumlah Laporan Kerjasama	Dokumen	1	1	1	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				148.500	195.461	247.476	254.596	246.147	1.092.180
	36	85	247	35.127	61.172	62.190	60.592	37.582	256.663
	2	2	13						
	1	1	1						
	36	85	247						
	2	2	13						
	1	1	5						
	24	32	110	9.912	11.462	20.481	20.240	23.982	86.077
	30	30	143						
	8	8	40						
	9	12	40						
	30	30	143						
	15	20	70						
	8	8	40						
	90	90	450	101.321	120.474	162.216	170.917	181.451	736.379
	35	20	105						
	13	13	65						
	21	21	105						
	25	20	140						
	29	29	145						
	1	1	5						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	6	Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala	Dokumen	Jakarta	7	7	7	
	7	Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI)	Dokumen	Jakarta	7	7	7	
	8	Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)	Dokumen	Jakarta	12	12	12	
4	Layanan PNB		Juta Rupiah	Jakarta	2.139	2.353	2.589	
	1	Jumlah penerimaan PNB	Juta Rupiah	Jakarta	2.139	2.353	2.589	
KEGIATAN 2: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG JALAN DAN JEMBATAN								
UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG JALAN & JEMBATAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan		Komponen Teknologi	Bandung	40	36	28	
			Prosiding DSP		1	1	1	
	1	Jumlah komponen teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-D) untuk menghasilkan 8 kelompok teknologi selama 5 tahun	Komponen Teknologi	Bandung	40	36	28	
	2	Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT)	Prosiding DSP	Bandung	1	1	1	
2	Rekomendasi dan masukan kebijakan		Naskah	Bandung	27	27	25	
			Dokumen		9	9	9	
			Laporan		5	5	5	
	1	Jumlah naskah kebijakan	Naskah	Bandung	2	2	0	
	2	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis	Dokumen	Bandung	9	9	9	
	3	Jumlah R-3	Naskah	Bandung	25	25	25	
	4	Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium	Laporan	Bandung	5	5	5	
3	Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya		Dokumen	Bandung	51	51	51	
			Unit		18	18	18	
	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)	Dokumen	Bandung	10	10	10	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	7	35						
	7	7	35						
	12	12	60						
	2.847	3.132	13.061	2.139	2.353	2.589	2.847	3.132	13.061
	2.847	3.132	13.061						
				171.500	188.103	236.589	243.025	257.528	1.096.745
	13	0	117	42.565	31.653	24.219	12.325	6.968	117.730
	1	1	5						
	13	0	117						
	1	1	5						
	25	25	129	15.201	16.566	23.470	25.134	26.066	106.437
	9	9	45						
	5	5	25						
	0	0	4						
	9	9	45						
	25	25	125						
	5	5	25						
	51	51	255	107.364	132.734	181.035	196.915	214.977	833.025
	18	18	90						
	10	10	50						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET			
					2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	
	2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)	Dokumen	Bandung	5	5	5	
	3	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)	Unit	Bandung	18	18	18	
	4	Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev	Dokumen	Bandung	14	14	14	
	5	Jumlah Laporan Kerjasama	Dokumen	Bandung	9	9	9	
	6	Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala	Dokumen	Bandung	5	5	5	
	7	Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI)	Dokumen	Bandung	6	6	6	
	8	Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)	Dokumen	Bandung	2	2	2	
4	Layanan PNPB		Juta Rupiah	Bandung	6.370	7.150	7.865	
	1	Jumlah penerimaan PNPB	Juta Rupiah	Bandung	6.370	7.150	7.865	
KEGIATAN 3 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG PERMUKIMAN								
UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG PERMUKIMAN								
SASARAN KEGIATAN								
1	Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan		Komponen Teknologi	Bandung	30	32	34	
			Prosiding DSP		11	10	10	
	1	Jumlah komponen teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) untuk menghasilkan 6 kelompok teknologi selama 5 tahun	Komponen Teknologi	Bandung	30	32	34	
	2	Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT)	Prosiding DSP	Bandung	11	10	10	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	5	25						
	18	18	90						
	14	14	70						
	9	9	45						
	5	5	25						
	6	6	30						
	2	2	10						
	8.652	9.517	39.553	6.370	7.150	7.865	8.652	9.517	39.553
	8.652	9.517	39.553						
				124.000	137.429	172.159	171.629	174.031	779.248
	31	33	160	50.291	51.253	56.731	35.873	14.482	208.630
	10	10	51						
	31	33	160						
	10	10	51						

SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
2	Rekomendasi dan masukan kebijakan		Naskah	21	21	21	
			Dokumen	1	1	1	
			Laporan	7	8	8	
	1	Jumlah naskah kebijakan	Naskah	1	1	1	
	2	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis	Dokumen	1	1	1	
3	3	Jumlah R-3	Naskah	20	20	20	
	4	Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium	Laporan	7	8	8	
	Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya		Dokumen	80	81	81	
			Unit	18	17	18	
	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)	Dokumen	11	11	11	
	2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)	Dokumen	10	10	10	
	3	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)	Unit	18	17	18	
	4	Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev	Dokumen	13	13	13	
	5	Jumlah Laporan Kerjasama	Dokumen	6	7	7	
	6	Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala	Dokumen	10	10	10	
	7	Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI)	Dokumen	13	13	13	
	8	Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)	Dokumen	17	17	17	
	Layanan PNBP		Juta Rupiah	2.459	2.907	3.343	
4	1	Jumlah penerimaan PNBP	Juta Rupiah	2.459	2.907	3.343	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	21	21	105	5.431	6.553	8.650	9.110	9.635	39.379
	1	1	5						
	8	8	39						
	1	1	5						
	1	1	5						
	20	20	100	65.867	76.716	103.435	122.801	145.493	514.312
	8	8	39						
	81	81	404						
	17	18	57						
	11	11	55						
	10	10	50						
	17	18	57						
	13	13	65						
	7	7	34						
	10	10	50						
	13	13	65						
	17	17	85						
	3.845	4.421	16.975	2.411	2.907	3.343	3.845	4.421	16.926
	3.845	4.421	16.975						

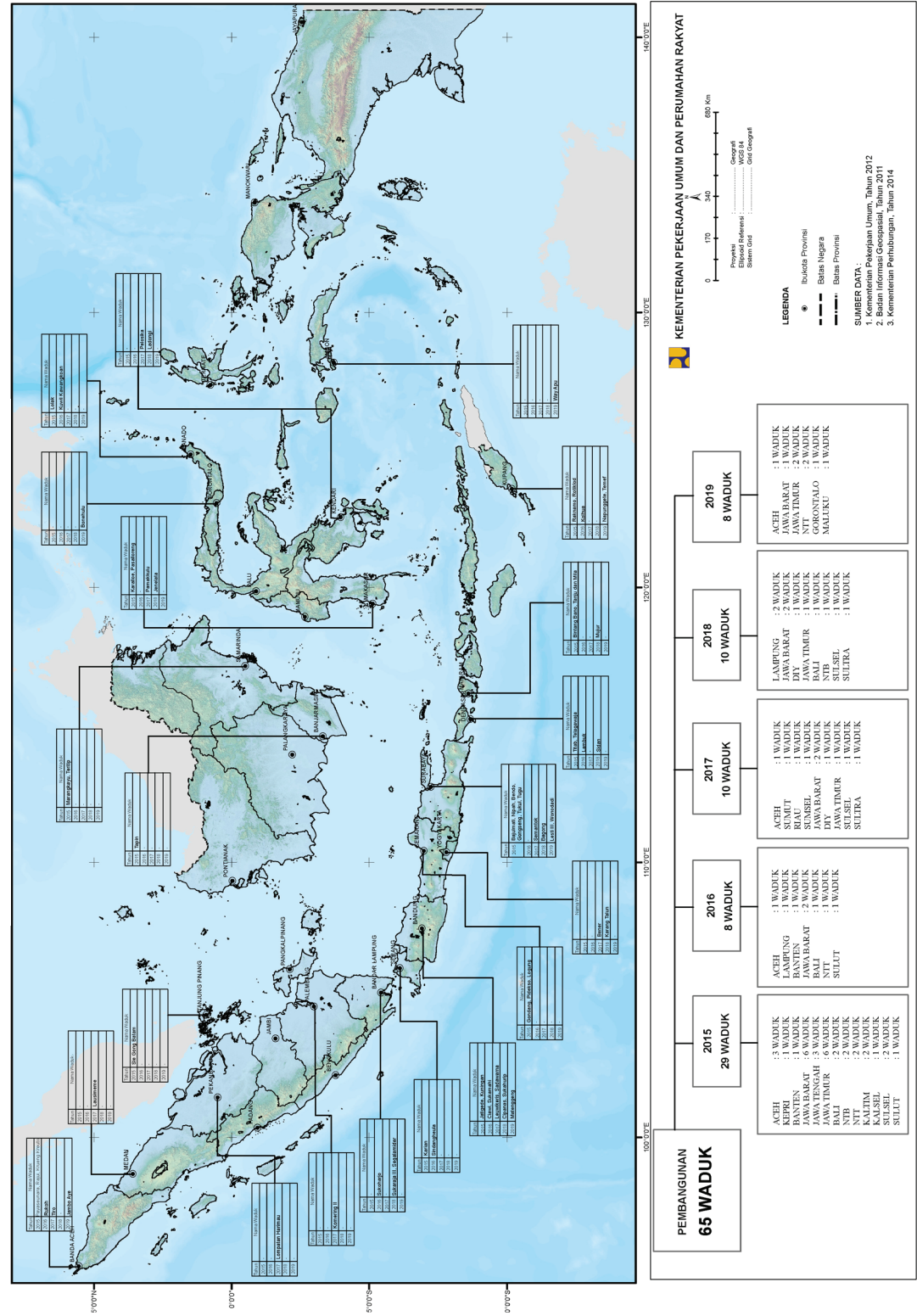
SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 4: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI							
UNIT ORGANISASI : PUSLITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI							
SASARAN KEGIATAN							
1	Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan		Prosiding DSP	Jakarta	1	1	1
	1	Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)	Prosiding DSP	Jakarta	1	1	1
2	Rekomendasi dan masukan kebijakan		Rekomendasi	Jakarta	18	13	13
	1	Jumlah rekomendasi kebijakan	Rekomendasi	Jakarta	18	13	13
3	Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya		Dokumen	Jakarta	38	36	36
			Unit		6	6	6
	1)	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)	Dokumen	Jakarta	4	4	4
	2)	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)	Dokumen	Jakarta	8	8	8
	3)	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)	Unit	Jakarta	6	6	6
	4)	Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev	Dokumen	Jakarta	3	2	2
	5)	Jumlah Laporan Kerjasama	Dokumen	Jakarta	8	8	8
	6)	Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala	Dokumen	Jakarta	6	5	5
	7)	Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI)	Dokumen	Jakarta	8	8	8
	8)	Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)	Dokumen	Jakarta	1	1	1
	Layanan PNB		Juta Rupiah	Jakarta	627	691	760
	1)	Jumlah penerimaan PNB	Juta Rupiah	Jakarta	627	691	760

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				42.000	48.672	66.611	70.815	86.497	314.595
	1	1	5	735	1.068	1.377	1.417	1.462	6.059
	1	1	5						
	13	13	70	12.223	19.119	24.785	27.385	30.374	113.886
	13	13	70						
	36	36	182	28.428	27.794	39.689	41.176	53.741	190.828
	6	6	30						
	4	4	20						
	8	8	40						
	6	6	30						
	2	2	11						
	8	8	40						
	5	5	26						
	8	8	40						
	1	1	5						
	837	920	3.835.467	615	691	760	837	920	3.823
	837	920	3.835.467						

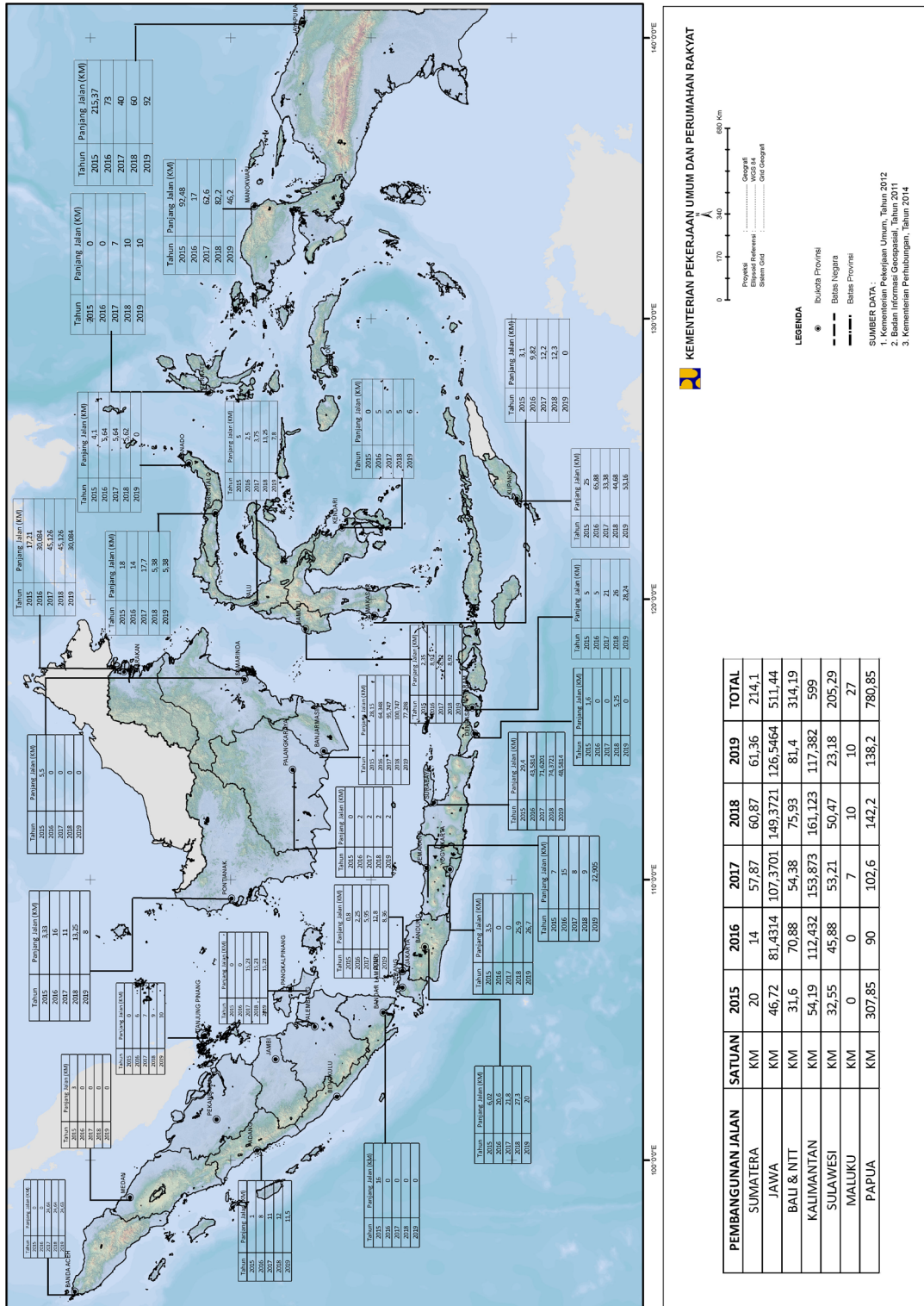
SASARAN / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET			
				2015	2016	2017	
1		2	3	4	5	6	
KEGIATAN 5: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANG							
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BALITBANG							
SASARAN KEGIATAN							
1	Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan	Dokumen	Jakarta	8	8	8	
	1) Jumlah Diseminasi dan Sosialisasi	Dokumen	Jakarta	5	5	5	
	2) Jumlah Penerapan Standar	Dokumen	Jakarta	3	3	3	
2	Rekomendasi dan masukan kebijakan	Dokumen	Jakarta	2	2	2	
	1) Jumlah R-3 yang ditetapkan	Dokumen	Jakarta	1	1	1	
	2) Jumlah Pembinaan Lab Pusat Litbang dan Daerah	Dokumen	Jakarta	1	1	1	
3	Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya	Dokumen	Jakarta	25	25	25	
		Unit		3	3	3	
	1) Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)	Dokumen	Jakarta	3	3	3	
	2) Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)	Dokumen	Jakarta	5	5	5	
	3) Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)	Unit	Jakarta	3	3	3	
	4) Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev	Dokumen	Jakarta	5	5	5	
	5) Jumlah Laporan Kerjasama	Dokumen	Jakarta	1	1	1	
	6) Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala	Dokumen	Jakarta	6	6	6	
	7) Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI)	Dokumen	Jakarta	3	3	3	
	8) Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)	Dokumen	Jakarta	2	2	2	

				ANGGARAN (JUTA)					
	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				33.500	38.363	49.163	49.936	53.997	224.959
	8	8	40	5.959	7.131	7.448	7.641	7.994	36.173
	5	5	25						
	3	3	15						
	2	2	10	1.735	1.995	2.613	2.033	2.701	11.077
	1	1	5						
	1	1	5						
	25	25	125	25.806	29.237	39.102	40.262	43.302	177.709
	3	3	15						
	3	3	15						
	5	5	25						
	3	3	15						
	5	5	25						
	1	1	5						
	6	6	30						
	3	3	15						
	2	2	10						

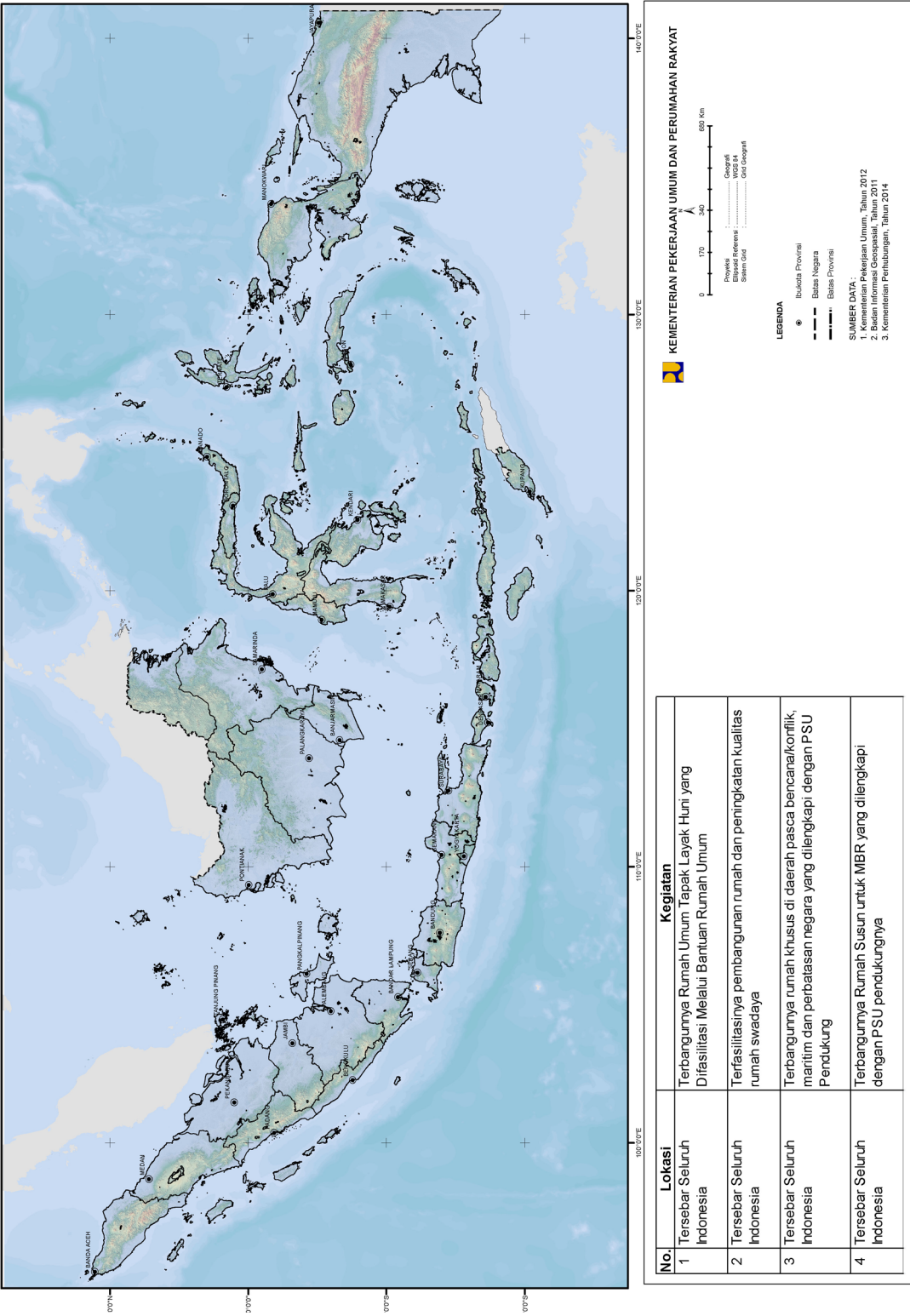
Gambar SL-2.1. RENCANA PEMBANGUNAN WADUK TAHUN 2015-2019



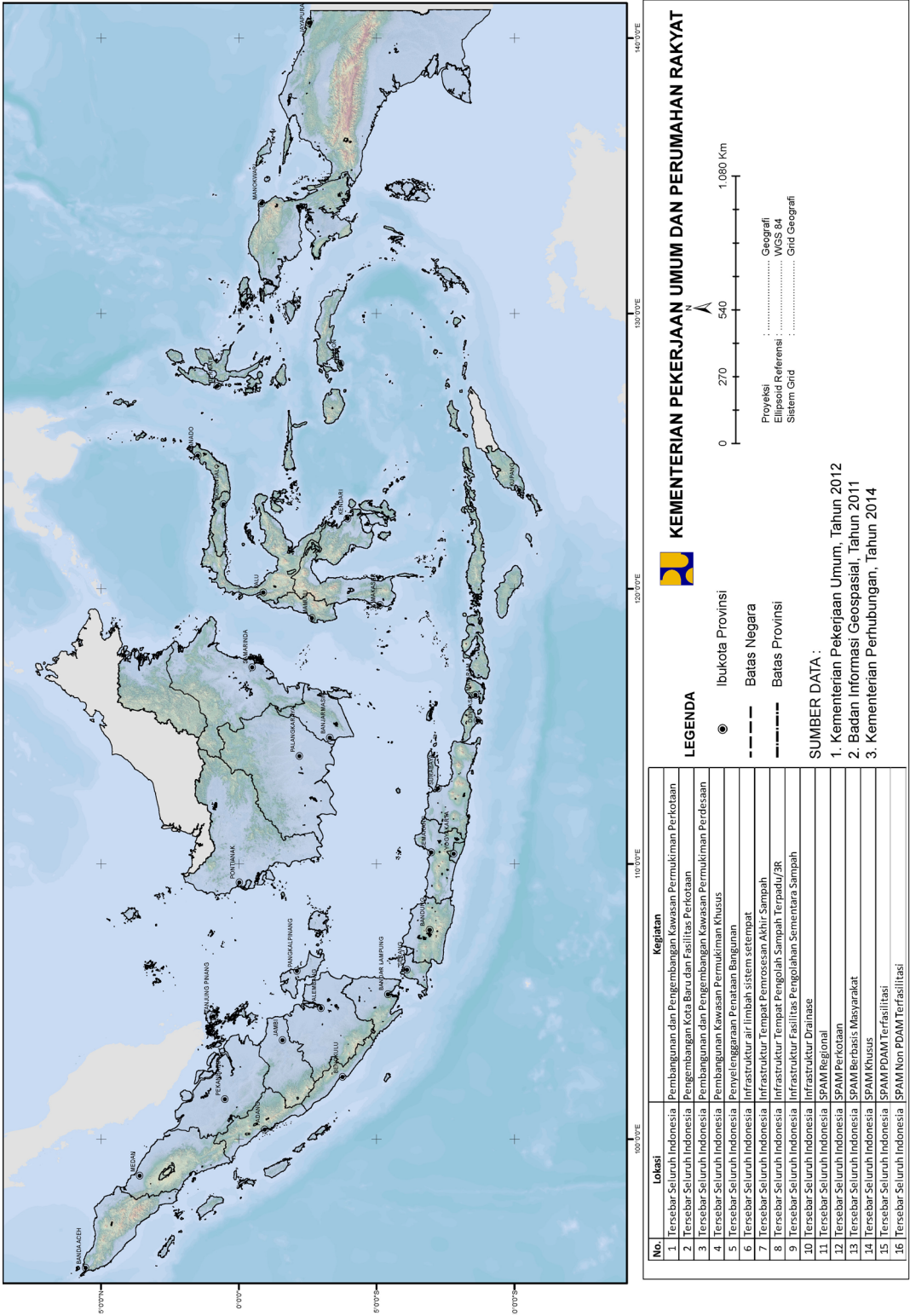
Gambar SL-2.2. RENCANA PEMBANGUNAN JALAN INDONESIA TAHUN 2015-2019



Gambar SL-2.3. RENCANA PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015-2019



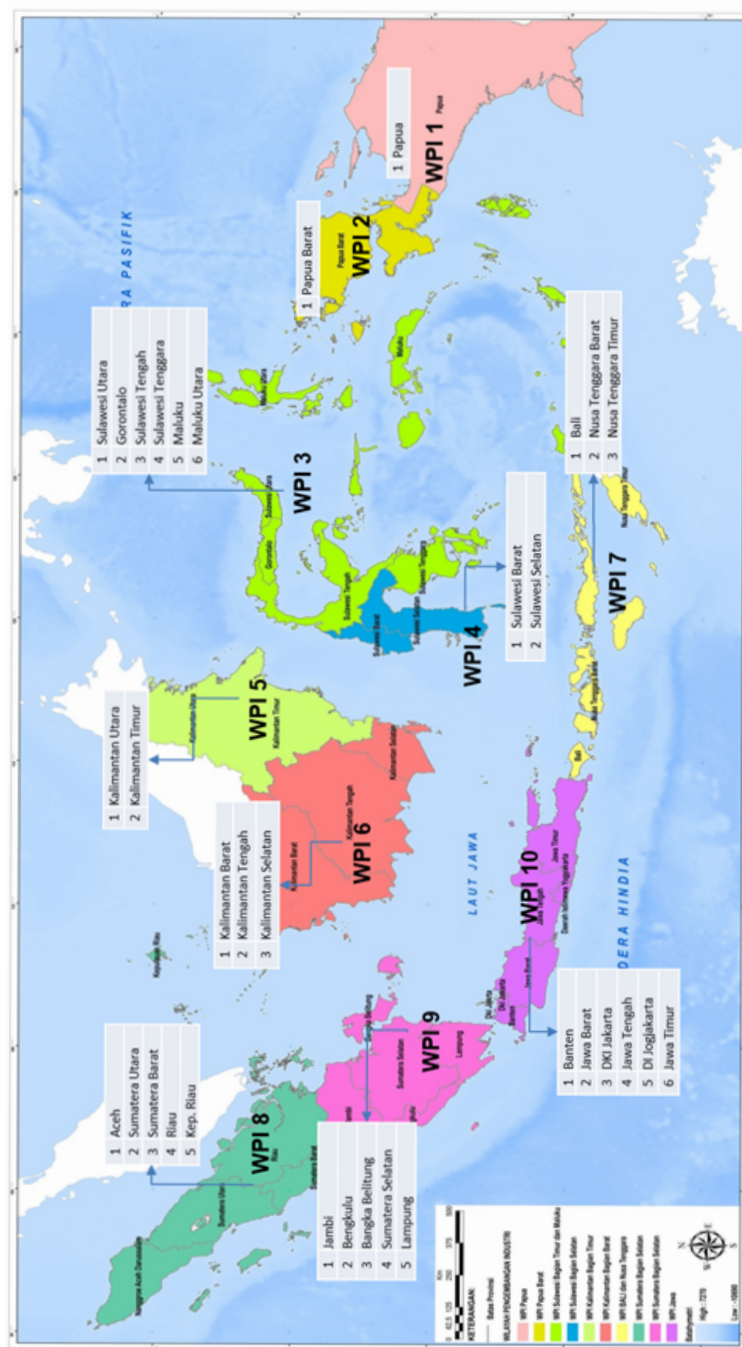
Gambar SI-2.4. RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TAHUN 2015-2019



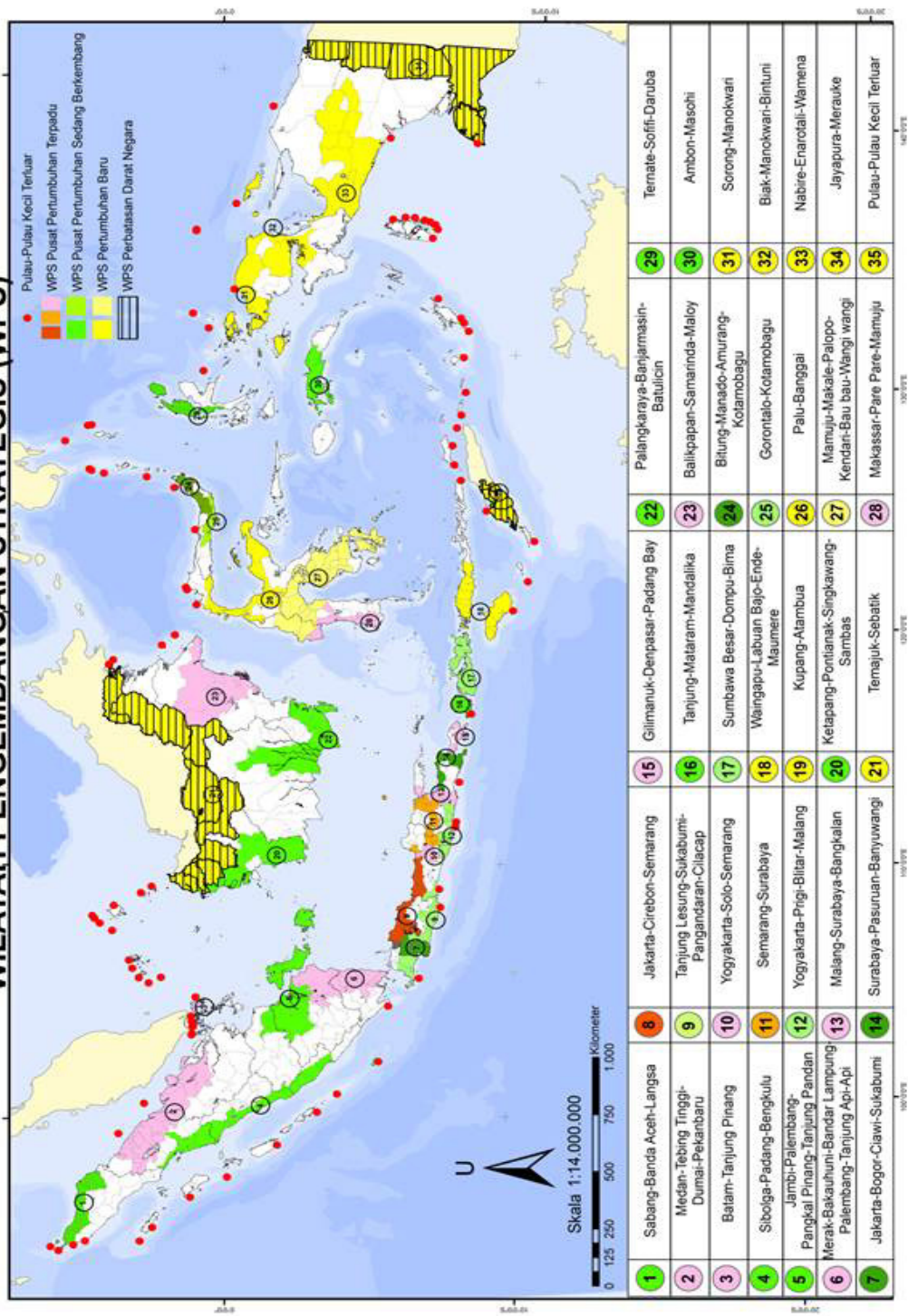
SUB LAMPIRAN 3

Wilayah Pengembangan Strategis
(WPS)

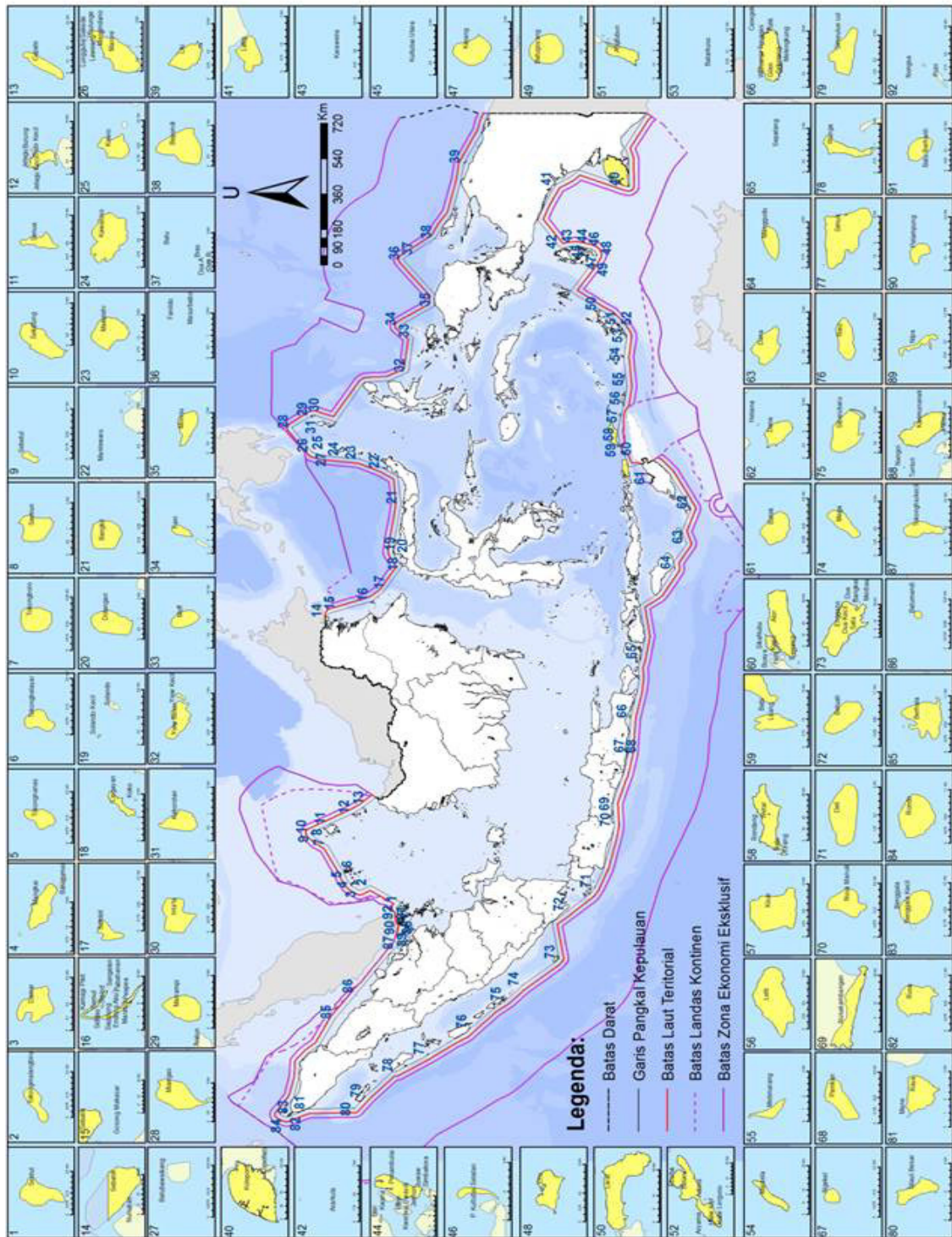
PP No.14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035



PETA SEBARAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)

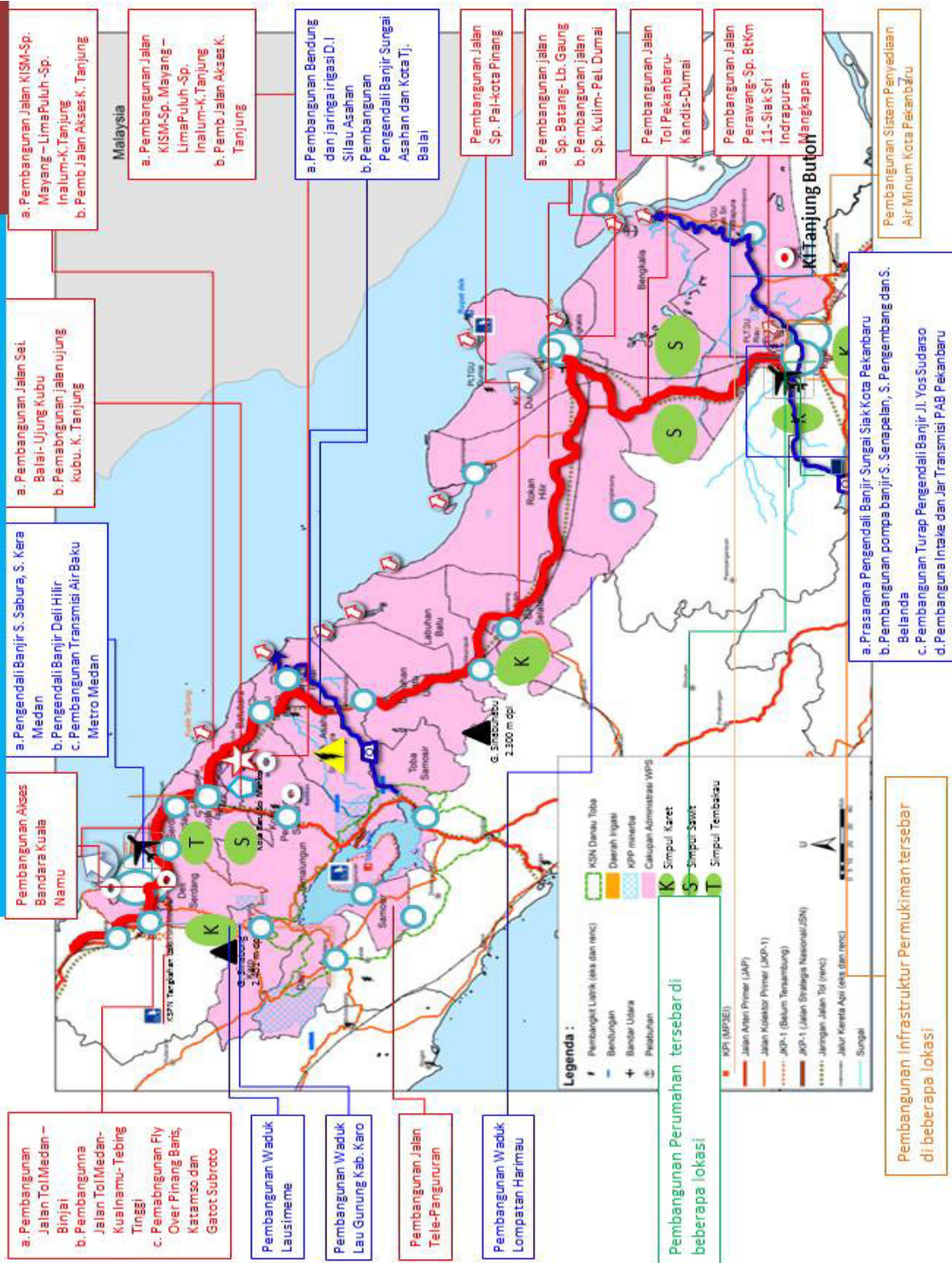


WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR



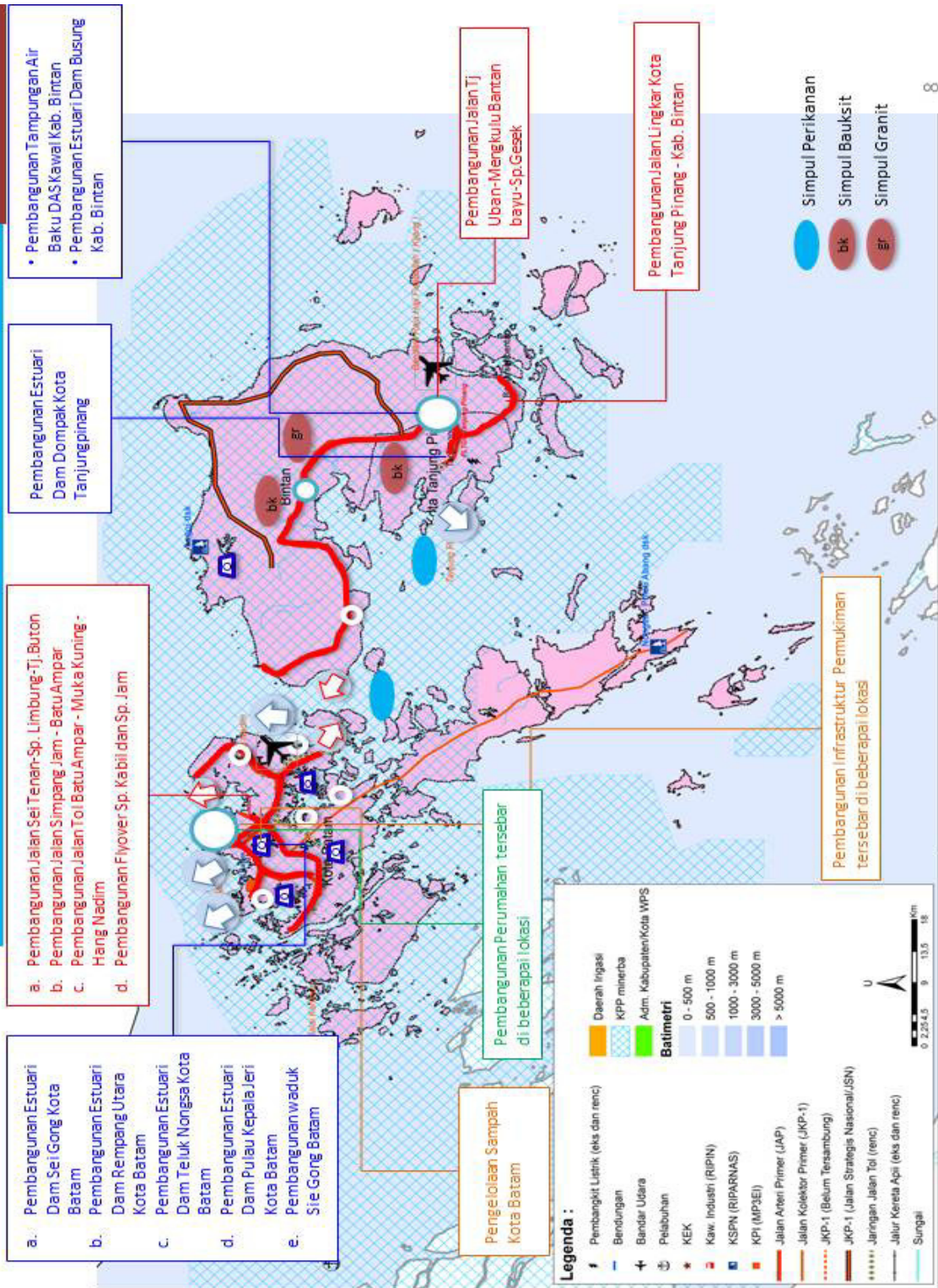
2. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru

TA 2015-2019



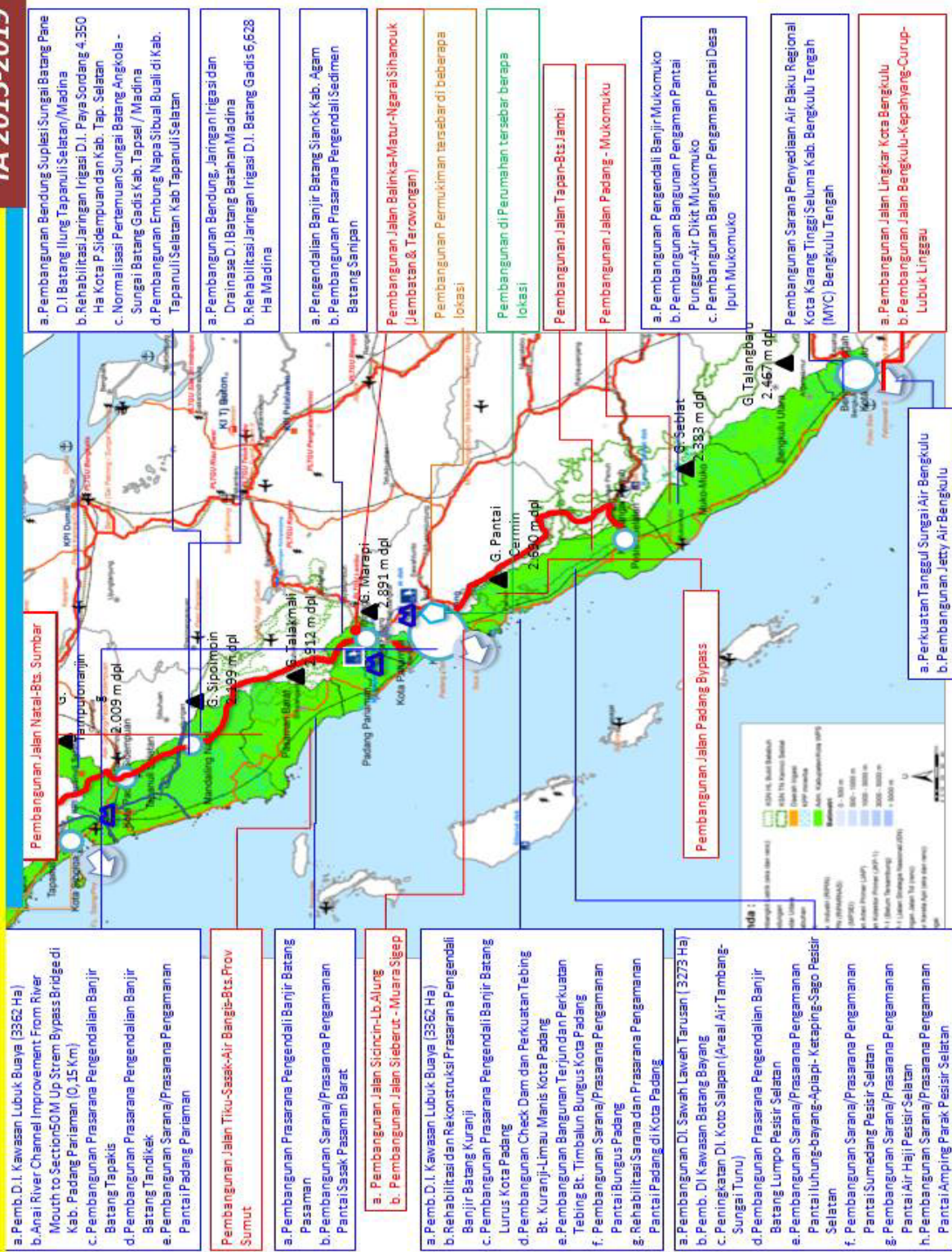
3. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Batam-Tanjung Pinang

TA 2015-2019

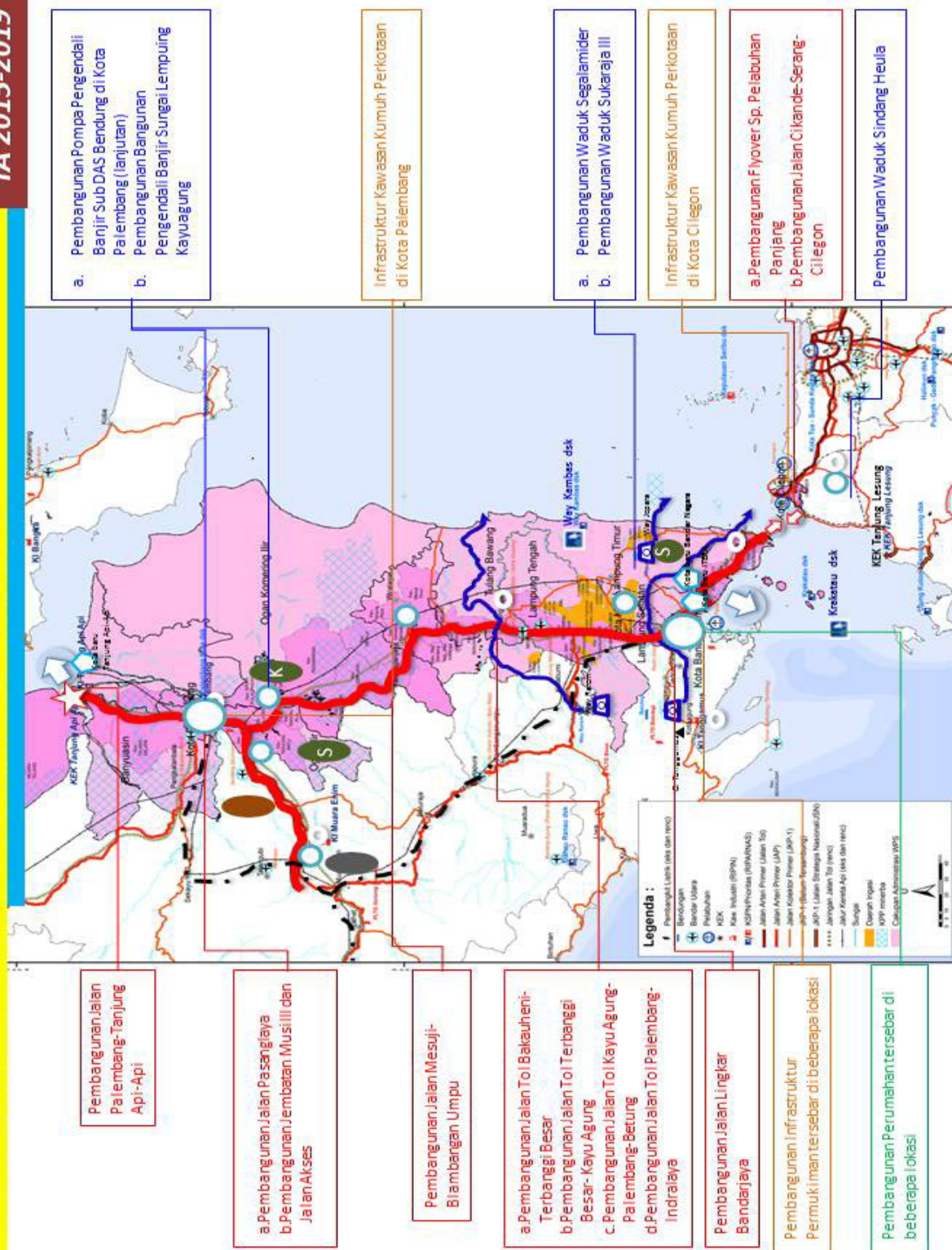


4. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sibolga-Padang-Bengkulu

IA 2015-2019

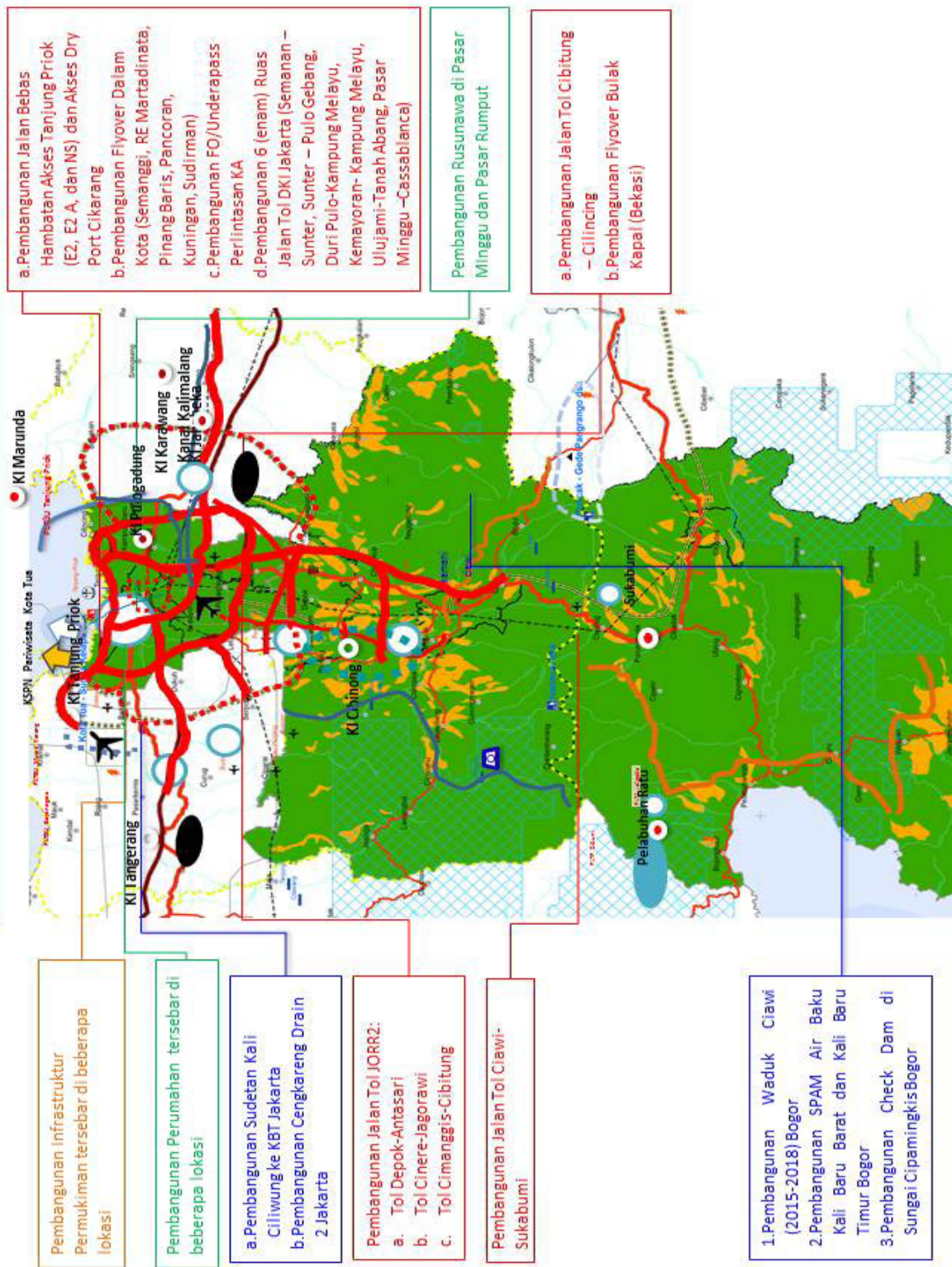


TA 2015-2019

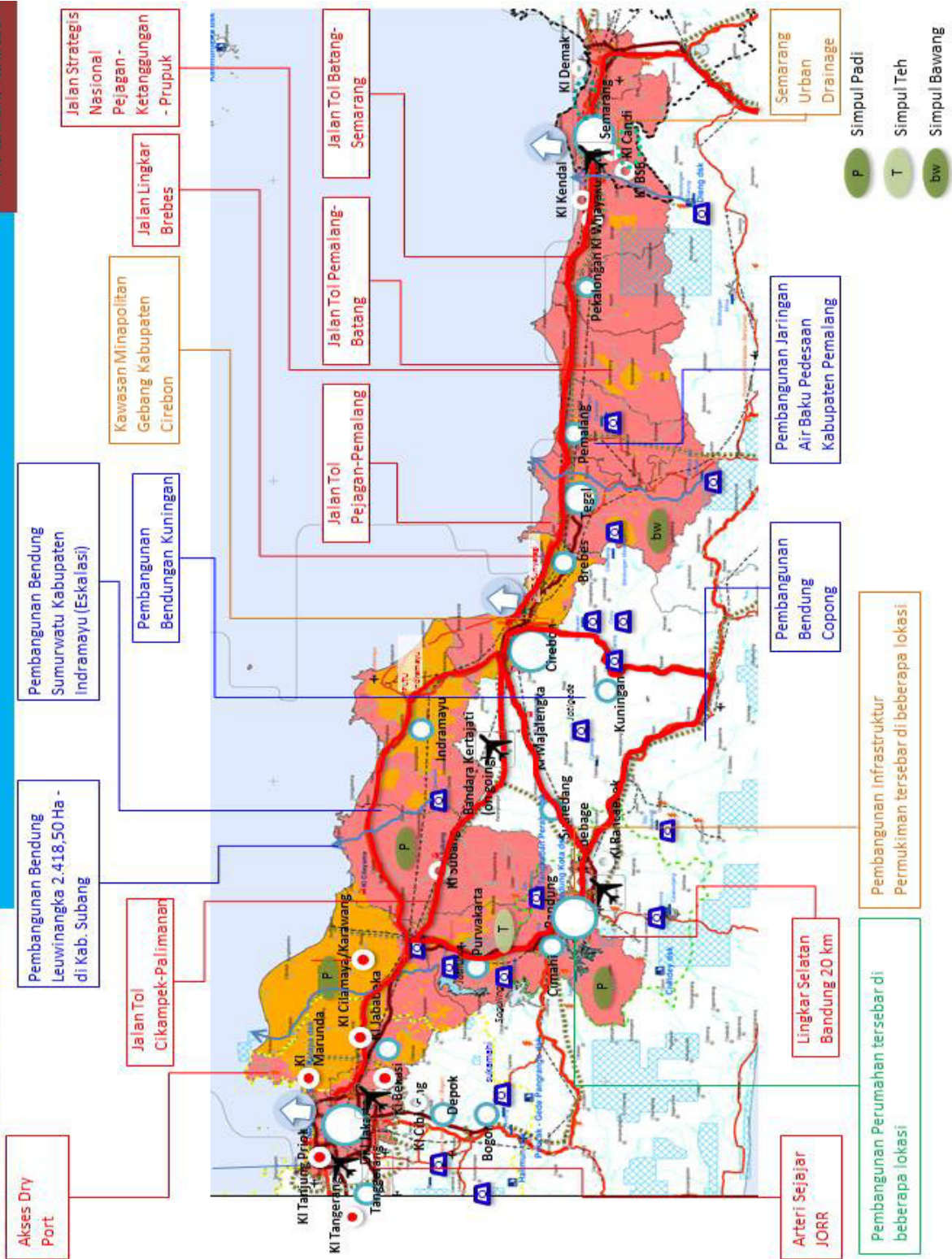


7. Sebaran Program Utama di WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Terpadu Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi

TA 2015-2019

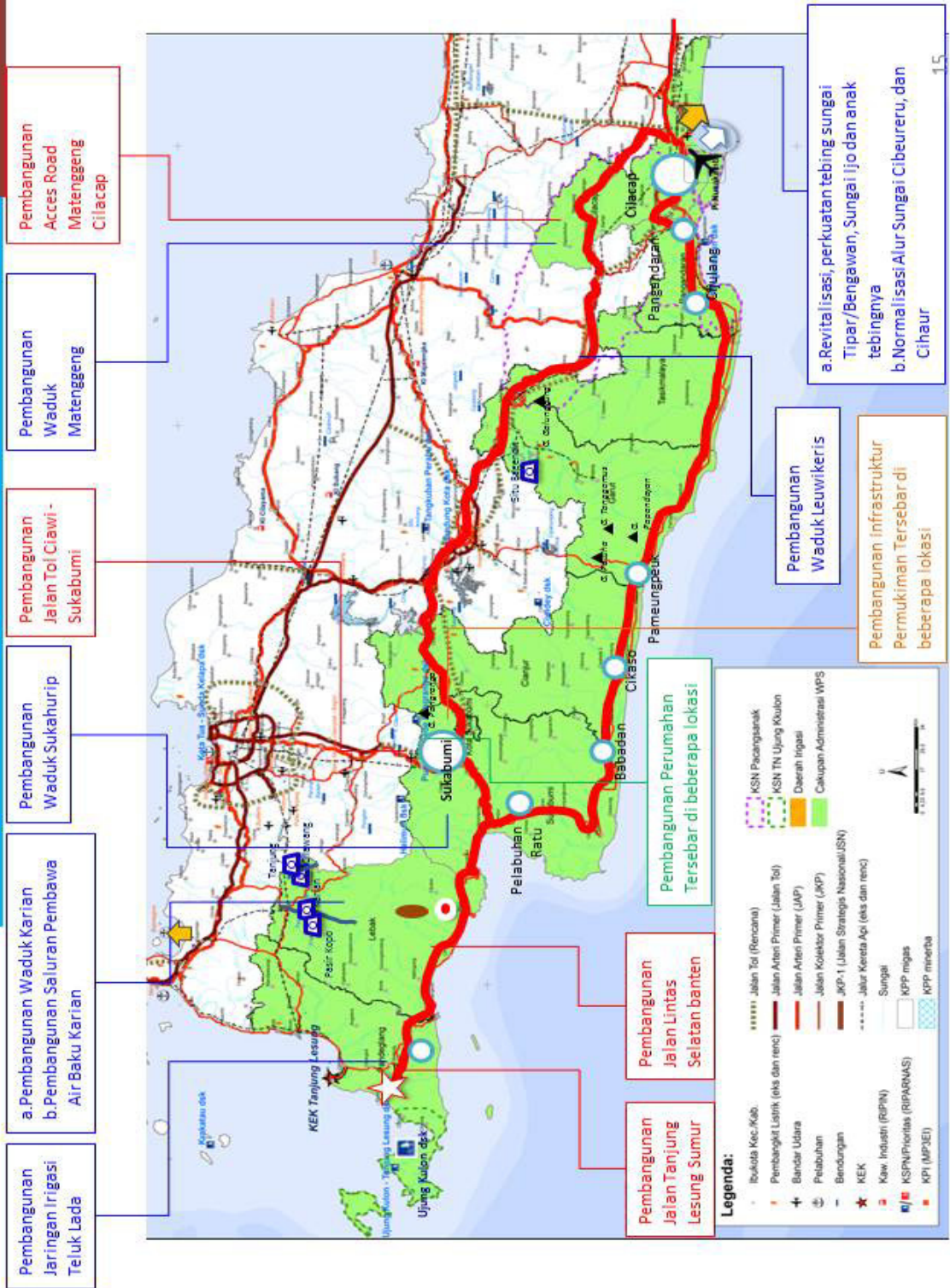


TA 2015-2019



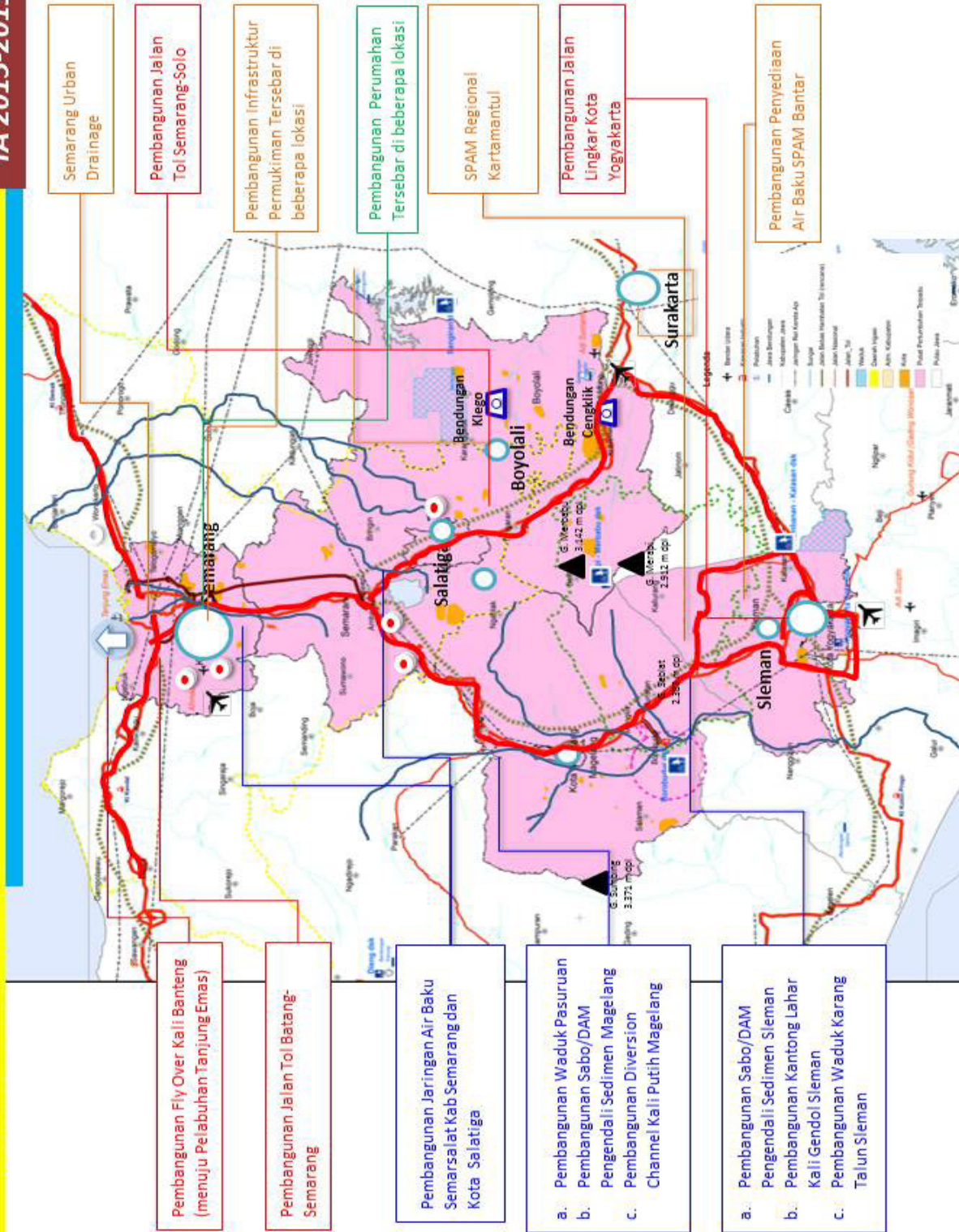
9. Sebaran Program Utama di WPS Pertumbuhan Baru Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap

TA 2015-2019



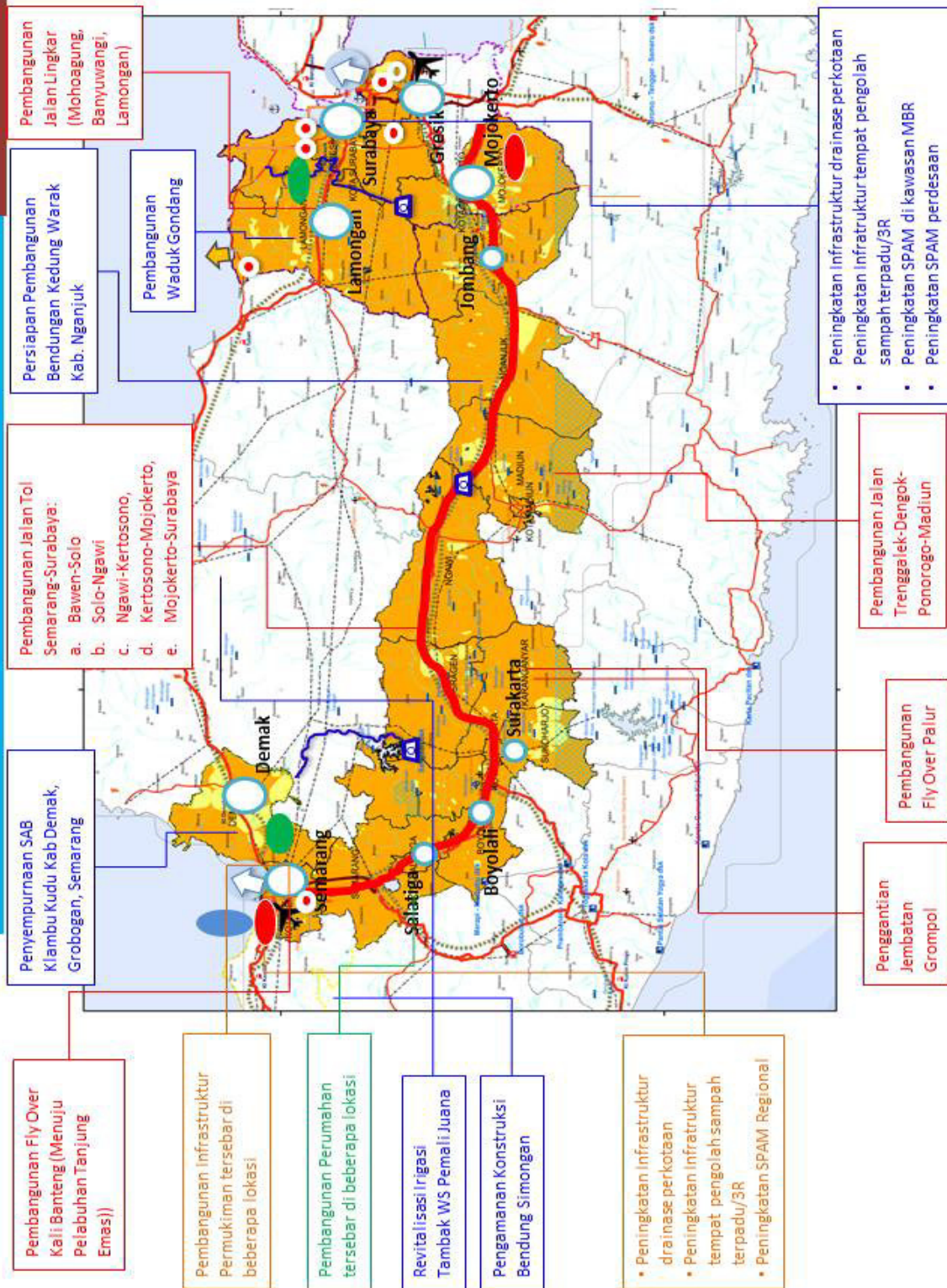
10. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta-Solo-Semarang

TA 2015-2019

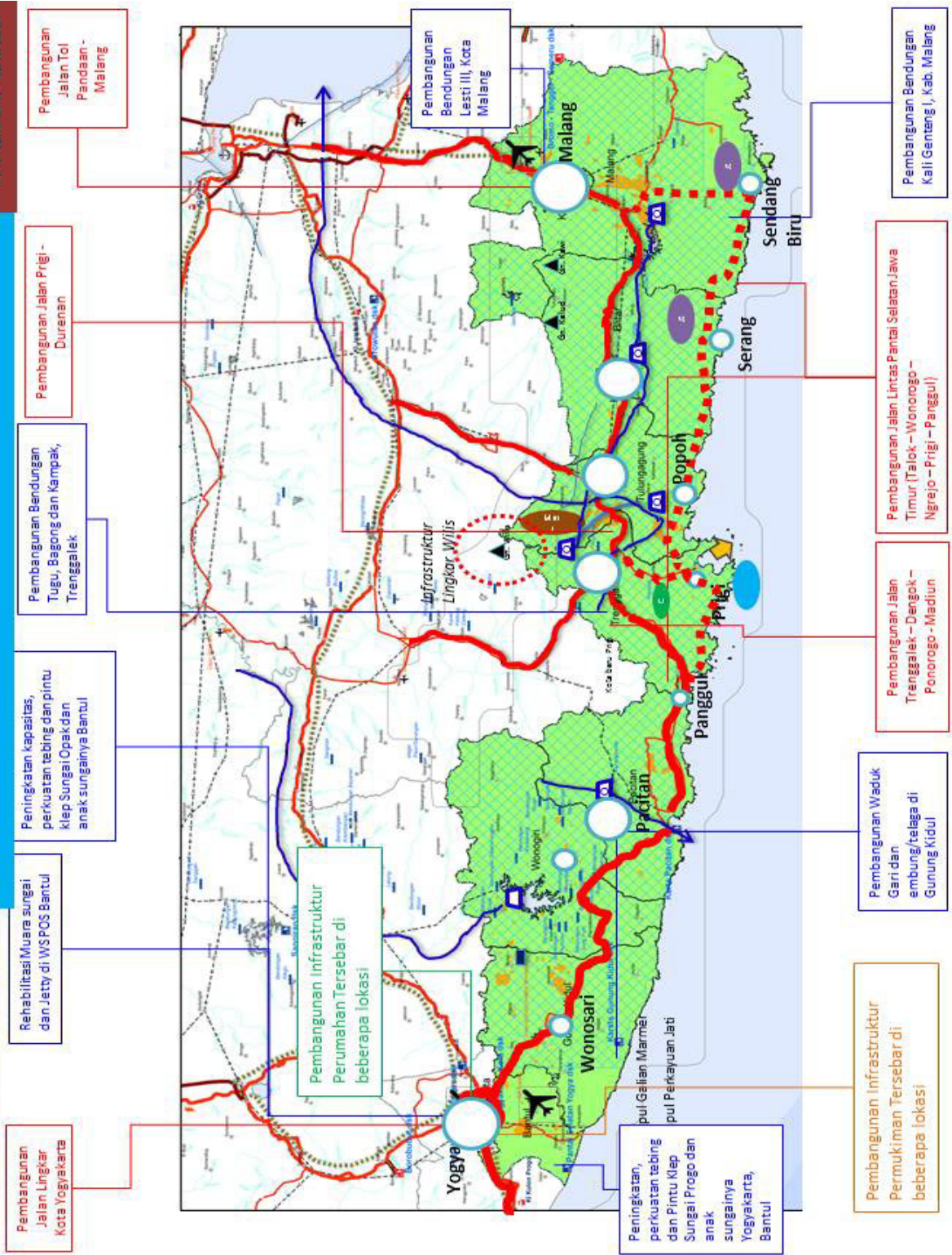


11. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Semarang-Surabaya

TA 2015-2019

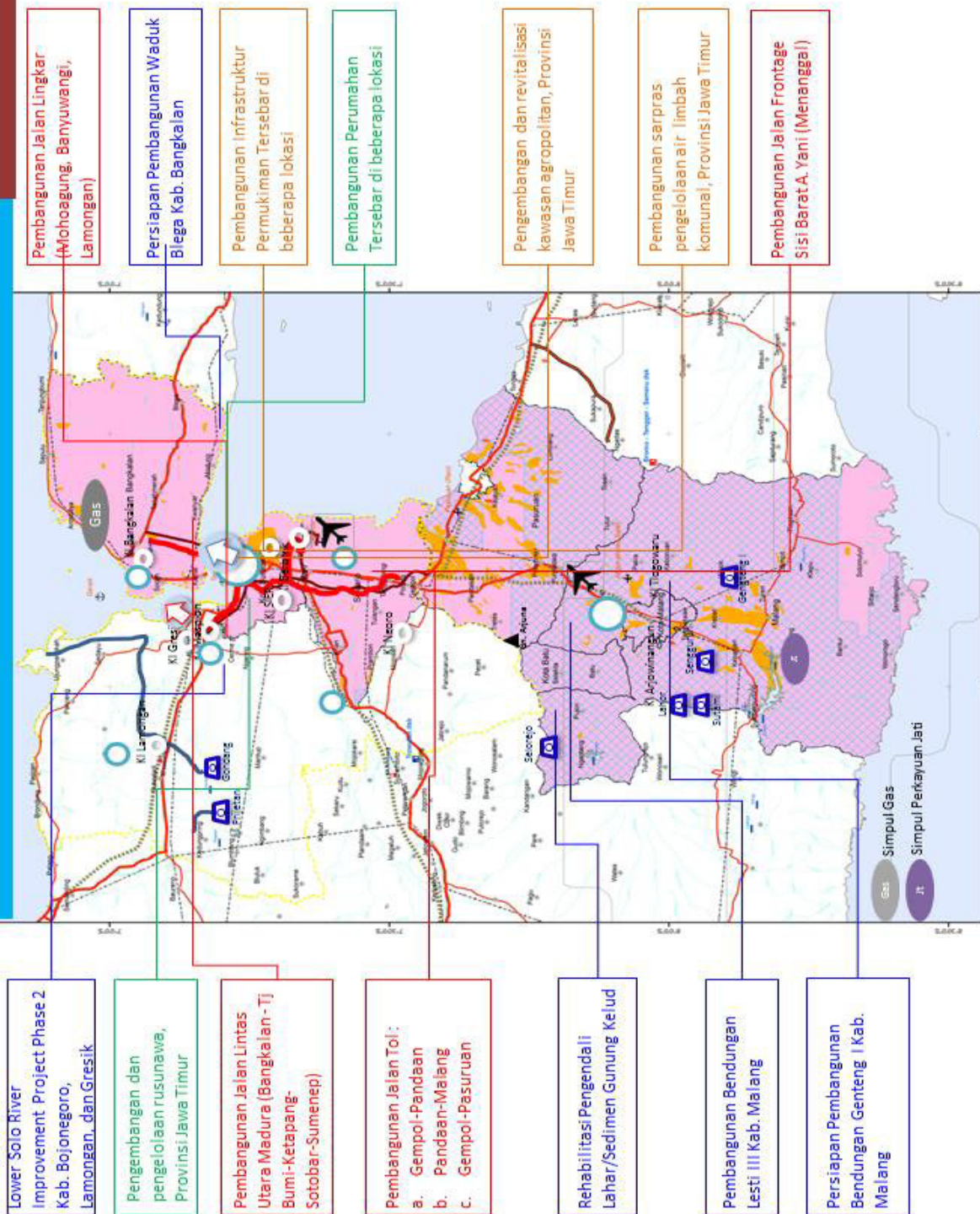


TA 2015-2019



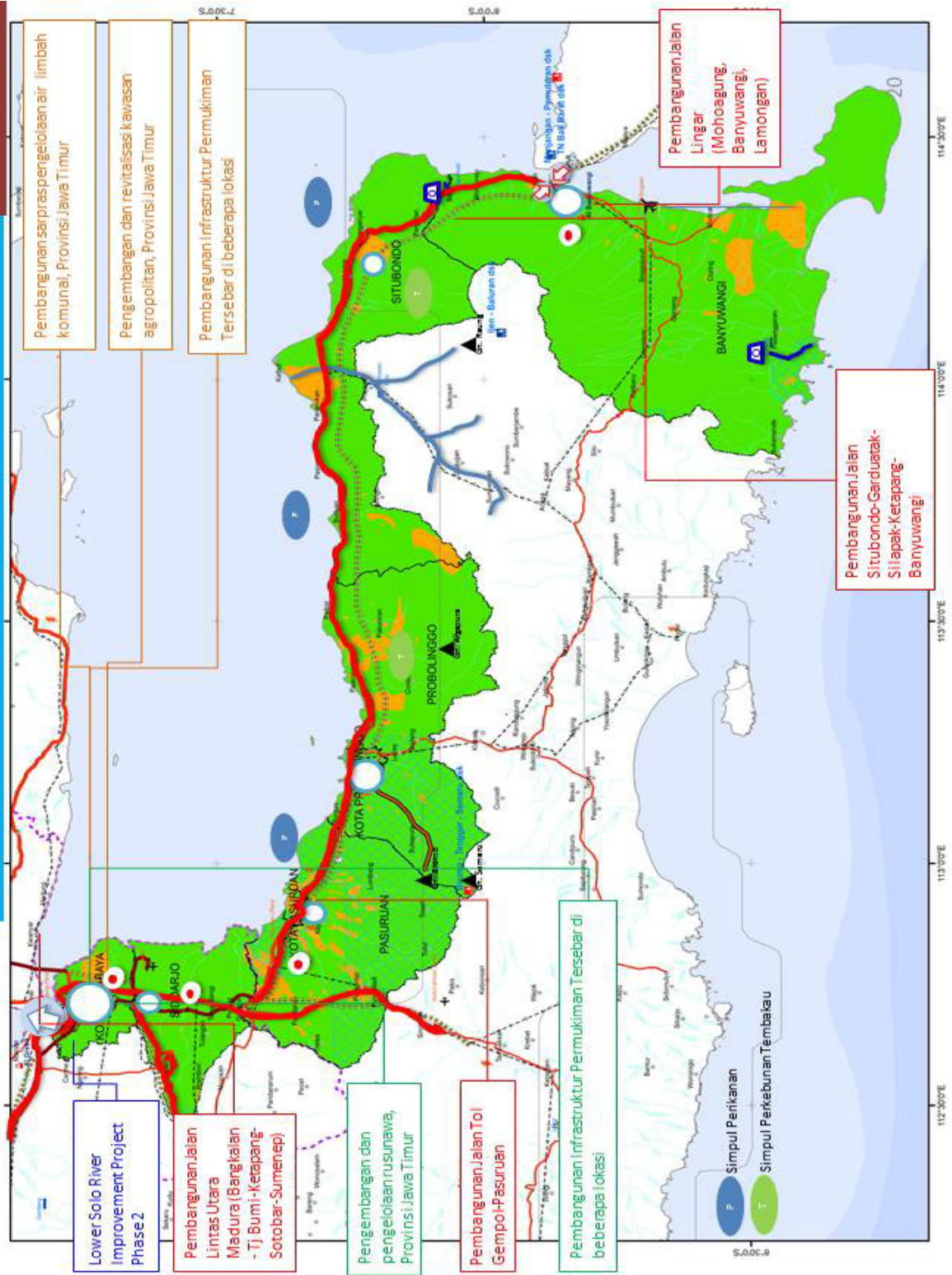
13. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Malang-Surabaya-Bangkalan

TA 2015-2019

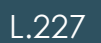


14. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi

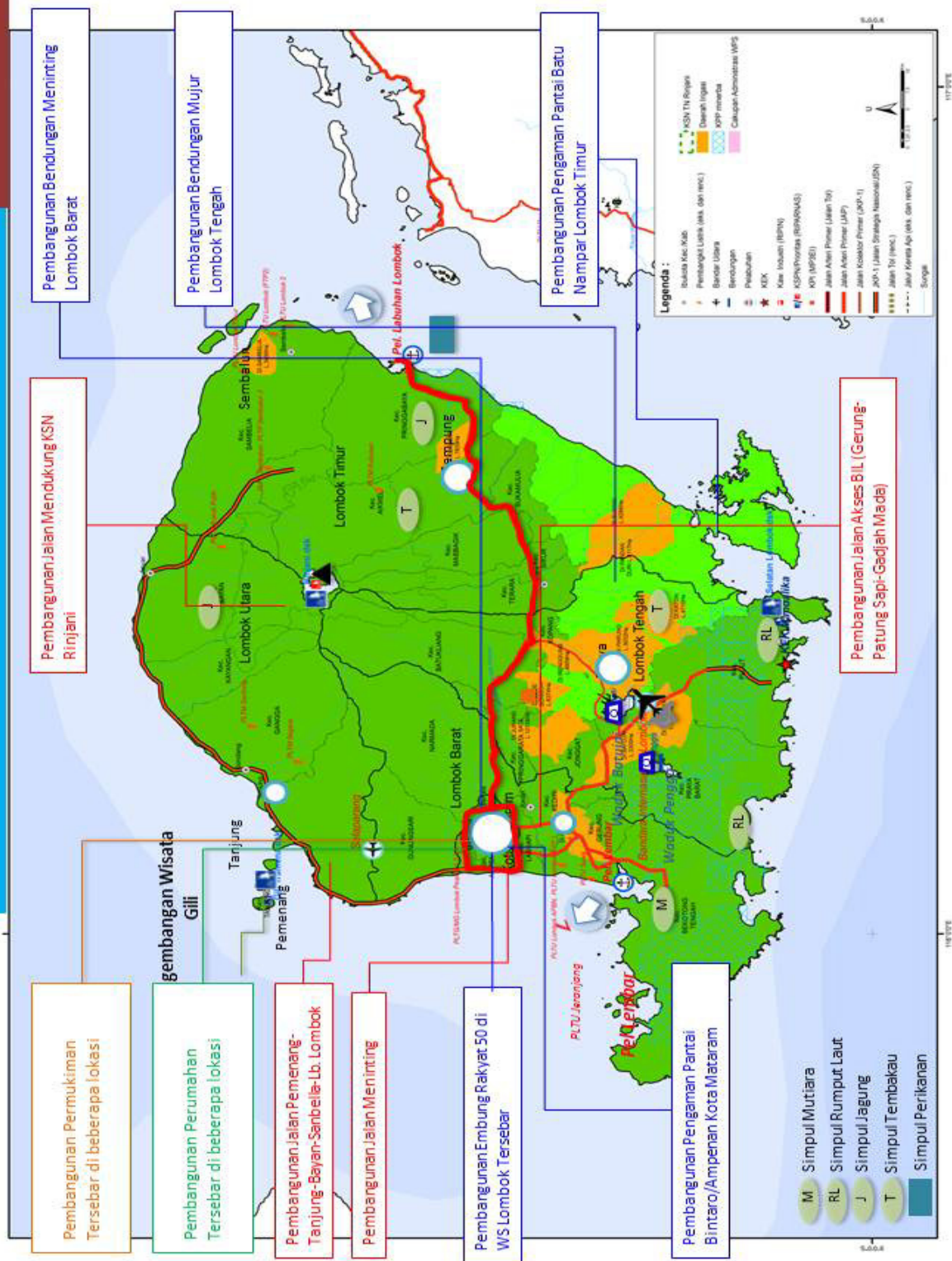
TA 2015-2019



TA 2015-2019

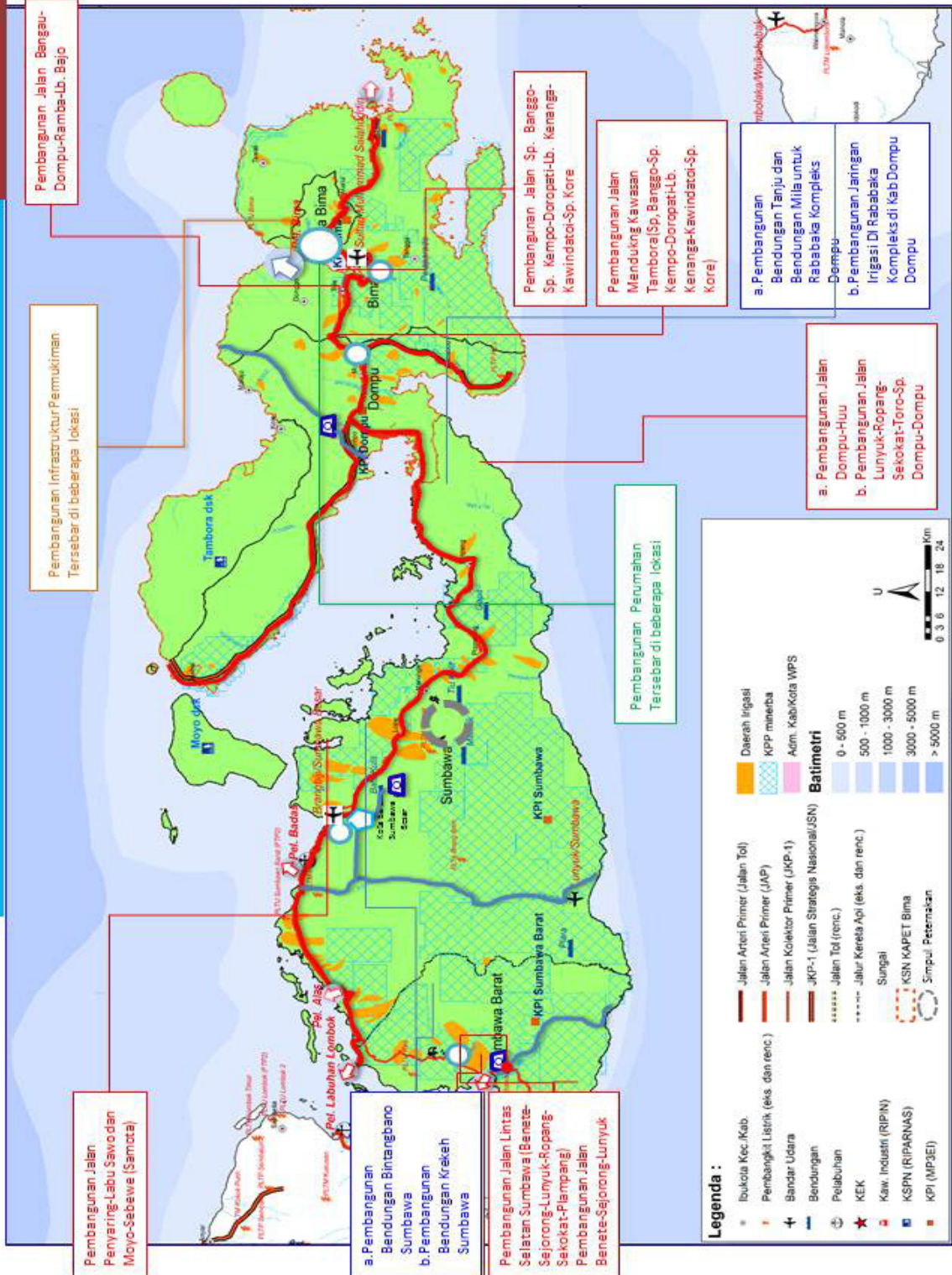


IA 2015-2019

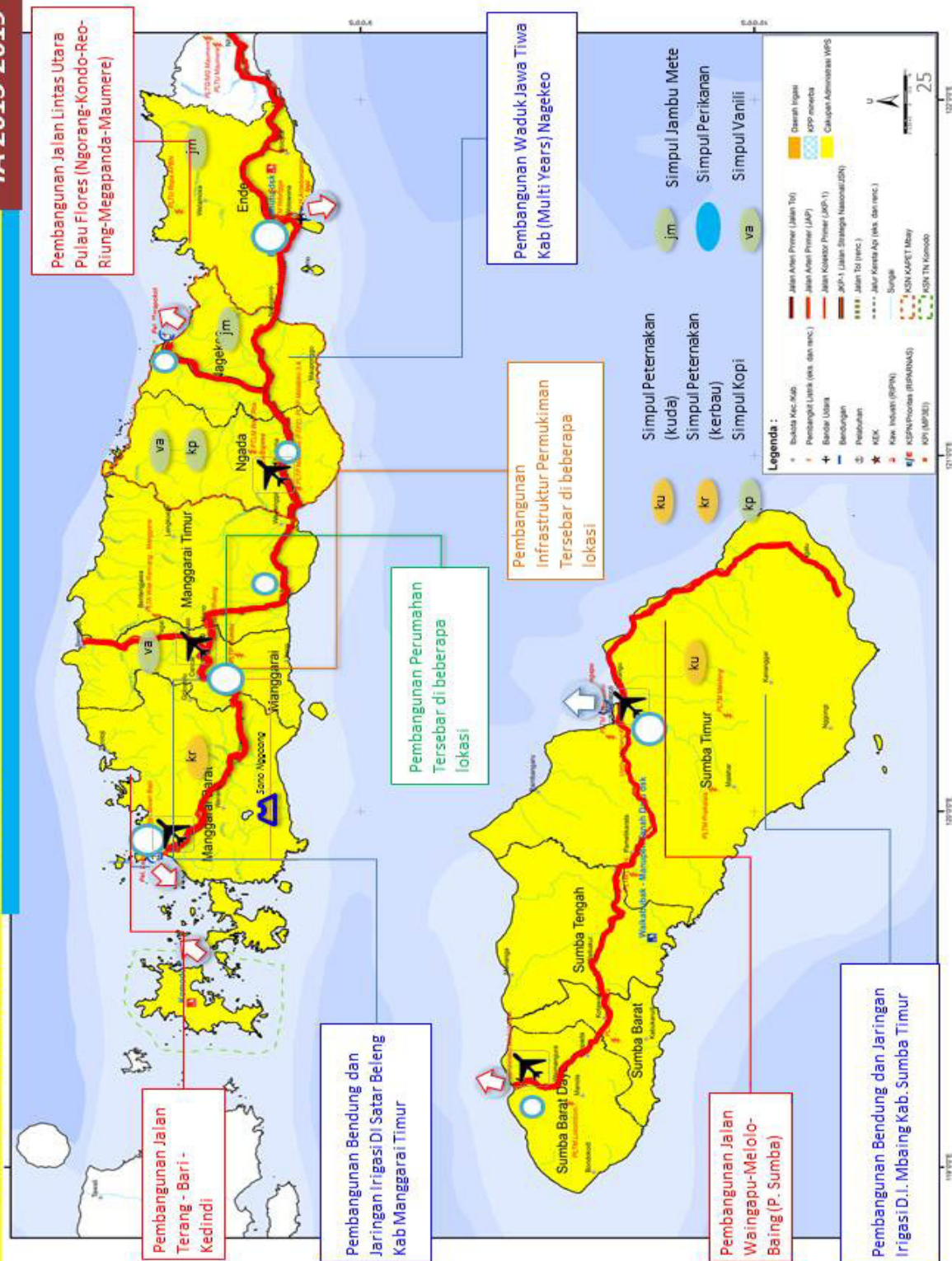


17. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Wisata dan Hinterland Sumbawa Besar-Dompu-Bima

TA 2015-2019

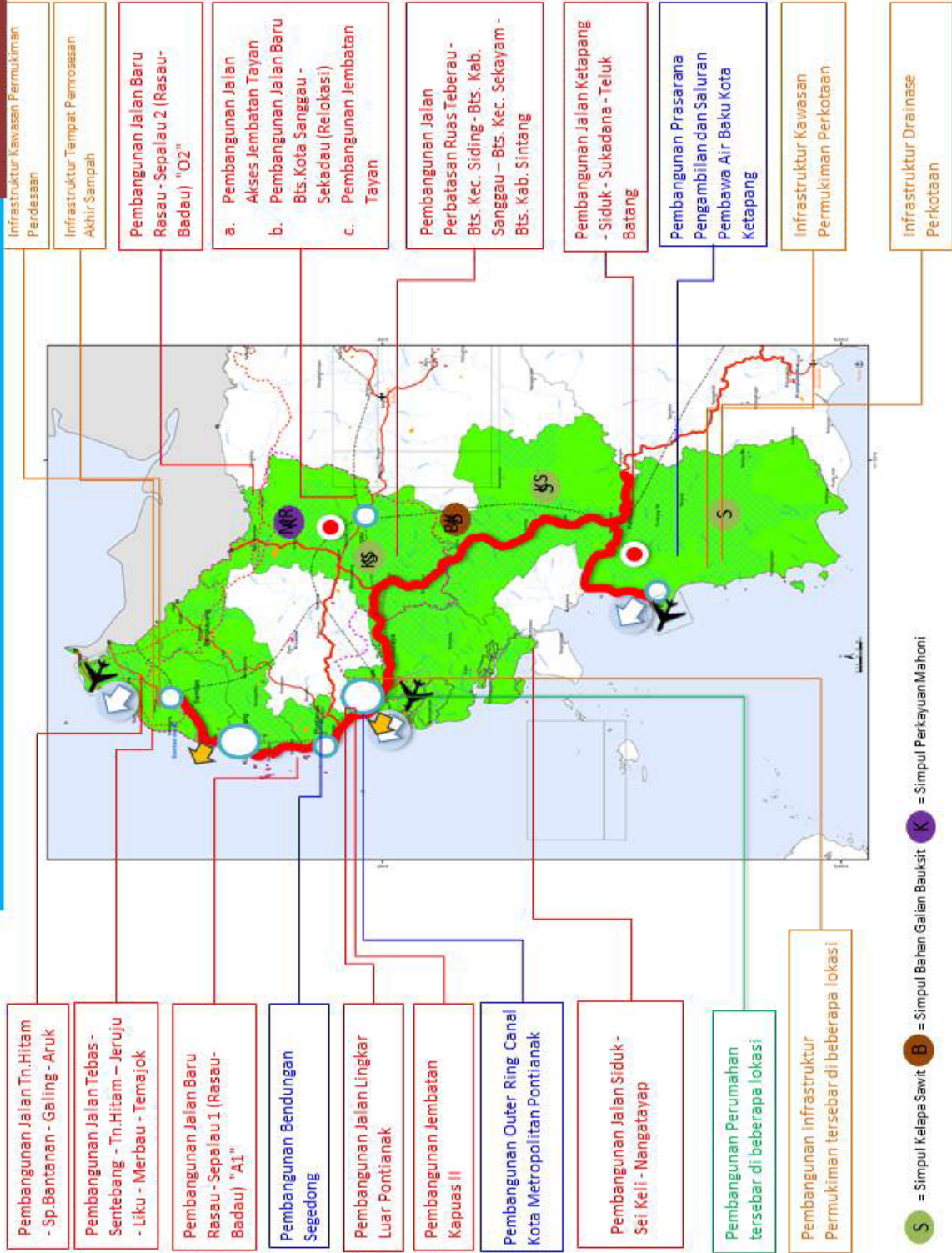


TA 2015-2019



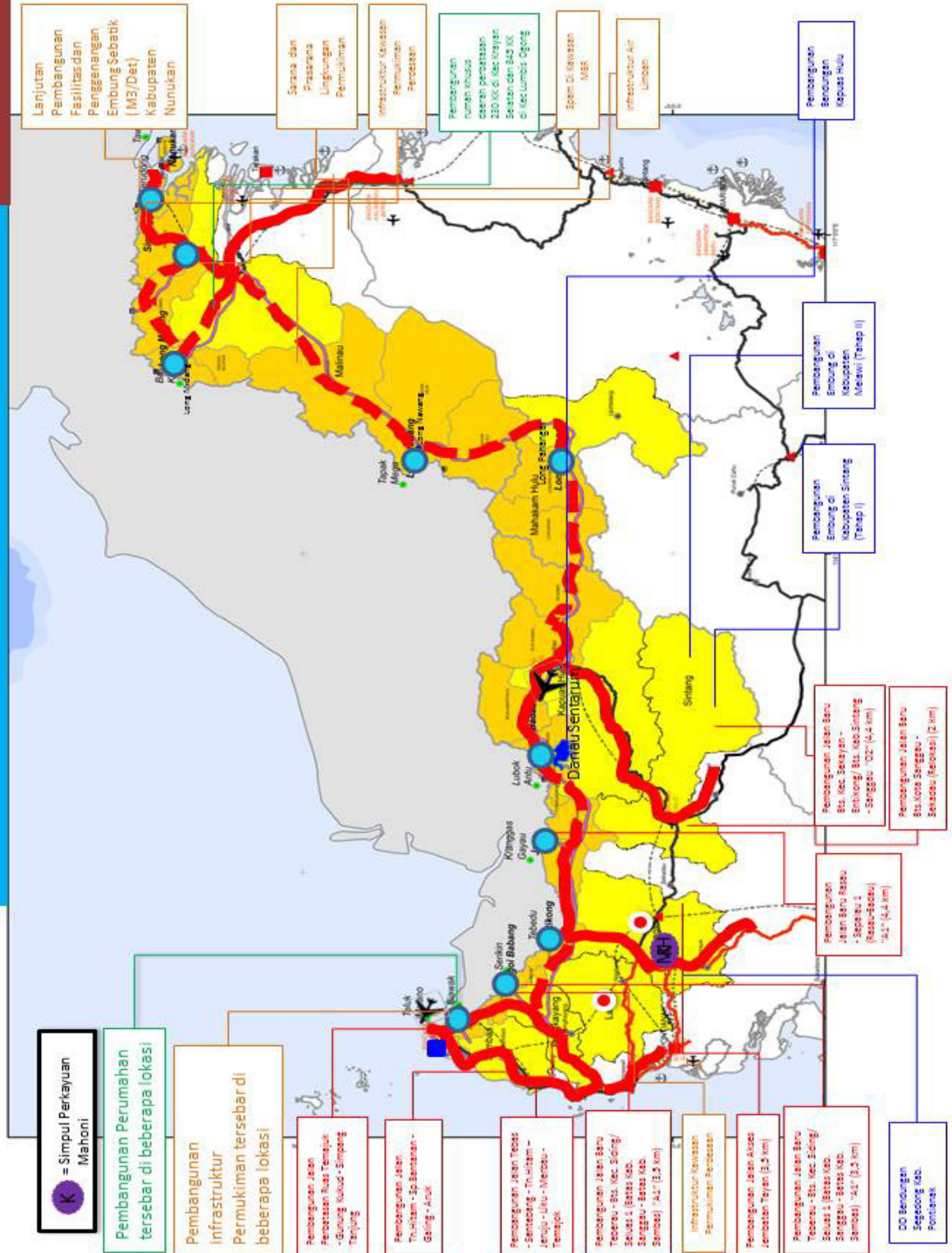
20. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas

TA 2015-2019



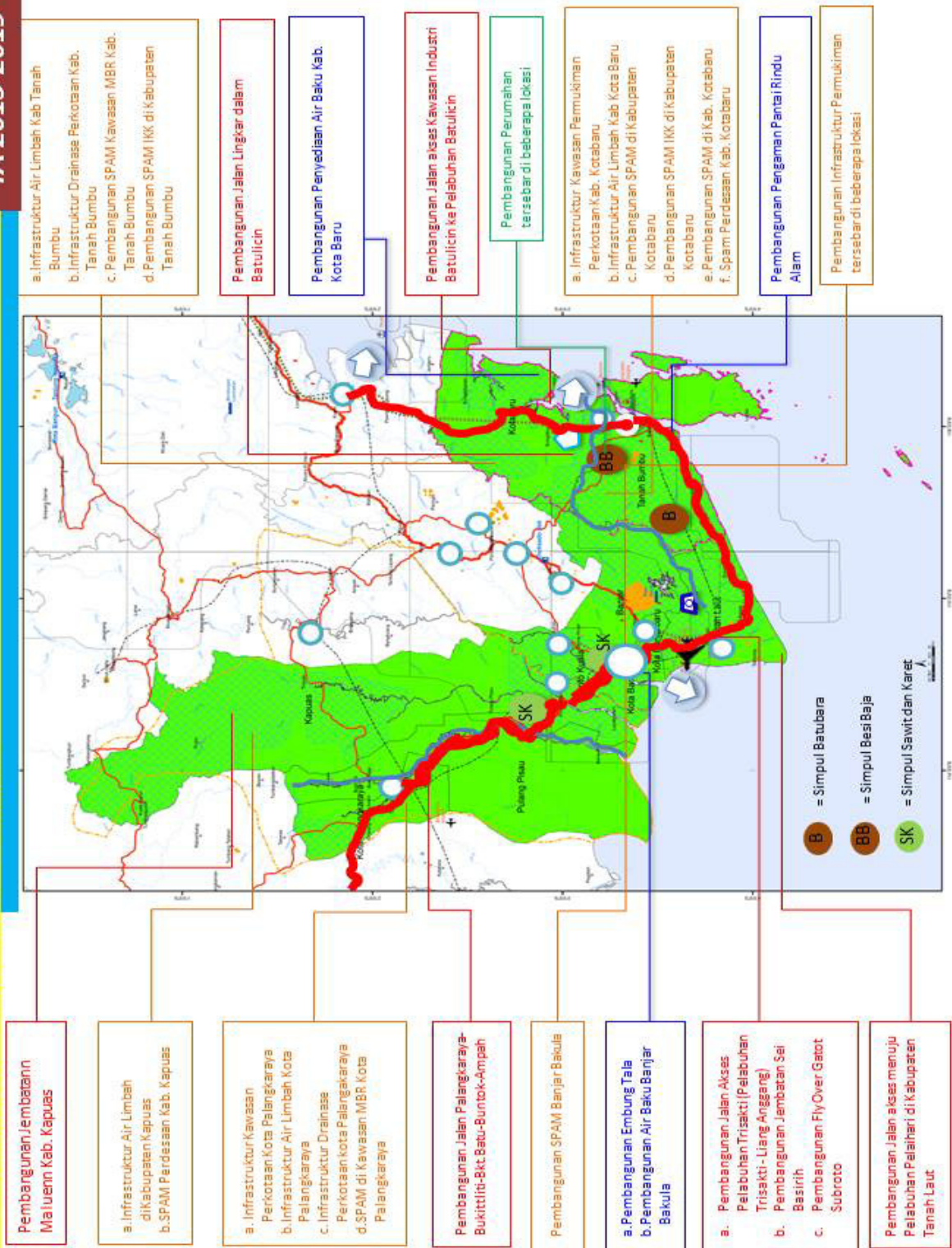
21. Sebaran Program Utama di WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk – Sebatik

TA 2015-2019



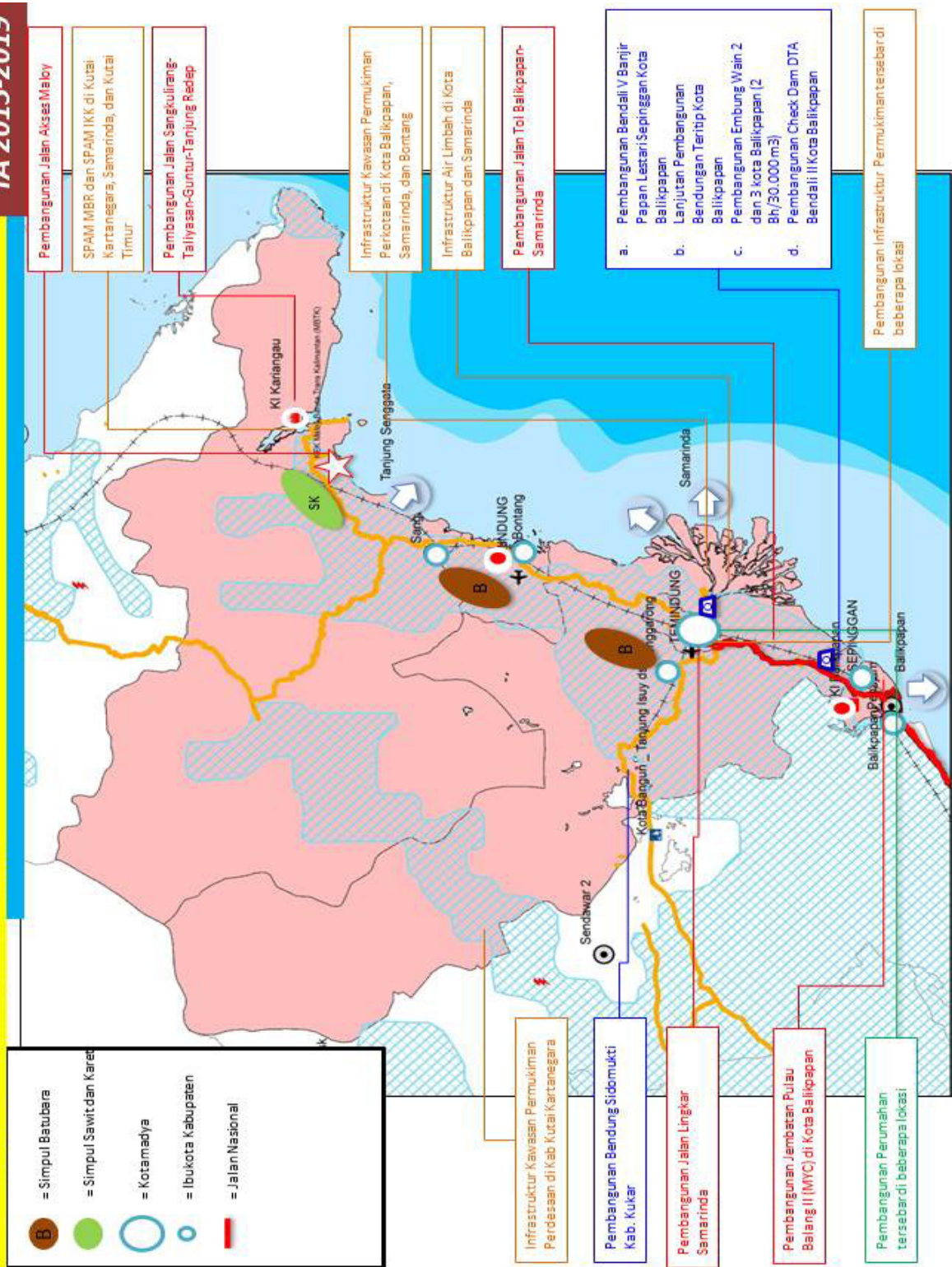
22. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin

TA 2015-2019



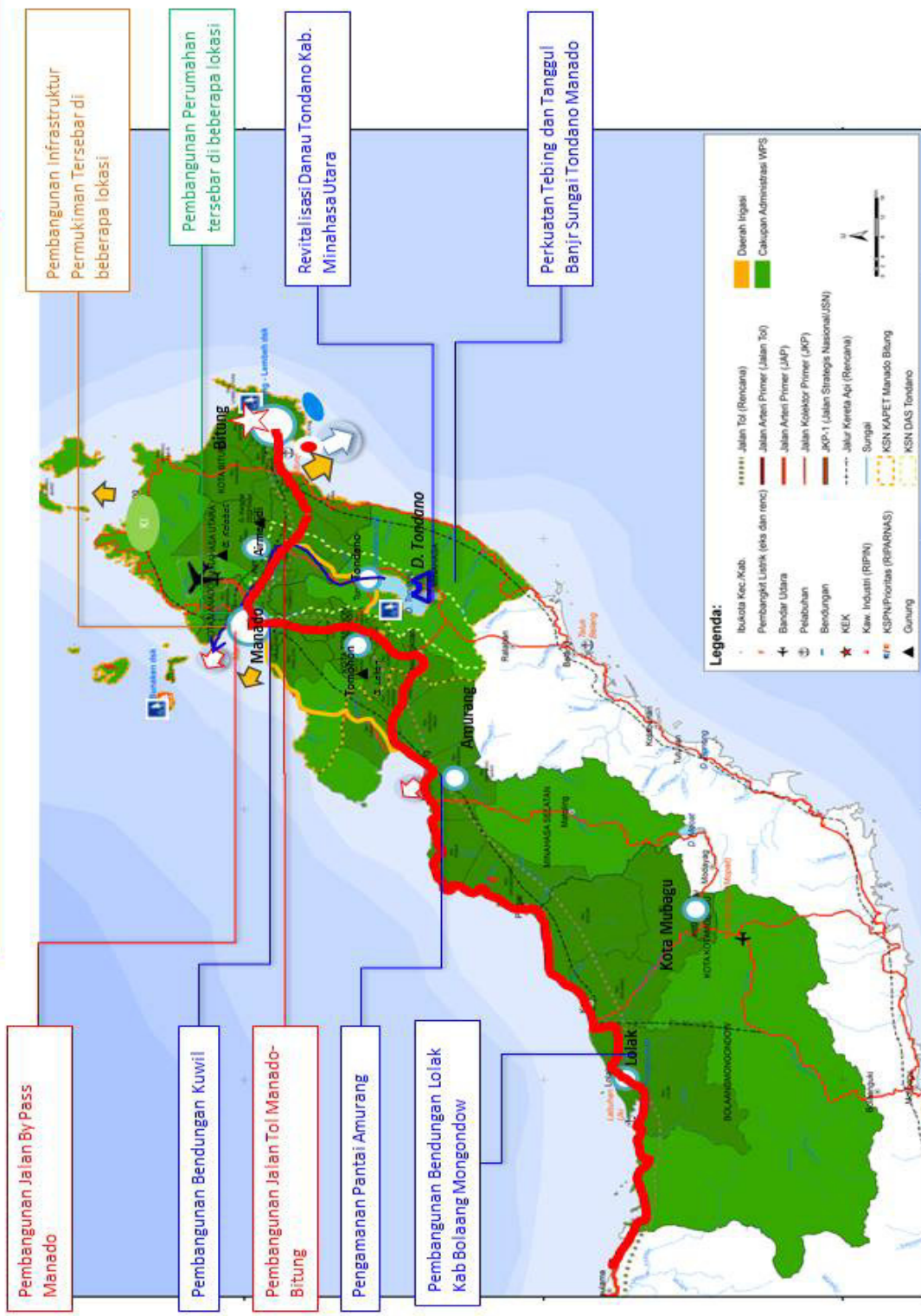
23. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan – Samarinda – Maloy

TA 2015-2019



24. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu

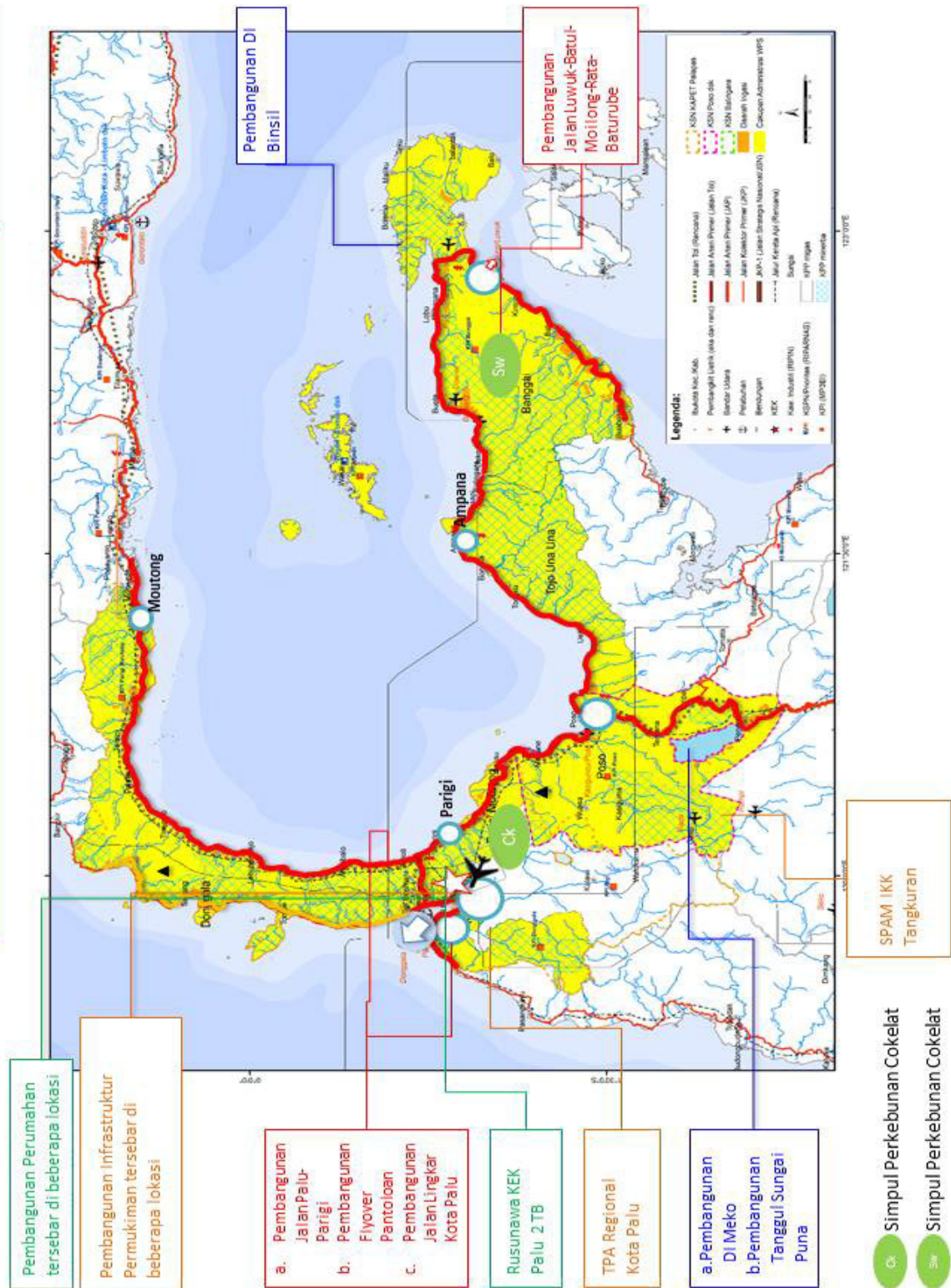
TA 2015-2019



TA 2015-2019

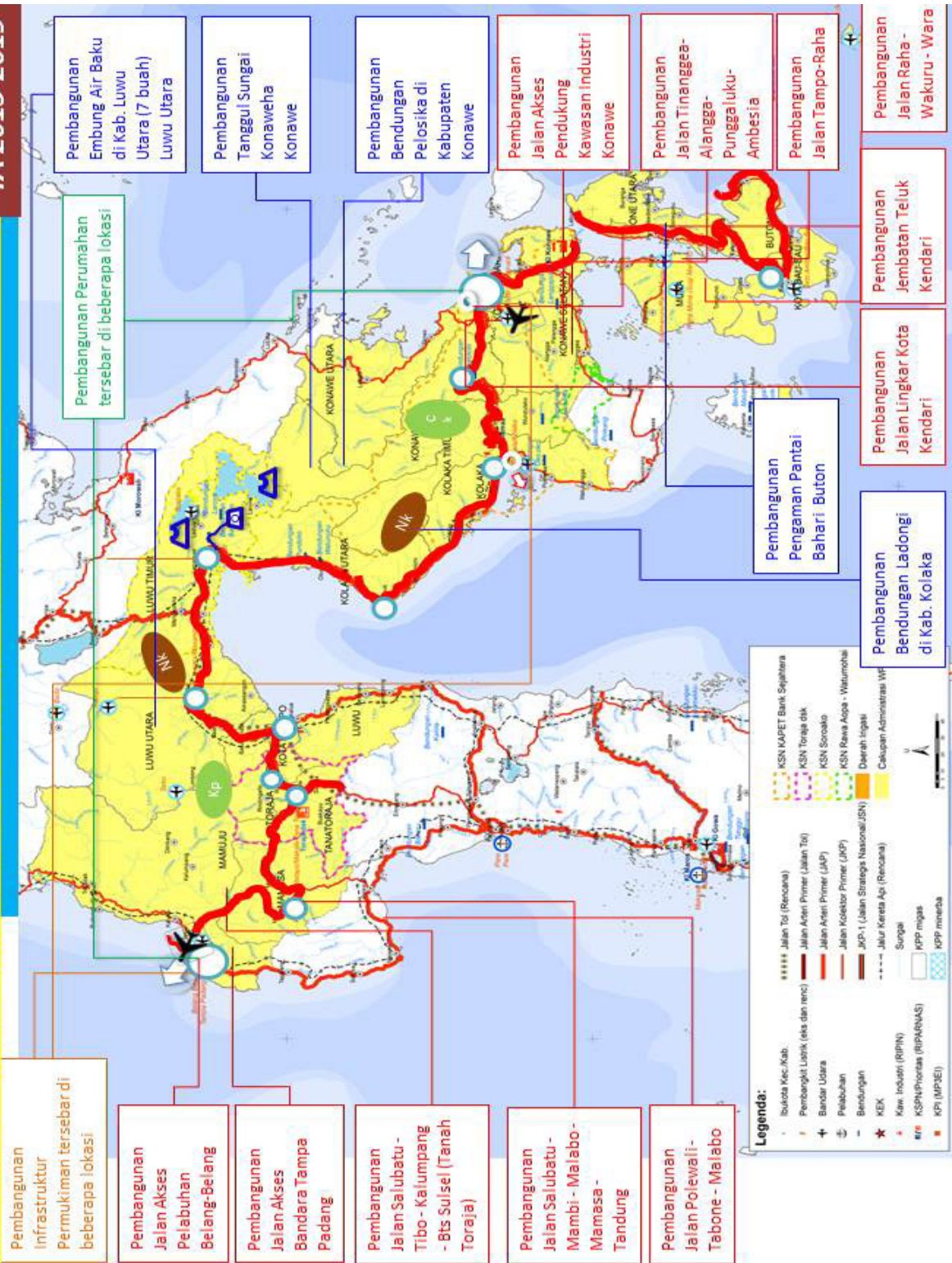


TA 2015-2019



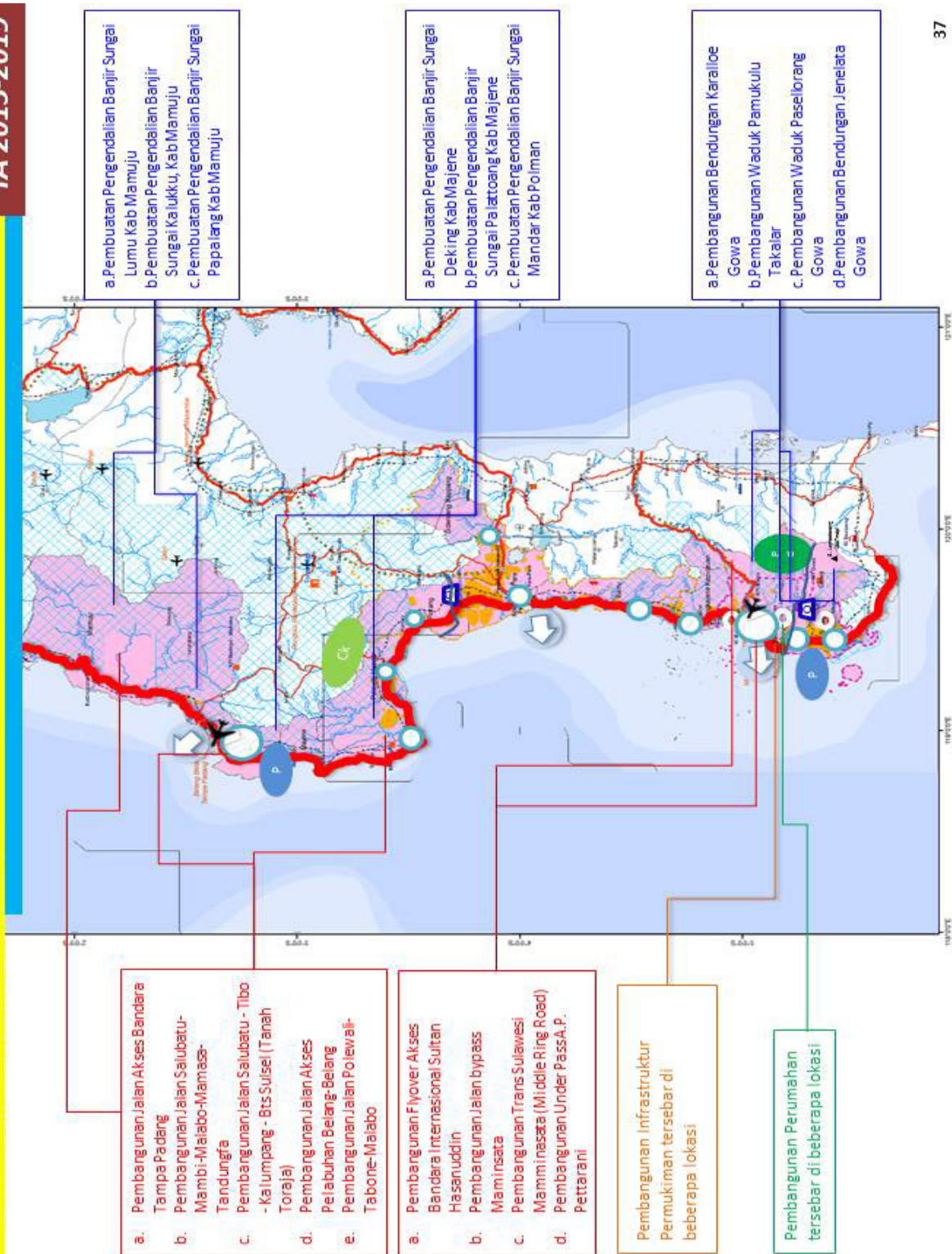
27. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau Bau – Wangi Wangi

TA 2015-2019



28. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar – Pare Pare – Mamuju

TA 2015-2019



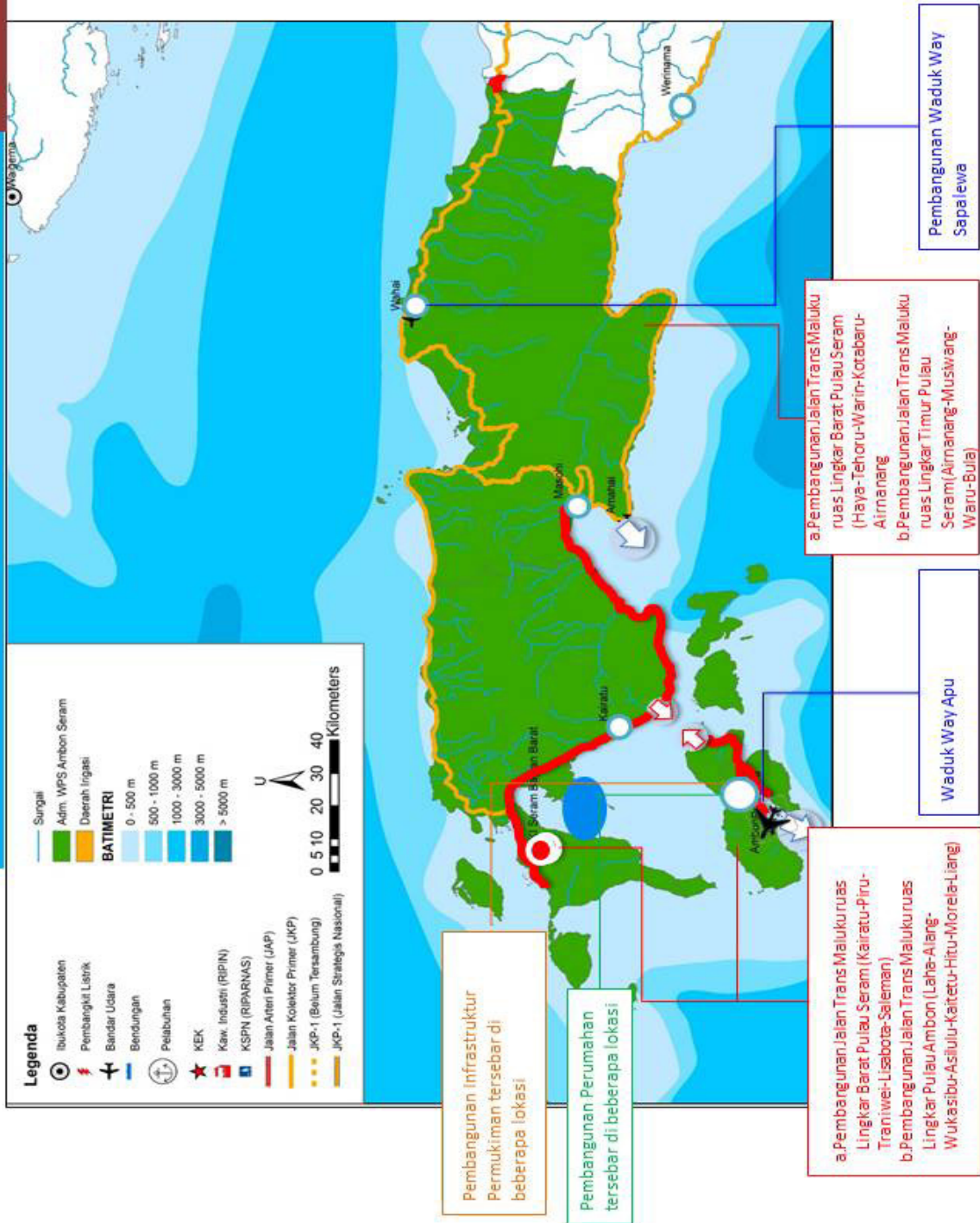
29. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ternate – Sofifi – Daruba

TA 2015-2019



30. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon – Masohi

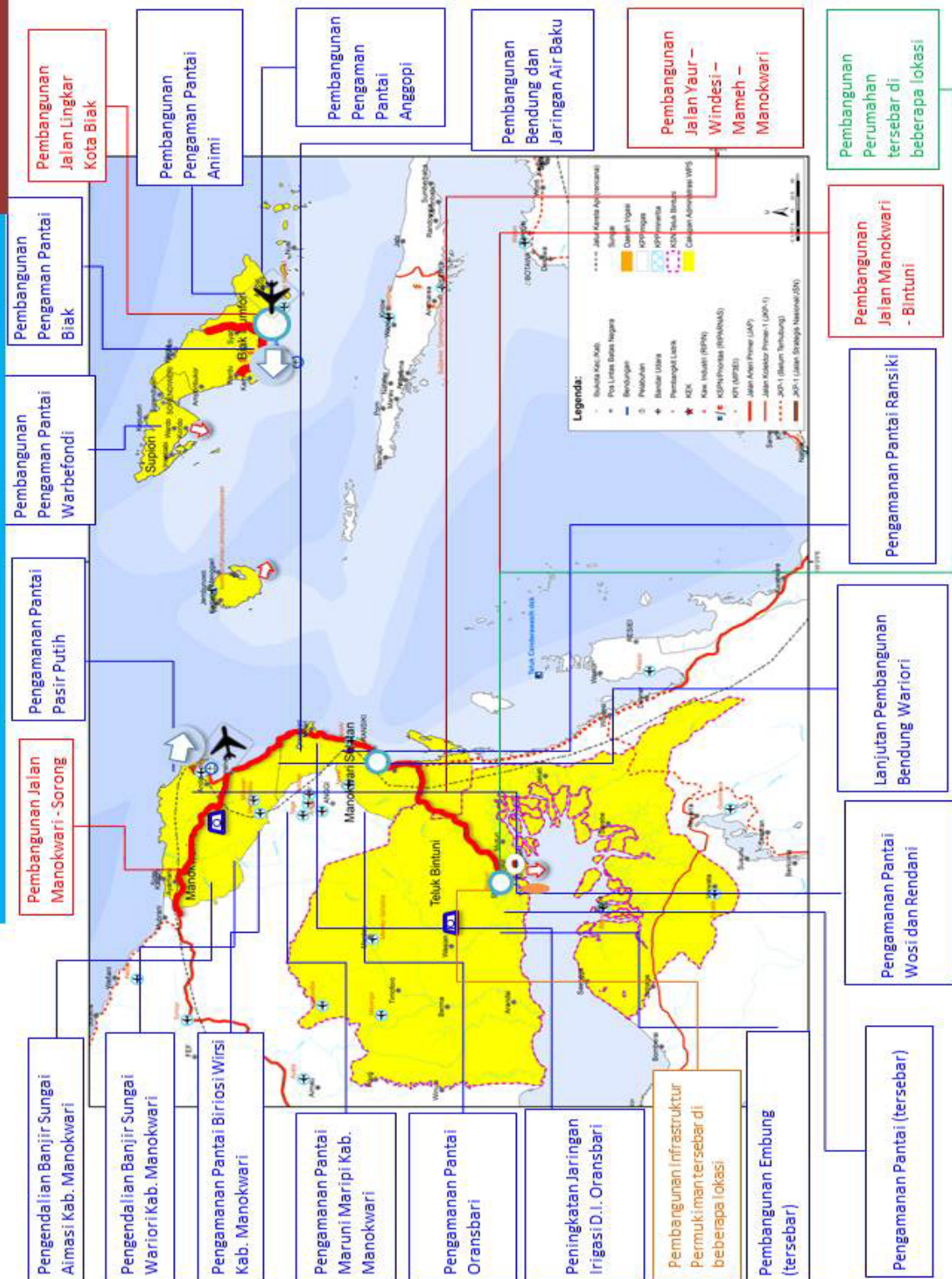
TA 2015-2019



TA 2015-2019

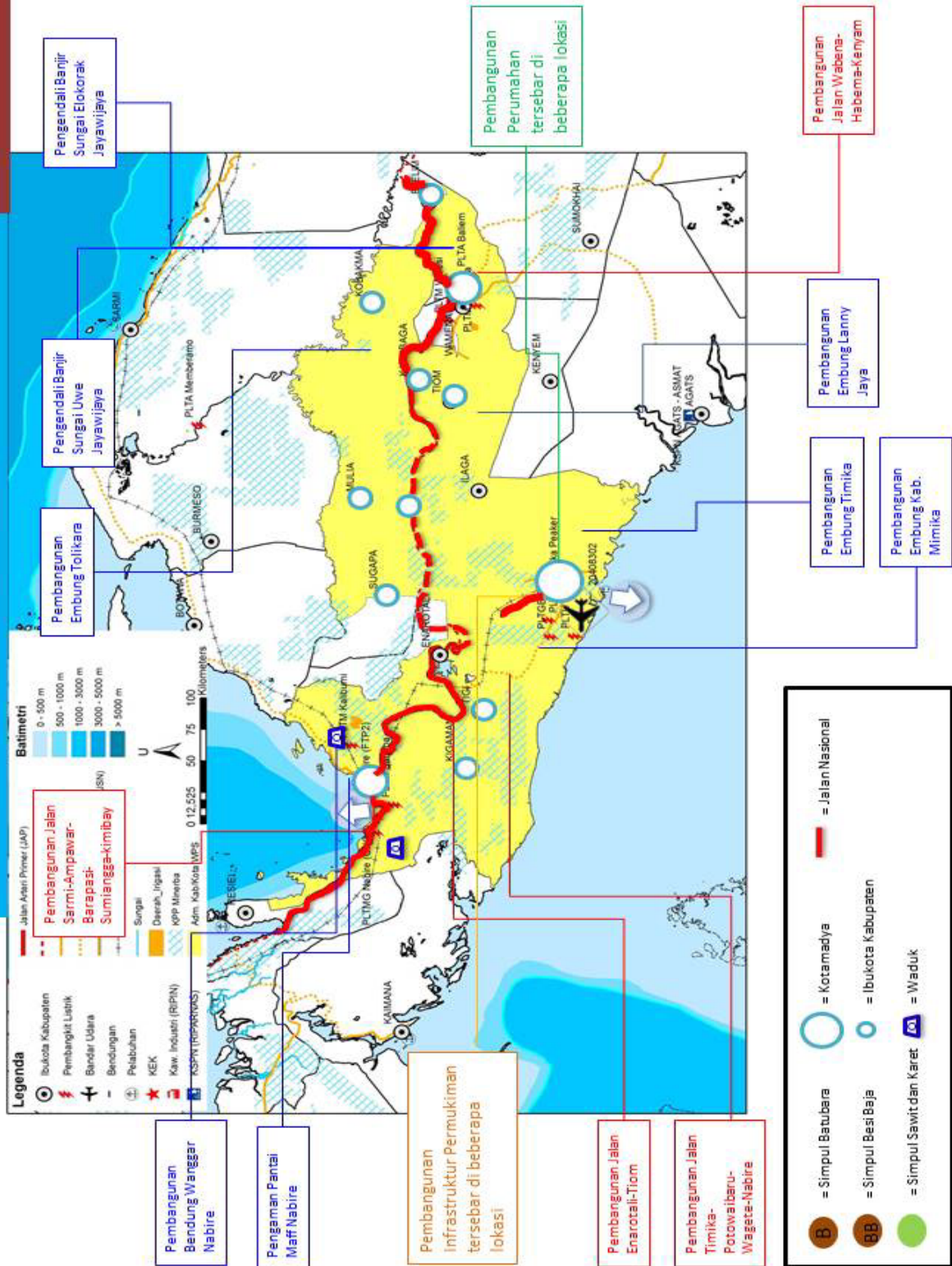


IA 2015-2019



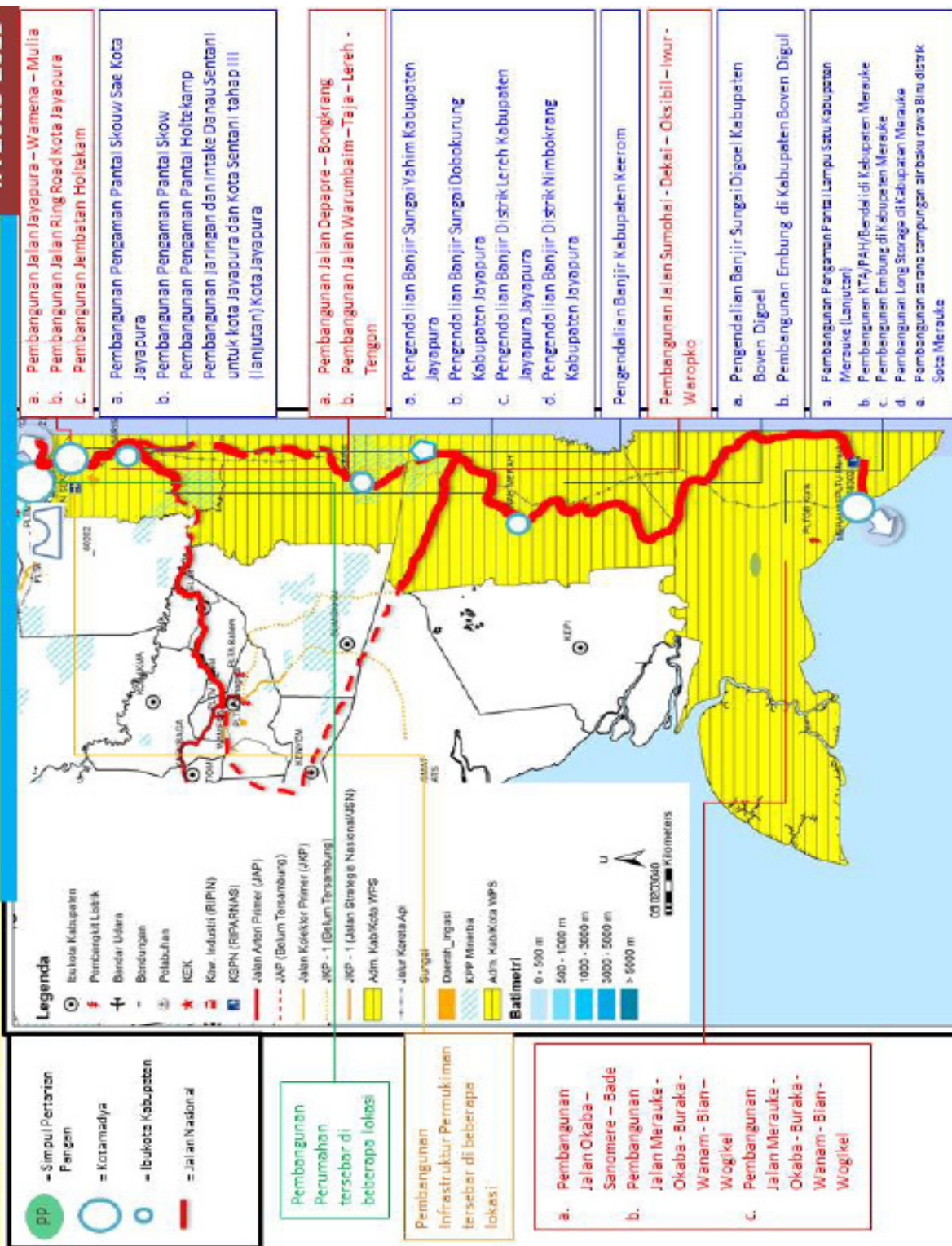
33. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru Nabire – Enarotali – Wamena

TA 2015-2019



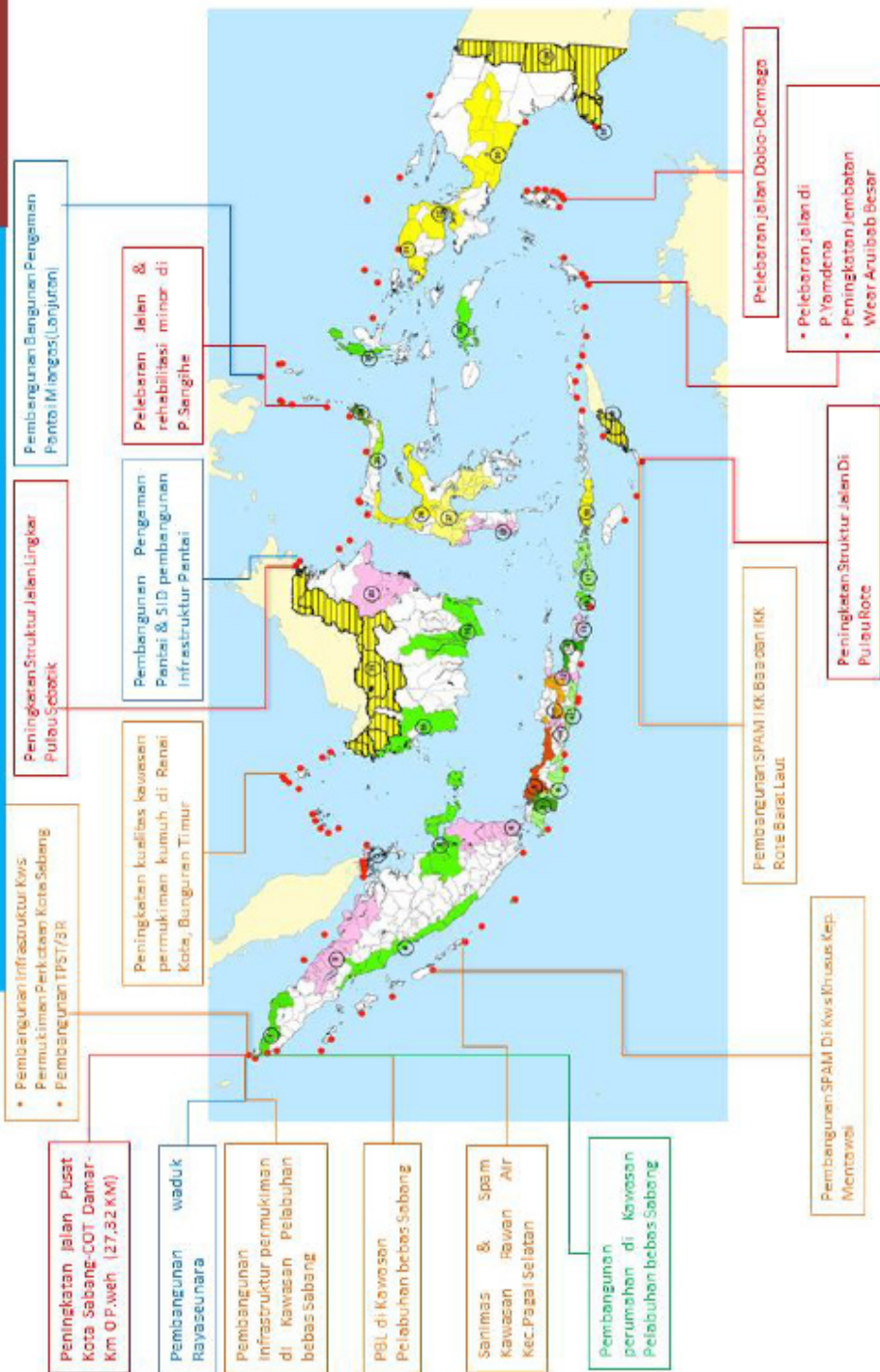
34. Sebaran Program Utama di WPS Perbatasan Negara Jayapura – Merauke

TA 2015-2019



35. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru Pulau-Pulau Kecil Terluar

TA 2015-2019



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp. (021) 724.6487

email : perencanaan.bpiw@pu.go.id